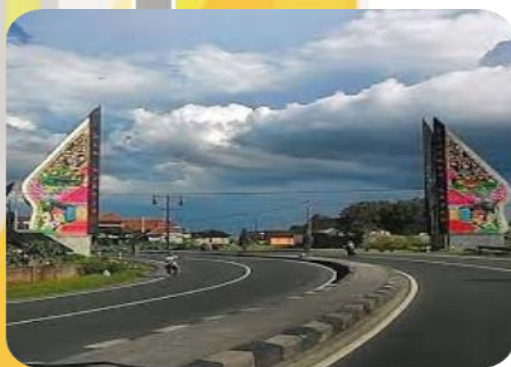




LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2018



*Mewujudkan Masyarakat Klaten yang:
Maju, Mandiri dan Berdaya Saing.*

PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN

Jl. Pemuda Nomor 294, Gd. Pemda I

Telp. (0272) 321046 Ps.486.Faks.(0272)325367

KLATEN – 57424

Kata Pengantar



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

Kabupaten Klaten Tahun 2018 disusun sebagai suatu bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Klaten untuk mewujudkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang baik sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, dan Peraturan Menteri Negara Pemdagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. **Maksud dan tujuan Penyusunan LKjIP adalah untuk:** (a) meningkatkan akuntabilitas Kinerja OPD, (b) sebagai umpan balik peningkatan kinerja instansi pemerintah, (c) mengetahui dan menilai keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab instansi, (d) mendorong OPD untuk melaksanakan tata penyelenggaraan pemerintahan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, dan (e) menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel, sehingga dapat berjalan secara efisien dan efektif, serta responsif terhadap issue yang berkembang.

Pengukuran capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Klaten beserta analisis dan evaluasi sangat penting sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas kinerja instansi secara terus menerus guna menjamin berkelanjutan tata penyelenggaraan pemerintah diukur dari pencapaian target indikator kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang tertuang dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021, serta untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten **Klaten Maju, Mandiri dan Berdaya Saing.**

Klaten, 28 Maret 2019

 **BUPATI KLATEN,**

SRI MULYANI



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
INSPEKTORAT

Jalan Pemuda Selatan No.4 Telp. 321040 Kode Pos 57412
K L A T E N

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
ATAS LAPORAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KLATEN
TAHUN ANGGARAN 2018

Kami telah mereviu Laporan Kinerja instansi pemerintah Daerah untuk tahun anggaran 2018 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pemerinta Daerah Kabupaten Klaten.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Klaten, 28 Maret 2019



Plt. INSPEKTUR KABUPATEN KLATEN

Drs. PURWANTO ANGGONO CIPTO, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP . 19590901 198603 1 016
Asisten Ekonomi dan Pembangunan

Executive Summary

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Klaten Tahun 2018 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Review Atas Laporan Kinerja, di mana Laporan kinerja instansi pemerintah merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas pertanggungjawaban atas kinerja yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 ditetapkan 45 (empat puluh lima) sasaran strategis dengan 67 (enam puluh tujuh) Indikator Kinerja Sasaran yang terdiri dari: 58 (lima puluh delapan) indikator yang sifatnya progresif, dan 9 (sembilan) indikator yang sifatnya represif.

Selanjutnya untuk mengimplementasikan RPJMD, telah ditetapkan pula Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten tahun 2018, dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Nomor Tahun 2018 tentang APBD Kabupaten Klaten Tahun 2018 tercatat sebanyak 173 program dengan 987 kegiatan. Realisasi fisik tercapai 87,78% dari target rencana. Dukungan dana untuk melaksanakan pembangunan dianggarkan sebanyak Rp.1.018.676.084.121,98 dan terserap sebesar Rp.859.618.219.315,88 (atau 84,39%).

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 45 (empat puluh lima) sasaran strategis dengan 67 (enam puluh tujuh) Indikator Kinerja Sasaran yang terdiri dari: 58 (lima puluh delapan) indikator yang sifatnya progresif, dan 9 (sembilan) indikator yang sifatnya represif. Dari masing-masing indikator diperoleh hasil:

A. **Indikator Progresif**, dengan hasil:

- a. Sebanyak 46 (enam puluh enam) Indikator Kinerja sasaran atau sebanyak 79,31% dengan Kriteria **Sangat Tinggi**;
- b. Sebanyak 7 (tujuh) atau sebanyak 12,07% dengan Kriteria **Tinggi**;

- c. Sebanyak 1 (satu) Indikator Kinerja Sasaran atau sebanyak 1,72% dengan Kriteria **Sedang**;
- d. Sebanyak 1 (satu) Indikator Kinerja Sasaran atau sebanyak 1,72% dengan Kriteria **Rendah**; dan
- e. Sebanyak 3 (tiga) Indikator Kinerja Sasaran atau sebanyak 5,17% dengan Kriteria **Sangat Rendah**. Adapun perincian atas hasil pengukuran kinerja, sebagai berikut:

Berdasarkan capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas:

- a. Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja dengan Kriteria **sangat tinggi**, atau interval nilai realisasi kinerja $\geq 90,1$ sebanyak 46 (*empat puluh enam*), diantaranya:
 - 1. Persentase sekolah dasar yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan;
 - 2. Persentase sekolah menengah pertama yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan;
 - 3. Usia Harapan Hidup;
 - 4. Persentase penguatan kapasitas PSKS;
 - 5. Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
 - 6. Persentase Kenaikan Prestasi Pemuda;
 - 7. Persentase Kenaikan Prestasi Olahraga;
 - 8. Persentase Peningkatan Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan;
 - 9. Persentase Kenaikan Kunjungan Masyarakat;
 - 10. Indeks Profesionalitas ASN;
 - 11. Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
 - 12. Persentase Raperda yang Disahkan Tepat Waktu;
 - 13. Tingkat Konsistensi dan Ketepatan Waktu Perencanaan;
 - 14. Persentase Kenaikan SKPD Mengelola Arsip Secara Baku;
 - 15. Persentase Penyelenggaraan Pemerintah Desa yang Profesional, Transparan dan Akuntabel;
 - 16. Level Maturitas SPIP;
 - 17. Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
 - 18. Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD);
 - 19. Persentase Tercapainya Penyusunan Produk Hukum dan Penanganan Perkara;
 - 20. Indeks Kabupaten Peduli HAM;
 - 21. Persentase Kesesuaian Capaian Pelaksanaan Pembangunan (Fisik dan Keuangan) dengan Target (rencana);

22. Persentase Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik yang Sesuai Regulasi;
23. Persentase Publikasi Kebijakan dan Kegiatan Kepala Daerah;
24. Persentase Dokumentasi Kegiatan Kepala Daerah;
25. Persentase Pelayanan Keprotokolan Kegiatan Kepala Daerah;
26. Persentase Keterlibatan Stakeholder dalam Pelaksanaan Pembangunan Bidang Kesra;
27. Persentase Desa yang Memiliki LEM, LED dan Posyantek;
28. Persentase Peningkatan PAD dari Sektor Pariwisata;
29. Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB;
30. Persentase UMKM yang Memiliki Daya Saing;
31. Persentase Pertumbuhan Realisasi Investasi (PMDN/PMA);
32. Angka Partisipasi Angkatan Kerja;
33. Besaran Pekerja/ Buruh Yang Menjadi Peserta Program BPJS Ketenagakerjaan;
34. Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB;
35. Indeks Layanan Infrastruktur;
36. Tingkat Pelayanan Infrastruktur Perhubungan;
37. Ketaatan Terhadap RTRW;
38. Kelas Indeks Kapasitas Bencana;
39. Indeks Demokrasi;
40. Rata - rata Kader Lembaga Kemasyarakatan dan Kelompok Pelestarian Adat dalam Pengembangan Sosial Budaya yang Aktif (mendapat pembinaan dan pelatihan);
41. Indeks Ketertiban Masyarakat;
42. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG);
43. Capaian Kabupaten Layak Anak (KLA);
44. Indeks Kepuasan Layanan Perhubungan;
45. Nilai Survei Kepuasan Masyarakat; dan
46. Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat.

b. Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja dengan Kriteria ***tinggi***, atau interval nilai realisasi kinerja **$75,1 \leq 90$** sebanyak 7 (tujuh), diantaranya:

1. Persentase Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial ;
2. Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB;
3. Persentase Inovasi yang Diterapkan;
4. Rasio Daya Serap Tenaga Kerja PMA;
5. Kelas Indeks Kapasitas Bencana;

6. Rasio Penduduk yang Bekerja; dan
 7. Indeks Kualitas Perumahan dan Kawasan Pemukiman.
- c. Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja dengan Kriteria ***sedang***, atau interval nilai realisasi kinerja $65,1 \leq 75$ sebanyak 1 (satu), yaitu Level Kapabilitas APIP.
- d. Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja dengan Kriteria ***rendah***, atau interval nilai realisasi kinerja $50,1 \leq 65$ sebanyak 1 (satu), yaitu Persentase Kenaikan Penyelenggaraan Pagelaran Seni dan Budaya.
- e. Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja dengan Kriteria ***sangat rendah***, atau interval nilai realisasi kinerja ≤ 50 sebanyak 3 (tiga), diantaranya:
1. Rasio daya serap tenaga kerja PMDN;
 2. Persentase IKM yang memiliki daya saing; dan
 3. Persentase besaran peningkatan minat transmigrasi.

B. **Indikator Regresif**, dengan hasil: Sebanyak 9 (sembilan) indikator kinerja sasaran atau sebanyak 100% dengan Kriteria ***Baik (Berhasil Menekan)***, yaitu:

1. Kasus Kematian Ibu;
2. Kasus Kematian Bayi;
3. Kasus Kematian Balita;
4. Prevalensi Gizi Buruk (BB/U);
5. Tingkat Inflasi YoY;
6. Indeks Kualitas Air;
7. Indeks Kualitas Udara;
8. Indeks Tutupan Vegetasi (lahan); dan
9. Angka Kelahiran (*Total Fertility Rate*) /TFR.

Evaluasi atas data pendukung beserta berbagai permasalahan yang muncul dari setiap sasaran strategis perlu diantisipasi. Sebab sekalipun realisasi kinerja menunjukkan hasil sangat baik, di lapangan belum tentu menjawab isu-isu pembangunan secara tuntas. Sehingga kehadiran pemerintah harus selalu ada disaat-saat masyarakat memerlukan pelayanan.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ii
Pernyataan Telah Direviu	iii
Executive Summary	iv
Daftar Isi	viii
Daftar Tabel.....	ix
Daftar Grafik.....	xvi
Daftar Diagram	xviii
Daftar Gambar.....	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
1.1 Latar Belakang.....	I-1
1.2 Pembangunan Menyeluruh dan Tren Wilayah.....	I-2
1.3 Kondisi Ekonomi Daerah.....	I-9
1.4 Kapabilitas SDM Pemerintah Kabupaten Klaten.....	I-14
1.5 Isu Startegis.....	I-16
BAB II PERENCANAAN KINERJA	II-1
2.1 Rencana Strategis	II-1
2.2 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2018	II-15
2.3 Program Pendukung Pencapaian Sasaran.....	II-19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	III-1
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	III-2
3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja.....	III-10
3.3 Akuntabilitas Anggaran.....	III-138
BAB IV PENUTUP	IV-1
4.1 Kesimpulan.....	IV-1
4.2 Rencana Tindak Lanjut	IV-2
Lampiran I Penghargaan dan Piagam Penghargaan Kabupaten Klaten Tahun 2018	
Lampiran II Struktur Pemerintah Kabupaten Klaten	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Rasio Beban Tanggungan (RBT) Kabupaten Klaten Tahun 2014 - 2018	I-4
Tabel 1.2	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Klaten 2014 - 2018	I-6
Tabel 1.3	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Klaten Tahun 2014-2018	I-7
Tabel 1.4	Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Kabupaten Klaten Tahun 2014 – 2018	I-11
Tabel 1.5	Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Klaten Tahun 2014 – 2018	I-12
Tabel 1.6	Pejabat Struktural Yang Mengikuti Diklat Kepemimpinan Kabupaten Klaten Tahun 2014 – 2018.....	I-15
Tabel 1.7	Jumlah ASN Yang Mengikuti Diklat, Bintek dan Seminar tahun 2014 – 2018.....	I-16
Tabel 2.1	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2016 – 2021.....	II-9
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja Kabupaten Klaten Tahun 2018.....	II-15
Tabel 2.3	Program Pendukung Pencapaian Sasaran.....	II-19
Tabel 3.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja Progresif.....	III-2
Tabel 3.2	Skala Nilai Peringkat Kinerja Regresif.....	III-2
Tabel 3.3	Capaian Kinerja Organisasi Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2018	III-3
Tabel 3.4	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Terwujudnya Pemenuhan Kebutuhan Pendidikan Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Non Formal	III-11
Tabel 3.5	Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) di Kabupaten Klaten Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2014 – 2018 ...	III-13
Tabel 3.6	Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) di Kabupaten Klaten Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2014 -2018	III-14
Tabel 3.7	Perkembangan Persentase Angka Putus Sekolah (APS) Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Klaten Tahun 2014 -2018	III-14
Tabel 3.8	Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D IV Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Klaten Tahun 2014 – 2018.....	III-17

Tabel 3.9	Kepala Sekolah yang Memenuhi Kualifikasi S1/D IV dan Bersertifikat menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2014–2018.....	III-17
Talle 3.10	Jumlah Sekolah Murid, Guru SD Negeri Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2014 – 2018.....	III-18
Tabel 3.11	Jumlah Sekolah Murid, Guru SD Swasta Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2014 – 2018.....	III-19
Tabel 3.12	Jumlah Sekolah Murid, Guru SMP Negeri Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2014 – 2018.....	III-20
Tabel 3.13	Jumlah Sekolah Murid, Guru SMP Swasta Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2014 – 2018.....	III-21
Tabel 3.14	Perkembangan Angka Melanjutkan Seolah dari SMP/MTs ke SMA/MA/SMK Kabupaten Klaten Tahun 2014 – 2018 ..	III-23
Tabel 3.15	Persentase Ruang Kelas Dalam Kondisi Baik	III-23
Tabel 3.16	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat dan Menurunnya Angka Kematian, Angka Kesakitan dan Kecacatan	III-26
Tabel 3.17	Jumlah Kasus Kematian Ibu Melahirkan Menurut Kecamatan dan Puskesmas di Kabupaten Klaten Tahun 2014 – 2018.....	III-27
Tabel 3.18	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Pemanfaatan Pelayanan Kerumahsakitian oleh Masyarakat dan Menurunnya Angka Kematian di Rumah Sakit.....	III-31
Tabel 3.19	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Upaya Pencegahan Permasalahan Sosial dan Aksesibilitas PMKS dalam Memperoleh Pelayanan dan Rehabilitasi yang Berperspektif HAM	III-35
Tabel 3.20	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Menurunnya Angka Kelahiran (Total Fertility Rate)	III-37
Tabel 3.21	Peserta KB dan KB Aktif di Kabupaten Klaten Tahun 2014-2018.....	III-38
Tabel 3.22	Jumlah Pentahapan Keluarga Sejahtera Menurut Jenisnya di Kabupaten Klaten Tahun 2014-2018	III-38
Tabel 3.23	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Hasil Pengembangan dan Pembinaan Pemuda dan Olahraga.....	III-40
Tabel 3.24	Perkembangan Kepemudaan dan Olahraga di Kabupaten Klaten Tahun 2014-2018	III-41
Tabel 3.25	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam	

	Pengembangan dan Pelestarian Seni Budaya Daerah, Kawasan Cagar Budaya, Situs dan Bunda Cagar Budaya ..	III-42
Tabel 3.26	Jumlah Penyelenggaraan Seni dan Budaya di Kabupaten Klaten Tahun 2014-2018	III-43
Tabel 3.27	Jumlah Cagar Budaya yang Dilestarikan di Kabupaten Klaten Tahun 2014-2018	III-44
Tabel 3.28	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Kunjungan Masyarakat ke Perpustakaan	III-45
Tabel 3.29	Perkembangan Jumlah Pengunjung Perpustakaan di Kabupaten Klaten Tahun 2014-2018	III-46
Tabel 3.30	Perkembangan Jumlah Perpustakaan Desa di Kabupaten Klaten Tahun 2014-2018	III-46
Tabel 3.31	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Profesionalisme Aparatur Pemerintah Daerah.....	III-47
Tabel 3.32	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah	III-49
Tabel 3.33	Opini BPK Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017	III-49
Tabel 3.34	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Kualitas Layanan dan akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD.....	III-51
Tabel 3.35	Capaian Kinerja Organisasi Berdasarkan Pelaksanaan Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2016-2021 sampai dengan Tahun 2018	III-51
Tabel 3.36	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah.....	III-53
Tabel 3.37	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Kunjungan Masyarakat ke Perpustakaan	III-54
Tabel 3.38	Pengelolaan Kearsipan di Kabupaten Klaten Tahun 2014-2018	III-55
Tabel 3.39	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Profesioanl, Transparan dan Akuntabel	III-56
Tabel 3.40	Lembaga Ekonomi Perdesaan	III-57
Tabel 3.41	Pelatihan Teknologi Tepat Guna Tahun 2014-2018.....	III-57
Tabel 3.42	Lokasi Pengembangan Wisata.....	III-59
Tabel 3.43	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.....	III-61

Tabel 3.44	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Kinerja Penyelenggraan Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah.....	III-67
Tabel 3.45	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Koordinasi Penataan Peraturan Perundang-Undangan serta Bantuan Hukum dan HAM.....	III-68
Tabel 3.46	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan	III-70
Tabel 3.47	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Terwujudnya Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa yang Kredibel	III-71
Tabel 3.48	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Fasilitasi Koordinasi Bidang Kehumasan dan Keprotokolan	III-72
Tabel 3.49	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Fasilitasi dan Pengawasan Kebijakan Daerah Bidang Perekonomian	III-73
Tabel 3.50	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Koordinasi Kesejahteraan Rakyat.....	III-75
Tabel 3.51	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Ketersediaan Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah.....	III-76
Tabel 3.52	Luas Lahan Pertanian dan Bukan Lahan Pertanian di Kabupaten Klaten Tahun 2014-2018.....	III-77
Tabel 3.53	Luas Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian ke Non Pertanian Menurut Kecamatan dan Penggunaannya di Kabupaten Klaten Tahun 2014-2018.....	III-78
Tabel 3.54	Perkembangan Luas Tanam dan Luas Panen Tanaman Pangan Kabupaten Klaten Tahun 2014-2018.....	III-79
Tabel 3.55	Perkembangan Produksi dan Produktifitas Tahun 2014-2018.....	III-79
Tabel 3.56	Produksi Perkebunan Tahun 2014-2018	III-80
Tabel 3.57	Produksi Ternak Tahun 2014-2018	III-80
Tabel 3.58	Produksi Susu, Daging dan Telur Tahun 2014-2018.....	III-81
Tabel 3.59	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Peran LEM, LED dan Pengembangan Potensi TTG di Desa dalam Penanggulangan Kemiskinan.....	III-83
Tabel 3.60	Lembaga Ekonomi Perdesaan	III-84
Tabel 3.61	Pelatihan Teknologi Tepat Guna Tahun 2014-2018.....	III-84

Tabel 3.62	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Produktifitas, Nilai Tambah dan Daya Saing Sektor Kepariwisataaan	III-86
Tabel 3.63	Nama dan Jenis Obyek Wisata serta Lokasinya di Kabupaten Klaten Tahun 2018.....	III-87
Tabel 3.64	Jumlah Obyek Wisata, pengunjung, Lama Tinggal dan rata-rata Pengeluaran Wisatawan Nusantara (Wisnus) dan Wisatawan Mancanegara (Wisman) Tahun 2014-2018	III-89
Tabel 3.65	Sumbangan Sektor Pariwisata terhadap PAD Kabupaten Klaten Tahun 2014-2018	III-90
Tabel 3.66	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Nilai tambah, Produktifitas dan Daya Saing pada Urusan Perdagangan, Koperasi dan UKM	III-91
Tabel 3.67	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Penerapan Inovasi Dalam Pembangunan Daerah.....	III-93
Tabel 3.68	Inovasi Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten.....	III-94
Tabel 3.69	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Nilai tambah, Produktifitas dan Daya Saing Sektor Penanaman Modal.....	III-97
Tabel 3.70	Jumlah Investasi PMA dan PMDN Tahun 2014-2018	III-97
Tabel 3.71	Perkembangan Realisasi PMDN Tahun 2014-2018.....	III-98
Tabel 3.72	Perkembangan Realisasi PMA Tahun 2014-2018	III-98
Tabel 3.73	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya dan Pengembangan Produktifitas, Nilai Tambah dan Daya Saing, Sektor Ketenagakerjaan	III-99
Tabel 3.74	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Perlindungan Sektor Ketenagakerjaan.....	III-102
Tabel 3.75	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Nilai Tambah, Produktifitas dan Daya Saing Sektor Perindustrian	III-104
Tabel 3.76	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Insfrastruktur Publik dan Sarana Prasarana Dasar Masyarakat.....	III-106
Tabel 3.77	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Kualitas Manajemen Rekayasa Lalu Lintas dan Penyelenggaraan Angkutan.....	III-108
Tabel 3.78	Jumlah Sarana Angkutan (Umum dan Pribadi) di Kabupaten Klaten tahun 2014-2018.....	III-108
Tabel 3.79	Data Terminal Angkutan Penumpang Umum di Kabupaten Klaten Tahun 2018	III-109

Tabel 3.80	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Pemenuhan Prasarana, Sarana dan Utilitas Kawasan Perumahan dan Permukiman	III-110
Tabel 3.81	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Terkendalinya Pemanfaatan Kawasan Sesuai Dengan Konsep Tata Ruang	III-112
Tabel 3.82	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Terjaganya Kualitas Lingkungan	III-114
Tabel 3.83	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Pengurangan kerentanan Risiko Bencana.....	III-117
Tabel 3.84	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Kesadaran dan Pemahaman Masyarakat Terhadap Politik dan Demokrasi.....	III-119
Tabel 3.85	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Kelompok Pelestarian Adat Dalam Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya	III-120
Tabel 3.86	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Terwujudnya Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.....	III-122
Tabel 3.87	Rekapitulasi Data Hasil Operasi Penertiban Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT) Tahun 2014-2018	III-123
Tabel 3.88	Rekapitulasi Hasil Operasi Penertiban Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT) Jenis Minuman Keras / Beralkohol Tahun 2014-2018	III-124
Tabel 3.89	Kondisi Jenis Permasalahan Ketentraman Umum Tahun 2014-2018	III-124
Tabel 3.90	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Kapasitas Perempuan, Perlindungan Perempuan dan Anak	III-127
Tabel 3.91	Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Klaten Tahun 2014-2018	III-127
Tabel 3.92	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Klaten Tahun 2014-2018	III-128
Tabel 3.93	Keikutsertaan Perempuan di dalam Jabatan Eksekutif dan Legislatif di Kabupaten Klaten Tahun 2014-2018.....	III-129
Tabel 3.94	Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Berhadapan dengan Hukum di Kabupaten Klaten Tahun 2014-2018	III-130
Tabel 3.95	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Kualitas Layanan Perhubungan	III-131
Tabel 3.96	Jumlah Sarana Angkutan (Umum dan Pribadi) di Kabupaten Klaten Tahun 2014-2018.....	III-131

Tabel 3.97	Data terminal Angkutan Penumpang Umum di Kabupaten Klaten Tahun 2014-2018	III-132
Tabel 3.98	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Pelayanan Perijinan Satu Pintu Yang Tepat Waktu, Tepat Mutu, Tepat Sasaran dan Tepat Manfaat.....	III-133
Tabel 3.99	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kependudukan yang Berkualitas	III-134
Tabel 3.100	Jumlah Pelayanan Akte di Kabupaten Klaten Tahun 2014-2018	III-135
Tabel 3.101	Penduduk kabupaten Klaten yang Belum ber-Akte lahir dan KTP Elektronik Tahun 2014-2018	III-136
Tabel 3.102	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Pengembangan Ketrasmigrasian	III-137
Tabel 3.103	Realisasi Penempatan Transmigrasi Umum Menurut Daerah Penempatan Tahun 2014-2018	III-137
Tabel 3.104	Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2018	III-141

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1	Perkembangan Jumlah Kepala Keluarga (KK) Kabupaten Klaten Tahun 2014 - 2018	I-5
Grafik 1.2	Perkembangan Kemiskinan di Kabupaten Klaten Terhadap Provinsi Jawa Tengah dan Nasional tahun 2014 - 2018	I-7
Grafik 1.3	Perkembangan Relevansi Indeks Kedalamam Kemiskinan (pP1) Kabupaten Klaten Terhadap Provinsi Jawa Tengah	I-8
Grafik 1.4	Perkembangan Relevansi Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Klaten Terhadap Provinsi Jawa Tengah Pada Tahun 2014 - 2018.....	I-8
Grafik 1.5	Perbandingan Pertumbuhan Perekonomian Antara Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah dan nasional Tahun 2014-2018.....	I-9
Grafik 1.6	Perkembangan PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 di Kabupaten Klaten dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2017	I-14
Grafik 1.7	Profil Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan Kabupaten Klaten Tahun 2013 - 2018.....	I-15
Grafik 3.1	Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Klaten Tahun 2014 - 2018	III-11
Grafik 3.2	Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Klaten tahun 2014 - 2018.....	III-12
Grafik 3.3	Angka Kelulusan (AL) Tahun 2014 - 2018	III-15
Grafik 3.4	Angka Melek Huruf Penduduk Usia > 15 tahun ke Atas di Kabupaten Klaten Tahun 2014 - 2018.....	III-16
Grafik 3.5	Perkembangan Kasus Kematian Ibu Melahirkan di Kabupaten Klaten Tahun 2014 - 2018.....	III-27
Grafik 3.6	Perkembangan Angka Kematian Bayi di Kabupaten Klaten Tahun 2014 - 2018.....	III-29
Grafik 3.7	Perkembangan Persentase Gizi Buruk di Kabupaten Klaten Tahun 2014 - 2018.....	III-30
Grafik 3.8	Perkembangan Usia Harapan Hidup Masyarakat di Kabupaten Klaten Tahun 2014 - 2018.....	III-33
Grafik 3.9	Indikator BOR (Persentase Pemakaian Tempat Tidur pada Satuan Waktu Tertentu Menurut Bulan Tahun 2018)	III-34
Grafik 3.10	Indikator BOR (Persentase Pemakaian Tempat Tidur pada Satuan Waktu Tertentu Tahun 2016-2018)	III-34
Grafik 3.11	PMKS yang Memperoleh Bantuan Tahun 2014-2018	III-37

Grafik 3.12	Laju Inflasi di Kabupaten Klaten Tahun 2014-2018	III-76
Grafik 3.13	Indeks Kualitas Air dan Indeks Kualitas Udara	III-118
Grafik 3.14	Capaian Konservasi Penghijauan Daerah Sumber Mata Air Kabupaten Klaten Tahun 2016-2017 dan Target sampai Tahun 2021	III-119

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 2.1	Korelasi Antara Tujuan dan Misi Pembangunan Daerah.....	II-13
Diagram 3.1	Peringkat Kinerja Progresif	III-9
Diagram 3.2	Peringkat Kinerja Regresif	III-10

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Peta Aministrasi Kabupaten Klaten Menurut Kecamatan	I-3
------------	---	-----



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan menuntut adanya pengelolaan atau manajemen pemerintahan yang baik. Manajemen pemerintahan yang baik bermuara pada terwujudnya *good governance* yang akan berdampak pada pengambilan kebijakan-kebijakan pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, pelayanan masyarakat dan daya saing daerah (Permendagri Nomor 86 Tahun 2017). Disamping itu, tujuan utama pembangunan adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan bagi rakyat untuk menikmati umur panjang, sehat, dan menjalankan kehidupan yang produktif, serta memiliki pendapatan per kapita untuk hidup layak(*Human Development Report*, 1990).

Sebagai langkah awal untuk mewujudkan tujuan nasional tersebut, maka harus disusun *grand-design* perencanaan yang terpadu dari berbagai sektor, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sehingga perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional harus dilaksanakan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

Keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan dan pelaporan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu penguatan pelaksanaan *otonomi daerah* dalam upaya peningkatan pelayanan publik secara terus-menerus dan berkelanjutan.

Laporan kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Klaten Tahun 2018 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

BAB I PENDAHULUAN, terdiri dari :
1.1 Latar Belakang
1.2 Pembangunan Menyeluruh dan Tren Wilayah
1.3 Kondisi Ekonomi Daerah
1.4 Kapabilitas SDM Pemerintah Kabupaten Klaten
1.5 Isu Strategis

Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Review Atas Laporan Kinerja. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan sebagaimana dimaksud, bahwa pelaporan capaian kinerja instansi pemerintah yang disampaikan secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Pemerintah Kabupaten Klaten.

Laporan kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Klaten Tahun 2018 disusun bertujuan untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam *Dokumen Penetapan Kinerja*. Adapun pengukuran capaian target kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target yang telah ditetapkan dengan realisasi kinerja yang dihasilkan dari setiap instansi pemerintah.

Sehingga laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Memedomani ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Review Atas Laporan Kinerja, Pemerintah Kabupaten Klaten menyusun laporan kinerja tahunan berdasarkan perjanjian kinerja disampaikan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

1.2 Pembangunan Menyeluruh dan Tren Wilayah

1.2.1 Kondisi Geografi dan Demografi

a. Letak Geografis

Kabupaten Klaten dalam lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu dari 35 kabupaten/kota yang mempunyai nilai strategis dan memiliki peranan yang sangat penting dalam proses pertumbuhan wilayah di Jawa Tengah. Wilayah Kabupaten Klaten terletak di jalur yang sangat strategis, karena berbatasan langsung dengan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), yang dikenal sebagai salah satu Daerah Tujuan Wisata (DTW). Dari sisi

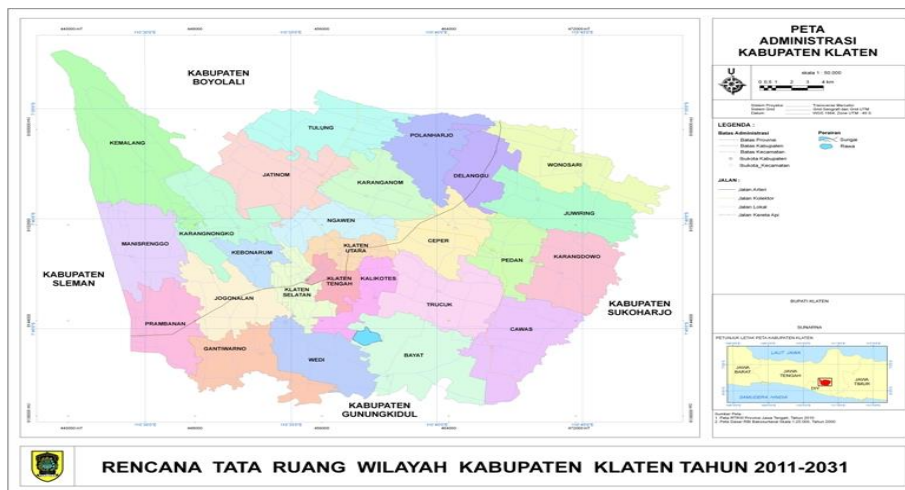
bentangan garis katulistiwa, Kabupaten Klaten terletak antara 7°32'19" Lintang Selatan sampai 7°48'33" Lintang Selatan dan antara 110°26'14" Bujur Timur sampai 110°47'51" Bujur Timur.

b. Tata Letak dan Wilayah Administrasi Administrasi

Kabupaten Klaten mempunyai luas wilayah 65.556 ha (655,56 km²) atau seluas 2,014% dari luas Provinsi Jawa Tengah, yang luasnya 3.254.412 ha. Luas wilayah tersebut mencakup seluruh wilayah administrasi di Kabupaten Klaten yang terdiri dari 26 Kecamatan, 391 Desa serta 10 Kelurahan, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah Utaraberbatasan dengan Kabupaten Boyolali,
2. Sebelah Timurberbatasan dengan Kabupaten Sukoharjo,
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Gunungkidul (DIY), dan
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Sleman (DIY).

Gambaran Peta Wilayah Kabupaten Klaten berdasar Kecamatan, selengkapnya dapat dilihat pada Gambar1.1



Gambar1.1 Peta Administrasi Kabupaten Klaten Menurut Kecamatan

Adapun pembagian wilayah ada 26 kecamatan, 391 desa, 10 kelurahan, 3.689RW dan 9.592RT.

c. Penggunaan Lahan

Dari sisi penggunaan lahan pertanian selama 5 (lima) tahun terakhir mulai tahun 2014-2018 terjadi perubahan pola penggunaan lahan sawah irigasi. Penggunaan lahan sawah dari 33.314 Ha pada

tahun 2014, menjadi 33.220 Ha pada tahun 2015, menjadi 33.220 Ha pada tahun 2016, pada tahun 2017 menjadi 33.111 Ha, dan pada tahun 2018 menjadi 33.066 Ha.

Adapun perubahan luasan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian pada tahun 2017 perubahan luasan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian seluas 55,2309 Ha, dengan perincian peruntukan: perumahan 40,8997 Ha, dan industri 13,6631 Ha. Sedangkan tahun 2018 seluas 45,391 Ha, dengan perincian peruntukan: perumahan 33,0577 Ha, industri 8,9094 Ha, perusahaan seluas 0,113 Ha, dan jasa seluas 3,3109 Ha.

Besaran luas lahan dan persentase lahan sawah yang beririgasi di Kabupaten Klaten menunjukkan bahwa tanah pertanian di Kabupaten Klaten masih sangat potensial untuk dikembangkan menjadi kawasan agropolitan. Hal ini juga didukung oleh kenyataan bahwa selama ini Kabupaten Klaten mendapat sebutan sebagai penyangga pangan di Provinsi Jawa Tengah. Pengembangan Kabupaten Klaten sebagai kawasan agropolitan, perlu adanya pengendalian dan optimalisasi pemanfaatan lahan sesuai produk unggulan yang disesuaikan dengan tata ruang wilayah.

d. Kondisi Demografi

Pada tahun 2017 sebanyak 1.308.712 jiwa, dan menjadi 1.314.781 jiwa pada tahun 2018. Berdasarkan jumlah penduduk yang tervalidasi, mengakibatkan pergeseran Rasio Beban Tanggungan (RBT) sebagaimana Tabel 1.1..

Tabel 1.1.

Rasio Beban Tanggungan (RBT)
Kabupaten Klaten Tahun 2014-2018

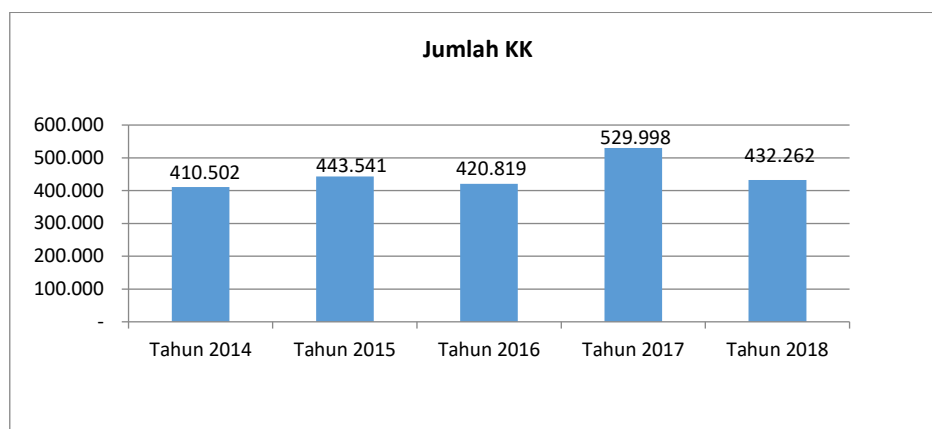
No	Tahun	Penduduk Kelompok Umur			Jumlah Penduduk	Persentase RBT
		0-14	15-64	65+		
1	2014	284.632	1.016.916	167.705	1.469.253	44,48%
2	2015	288.064	1.023.245	168.962	1.480.271	44,66%
3	2016	288.047	1.028.714	169.665	1.486.426	44,49%
4	2017	275.208	907.665	125.839	1.308.712	44,18%
5	2018*)	251.025	916.620	147.136	1.314.781	43,44%

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Klaten, 2018

*) Data sementara, (diolah)

Disamping RBT sebagaimana tersebut di atas, jumlah KK yang semula sejumlah 529.998 KK pada tahun 2017 menjadi 432.262 KK

pada Tahun 2018 (atau berkurang sebanyak 97.736 KK). Hal ini disebabkan adanya penertiban administrasi kependudukan (setiap penduduk yang sudah menikah wajib memiliki KK tersendiri). Gambaran perkembangan jumlah Kepala Keluarga Kabupaten Klaten Tahun 2014-2018 disajikan pada Grafik 1.1.



Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Klaten, 2018
 Grafik 1.1. Perkembangan Jumlah Kepala Keluarga (KK) Kabupaten Klaten Tahun 2014-2018

1.2.2 Indeks Pembangunan Manusia

Berbagai program pembangunan khususnya dalam pembangunan manusia yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Klaten selama ini telah menunjukkan hasil yang cukup baik. Salah satu indikator untuk mengukur kualitas pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) adalah dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

IPM merupakan suatu indeks komposit yang disusun dari 3 (tiga) komponen esensial untuk kehidupan manusia, yaitu: (i) Usia hidup panjang dan sehat diukur dengan Angka harapan Hidup, (ii) Pengetahuan (*knowledge*) yang diukur dengan Rata-rata lama sekolah dan Angka harapan lama sekolah (iii) Standar hidup layak yang diukur dengan Pengeluaran Riel Per kapita. Adapun Hasil penghitungan IPM Kabupaten Klaten dapat dilihat pada tabel 1.2.

Tabel 1.2.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
di Kabupaten Klaten Tahun 2014-2018

Indikator IPM	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Angka Harapan Hidup (tahun)	76,54	76,55			
Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	7,92	8,16	8,22	8,23	
Angka Harapan Lama Sekolah (tahun)	12,74	12,84	12,85	12,97	
Pengeluaran Riel Per Kapita (dalam Ribuan Rp.)	10.965	11.178			
IPM	73,19	73,81	76,59	76,62	

Sumber : BAPPEDA Kabupaten Klaten, 2019.



Gambaran Ideal Daur Siklus IPM

1.2.3 Kemiskinan

Kondisi kemiskinan di Kabupaten Klaten dapat disajikan dengan 2 (dua) pendekatan pendataan, yaitu: 1. Persentase penduduk miskin, dan 2. Jumlah rumah tangga miskin yang masing-masing dihitung dengan kriteria yang berbeda.

a. Persentase Penduduk Miskin

Persentase penduduk miskin dihitung berdasarkan pada hasil survey Susenas, dimana angka yang diperoleh adalah angka makro. Adapun penentuan penduduk miskin berdasarkan garis kemiskinan yang dihitung berdasarkan pemenuhan kebutuhan pangan maupun non pangan. Garis kemiskinan setara dengan 2.100 kkal per kapita. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Klaten selama tahun 2014-2018 cenderung mengalami penurunan walaupun penurunannya relatif

lambat. Perkembangan jumlah dan persentase penduduk miskin di Kabupaten Klaten Tahun 2014-2018 disajikan pada Tabel 1.3.

Tabel 1.3.

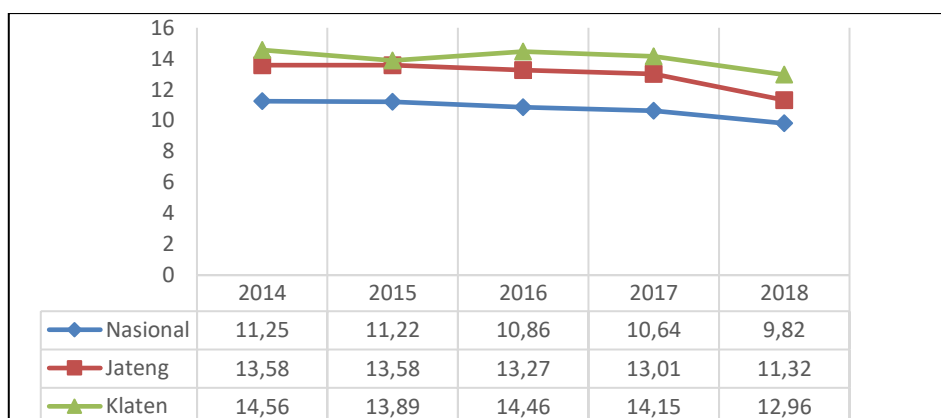
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Klaten Tahun 2014-2018

Tahun	Jumlah Penduduk Disdukcapil (Jiwa)	Jumlah Penduduk BPS (Jiwa)	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	Persentase Penduduk Miskin
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2014	1.469.253	1.154.028	168.180	14,56
2015	1.480.271	1.158.295	172.300	14,89
2016	1.486.426	1.163.218	168.010	14,46
2017	1.308.712	1.166.100	164.990	14,15
2018	1.314.781	1.171.411	151.700	12,96

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Klaten, 2019

Pada tahun 2018 angka persentase penduduk miskin mengalami penurunan sebesar 1,19 % yaitu dari tahun 2017 sebesar 14,15 % turun menjadi 12,96 %.hal ini dikarenakan percepatan bantuan sosial bagi masyarakat miskin dari pemerintah turun tepat waktu, seperti Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Dana Desa, pengendalian inflasi dan lain-lain.

Perkembangan relevansi persentase tingkat kemiskinan di Kabupaten Klaten tahun 2014-2018 disajikan pada Grafik 1.2.



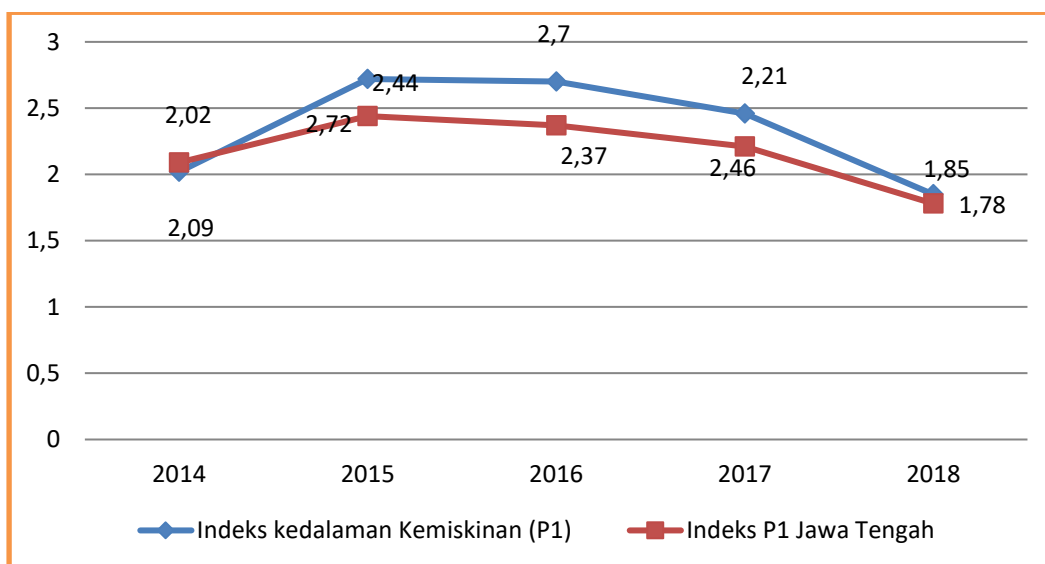
Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Klaten, 2019

Grafik 1.2. Perkembangan Kemiskinan di Kabupaten Klaten Terhadap Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2014 – 2018

Penurunan angka kemiskinan terjadi baik di Kabupaten, Provinsi maupun Nasional, hal ini dikarenakan keberhasilan program penganggulangan kemiskinan lintas sektor. Namun angka kemiskinan Kabupaten Klaten masih di atas angka kemiskinan provinsi dan nasional, hal ini disebabkan karena jumlah penduduk miskin di Kabupaten Klaten masih terlalu banyak berdasarkan data PBDT Tahun 2018.

b. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Menurut Data Kemiskinan Makro

Indeks kedalaman kemiskinan (P1) sebagai ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Posisi relatif Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Klaten dengan Provinsi Jawa Tengah dapat disajikan pada Grafik 1.3.



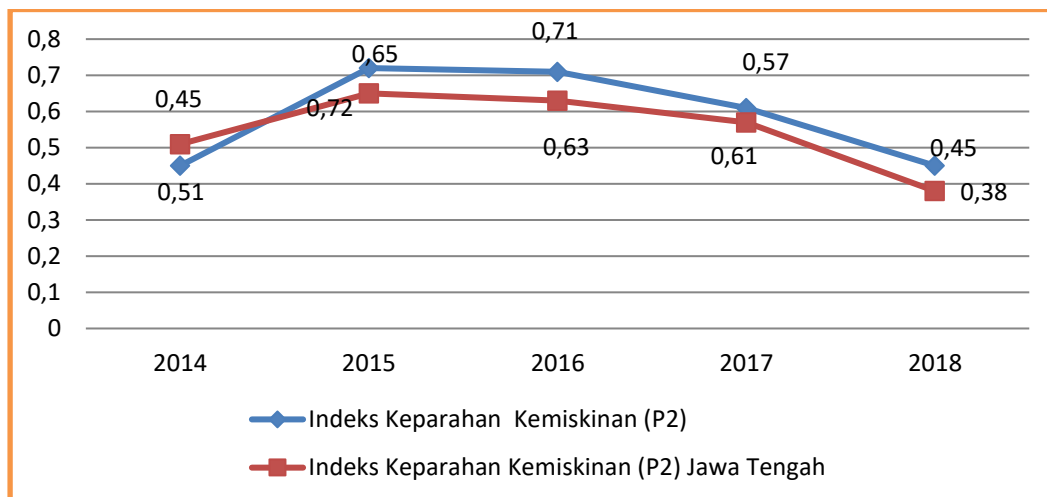
Grafik 1.3. Perkembangan Relevansi Indeks Kedalaman kemiskinan (P1) Kab. Klaten Terhadap Provinsi Jawa Tengah 2013-2017

Pada Grafik 1.3. ditunjukkan Indeks kedalaman kemiskinan (P1) Kabupaten Klaten pada tahun 2017 sebesar 2,46 masih di atas posisi Provinsi Jawa Tengah (2,21).

a. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Menurut Data Kemiskinan Makro

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) merupakan ukuran untuk mengetahui penyebaran ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin, semakin tinggi nilai indeks semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Perkembangan relevansi Indeks

Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Klaten terhadap Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2014-2018 disajikan pada Grafik 1.5.



Grafik 1.4. Perkembangan Relevansi Indeks Keparahan Kemiskinan(P2) Kabupaten Klaten terhadap Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2014-2018

Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Klaten tahun 2014-2018 terhadap perkembangan realisasi Provinsi Jawa Tengah, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten pada tahun 2017 (0,61) masih di atas rata-rata Provinsi Jawa Tengah (0,57).



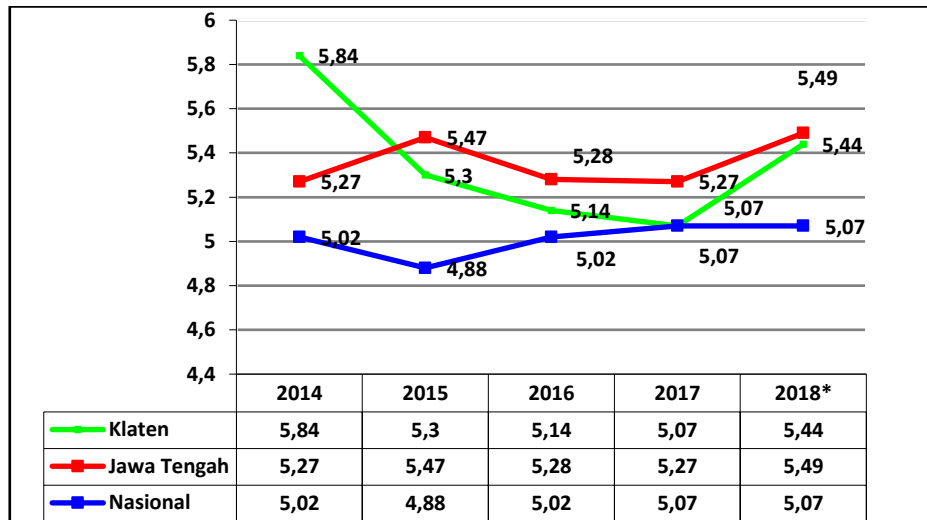
Gambaran Upaya yang Dilakukan Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Klaten

1.3 Kondisi Ekonomi Daerah

Pertumbuhan perekonomian Kabupaten Klaten selama Tahun 2014-2018 menunjukkan kinerja positif, hal ini ditunjang adanya pertumbuhan sektor UMKM dan lapangan usaha yang mendukung peningkatan sektor jasa. Tahun 2014 sebesar 5,84%, Tahun 2015 sebesar 5,30%, Tahun 2016 sebesar 5,14%, Tahun 2017 sebesar 5,07%, dan pada tahun 2018 tumbuh sebesar

5,44%, hal ini sebagai dampak adanya pelaksanaan program pembangunan yang sinergis antar sektor.

Perbandingan pertumbuhan perekonomian antara Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional selama Tahun 2014-2018, dapat dilihat pada Grafik 1.5.



Sumber : BPS Kab. Klaten, 2019

*Proyeksi Sementara (Bappeda, 2019)

Grafik 1.5. Perbandingan Pertumbuhan Perekonomian Antara Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2014-2018

Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Klaten atas Dasar Harga Konstan 2010 selama Tahun 2014-2018 tumbuh secara positif. Gambaran selengkapnya Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010, di Kabupaten Klaten selama Tahun 2014-2018 dapat dilihat dapat dilihat pada Tabel 1.4.

Tabel 1.4.

Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010
Kabupaten Klaten Tahun 2014-2018 (dalam Rp. Juta)

No	Lapangan Usaha	2014		2015		2016		2017		2018*	
		Nilai (juta Rp.)	Pertumbuhan (%)	Nilai (juta Rp.)	Pertumbuhan (%)	Nilai (juta Rp.)	Pertumbuhan (%)	Nilai (juta Rp.)	Pertumbuhan (%)	Nilai (juta Rp.)	Pertumbuhan (%)
(1)	(2)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2.606.035,81	0,87	2.732.275,47	4,84	2.814.072,17	2,99	2.845.097,06	1.10	2.883.211,50	1.34
2	Pertambangan dan Penggalian	597.551,15	7,19	617.439,64	3,33	635.253,28	2,89	661.866,20	4.19	690.599,20	4.34
3	Industri Pengolahan	7.093.268,56	9,02	7.540.801,78	6,31	8.001.139,74	6,10	8.484.614,05	6.04	9.032.267,30	6.45
4	Pengadaan Listrik dan gas	38.526,20	3,28	39.160,62	1,65	41.588,12	6,20	44.249,82	6.40	47.202,20	6.67
5	Pengadaan Air, Pengolahan sampah, Limbah, dan Daur Ulang	11.527,87	4,21	11.793,17	2,30	12.047,34	2,16	12.726,81	5.64	13.478,24	5.90
6	Konstruksi	1.294.690,29	3,17	1.356.317,55	4,76	1.435.985,49	5,87	1.528.175,76	6.42	1.629.914,60	6.66
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4.094.285,55	2,35	4.209.074,39	2,80	4.358.461,18	3,55	4.519.078,43	3.69	4.699.213,20	3.99
8	Transportasi dan Pergudangan	515.457,41	9,82	544.592,24	5,65	566.772,32	4,07	597.101,45	5.35	631.381,60	5.74
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	792.087,87	4,89	832.820,90	5,14	883.280,17	6,06	944.307,06	6.91	1.013.542,00	7.33
10	Informasi dan Komunikasi	794.978,71	6,12	844.708,79	6,26	908.151,37	7,51	1.003.507,26	10.5	1.113.258,00	10,9
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	718.614,58	6,37	767.642,41	6,82	823.297,85	7,25	589.687,64	4.42	898.137,00	4.47
12	Real Estate	316.062,61	8,79	339.893,73	7,54	360.869,45	6,17	382.124,67	5.89	405.455,00	6.11
13	Jasa Perusahaan	65.626,24	8,41	70.961,66	8,13	77.484,45	9,19	83.334,52	7.55	89.961,60	7.95
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	546.822,57	0,61	574.874,57	5,13	591.863,52	2,96	610.862,34	3.21	631.158,40	3.32
15	Jasa Pendidikan	1.333.544,38	11,69	1.438.627,68	7,88	1.519.264,74	5,61	1.598.874,21	5.24	1.688.534,00	5.61
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan sosial	224.011,39	11,52	241.260,27	7,70	260.076,42	7,80	280.778,51	7.96	303.682,20	8.16
17	Jasa Lainnya	381.431,17	8,57	396.731,26	4,01	428.323,40	7,96	463.917,08	8.32	504.325,40	8.71
Produk Domestik Regional Bruto		21.424.522,36	5,84	22.558.976,15	5,30	23.717.931,02	5,14	24.920.302,87	5,07	26.275.321,44	5,44

Sumber : BPS Kabupaten Klaten 2018
*Proyeksi oleh Bappeda, 2019

Berdasarkan Tabel 1.4. dapat diketahui bahwa PDRB atas dasar Harga Konstan di Kabupaten Klaten selama Tahun 2014-2018 mengalami kenaikan dari sebesar Rp.21.424.522,36 juta pada tahun 2014, meningkat menjadi sebesar Rp.26.275.321,44 juta pada tahun 2018 (atau naik 18,46%).

Jika dilihat Atas Dasar Harga Konstan sumbangan sektor PDRB berdasarkan lapangan usaha terjadi pertumbuhan yang fluktuatif, ada yang mengalami kenaikan namun juga ada yang menurun. Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan pada tahun 2018 tumbuh paling rendah diantara sektor lainnya, hal ini disebabkan perubahan iklim, adanya serangan hama dan lambatnya peningkatan produksi maupun produktifitas yang berakibat lambatnya nilai tambah sektor pertanian.

Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor meskipun tumbuh melambat, namun apabila dilihat dari nilai investasi mempunyai peluang usaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat untuk mengatasi pengangguran.

Sektor lain yang protektif, dan tumbuh adalah sektor industri pengolahan. Sektor ini tumbuh tidak saja ditunjukkan berkembangnya usaha kecil mikro dan industri olahan, tetapi juga ditunjang menguatnya daya beli masyarakat yang menopang tumbuhnya perekonomian daerah.

Sementara itu, nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Klaten Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2010, pada Tahun 2014-2018 dapat dilihat pada Tabel 1.5.

Tabel 1.5.

Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Klaten
Tahun 2014-2018 (dlm Juta Rupiah)

No	Lapangan Usaha	2014		2015		2016		2017		2018*	
		Nilai (juta Rp.)	(%)	Nilai (juta Rp.)	(%)	Nilai (juta Rp.)	(%)	Nilai (juta Rp.)	(%)	Nilai (juta Rp.)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3,284,129.30	6.1	3,622,347.95	10.3	3,807,648.99	5.12	3,888,677.97	7.82	4,206,252.00	8.17
2	Pertambangan dan Penggalian	809,207.55	22.2	955,364.63	18.06	1,013,913.84	6.13	1,090,844.57	14.12	1,251,575.40	14.73
3	Industri Pengolahan	9,116,653.82	18.5	10,178,503.39	11.65	11,342,482.65	11.44	12,412,507.52	13.02	14,080,982.00	13.44
4	Pengadaan Listrik dan gas	36,912.08	6.46	39,661.13	7.45	45,832.98	15.56	52,851.96	8.04	57,168.80	8.17
5	Pengadaan Air, Pengolahan sampah, Limbah, dan Daur Ulang	12,097.70	6.17	12,698.33	4.96	13,246.78	4.32	14,143.63	5.17	14,934.58	5.59
6	Konstruksi	1,604,879.56	13.2	1,780,130.61	10.92	1,914,709.83	7.56	2,090,001.40	10.03	2,307,153.80	10.39
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,609,167.50	5.65	4,947,444.05	7.34	5,290,031.30	6.92	5,686,966.56	6.33	6,048,164.80	6.35
8	Transportasi dan Pergudangan	557,513.39	15.39	614,745.60	10.27	645,983.06	5.03	730,496.14	10.66	810,468.50	10.95
9	Penyediaan Akomodasi dan	878,161.00	9.33	974,845.99	11.01	1,091,004.92	11.92	1,190,467.24	8.91	1,298,448.50	9.07

No	Lapangan Usaha	2014		2015		2016		2017		2018*	
		Nilai (juta Rp.)	(%)	Nilai (juta Rp.)	(%)	Nilai (juta Rp.)	(%)	Nilai (juta Rp.)	(%)	Nilai (juta Rp.)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Makan Minum										
10	Informasi dan Komunikasi	836,098.10	5.09	880,528.28	5.31	948,513.65	7.72	1,094,538.75	5.97	1,163,021.70	6.26
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	888,874.29	10.97	985,803.41	10.9	1,084,247.12	9.99	1,180,028.20	10.62	1,312,773.50	11.25
12	Real Estate	343,172.57	14.82	381,078.74	11.05	409,138.03	7.36	444,110.49	10.41	493,620.60	11.15
13	Jasa Perusahaan	79,657.41	12.11	90,459.78	13.56	102,385.38	13.18	114,288.85	16.27	133,065.00	16.43
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	668,437.00	6.77	730,951.96	9.35	790,819.46	8.19	842,976.28	7.50	910,240.00	7.98
15	Jasa Pendidikan	1,805,978.48	16.62	1,984,205.50	9.87	2,159,132.68	8.82	2,366,343.26	13.34	2,685,456.10	13.49
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan sosial	303,146.41	15.57	339,329.96	11.94	371,819.69	9.57	411,170.96	14.07	472,641.00	14.95
17	Jasa Lainnya	436,804.15	15.64	470,679.24	7.76	527,780.71	12.13	580,442.53	12.35	656,570.40	13.12
	Produk Domestik Regional Bruto	26,270,890.31	12.53	28,988,778.55	10.35	31,558,691.06	8.87	34,190,856.31	10.27	37,902,536.68	10.68

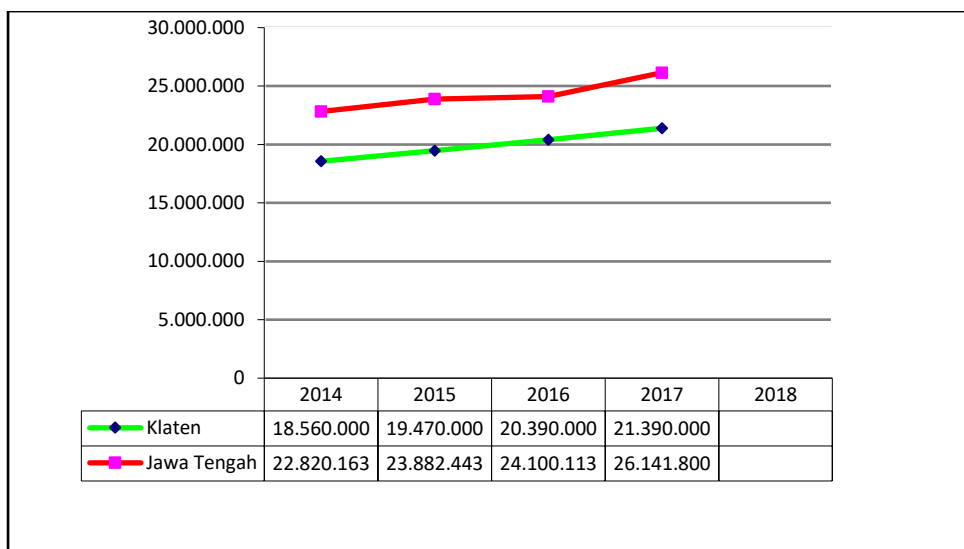
Sumber: BPS Kabupaten Klaten 2018

*Proyeksi oleh Bappeda, 2019

Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Klaten Tahun 2014-2018 sebagaimana Tabel 2.4 di atas tumbuh secara fluktuatif. Pada Tahun 2018 sebesar Rp.37.902.536,68 juta dari Tahun 2017 sebesar Rp.34.190.856,31 juta.

Sedangkan jika dilihat Atas Dasar Harga Berlaku sumbangan sektor PDRB berdasarkan lapangan usaha terjadi pertumbuhan yang fluktuatif, ada yang mengalami kenaikan namun juga ada yang menurun. Pada Tahun 2018, kontribusi terbesar atas dasar harga berlaku masih disumbang oleh sector industry pengolahan sebesar 37,15% atau Rp.14.080.982 juta.

Sedangkan pertumbuhan PDRD perKapita Tahun 2018 mengalami kenaikan seiring dengan pertumbuhan PDRD Atas Dasar Harga Berlaku. Gambaran pertumbuhan PDRD per Kapita sebagaimana Grafik 1.6.

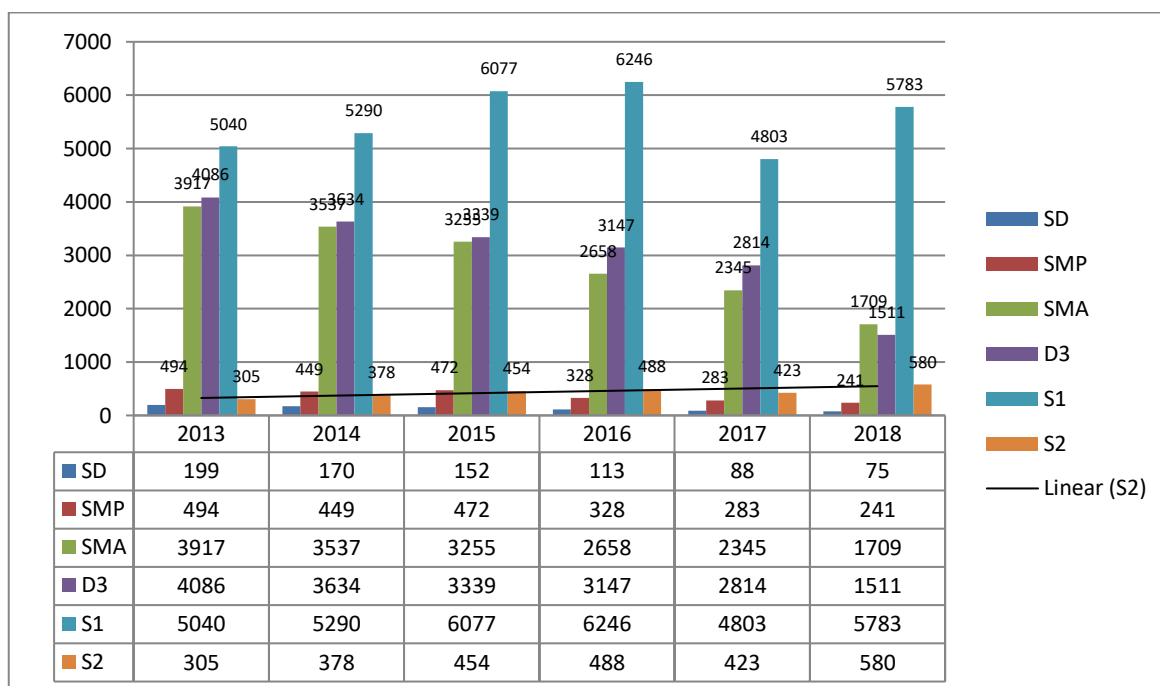


Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Klaten, 2019

Grafik 1.6. Perkembangan PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 di Kabupaten Klaten dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2017

1.4 Kapabilitas SDM Pemerintah Kabupaten Klaten

Kapabilitas SDM Pemerintah Kabupaten Klaten berdasarkan jumlah ASN pada Tahun 2018 sebanyak 9.899 orang. Gambaran singkat profil jumlah pegawai berdasarkan Jenjang Pendidikan, dan dapat disajikan dalam Grafik 1.7.



Sumber : BKPPD Kabupaten Klaten, 2019.

Grafik 1.7 Profil Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan Kabupaten Klaten Tahun 2013-2018

Berdasarkan Grafik 1.7. sebagaimana tersebut di atas, Pendidikan dan pelatihan memiliki peran strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya aparatur yaitu aparatur pegawai yang profesional baik dalam hal kompetensi, sikap dan perilaku yang diharapkan sesuai dengan tugas dan peranannya masing-masing. Berikut Tabel ASN yang telah mengikuti diklat struktural di Kabupaten Klaten. Sedangkan pejabat Struktural yang mengikuti Diklat Kepemimpinan Kabupaten Klaten 2014–2018 disajikan pada Tabel 1.6.

Tabel 1.6.

Pejabat Struktural Yang Mengikuti Diklat Kepemimpinan
Kabupaten Klaten Tahun 2014-2018

NO	Jabatan (Eselon)	Jenis Diklat Struktural	Sudah Mengikuti Diklat Struktural														
			TAHUN 2014			TAHUN 2015			TAHUN 2016			TAHUN 2017			TAHUN 2018		
			LU LU S	JML PEJ ABA T	%	LU LU S	JML PEJ ABA T	%	LU LU S	JML PEJ ABA T	%	LU LU S	JML PEJ ABA T	%	LU LU S	JML PEJ ABA T	%
1	JPT (Eselon II)	Diklatpim Tingkat II	0	23	0	0	24	0	5	21	23,8	5	21	23,81	5	27	18,52
2	Administ rator (Eselon III)	Diklatpim Tingkat III	2	145	1,38	2	148	1,35	3	143	2,1	8	138	5,80	16	152	10,53
3	Pengawa s (Eselon IV)	Diklatpim Tingkat IV	3	541	0,55	2	602	0,33	2	520	0,38	16	495	3,23	48	452	10,62

Sumber: BKPPD Kabupaten Klaten, 2019.

Berdasarkan Tabel 1.6. sebagaimana tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa pejabat yang sudah mengikuti Diklat Kepemimpinan II sebanyak 18.52%, diklat kepemimpinan III 10.53 % dan diklat kepemimpinan IV 10.62 % yang menandakan masih dibutuhkan diklat kepemimpinan baik pejabat eselon II, III dan IV. Sedangkan dalam rangka peningkatan sumber daya aparatur terdapat data ASN yang telah mengikuti Diklat, BinteK dan Seminar tahun 2014–2018 disajikan pada Tabel 1.7.

Tabel 1.7.

Jumlah ASN yang Mengikuti Diklat, Bintek dan Seminar
Tahun 2014–2018

NO	PERMOHONAN	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Diklat Teknis sesuai Tupoksi	23	41	56	211	450
2.	Diklat Teknis Fungsional	28	27	36	47	312
3.	Bimbingan Teknis	61	89	80	42	58
4.	Seminar dan sejenisnya	14	24	-	-	-
JUMLAH		126	181	172	300	820

Sumber: BKPPD Kabupaten Klaten, 2019.

Berdasarkan Tabel 1.7. sebagaimana tersebut di atas, kondisi jumlah pegawai Kabupaten Klaten yang berjumlah 9.899 ASN dibandingkan dengan yang telah mengikuti diklat, bintek dan seminar hanya 8.28 %. Hal ini menandakan masih diperlukan peningkatan sumber daya aparatur agar kinerja pegawai meningkat.

1.5 Isu Strategis

Isu strategis yang menjadi prioritas pembangunan bagi Pemerintah Kabupaten Klaten, diantaranya:

1. Pendidikan Untuk Semua dan Peningkatan Moralitas

Isu belum optimalnya penanaman nilai-nilai moralitas, budi pekerti dan integritas diibaratkan bahwa pendidikan memiliki dua mata pisau, di satu sisi berorientasi pada kecerdasan dan iptek guna kemudahan dalam pemenuhan kebutuhan jasmaniah, di sisi lain berorientasi pada kecerdasan emosional dan spiritual guna kedamaian hidup, solidaritas dan kepedulian sosial.

Penunjang sisi yang pertama adalah adanya kesempatan dalam memperoleh pendidikan, sarana dan prasarana yang memadai, serta tenaga kependidikan yang berkualitas. Kesempatan yang sama tersebut berlaku baik laki-laki-perempuan, tua-muda, kaya maupun miskin, yang artinya bisa dijangkau oleh semua lapisan masyarakat. Menuju pendidikan Wajib belajar 12 tahun di Kabupaten Klaten, Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS), pembangunan gedung dan prasarana lainnya, merupakan contoh riil perhatian pemerintah terhadap pendidikan. Agar pendidikan bisa bermanfaat, kurikulum pendidikan juga harus mempertimbangkan kebutuhan dunia usaha dan spesifikasi potensi setiap pelaku/siswa.

Penunjang sisi yang kedua adalah pembentukan karakter manusia yang berbudi, agar mampu memilih yang baik, menghindari/mencegah perilaku yang salah. Sehingga perlunya pendidikan untuk semua, dan peningkatan moralitas menjadi upaya sinergis untuk menciptakan Kabupaten yang maju dan berdaya saing.

2. Pelayanan Kesehatan

Percepatan SDG's dan pencapaian target indikator kinerja SPM Kesehatan belum tercapai. Angka kematian bayi dan balita, status Gizi masyarakat, endemi Demam Berdarah, Flu Burung dan Chikungunya, angka kesakitan dan kematian diabetes militus, kardiovaskuler dan keganasan (kanker), kebiasaan merokok serta pola hidup tidak sehat lainnya menjadi sebagian dari masalah yang harus ditangani.

Kesehatan merupakan hak dasar yang harus dipenuhi, jaminan pelayanan kesehatan yang memuaskan bagi semua warga negara. Subsidi silang pun harus disadari oleh semua pengguna layanan kesehatan bahwa tanggung jawab pembangunan tidak hanya pada pemerintah, tetapi seluruh komponen masyarakat/swasta sesuai dengan kemampuannya.

3. Optimalisasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Isu reformasi birokrasi selama ini belum menyentuh akar permasalahan peningkatan pelayanan publik, dalam hal memperbaiki tata pemerintahan yang mencakup seluruh aspek manajemen (perencanaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan, pendayagunaan aparatur, pelaporan dan pertanggungjawaban) dengan pengertian:

- Dalam sistem perencanaan, kebijakan harus sinergis sejalan dengan kebutuhan dan kemampuan, terukur, efektif dan dapat dipertanggungjawabkan.
- Dalam hal kelembagaan, organisasi pemerintah daerah dibentuk secara ramping namun mampu mencakup keseluruhan urusan/kepentingan yang menjadi tanggung jawab pemerintah, jelas, tidak tumpang tindih dan memungkinkan kemudahan akses pelayanan terhadap publik.
- Penanganan berbagai permasalahan pemerintahan dan pembangunan (Penegakan Peraturan Daerah, dan Pencegahan Korupsi) yang sangat kompleks membutuhkan penempatan aparatur yang sesuai baik secara kualitas kompetensi maupun kuantitasnya. Pembinaan terhadap aparatur mesti terus dilakukan agar mampu menyikapi dinamika yang terjadi, responsif dengan dedikasi dan integritas yang tinggi untuk semata-mata

kepentingan umum. Selain itu, pembangunan juga membutuhkan aparatur dengan daya inisiasi dan inovasi yang baik untuk dapat mengejar ketertinggalan dan mengatasi keterpurukan atas kemiskinan dan instabilitas yang terjadi.

- Kelemahan SKPD dalam pelaporan dan pertanggungjawaban biasanya terletak dalam kemampuan penyediaan data, analisa dan model laporan yang tidak simpel. Kesadaran akan pentingnya data yang lengkap dan akurat hingga kearsipan sebagai dokumen pembuktian harus ditingkatkan.

4. Keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Isu keterbatasan anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk membiayai pembangunan daerah selalu terkait dengan pelaksanaan Otonomi Daerah bahwa Pemerintah Daerah harus berupaya meningkatkan pendapatan asli daerah dan mengurangi ketergantungan dari pemerintah pusat.

Sekalipun langkah dan kebijakan peningkatan pendapatan daerah telah diupayakan melalui intensifikasi pemungutan pajak/retribusi, penggalan potensi pendapatan dan perwujudan realisasi investasi, dan efisiensi dan efektivitas belanja daerah tetap saja keterbatasan anggaran menjadi masalah klasik. Anggaran berbasis kinerja, dan anggaran berbasis beban kerja belum bisa menjawab kebutuhan pembangunan, manakala penapisan permasalahan belum terurai terlebih dahulu.

5. Kemiskinan dan Pengangguran

Kemiskinan terjadi karena rendahnya kemampuan ekonomi masyarakat. Pendapatan perkapita penduduk Kabupaten Klaten yang masih rendah di banding dengan rerata Jawa Tengah, sementara tingkat inflasi yang masih relatif tinggi sangat memungkinkan terjadinya penurunan daya beli masyarakat, sehingga menimbulkan beban berat bagi masyarakat miskin. Langkah preventif dalam bentuk pemberdayaan dan langkah kuratif dalam bentuk jaminan sosial atas kebutuhan dasar mesti dilakukan. Sisi lain, masih terjadinya kesenjangan antar wilayah kecamatan yang memerlukan perhatian semua pihak.

Tingkat pengangguran terbuka yang terus meningkat selain disebabkan oleh dampak berkepanjangan krisis ekonomi dan bencana alam, juga disebabkan oleh rendahnya kualitas angkatan kerja yang tidak mampu bersaing dan tidak mampu menciptakan lapangan kerja mandiri. Disamping itu, lapangan kerja yang akan terus bertahan adalah terciptanyapangsa pasar yang besar dan memiliki daya saing produk, maka penerapan iptek dalam produksi dan bisnis serta peningkatan hubungan antara produsen lokal dengan pasar yang luas harus menjadi perhatian.

6. Ancaman Kerusakan Lingkungan, Permukiman Tak Sehat, dan Bencana Alam

Menurunnya tingkat kesuburan tanah dan kerusakan lingkungan hidup di kawasan penambangan bahan galian golongan C, dan menurunnya daya dukung lingkungan, kelestarian fungsi adalah sebagai akibat kurangnya pengendalian para pemangku-kepentingan dalam pemanfaatan, dan penataan struktur ruang. Kesalahan dalam tata guna lahan, bangunan, rumah tidak layak huni, lingkungan permukiman kumuh utamanya pada kawasan padat, penghijauan dan resapan air ke tanah serta penertiban perijinan perlu makin diperhatikan.

Dampak dari kesalahan tersebut akan meningkatnya potensi kerusakan lingkungan dan bencana non alam, bencana alam dan bencana sosial, menuntut kesiap-siagaan penanganan bencana dan dukungan sarana-prasarana makin dibutuhkan. Terutama perlunya pengelolaan Sumber daya alam dan lingkungan yang selaras dengan daya dukung dan daya tampung, mendesak hal yang mendesak untuk dilakukan.

7. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Perempuan

Isu adanya kekerasan dalam rumah tangga yang merebak akhir-akhir ini menyebabkan perlunya perlindungan anak dan perempuan, apalagi untuk mewujudkan Kabupaten Klaten LAYAK ANAK menjadi tantangan tersendiri. Kondisi tersebut dilatar-belakangi masih kurangnya keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan kebijakan publik, masih kurangnya kebijakan pembangunan yang berpihak pada perempuan dan anak, lemahnya kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak, serta sistem kesejahteraan dan perlindungan anak belum memadai.

8. Tuntutan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Isu tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik selama ini masih adanya masyarakat belum sejahtera, padahal azas dasar tujuan diselenggarakannya pemerintahan dan pembangunan adalah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, sehingga pemerintah dituntut untuk dapat menunjukkan kinerja terbaik yakni kemajuan pembangunan dan pelayanan yang dapat memuaskan publik.

Sehingga berbagai kebijakan pemerintah yang dikeluarkan dan harus dilaksanakan dalam rangka menyikapi tuntutan tersebut. Standar pelayanan (SPM, SPP, SOP) harus diterapkan, baik yang menyangkut sarana-prasarana, mekanisme/prosedur, SDM, keterbukaan informasi dan lain-lain. Kemudahan

perizinan, transparansi/kejelasan SOP, tidak adanya pungutan liar dan iklim yang kondusif, akan sangat menunjang kegairahan dalam berinvestasi.

9. Perlindungan Lahan Pangan Berkelanjutan

Isu lahan pangan berkelanjutan mencuat, karena penggunaan lahan di Kabupaten Klaten setiap tahunnya selalu berkurang seiring dengan penambahan jumlah penduduk, aktifitas penduduk dan perluasan kegiatan perekonomian. Perubahan tata guna lahan dari tanah pertanian berubah ke non pertanian, mengingat Kabupaten Klaten dinyatakan sebagai daerah penyangga pangan, maka perlindungan lahan pangan berkelanjutan dan kebutuhan untuk mempertahankan posisi sawah lestari menjadi mendesak. Adapun sawah lestari ditetapkan seluas 32.451 Ha yang tersebar di wilayah Kabupaten Klaten.

10. Penanganan Infrastruktur

Meningkatnya dinamika kehidupan sosial, ekonomi, budaya dan politik masyarakat serta pengembangan wilayah, menyebabkan semakin tinggi dan vitalnya peran infrastruktur sebagai sarana publik. Dalam hal ini, tidak terbatas pada infrastruktur fisik namun juga terintegrasi dengan infrastruktur non fisik dan teknologi informasi, sehingga ke depan partisipasi, transparansi dan ketepatan manfaat akan menjadi lebih baik. Tingginya laju pertumbuhan dan pesatnya kegiatan sosial ekonomi serta masih adanya kesenjangan antar wilayah, memerlukan pengembangan infrastruktur secara terpadu, integral dan lintas sektor yang sinergis dengan rencana tata ruang.

Belum optimalnya kondisi infrastruktur di Kabupaten Klaten dalam mengimbangi dinamika kebutuhan dan tuntutan masyarakat serta wilayah, berimplikasi pada beban masyarakat dalam penyediaan produksi, dan mobilisasi sumberdaya. Selain itu, pengembangan dan pembenahan sarana transportasi publik juga menjadi hal penting guna mengurangi beban arus distribusi dan akan berefek domino pada koneksitas antar wilayah yang semakin kuat.

Pembangunan infrastruktur sumberdaya air diarahkan untuk mewujudkan air sebagai *collective goods*. Pemanfaatan sumber-sumber air untuk kepentingan produksi dan konsumsi secara efektif dilakukan melalui perlindungan terhadap kawasan resapan air di daerah hulu dengan tetap memperhatikan keberlanjutan sumber-sumber air tersebut. Selain itu, pembangunan jaringan irigasi yang menunjang peningkatan produktivitas pertanian juga menjadi hal penting untuk tetap dilakukan dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan di Klaten.

Pengembangan infrastruktur teknologi informasi juga menjadi hal penting dan menjadi bagian dari pembangunan infrastruktur secara utuh dan berkelanjutan. Namun demikian, pertumbuhan dan kegiatan sosial ekonomi juga perlu mempertimbangkan kemampuan daya tampung dan daya dukung lingkungan hidup. Hal ini dilakukan agar dapat menjamin keutuhan lingkungan hidup guna menjaga keselamatan, kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan akan datang. Pembangunan lingkungan hidup diarahkan untuk pengendalian pencemaran dan penanganan kerusakan lingkungan hidup melalui upaya rehabilitasi dan pemulihan sumber daya alam.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Rencana strategis merupakan bagian penting dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) karena menjadi dasar pemikiran dalam penajaman dan penyelarasan antara visi, misi dan arah pembangunan daerah. Penyajian analisis dalam bagian permasalahan pembangunan yang mengawali bagian analisis isu-isu strategis, diharapkan akan dapat menjelaskan isu-isu strategis yang akan menentukan kinerja pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Klaten dalam kurun waktu Tahun 2016-2021.

BAB II PERENCANAAN KINERJA, berisi :
2.1 Rencana Strategis
2.2 Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2018
2.3 Program Pendukung Pencapaian Sasaran

2.1.1 Visi dan Misi

Visi sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, khususnya dalam Pasal 1, angka 12 disebutkan bahwa visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir perencanaan. Sehingga rumusan Visi Pembangunan Nasional Tahun 2005-2025 sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 adalah: *“Indonesia yang Maju, Mandiri, Adil dan Makmur”*.

Visi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sesuai Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025, dengan Visi: *“Jawa Tengah yang Mandiri, Maju, Sejahtera dan Lestari”*.

Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7

Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025 adalah: “*Terwujudnya Masyarakat Klaten Sejahtera Yang Berketuhanan, Cerdas, Mandiri dan Berbudaya*”.

Belajar dari sejarah, dan berangkat dari potensi dan peluang yang dimiliki, serta untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang dirumuskan dalam RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 adalah:

MEWUJUDKAN KABUPATEN KLATEN YANG MAJU, MANDIRI DAN BERDAYA SAING

Dasar Filosofi Misi RPJMD Kab. Klaten Tahun 2016–2021, yakni:

- 
- Pertama* : **Redi – tinamping**, artinya seorang pemimpin harus bisa aju-ajer dengan masyarakat.
 - Kedua* : **Jiwan – danarta**, artinya seorang pemimpin harus mampu membaca tanda-tanda zaman. Rumusan RPJM yang kita susun, tak lebih sebagai aktualisasi diri membaca tanda-tanda zaman.
 - Ketiga* : **Lir – ginelar**, artinya dalam mengambil keputusan harus dimusyawarahkan terlebih dahulu. Itulah mengapa perlunya Musrenbangda RPJM.
 - Keempat* : **Pitraya – inyika**, artinya jiwa pengabdian seorang pemimpin harus dilandasi adanya semangat untuk melayani. Itulah maknanya semangat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kabupaten diwajibkan fokus pada urusan pelayanan dasar.
 - Kelima* : **Andaya – wilang**, artinya seorang pemimpin jangan mengumbar janji, dan memelihara rasa “ewuh pakewuh” tetapih fokus pada tujuan semula, dalam bahasa Permendagri: aspek kesejahteraan, pelayanan publik, dan daya saing daerah harus tetap sebagai arah kebijakan pembangunan daerah.
 - Keenam* : **Surya – sribhawanti**, artinya kehadiran negara harus menjadi pelindung peradapan.
 - Ketujuh* : **Rohartaya**, artinya selalu harus insaf dan tawakal.
 - Kedelapan* : **Traju – tresna**, artinya arif dan bijaksana

14

Adapun beberapa penjelasan terhadap visi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Klaten, diartikan sebagai suatu daerah otonom, yang mempunyai batas-batas wilayah yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dan kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Maju, yang dimaksud maju adalah kondisi bahwa masyarakat Kabupaten Klaten dapat tercukupi kebutuhan hidupnya secara adil dan merata, baik *kebutuhan lahiriah* yang meliputi: sandang, pangan, papan, dan kesehatan, maupun *kebutuhan batiniah* yang meliputi rasa aman, tentram, dan damai.

3. Mandiri, yang dimaksud mandiri adalah bahwa masyarakat Kabupaten Klaten mampu bertumpu pada kondisi, potensi, dan kemampuan sendiri, tanpa harus meninggalkan kerjasama dengan para pihak untuk melaksanakan pembangunan.

4. **Berdaya saing**, yang dimaksud berdaya saing adalah bahwa masyarakat Kabupaten Klaten yang ingin dituju adalah masyarakat yang tidak tergantung pada pihak lain dan memiliki keunggulan komparatif.

Misi

Misi menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, khususnya Pasal 1 angka 13 adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dengan kata lain, misi adalah rumusan mengenai apa-apa yang diyakini dapat dilakukan dalam rangka mewujudkan visi.

Sedangkan Misi Pembangunan Daerah sebagai implementasi Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2016-2021 yang dirumuskan kedalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

- Misi 1 : Mewujudkan sumber daya manusia yang cerdas, sehat dan berbudaya;
- Misi 2 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih;
- Misi 3 : Meningkatkan dan mengembangkan ekonomi daerah yang lebih produktif, kreatif, inovatif dan berdaya saing berlandaskan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi lokal;
- Misi 4 : Meningkatkan kapasitas infrastruktur publik dan penyediaan kebutuhan sarana prasarana dasar sosial masyarakat;
- Misi 5 : Meningkatkan kapasitas pengelolaan dan kelestarian sumber daya alam yang selaras dengan tata ruang wilayah;
- Misi 6 : Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang berakhlak dan berkepribadian;
- Misi 7 : Meningkatkan kapasitas pengarusutamaan gender dan perlindungan anak;
- Misi 8 : Meningkatkan kapasitas pelayanan publik.

2.1.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Sementara sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Sasaran memuat penjabaran visi dan misi yang lebih terukur dalam jangka waktu perencanaan, serta memuat besaran-besaran kuantitatif yang menterjemahkan rumusan tujuan. Sehingga adanya rumusan sasaran diharapkan dapat membantu dan memandu dalam mempermudah perumusan indikator kinerja.

Guna mewujudkan visi dan misi pembangunan tersebut, maka pembangunan jangka menengah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 memiliki tujuan, sasaran, dan arah kebijakan yang dijabarkan sebagai berikut.

Misi 1

Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Sehat dan Berbudaya

Misi ini didukung dengan 6 (enam) tujuan, yaitu:

- Tujuan 1 : Terwujudnya pemenuhan kebutuhan pendidikan bagi masyarakat
 - Sasaran 1 : Terwujudnya pemenuhan kebutuhan pendidikan usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan non formal.

- Tujuan 2 : Mewujudkan kualitas derajat kesehatan masyarakat
 - Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat dan menurunnya angka kematian, angka kesakitan dan kecacatan.
 - Sasaran 2 : Meningkatnya pemanfaatan pelayanan Kerumahsakititan oleh masyarakat dan menurunnya angka kematian di Rumah Sakit.

- Tujuan 3 : Menurunkan tingkat kemiskinan
 - Sasaran 1 : Meningkatnya upaya pencegahan permasalahan sosial dan aksesibilitas PMKS dalam memperoleh pelayanan dan rehabilitasi yang berperspektif HAM.

- Tujuan 4 : Menurunkan Laju Pertumbuhan Penduduk
 - Sasaran 1 : Menurunnya angka kelahiran (*Total Fertility Rate*).

Tujuan 5 : Meningkatkan Peran Serta, Kesadaran dan Pemberdayaan Masyarakat untuk Hidup Sehat, Berprestasi dan Berbudaya

Sasaran 1 : Meningkatnya Hasil Pengembangan dan Pembinaan Pemuda dan Olahraga.

Sasaran 2 : Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan dan Pelestarian Seni Budaya Daerah, Kawasan Cagar Budaya, Situs dan benda Cagar Budaya.

Tujuan 6 : Meningkatkan minat baca masyarakat

Sasaran 1 : Meningkatnya kunjungan masyarakat ke perpustakaan

Misi 2

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih

Misi ini didukung dengan 4 (empat) tujuan, yaitu:

Tujuan 1 : Meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah daerah

Sasaran 1 : Meningkatnya profesionalisme aparatur pemerintah daerah.

Sasaran 2 : Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah.

Sasaran 3 : Meningkatnya kualitas layanan dan akuntabilitas kinerja sekretariat DPRD

Sasaran 4 : Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah

Tujuan 2 : Meningkatnya pengelolaan dan penataan arsip daerah

Sasaran 1 : Meningkatnya tata kelola arsip SKPD

Tujuan 3 : Meningkatnya tata kelola kelembagaan desa dan pembinaan administrasi pemerintahan desa.

Sasaran 1 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan desa yang profesional, transparan dan akuntabel.

Tujuan 4 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Sasaran 1 : Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah.

- Sasaran 2 : Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan otonomi daerah.
- Sasaran 3 : Meningkatkan koordinasi penataan peraturan perundang undangan serta bantuan hukum dan HAM.
- Sasaran 4 : Meningkatkan koordinasi pelaksanaan pembangunan.
- Sasaran 5 : Terwujudnya pelayanan pengadaan barang dan jasa yang kredibel.
- Sasaran 6 : Meningkatkan fasilitasi koordinasi bidang kehumasan dan keprotokolan.
- Sasaran 7 : Meningkatkan fasilitasi dan pengawalan kebijakan daerah bidang perekonomian.
- Sasaran 8 : Meningkatkan koordinasi kesejahteraan rakyat.

Misi 3

Meningkatkan dan Mengembangkan Ekonomi Daerah yang Lebih Produktif, Kreatif, Inovatif dan Berdaya Saing Berlandaskan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Potensi Lokal;

Misi ini didukung dengan 5 (lima) tujuan, yaitu:

- Tujuan 1 : Meningkatkan Perekonomian Daerah yang Berdaya saing untuk kesejahteraan Masyarakat.
 - Sasaran 1 : Meningkatkan ketersediaan Pangan Beragam, bergizi seimbang dan meningkatnya kontribusi sektor pertanian terhadap pertumbuhan ekonomi daerah
- Tujuan 2 : Meningkatkan pemberdayaan dan perekonomian yang produktif, kreatif, inovatif dan berdaya saing serta mengoptimalkan jaringan penanggulangan kemiskinan di desa.
 - Sasaran 1 : Meningkatkan peran LEM, LED dan pengembangan potensi TTG di desa dalam penanggulangan kemiskinan
- Tujuan 3 : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat.
 - Sasaran 1 : Meningkatkan Produktifitas, Nilai Tambah dan Daya Saing Sektor Kepariwisata.

- Sasaran 2 : Meningkatnya nilai tambah, produktifitas dan daya saing pada Urusan Perdagangan, Koperasi dan UKM.
- Sasaran 3 : Meningkatnya penerapan inovasi dalam pembangunan daerah.
- Sasaran 4 : Meningkatnya nilai tambah, produktifitas dan daya saing sektor penanaman modal.
- Tujuan 4 : Menurunkan tingkat pengangguran terbuka.
 - Sasaran 1 : Meningkatnya nilai tambah, produktifitas dan daya saing sektor Ketenagakerjaan.
 - Sasaran 2 : Meningkatnya perlindungan sektor ketenagakerjaan
- Tujuan 5 : Meningkatnya daya saing produk industri daerah.
 - Sasaran 1 : Meningkatnya nilai tambah, produktifitas, dan daya saing sektor Perindustrian.

Misi 4

Meningkatkan kapasitas infrastruktur publik dan penyediaan kebutuhan sarana prasarana dasar sosial masyarakat;

Misi ini didukung dengan 1 (satu) tujuan, yaitu:

- Tujuan 1 : Meningkatkan pemenuhan infrastruktur publik dan sarana prasarana dasar masyarakat.
 - Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur publik dan sarana prasarana dasar masyarakat.
 - Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas manajemen rekayasa lalu lintas dan penyelenggaraan angkutan.
 - Sasaran 3 : Meningkatnya kualitas perumahan dan kawasan permukiman

Misi 5

Meningkatkan Kapasitas Pengelolaan dan Kelestarian Sumber Daya Alam yang Selaras dengan Tata Ruang Wilayah;

Misi ini didukung dengan 2 (dua) tujuan, yaitu:

- Tujuan 1 : Meningkatkan kelestarian sumber daya alam.
 - Sasaran 1 : Terkendalinya pemanfaatan kawasan sesuai dengan konsep tata ruang.
 - Sasaran 2 : Terjaganya kualitas lingkungan hidup.

Tujuan 2 : Mewujudkan pengurangan resiko bencana.

Sasaran 1 : Terwujudnya pengurangan kerentanan resiko bencana.

Misi 6

Mewujudkan Tatanan Kehidupan Masyarakat yang Berakhlak dan Berkepribadian;

Misi ini didukung dengan 3 (tiga) tujuan, yaitu:

Tujuan 1 : Meningkatkan kualitas tatanan kehidupan masyarakat yang mempunyai jati diri dan berwawasan kebangsaan.

Sasaran 1 : Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap politik dan demokrasi.

Tujuan 2 : Meningkatkan pengembangan sosial budaya dan lembaga kemasyarakatan.

Sasaran 1 : Meningkatnya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan kelompok pelestarian adat dalam pengembangan kehidupan sosial budaya.

Tujuan 3 : Menciptakan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

Sasaran 1 : Terwujudnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

Misi 7

Meningkatkan Kapasitas Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak;

Misi ini didukung dengan 1 (satu) tujuan, yaitu:

Tujuan 1 : Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan dan kualitas pemenuhan hak anak serta perlindungan khusus anak.

Sasaran 1 : Meningkatnya kapasitas perempuan, perlindungan perempuan dan anak.

Misi 8

Meningkatkan Kapasitas Pelayanan Publik;

Misi ini didukung dengan 2 (dua) tujuan, yaitu:

Tujuan 1 : Meningkatkan kualitas layanan masyarakat.

Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas layanan perhubungan.

Sasaran 2 : Meningkatnya pelayanan perijinan satu pintu yang tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran dan tepat manfaat.

Sasaran 3 : Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan yang berkualitas.

Tujuan 2 : Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program transmigrasi.

Sasaran 1 : Pengembangan ketransmigrasian.

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran dan arah kebijakan yang telah ditetapkan, selanjutnya dirumuskan IKU (indikator kinerja utama) Kabupaten Klaten sebagai ukuran keberhasilan untuk mencapai tujuan, dan merupakan ikhtisar hasil (outcome) dari berbagai program prioritas sebagai penjabaran tugas pokok dan fungsi organisasi perangkat daerah.

Perumusan IKU Kabupaten Klaten ditetapkan dengan Peraturan Bupati Klaten Nomor 34 Tahun 2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021. Namun dengan berlakunya peraturan Mendagri No 86 Tahun 2017, IKU menjadi bagian tidak terpisahkan dari dokumen RPJMD yaitu Bab VII. Oleh karena itu, IKU Kab. Klaten tercantum dalam Peraturan Daerah Kab. Klaten Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kab. Klaten Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah Kab. Klaten 2016-2021. Tujuan penetapan IKU adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Adapun sasaran strategis Indikator Kinerja Utama Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 adalah sebagaimana Tabel 2.1

Tabel 2.1

**Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja
Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	
(1)	(2)	(3)	
1	Terwujudnya pemenuhan kebutuhan pendidikan usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan non formal	1.1	Prosentase sekolah dasar yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan
		1.2	Prosentase sekolah menengah pertama yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan
2	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat dan menurunnya angka kematian , angka kesakitan dan kecacatan	2.1	Kasus kematian Ibu
		2.2	Angka Kematian Bayi
		2.3	Angka kematian Balita
		2.4	Prevalensi gizi buruk (BB/U)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	
(1)	(2)	(3)	
3	Meningkatnya pemanfaatan pelayanan Kerumahsakitkan oleh masyarakat dan menurunnya angka kematian di Rumah Sakit.	3.1	Usia Harapan Hidup
4	Meningkatnya upaya pencegahan permasalahan sosial dan aksesibilitas PMKS dalam memperoleh pelayanan dan rehabilitasi yang berperspektif HAM	4.1	Persentase penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial
		4.2	Persentase penguatan kapasitas PSKS
		4.3	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
5	Menurunnya angka kelahiran (<i>Total Fertility Rate</i>)	5.1	Angka Kelahira (<i>Total Fertility Rate</i>) / TFR
6	Meningkatnya Hasil Pengembangan dan Pembinaan Pemuda dan Olahraga.	6.1	Persentase Kenaikan Prestasi Pemuda
		6.2	Persentase Kenaikan Prestasi Olahraga
7	Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan dan Pelestarian Seni Budaya Daerah, Kawasan Cagar Budaya, Situs dan benda Cagar Budaya.	7.1	Persentase Kenaikan Penyelenggaraan Pagelaran Seni dan Budaya
		7.2	Persentase Peningkatan Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan
8	Meningkatnya kunjungan masyarakat ke perpustakaan	8.1	Prosentase kenaikan kunjungan masyarakat
9	Meningkatnya profesionalisme aparatur pemerintah daerah	9.1	Indeks Profesionalitas ASN
10	Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah	10.1	Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah
11	Meningkatnya kualitas layanan dan akuntabilitas kinerja sekretariat DPRD	11.1	Persentase raperda yang disahkan tepat waktu
12	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	12.1	Tingkat Konsistensi dan ketepatan waktu Perencanaan
13	Meningkatnya tata kelola arsip SKPD	13.1	Prosentase kenaikan SKPD mengelola arsip secara baku
14	Meningkatkan tata kelola pemerintahan desa yang profesional, transparan dan akuntabel	14.1	Prosentase penyelenggaraan pemerintah desa yang profesional, transparan dan akuntabel
15	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah	15.1	Level Maturitas SPIP
		15.2	Level Kapabilitas APIP
		15.3	Nilai Akuntabilitas Kinerja pemerintah
16	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan otonomi daerah	16.1	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)
17	Meningkatnya koordinasi penataan peraturan perundang undangan serta bantuan hukum dan HAM	17.1	Persentase tercapainya penyusunan
		17.2	produk hukum dan penanganan perkara
18	Meningkatnya koordinasi pelaksanaan pembangunan	18.1	Persentase kesesuaian capaian pelaksanaan pembangunan (fisik dan keuangan) dengan target (rencana)
19	Terwujudnya pelayanan pengadaan barang dan jasa yang kredibel	19.1	Persentase pengadaan barang dan jasa secara elektronik yang sesuai regulasi

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	
(1)	(2)	(3)	
20	Meningkatnya fasilitasi koordinasi bidang kehumasan dan keprotokolan	20.1	Persentase publikasi kebijakan dan kegiatan kepala daerah
		20.2	Persentase dokumentasi kegiatan kepala daerah
		20.3	Persentase pelayanan keprotokolan kegiatan kepala daerah
21	Meningkatnya fasilitasi dan pengawalan kebijakan daerah bidang perekonomian	21.1	Tingkat Inflasi YoY
22	Meningkatnya koordinasi kesejahteraan rakyat	22.1	Persentase keterlibatan stakeholder dalam pelaksanaan pembangunan bidang kesra
23	Meningkatnya ketersediaan Pangan Beragam, bergizi seimbang dan meningkatnya kontribusi sektor pertanian terhadap pertumbuhan ekonomi daerah	23.1	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB
24	Meningkatnya peran LEM, LED dan pengembangan potensi TTG di desa dalam penanggulangan kemiskinan	24.1	Prosentase desa yang memiliki LEM, LED dan posyantek
25	Meningkatnya Produktifitas, Nilai Tambah dan Daya Saing Sektor Kepariwisata	25.1	Persentase Peningkatan PAD dari sektor Pariwisata
26	Meningkatnya nilai tambah, produktifitas dan daya saing pada Urusan Perdagangan, Koperasi dan UKM	26.1	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB
		26.2	Persentase UMKM yang memiliki daya saing
27	Meningkatnya penerapan inovasi dalam pembangunan daerah	27.1	Prosentase inovasi yang diterapkan
28	Meningkatnya nilai tambah, produktifitas dan daya saing sektor penanaman modal	28.1	Rasio daya serap tenaga kerja (PMDN/PMA)
		28.2	Persentase pertumbuhan realisasi investasi (PMDN/PMA)
29	Meningkatnya nilai tambah, produktifitas dan daya saing sektor Ketenagakerjaan	29.1	Rasio penduduk yang bekerja
		29.2	Angka partisipasi angkatan kerja
30	Meningkatnya perlindungan sektor ketenagakerjaan	30.1	Besaran pekerja/ buruh yang menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan
31	Meningkatnya nilai tambah, produktifitas, dan daya saing sektor Perindustrian	31.1	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB
		31.2	Persentase IKM yang memiliki daya saing
32	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur publik dan sarana prasarana dasar masyarakat	32.1	Indeks layanan infrastruktur
33	Meningkatnya kualitas manajemen rekayasa lalu lintas dan penyelenggaraan angkutan	33.1	Tingkat Pelayanan Infrastruktur Perhubungan
34	Meningkatnya kualitas perumahan dan kawasan permukiman	34.1	Indeks kualitas perumahan dan kawasan permukiman
35	Terkendalinya pemanfaatan kawasan sesuai dengan konsep tata ruang	35.1	Ketaatan terhadap RTRW
36	Terjaganya kualitas lingkungan hidup	36.1	Indeks kualitas air
		36.2	Indeks kualitas udara
		36.3	Indeks tutupan vegetasi (lahan)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	
(1)	(2)	(3)	
37	Terwujudnya pengurangan kerentanan resiko bencana	37.1	Kelas Indeks kapasitas bencana
38	Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap politik dan demokrasi	38.1	Indeks demokrasi
39	Meningkatnya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan kelompok pelestarian adat dalam pengembangan kehidupan sosial budaya	39.1	Rata - rata kader lembaga kemasyarakatan dan kelompok pelestarian adat dalam pengembangan sosial budaya yang aktif (mendapat pembinaan dan pelatihan)
40	Terwujudnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.	40.1	Indeks ketertiban masyarakat
41	Meningkatnya kapasitas perempuan, perlindungan perempuan dan anak	41.1	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
		41.2	Capaian Kabupaten Layak Anak (KLA)
42	Meningkanya kualitas layanan perhubungan	42.1	Indeks kepuasan layanan perhubungan
43	Meningkatnya pelayanan perijinan satu pintu yang tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran dan tepat manfaat	43.1	Nilai Survy kepuasan masyarakat
44	Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan yang berkualitas	44.1	Indeks kepuasan layanan masyarakat
45	Pengembangan ketransmigrasian	45.1	Persentase besaran peningkatan minat transmigrasi

Sumber: Perubahan RPJMD Kabupaten Klaten 2016-2021.

2.1.3 Pentahapan dan Prioritas Pembangunan Daerah

Untuk mewujudkan visi bupati terpilih pada periode Tahun 2016-2021 yakni ***Mewujudkan Kabupaten Klaten yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing*** dengan menetapkan 8 (delapan) butir misi sebagai penjabaran atas visi dalam rangka perwujudan *ultimate goal*. Maka agar *ultimate goal* ini jelas sasarannya, dan dapat diimplementasikan perlu disusun pentahapan pembangunan daerah sebagai *milestone* (sasaran antara) dalam mewujudkan visi.

Gambaran tema/agenda pembangunan dari tahun 2017-2021 dapat disajikan dalam Diagram 2.1.

TEMA/AGENDA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2017-2020

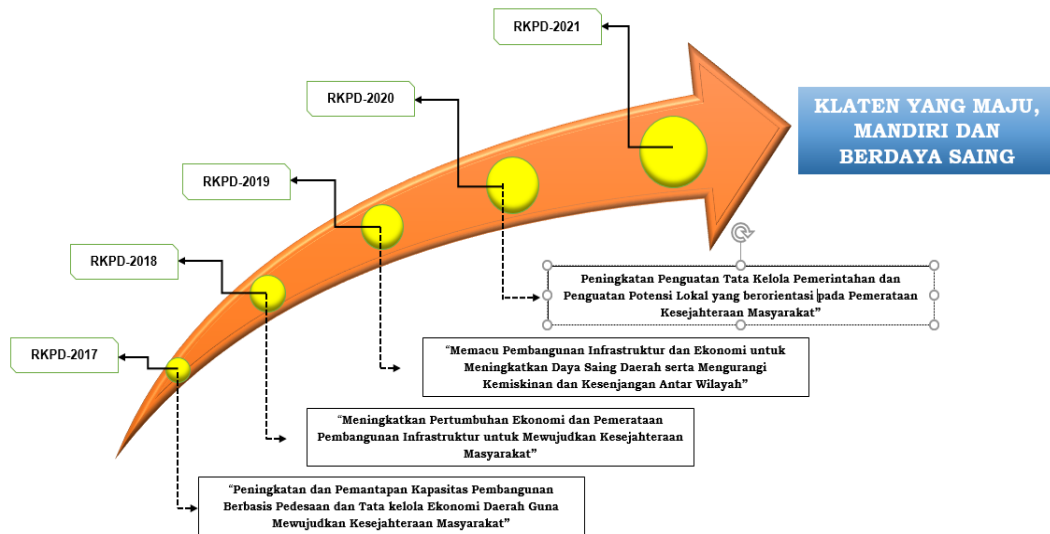
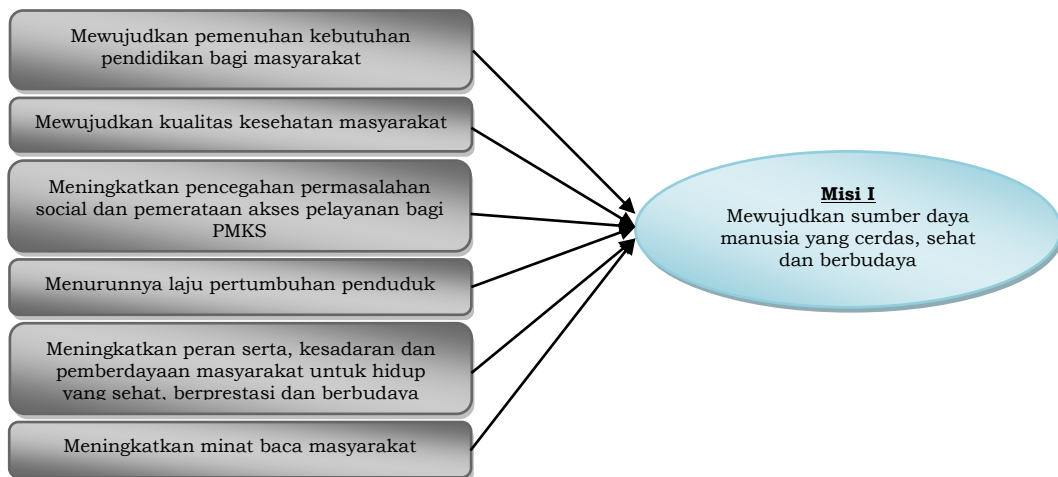
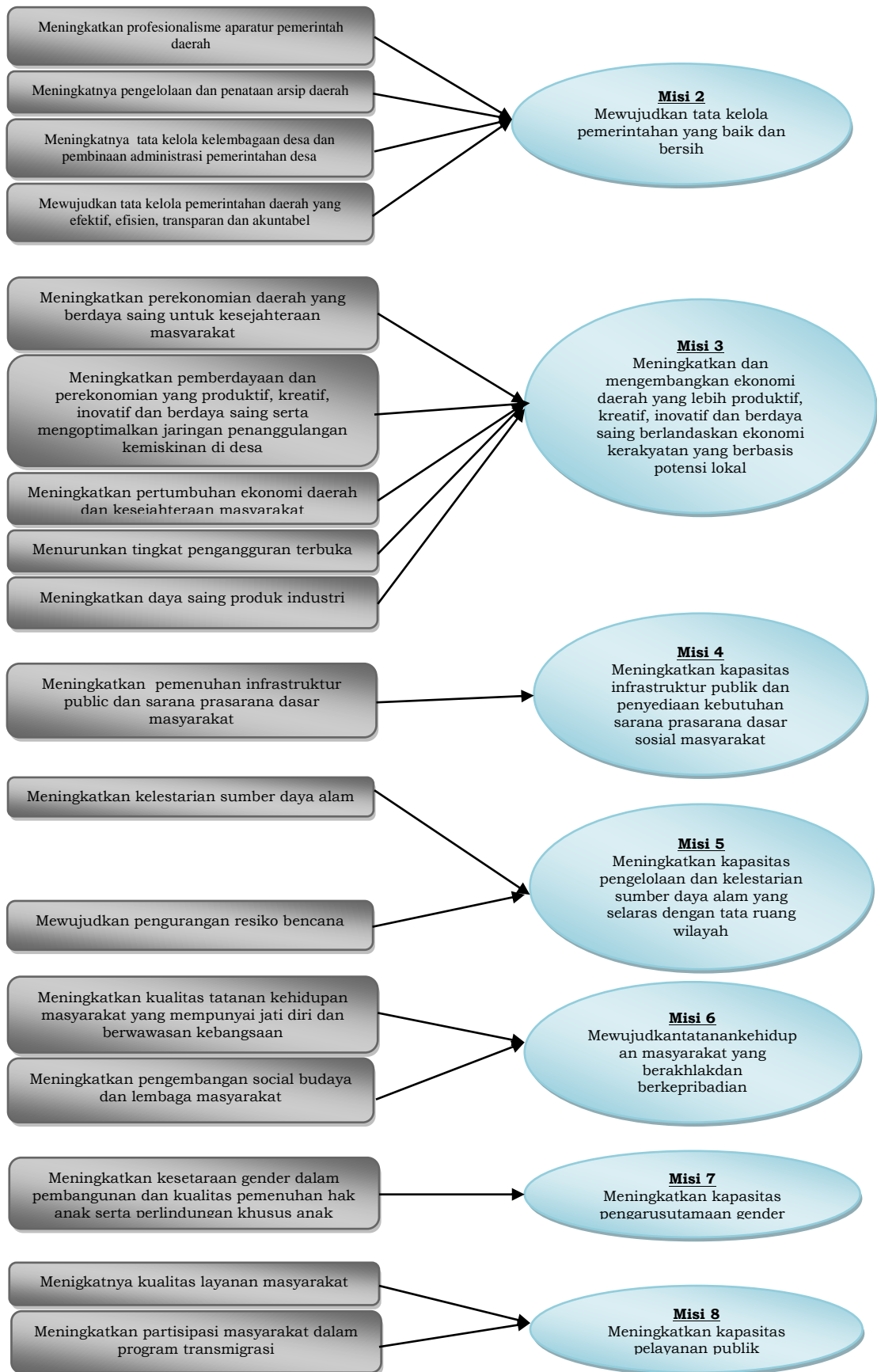


Diagram 2.1. Tema/Agenda Pembangunan Kabupaten Klaten Tahun 2017-2021

Mendasarkan pada arah tema/agenda pembangunan tersebut, perlu dijabarkan ke dalam prioritas pembangunan daerah yang disusun dengan memperhatikan tujuan dan sasaran. Pemerintah Kabupaten Klaten untuk setiap tahunnya.

Diagran 2.2 Korelasi antara Tujuan dan Misi Pembangunan Daerah





2.2 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2018

Program Prioritas sebagaimana tersebut di atas, untuk memberi gambaran yang lebih sistematis dan terukur ditentukanlah target kinerja pencapaian sasaran dalam jangka menengah. Hal ini dimaknai, bahwa target pencapaian tahunan merupakan bagian dari target yang lebih strategis.

Berangkat dari pengertian ini, maka Perjanjian Kinerja dimaknai sebagai lembaran/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program prioritas yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja diharapkan tercipta sinergisitas antara pemberi mandat dan penerima amanah untuk sama-sama mewujudkan target kinerja yang telah disepakati.

Perjanjian Kinerja Tahun 2018 ditetapkan mengacu pada RPJMD, RKPD 2017, IKU dan APBD. Adapun Perjanjian Kinerja Kabupaten Klaten Tahun 2018 sebagaimana Tabel 2.2.

Tabel 2.2.

Perjanjian Kinerja Kabupaten Klaten Tahun 2018

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Target
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
1	Terwujudnya pemenuhan kebutuhan pendidikan usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan non formal	1.1	Prosentase sekolah dasar yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan	%	48,00
		1.2	Prosentase sekolah menengah pertama yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan	%	80,00
2	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat dan menurunnya angka kematian , angka kesakitan dan kecacatan	2.1	Kasus kematian Ibu	Kasus	17
		2.2	Angka Kematian Bayi	per 1000 KH	10,13
		2.3	Angka kematian Balita	per 1000 KH	1,67
		2.4	Prevalensi gizi buruk (BB/U)	%	0,73
3	Meningkatnya pemanfaatan pelayanan Kerumahsakitatan oleh masyarakat dan menurunnya angka kematian di Rumah Sakit.	3.1	Usia Harapan Hidup	Tahun	76,62
4	Meningkatnya upaya pencegahan permasalahan sosial dan aksesibilitas PMKS dalam memperoleh pelayanan dan rehabilitasi yang berperspektif HAM	4.1	Persentase penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	%	83
		4.2	Persentase penguatan kapasitas PSKS	%	96
		4.3	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	%	13,3
		4.4	Persentase penduduk miskin	%	14,12

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Target
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
5	Menurunnya angka kelahiran (<i>Total Fertility Rate</i>)	5.1	Angka Kelahira (<i>Total Fertility Rate</i>) / TFR		2,16
6	Meningkatnya Hasil Pengembangan dan Pembinaan Pemuda dan Olahraga.	6.1	Persentase Kenaikan Prestasi Pemuda	%	10
		6.2	Persentase Kenaikan Prestasi Olahraga	%	5
7	Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan dan Pelestarian Seni Budaya Daerah, Kawasan Cagar Budaya, Situs dan benda Cagar Budaya.	7.1	Persentase Kenaikan Penyelenggaraan Pagelaran Seni dan Budaya	%	6
		7.2	Persentase Peningkatan Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	%	10
8	Meningkatnya kunjungan masyarakat ke perpustakaan	8.1	Prosentase kenaikan kunjungan masyarakat	%	5
9	Meningkatnya profesionalisme aparatur pemerintah daerah	9.1	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	82,06
10	Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah	10.1	Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	Opini	WDP
11	Meningkatnya kualitas layanan dan akuntabilitas kinerja sekretariat DPRD	11.1	Persentase Raperda yang disahkan tepat waktu	%	85
12	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	12.1	Tingkat Konsistensi dan ketepatan waktu Perencanaan	%	100
13	Meningkatnya tata kelola arsip OPD	13.1	Prosentase kenaikan OPD mengelola arsip secara baku	%	5
14	Meningkatkan tata kelola pemerintahan desa yang profesional, transparan dan akuntabel	14.1	Prosentase penyelenggaraan pemerintah desa yang profesional, transparan dan akuntabel	%	46
15	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah	15.1	Level Maturitas SPIP	Tingkat	2
		15.2	Level Kapabilitas APIP	Tingkat	3
		15.3	Nilai Akuntabilitas Kinerja pemerintah	Angka	64 (B)
16	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan otonomi daerah	16.1	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	Angka	2,9
17	Meningkatnya koordinasi penataan peraturan perundang undangan serta bantuan hukum dan HAM	17.1	Persentase tercapainya penyusunan produk hukum dan penanganan perkara	%	85
		17.2	Indeks kabupaten peduli HAM	%	75
18	Meningkatnya koordinasi pelaksanaan pembangunan	18.1	Persentase kesesuaian capaian pelaksanaan pembangunan (fisik dan keuangan) dengan target (rencana)	%	90
19	Terwujudnya pelayanan pengadaan barang dan jasa yang kredibel	19.1	Persentase pengadaan barang dan jasa secara elektronik yang sesuai regulasi	%	100

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Target
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
20	Meningkatnya fasilitasi koordinasi bidang kehumasan dan keprotokolan	20.1	Persentase publikasi kebijakan dan kegiatan kepala daerah	%	90
		20.2	Persentase dokumentasi kegiatan kepala daerah	%	90
		20.3	Persentase pelayanan keprotokolan kegiatan kepala daerah	%	94
21	Meningkatnya fasilitasi dan pengawalan kebijakan daerah bidang perekonomian	21.1	Tingkat Inflasi YoY	%	3,5 (± 1)
22	Meningkatnya koordinasi kesejahteraan rakyat	22.1	Persentase keterlibatan stakeholder dalam pelaksanaan pembangunan bidang kesra	%	90
23	Meningkatnya ketersediaan Pangan Beragam, bergizi seimbang dan meningkatnya kontribusi sektor pertanian terhadap pertumbuhan ekonomi daerah	23.1	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	%	12,25
24	Meningkatnya peran LEM, LED dan pengembangan potensi TTG di desa dalam penanggulangan Kemiskinan	24.1	Prosentase desa yang memiliki LEM, LED dan posyantek	%	35
25	Meningkatnya Produktifitas, Nilai Tambah dan Daya Saing Sektor Kepariwisata	25.1	Persentase Peningkatan PAD dari sektor Pariwisata	%	25
26	Meningkatnya nilai tambah, produktifitas dan daya saing pada Urusan Perdagangan, Koperasi dan UKM	26.1	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	18,94
		27.2	Persentase UMKM yang memiliki daya saing	%	9
27	Meningkatnya penerapan inovasi dalam pembangunan daerah	27.1	Prosentase inovasi yang diterapkan	%	72,73
28	Meningkatnya nilai tambah, produktifitas dan daya saing sektor penanaman modal	28.1	Rasio daya serap tenaga kerja (PMDN/PMA):		
			PMDN	%	417
		PMA	%	294	
		28.2	Persentase pertumbuhan realisasi investasi (PMDN/PMA):		
PMDN	%		1,98		
PMA	%	2,45			
29	Meningkatnya nilai tambah, produktifitas dan daya saing sektor Ketenagakerjaan	29.1	Rasio penduduk yang bekerja	%	1,03
		29.2	Angka partisipasi angkatan kerja	%	69
30	Meningkatnya perlindungan sektor ketenagakerjaan	30.1	Besaran pekerja/ buruh yang menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan	%	87,60

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Target
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
31	Meningkatnya nilai tambah, produktifitas, dan daya saing sektor Perindustrian	31.1	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	%	34,86
		31.2	Persentase IKM yang memiliki daya saing	%	5,50
32	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur publik dan sarana prasarana dasar masyarakat	32.1	Indeks layanan infrastruktur	Indeks	29,42
33	Meningkatnya kualitas manajemen rekayasa lalu lintas dan penyelenggaraan angkutan	33.1	Tingkat Pelayanan Infrastruktur Perhubungan	Tingkat	45,87
34	Meningkatnya kualitas perumahan dan kawasan permukiman	34.1	Indeks kualitas perumahan dan kawasan permukiman	Indeks	70,01
35	Terkendalinya pemanfaatan kawasan sesuai dengan konsep tata ruang	35.1	Ketaatan terhadap RTRW	%	78,98
36	Terjaganya kualitas lingkungan hidup	36.1	Indeks kualitas air	Indeks	30,68
		36.2	Indeks kualitas udara	Indeks	74,68
		36.3	Indeks tutupan vegetasi (lahan)	Indeks	48,82
37	Terwujudnya pengurangan kerentanan resiko bencana	37.1	Kelas Indeks kapasitas bencana	Indeks	sedang
38	Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap politik dan demokrasi	38.1	Indeks demokrasi	Indeks	75
39	Meningkatnya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan kelompok pelestarian adat dalam pengembangan kehidupan sosial budaya	39.1	Rata - rata kader lembaga kemasyarakatan dan kelompok pelestarian adat dalam pengembangan sosial budaya yang aktif (mendapat pembinaan dan pelatihan)	Klpk	49
40	Terwujudnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.	40.1	Indeks ketertiban masyarakat	Indeks	95
41	Meningkatnya kapasitas perempuan, perlindungan perempuan dan anak	41.1	Indeks pemberdayaan gender (IDG)	Indeks	60,16
		41.2	Capaian Kabupaten Layak Anak (KLA)	Kelas	Nidya
42	Meningkanya kualitas layanan perhubungan	42.1	Indeks kepuasan layanan perhubungan	Indeks	79,016
43	Meningkatnya pelayanan perijinan satu pintu yang tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran dan tepat manfaat	43.1	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perizinan	%	79,52
44	Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan yang berkualitas	44.1	Indeks kepuasan layanan masyarakat terhadap layanan administrasi	Indeks	80
45	Pengembangan ketransmigrasian	45.1	Persentase besaran peningkatan minat transmigrasi	%	40,50

2.3 Program Pendukung Pencapaian Sasaran

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam RPJMD, maka upaya untuk mencapainya kemudian dijabarkan kedalam program prioritas untuk mendukung tercapainya pembangunan jangka menengah daerah. Adapun program prioritas untuk mendukung tercapainya sasaran, sebagaimana Tabel 2.3.

Tabel 2.3.

Program Pendukung Pencapaian Sasaran

No	Sasaran Strategis	Jumlah Program Pendukung
(1)	(2)	(3)
1	Terwujudnya pemenuhan kebutuhan pendidikan usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan non formal	6
2	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat dan menurunnya angka kematian , angka kesakitan dan kecacatan	11
3	Menurunnya angka kelahiran (<i>Total Fertility Rate</i>).	0
4	Meningkatnya pemanfaatan pelayanan Kerumahsakitkan oleh masyarakat dan menurunnya angka kematian di Rumah Sakit.	1
5	Meningkatnya upaya pencegahan permasalahan sosial dan aksesibilitas PMKS dalam memperoleh pelayanan dan rehabilitasi yang berperspektif HAM	4
6	Menurunnya angka kelahiran (<i>Total Fertility Rate</i>).	3
7	Meningkatnya Hasil Pengembangan dan Pembinaan Pemuda dan Olahraga.	2
8	Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan dan Pelestarian Seni Budaya Daerah, Kawasan Cagar Budaya, Situs dan benda Cagar Budaya.	3
9	Meningkatnya kunjungan masyarakat ke perpustakaan	1
10	Meningkatnya profesionalisme aparatur pemerintah daerah	2
11	Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah	1
12	Meningkatnya kualitas layanan dan akuntabilitas kinerja sekretariat DPRD	1
13	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	4
14	Meningkatnya tata kelola arsip SKPD	2
15	Meningkatkan tata kelola pemerintahan desa yang profesional, transparan dan akuntabel	2
16	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah	3
17	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan otonomi daerah	9
18	Meningkatnya koordinasi penataan peraturan perundang undangan serta bantuan hukum dan HAM	2
19	Meningkatnya koordinasi pelaksanaan pembangunan	1
20	Terwujudnya pelayanan pengadaan barang dan jasa yang kredibel	1

No	Sasaran Strategis	Jumlah Program Pendukung
(1)	(2)	(3)
21	Meningkatnya fasilitasi koordinasi bidang kehumasan dan keprotokolan	3
22	Meningkatnya fasilitasi dan pengawalan kebijakan daerah bidang perekonomian	1
23	Meningkatnya koordinasi kesejahteraan rakyat	1
24	Meningkatnya ketersediaan Pangan Beragam, bergizi seimbang dan meningkatnya kontribusi sektor pertanian terhadap pertumbuhan ekonomi daerah	5
25	Meningkatnya peran LEM, LED dan pengembangan potensi TTG di desa dalam penanggulangan kemiskinan	2
26	Meningkatnya Produktifitas, Nilai Tambah dan Daya Saing Sektor Kepariwisata	3
27	Meningkatnya nilai tambah, produktifitas dan daya saing pada Urusan Perdagangan, Koperasi dan UKM	6
28	Meningkatnya penerapan inovasi dalam pembangunan daerah	1
29	Meningkatnya nilai tambah, produktifitas dan daya saing sektor penanaman modal	1
30	Meningkatnya nilai tambah, produktifitas dan daya saing sektor Ketenagakerjaan	2
31	Meningkatnya perlindungan sektor ketenagakerjaan	1
32	Meningkatnya nilai tambah, produktifitas, dan daya saing sektor Perindustrian	2
33	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur publik dan sarana prasarana dasar masyarakat	3
34	Meningkatnya kualitas manajemen rekayasa lalu lintas dan penyelenggaraan angkutan	1
35	Meningkatnya kualitas perumahan dan kawasan permukiman	5
36	Terkendalnya pemanfaatan kawasan sesuai dengan konsep tata ruang	1
37	Terjaganya kualitas lingkungan hidup	3
38	Terwujudnya pengurangan kerentanan resiko bencana	3
39	Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap politik dan demokrasi	2
40	Meningkatnya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan kelompok pelestarian adat dalam pengembangan kehidupan sosial budaya	3
41	Terwujudnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.	1
42	Meningkatnya kapasitas perempuan, perlindungan perempuan dan anak	2
43	Meningkanya kualitas layanan perhubungan	1
44	Meningkatnya pelayanan perijinan satu pintu yang tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran dan tepat manfaat	1
45	Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan yang berkualitas	1
46	Pengembangan ketransmigrasian	2
Jumlah		116



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pembangunan berbasis kinerja menuntut adanya pencapaian target sasaran strategis jangka menengah yang telah ditetapkan. Sehingga pembangunan berbasis kinerja, sesungguhnya upaya untuk mencapai efisiensi pelaksanaan program/kegiatan dan sumber daya anggaran yang diukur dari keluaran, hasil maupun dampak.

Sehingga pendekatan pembangunan berbasis kinerja akan sejalan dengan upaya untuk mewujudkan prinsip *good governance* dengan mengedepankan akuntabilitas sejauh mana instansi Pemerintah telah memenuhi tugas pokok dan fungsinya dalam pelayanan publik.

Oleh karena itu pentingnya pengendalian dan pertanggungjawaban pelaksanaan program/kegiatan untuk memastikan bahwa kinerja yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan pembangunan, dan mencapai target yang telah ditetapkan. Salah satu dasar rujukan yang diacu adalah Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 54 Tahun 2014 tentang Pentunjuk Teknis Penyusunan Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja. Juga berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, terutama terkait dengan penentuan skala nilai peringkat kinerja sebagai bahan penilaian dari masing-masing sasaran strategis. Adapun skala skala nilai peringkat kinerja sebagaimana dimaksud, dapat disajikan pada Tabel 3.1.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA, berisi :
3.1 Capaian Kinerja Organisasi
3.2 Evaluasi dan Analisis Kinerja
3.3 Akuntabilitas Anggaran
3.4 Efisiensi Sumber Daya

Tabel 3.1.

Skala Nilai Peringkat Kinerja Progresif

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	$\geq 90,1$	Sangat Tinggi	
2	$75,1 \leq 90$	Tinggi	
3	$65,1 \leq 75$	Sedang	
4	$50,1 \leq 65$	Rendah	
5	≤ 50	Sangat Rendah	

Sumber : Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, diolah.

Tabel 3.2.

Skala Nilai Peringkat Kinerja Regresif

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	≤ 100	Baik	
2	$\geq 99,9$	Tidak Baik	

Sumber : Bagian Organisasi Kabupaten Klaten

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Mengacu Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 136) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021, capaian indikator kinerja organisasi yang telah dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2018 sebagaimana Tabel 3.3.

Tabel 3.3.

Capaian Kinerja Organisasi Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2018

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Satuan	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
1	Terwujudnya pemenuhan kebutuhan pendidikan usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan non formal	1.1	Persentase sekolah dasar yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan	%	48,00	61,05	127,19
		1.2	Persentase sekolah menengah pertama yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan	%	80,00	82,00	102,44
2	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat dan menurunnya angka kematian , angka kesakitan dan kecacatan	2.1	Kasus kematian Ibu	Kasus	17	13	123,53
		2.2	Angka Kematian Bayi	per 1000 KH	10,13	10,7	94,37
		2.3	Angka kematian Balita	per 1000 KH	1,67	1,9	86,23
		2.4	Prevalensi gizi buruk (BB/U)	%	0,73	0,56	123,29
3	Meningkatnya pemanfaatan pelayanan Kerumahsakitian oleh masyarakat dan menurunnya angka kematian di Rumah Sakit.	3.1	Usia Harapan Hidup	Tahun	76,62	76,77	100,20
4	Meningkatnya upaya pencegahan permasalahan sosial dan aksesibilitas PMKS dalam memperoleh pelayanan dan rehabilitasi yang berperspektif HAM	4.1	Persentase penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	%	83	70,66	85,13
		4.2	Persentase penguatan kapasitas PSKS	%	96	96	100
		4.3	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	%	13,3	14,32	107,67
5	Menurunnya angka kelahiran (<i>Total Fertility Rate</i>)	5.1	Angka Kelahiran (<i>Total Fertility Rate</i>) / TFR		2,16	1,91	111,60
6	Meningkatnya Hasil Pengembangan dan Pembinaan Pemuda dan Olahraga.	6.1	Persentase Kenaikan Prestasi Pemuda	%	10	12	120
		6.2	Persentase Kenaikan Prestasi Olahraga	%	5	5	100
7	Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan dan Pelestarian Seni Budaya Daerah, Kawasan Cagar Budaya, Situs dan benda Cagar Budaya.	7.1	Persentase Kenaikan Penyelenggaraan Pagelaran Seni dan Budaya	%	6	3,2	54
		7.2	Persentase Peningkatan Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	%	10	14,3	143
8	Meningkatnya kunjungan masyarakat ke perpustakaan	8.1	Persentase kenaikan kunjungan masyarakat	%	5	65,79	1.315,8
9	Meningkatnya profesionalisme aparatur Pemerintah daerah	9.1	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	82,06	74	90,18
10	Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah	10.1	Opini BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah daerah	Opini	WDP	WDP	WDP
11	Meningkatnya kualitas layanan dan akuntabilitas kinerja sekretariat DPRD	11.1	Persentase Raperda yang disahkan tepat waktu	%	85	85	93,10

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Satuan	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
12	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	12.1	Tingkat Konsistensi dan ketepatan waktu Perencanaan	%	100	100	95
13	Meningkatnya tata kelola arsip SKPD	13.1	Persentase kenaikan SKPD mengelola arsip secara baku	%	5	11,72	234,4
14	Meningkatkan tata kelola Pemerintahan desa yang profesional, transparan dan akuntabel	14.1	Persentase penyelenggaraan Pemerintah desa yang profesional, transparan dan akuntabel	%	46	48	104
15	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah	15.1	Level Maturitas SPIP	Tingkat	2	2	100
		15.2	Level Kapabilitas APIP	Tingkat	3	2	66,67
		15.3	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Angka	64 (B)	60,33 (B)	94,27
16	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan otonomi daerah	16.1	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	Angka	2,9	3,09	110,4
17	Meningkatnya koordinasi penataan peraturan perundang undangan serta bantuan hukum dan HAM	17.1	Persentase tercapainya penyusunan produk hukum dan penanganan perkara	%	85	90	105
		17.2	Indeks kabupaten peduli HAM	%	75	234	175,5
18	Meningkatnya koordinasi pelaksanaan pembangunan	18.1	Persentase kesesuaian capaian pelaksanaan pembangunan (fisik dan keuangan) dengan target (rencana)	%	90	87,78	97,53
19	Terwujudnya pelayanan pengadaan barang dan jasa yang kredibel	19.1	Persentase pengadaan barang dan jasa secara elektronik yang sesuai regulasi	%	100	100	100
20	Meningkatnya fasilitasi koordinasi bidang kehumasan dan keprotokolan	20.1	Persentase publikasi kebijakan dan kegiatan Kepala Daerah	%	94	94	100
		20.2	Persentase dokumentasi kegiatan Kepala Daerah	%	94	98	102,1
		20.3	Persentase pelayanan keprotokolan kegiatan Kepala Daerah	%	94	95	101,06
21	Meningkatnya fasilitasi dan pengawalan kebijakan daerah bidang perekonomian	21.1	Tingkat Inflasi YoY	%	3,5 (± 1)	2,39	68,29
22	Meningkatnya koordinasi kesejahteraan rakyat	22.1	Persentase keterlibatan stakeholder dalam pelaksanaan pembangunan bidang kesra	%	90	90	100
23	Meningkatnya ketersediaan Pangan Beragam, bergizi seimbang dan meningkatnya kontribusi sektor pertanian terhadap pertumbuhan ekonomi daerah	23.1	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	%	12,25	10,98	89,68
24	Meningkatnya peran LEM, LED dan pengembangan potensi TTG di desa dalam penanggulangan kemiskinan	24.1	Persentase desa yang memiliki LEM, LED dan posyantek	%	35	35	100

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Satuan	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
25	Meningkatnya Produktifitas, Nilai Tambah dan Daya Saing Sektor Kepariwisata	25.1	Persentase Peningkatan PAD dari sektor Pariwisata	%	25	47,50	190
26	Meningkatnya nilai tambah, produktifitas dan daya saing pada Urusan Perdagangan, Koperasi dan UKM	26.1	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	18,94	17,88	94,40
		26.2	Persentase UMKM yang memiliki daya saing	%	9	8,99	99,88
27	Meningkatnya penerapan inovasi dalam pembangunan daerah	27.1	Persentase inovasi yang diterapkan	%	72,73	60	82,56
28	Meningkatnya nilai tambah, produktifitas dan daya saing sektor penanaman modal	28.1	Rasio daya serap tenaga kerja (PMDN/PMA):				
			PMDN	%	417	131	31,41
			PMA	%	294	264	89,79
		28.2	Persentase pertumbuhan realisasi investasi (PMDN/PMA):				
			PMDN	%	1,98	1078	54.444,44
PMA	%	2,45	424	17306,12			
29	Meningkatnya nilai tambah, produktifitas dan daya saing sektor Ketenagakerjaan	29.1	Rasio penduduk yang bekerja	%	1,03	0,87	84,47
		29.2	Angka partisipasi angkatan kerja	%	69	73,58	106,64
30	Meningkatnya perlindungan sektor ketenagakerjaan	30.1	Besaran pekerja/ buruh yang menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan	%	87,60	82,59	94,28
31	Meningkatnya nilai tambah, produktifitas, dan daya saing sektor Perindustrian	31.1	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	%	34,86	35,94	103,10
		31.2	Persentase IKM yang memiliki daya saing	%	5,50	1,80	32,73
32	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur publik dan sarana prasarana dasar masyarakat	32.1	Indeks layanan infrastruktur	Indeks	29,42	58,61	199,22
33	Meningkatnya kualitas manajemen rekayasa lalu lintas dan penyelenggaraan angkutan	33.1	Tingkat Pelayanan Infrastruktur Perhubungan	Tingkat	45,87	43,58	95,01
34	Meningkatnya kualitas perumahan dan kawasan permukiman	34.1	Indeks kualitas perumahan dan kawasan pemukiman	Indeks	41,06	34,08	83
35	Terkendalinya pemanfaatan kawasan sesuai dengan konsep tata ruang	35.1	Ketaatan terhadap RTRW	%	78,98	78,98	100
36	Terjaganya kualitas lingkungan hidup	36.1	Indeks kualitas air	Indeks	78,98	78,98	100
		36.2	Indeks kualitas udara	Indeks	30,68	18,28	59,58
		36.3	Indeks tutupan vegetasi (lahan)	Indeks	74,68	83,3	111,54
37	Terwujudnya pengurangan kerentanan resiko bencana	37.1	Kelas Indeks kapasitas bencana	Indeks	Sedang (119)	Sedang (123,20)	86,67
38	Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap politik dan demokrasi	38.1	Indeks demokrasi	Indeks	75	70,85	94,47

No (1)	Sasaran Strategis (2)	Indikator Kinerja Utama (3)		Satuan (4)	Target (5)	Realisasi (6)	% (7)
39	Meningkatnya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan kelompok pelestarian adat dalam pengembangan kehidupan sosial budaya	39.1	Rata - rata kader lembaga kemasyarakatan dan kelompok pelestarian adat dalam pengembangan sosial budaya yang aktif (mendapat pembinaan dan pelatihan)	Klpk	49	49	100
40	Terwujudnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.	40.1	Indeks Ketertiban Masyarakat	Indeks	95	92,20	97,05
41	Meningkatnya kapasitas perempuan, perlindungan perempuan dan anak	41.1	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	60,16	59,60	99,07
		41.2	Capaian Kabupaten Layak Anak (KLA)	Kelas	Nidya (750)	Madya (650)	86,67
42	Meningkanya kualitas layanan perhubungan	42.1	Indeks kepuasan layanan perhubungan	Indeks	79,02	78,95	99,92
43	Meningkatnya pelayanan perijinan satu pintu yang tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran dan tepat manfaat	43.1	Nilai Survy Kepuasan Masyarakat	Indeks	79,52	80,52	101,26
44	Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan yang berkualitas	44.1	Indeks kepuasan layanan masyarakat	Indeks	80	82,74	103,45
45	Pengembangan ketrasmigrasian	45.1	Persentase besaran peningkatan minat transmigrasi	%	40,50	-80	-197,05

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 45 (empat puluh lima) sasaran strategis dengan 67 (enam puluh tujuh) Indikator Kinerja Sasaran yang terdiri dari: 58 (lima puluh delapan) indikator yang sifatnya progresif, dan 9 (sembilan) indikator yang sifatnya represif. Dari masing-masing indikator diperoleh hasil:

A. **Indikator Progresif**, dengan hasil:

- a. Sebanyak 46 (enam puluh enam) Indikator Kinerja sasaran atau sebanyak 79,31% dengan Kriteria **Sangat Tinggi**;
- b. Sebanyak 7 (tujuh) atau sebanyak 12,07% dengan Kriteria **Tinggi**;
- c. Sebanyak 1 (satu) Indikator Kinerja Sasaran atau sebanyak 1,72% dengan Kriteria **Sedang**;
- d. Sebanyak 1 (satu) Indikator Kinerja Sasaran atau sebanyak 1,72% dengan Kriteria **Rendah**; dan
- e. Sebanyak 3 (tiga) Indikator Kinerja Sasaran atau sebanyak 5,17% dengan Kriteria **Sangat Rendah**, Adapun perincian atas hasil pengukuran kinerja, sebagai berikut:

a. Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja dengan Kriteria ***sangat tinggi***, atau interval nilai realisasi kinerja $\geq 90,1$ sebanyak 46 (*empat puluh enam*), diantaranya:

1. Persentase sekolah dasar yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan;
2. Persentase sekolah menengah pertama yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan;
3. Usia Harapan Hidup;
4. Persentase penguatan kapasitas PSKS;
5. Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
6. Persentase Kenaikan Prestasi Pemuda;
7. Persentase Kenaikan Prestasi Olahraga;
8. Persentase Peningkatan Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan;
9. Persentase Kenaikan Kunjungan Masyarakat;
10. Indeks Profesionalitas ASN;
11. Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
12. Persentase Raperda yang Disahkan Tepat Waktu;
13. Tingkat Konsistensi dan Ketepatan Waktu Perencanaan;
14. Persentase Kenaikan SKPD Mengelola Arsip Secara Baku;
15. Persentase Penyelenggaraan Pemerintah Desa yang Profesional, Transparan dan Akuntabel;
16. Level Maturitas SPIP;
17. Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
18. Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD);
19. Persentase Tercapainya Penyusunan Produk Hukum dan Penanganan Perkara;
20. Indeks Kabupaten Peduli HAM;
21. Persentase Kesesuaian Capaian Pelaksanaan Pembangunan (Fisik dan Keuangan) dengan Target (rencana);
22. Persentase Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik yang Sesuai Regulasi;
23. Persentase Publikasi Kebijakan dan Kegiatan Kepala Daerah;
24. Persentase Dokumentasi Kegiatan Kepala Daerah;
25. Persentase Pelayanan Keprotokolan Kegiatan Kepala Daerah;
26. Persentase Keterlibatan Stakeholder dalam Pelaksanaan Pembangunan Bidang Kesra;
27. Persentase Desa yang Memiliki LEM, LED dan Posyantek;

28. Persentase Peningkatan PAD dari Sektor Pariwisata;
29. Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB;
30. Persentase UMKM yang Memiliki Daya Saing;
31. Persentase Pertumbuhan Realisasi Investasi (PMDN/PMA);
32. Angka Partisipasi Angkatan Kerja;
33. Besaran Pekerja/ Buruh Yang Menjadi Peserta Program BPJS Ketenagakerjaan;
34. Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB;
35. Indeks Layanan Infrastruktur;
36. Tingkat Pelayanan Infrastruktur Perhubungan;
37. Ketaatan Terhadap RTRW;
38. Kelas Indeks Kapasitas Bencana;
39. Indeks Demokrasi;
40. Rata - rata Kader Lembaga Kemasyarakatan dan Kelompok Pelestarian Adat dalam Pengembangan Sosial Budaya yang Aktif (mendapat pembinaan dan pelatihan);
41. Indeks Ketertiban Masyarakat;
42. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG);
43. Capaian Kabupaten Layak Anak (KLA);
44. Indeks Kepuasan Layanan Perhubungan;
45. Nilai Survei Kepuasan Masyarakat; dan
46. Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat.

b. Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja dengan Kriteria ***tinggi***, atau interval nilai realisasi kinerja ***75,1 ≤ 90*** sebanyak 6 (enam), diantaranya:

1. Persentase Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial ;
2. Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB;
3. Persentase Inovasi yang Diterapkan;
4. Rasio Daya Serap Tenaga Kerja PMA;
5. Rasio Penduduk yang Bekerja; dan
6. Indeks Kualitas Perumahan dan Kawasan Pemukiman.

c. Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja dengan Kriteria ***sedang***, atau interval nilai realisasi kinerja ***65,1 ≤ 75*** sebanyak 1 (satu), yaitu Level Kapabilitas APIP.

d. Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja dengan Kriteria ***rendah***, atau interval nilai realisasi kinerja ***50,1 ≤ 65*** sebanyak 1 (satu), yaitu Persentase Kenaikan Penyelenggaraan Pagelaran Seni dan Budaya.

- e. Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja dengan Kriteria ***sangat rendah***, atau interval nilai realisasi kinerja ≤ 50 sebanyak 3 (tiga), diantaranya:
1. Rasio daya serap tenaga kerja PMDN;
 2. Persentase IKM yang memiliki daya saing; dan
 3. Persentase besaran peningkatan minat transmigrasi.

Berdasarkan *Capaian Kinerja Organisasi* Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2018 sebagaimana diuraikan di atas, apabila ditarik kesimpulan berdasarkan *Skala Nilai Peringkat Kinerja* sebagaimana diatur berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 diperoleh hasil sebagaimana Diagram 3.1.

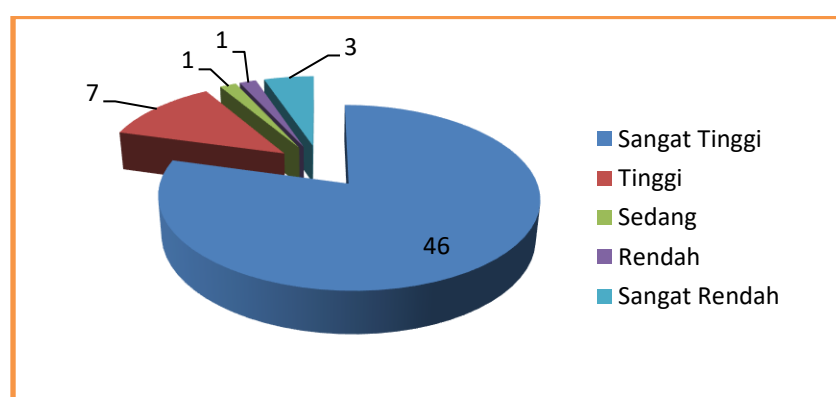


Diagram 3.1 Peringkat Kinerja Progresif

B. **Indikator Regresif**, dengan hasil: Sebanyak 9 (sembilan) indikator kinerja sasaran atau sebanyak 100% dengan Kriteria ***Baik (Berhasil Menekan)***, yaitu:

1. Kasus Kematian Ibu;
2. Angka Kematian Bayi;
3. Angka Kematian Balita;
4. Prevalensi Gizi Buruk (BB/U);
5. Tingkat Inflasi YoY;
6. Indeks Kualitas Air;
7. Indeks Kualitas Udara;
8. Indeks Tutupan Vegetasi (lahan); dan
9. Angka Kelahiran (*Total Fertility Rate*) /TFR.

Berdasarkan *Capaian Kinerja Organisasi* Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2018 sebagaimana diuraikan di atas, apabila ditarik kesimpulan berdasarkan *Skala Nilai Peringkat Kinerja Represif* maka diperoleh data sebagaimana Diagram 3.2

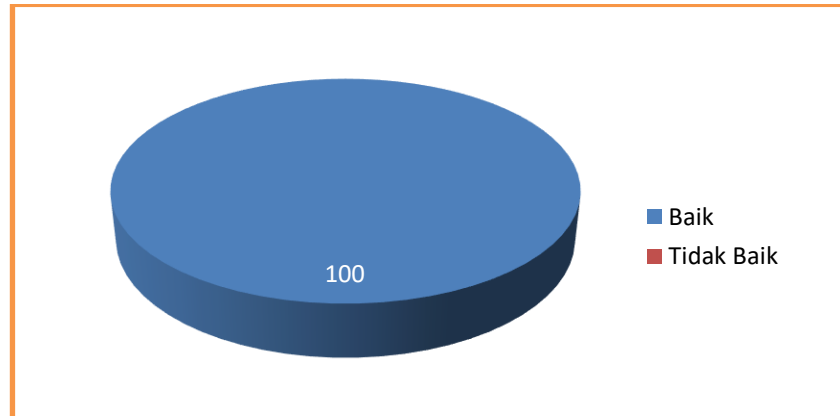


Diagram 3.2 Peringkat Kinerja Regresif

3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

1. Sasaran Terwujudnya Pemenuhan Kebutuhan Pendidikan Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Non Formal.

Sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan urusan pendidikan menjadi pelayanan dasar yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten. Untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah, serta untuk mewujudkan sasaran pemenuhan kebutuhan pendidikan bagi masyarakat didukung dengan Pelaksanaan Pendidikan Sepanjang Hayat di Kabupaten Klaten Tahun 2018 disusun tetap berdasarkan pencapaian pendekatan 6 (enam) pilar strategis, yakni: 1). Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), 2). Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, 3). Pendidikan Kecakapan Hidup (*Life-skill*), 4). Pendidikan Keaksaraan, 5). Pengarusutamaan gender, dan 6). Peningkatan Kualitas Pendidikan. Sehingga capaian kinerja Pendidikan Sepanjang Hayat tahun 2018 merupakan gambaran keberhasilan capaian kinerja urusan pendidikan dalam mendukung pencapaian visi-misi pembangunan jangka menengah daerah.

Adapun capaian sasaran terwujudnya pemenuhan kebutuhan pendidikan bagi masyarakat sebagaimana Tabel 3.4.

Tabel 3.4

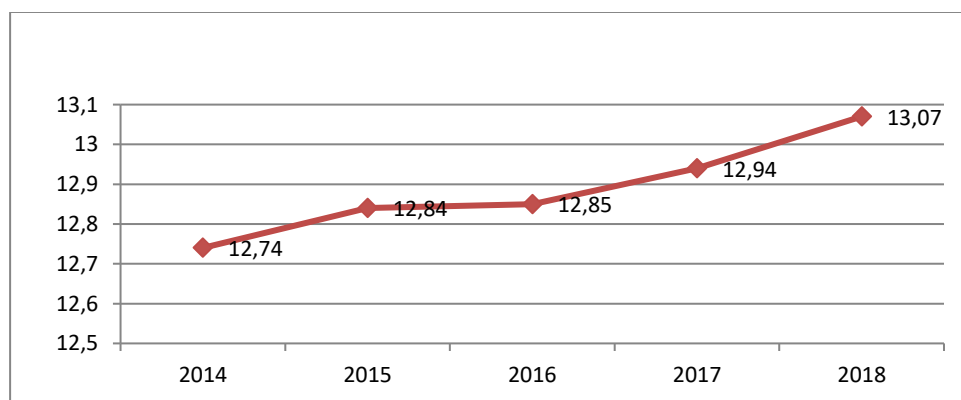
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja
Terwujudnya Pemenuhan Kebutuhan Pendidikan Usia Dini, Pendidikan Dasar
dan Pendidikan Non Formal

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kondisi Awal RPJM	Kondisi Tahun 2018			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2018 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			Target	Realisasi	%		
1	Persentase sekolah dasar yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan	43	48,00	61,05	127,19	55	111
2	Persentase sekolah menengah pertama yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan	65	80,00	82,00	102,50	95	86,32

Capaian sasaran kinerja "Terwujudnya Pemenuhan Kebutuhan Pendidikan Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Non Formal", sebagaimana tersebut di atas ditunjang beberapa indikator kinerja urusan pendidikan, diantaranya:

1) Angka Harapan Lama Sekolah

Angka harapan lama sekolah di Kabupaten Klaten mengalami peningkatan yang signifikan dalam kurun waktu 2014-2018, yaitu dari sebesar 12,74 pada tahun 2014 menjadi sebesar 13,07 pada tahun 2018. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi pendidikan semakin baik pada setiap jenjang pendidikan. Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Klaten dapat dilihat pada Grafik 3.1.

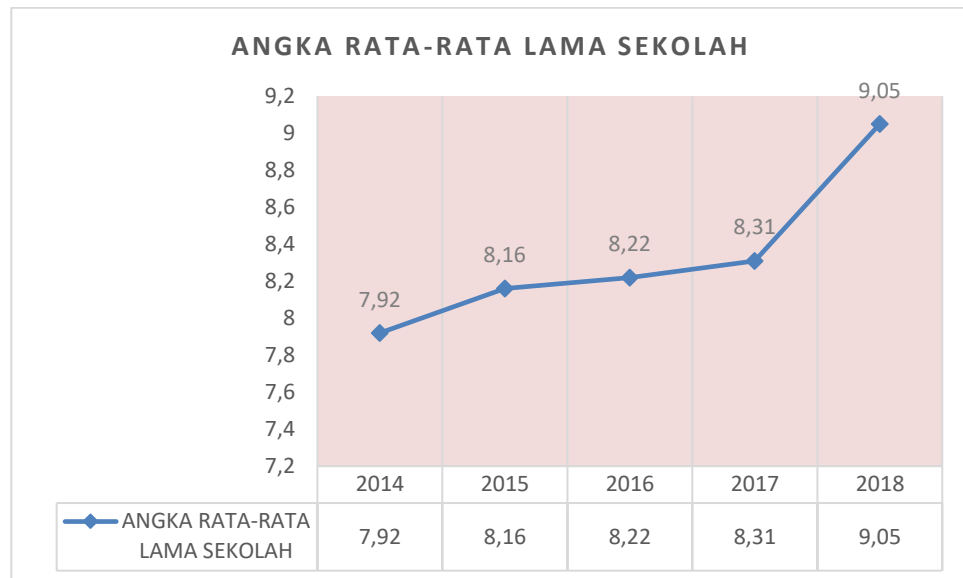


Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten, 2019.

Grafik 3.1. Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Klaten Tahun 2014-2018

2) Angka Rata-rata Lama Sekolah

Angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Klaten mengalami peningkatan yang signifikan dalam kurun waktu 2014-2018, yaitu dari sebesar 7,92 pada tahun 2014 menjadi sebesar 9,05 pada tahun 2018. Hal ini menunjukkan bahwa keinginan untuk memasuki jenjang pendidikan lebih tinggi semakin baik. Perkembangan Angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Klaten tahun 2014-2018 disajikan pada Grafik 3.2.



Sumber: Dinas Pendidikan Kab Klaten, 2019.
Grafik 3.2. . Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Klaten Tahun 2014-2018

Perkembangan angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Klaten dalam kurun waktu Tahun 2014-2018 mengalami peningkatan yang cukup signifikan khususnya di dua tahun terakhir terjadi kenaikan sebesar 0,74 % dari tahun 2017 sebesar 8,31 menjadi 9,05 di tahun 2018, hal ini disebabkan intervensi kebijakan Pemerintah Daerah yang berfokus pada intervensi anak usia sekolah untuk mengikuti program wajib pendidikan dasar dengan pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

3) Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk semua jenjang pendidikan dasar dan menengah selama tahun 2014-2018 mengalami perkembangan. Jenjang pendidikan SD/MI/SDLB/Paket A tahun 2014 sudah mencapai 92,27%, seiring dengan perbaikan layanan pendidikan, dan pada tahun 2018 naik menjadi 102,75%. Adapun untuk jenjang SMP/MTs/SMPLB/Paket B tumbuh dari 87,26% pada tahun 2014, dan

pada Tahun 2018 menjadi 95,21%. Hal ini disebabkan karena keinginan anak usia sekolah pada jenjang SMP/MTs/SMPLB/Paket B banyak yang bersekolah dari luar daerah serta ditunjang angka melanjutkan dan proporsi jumlah penduduk anak usia SMP/MTs/SMPLB/Paket B juga meningkat. Secara rinci, perkembangan APK di Kabupaten Klaten selama Tahun 2014-2018 untuk semua jenjang pendidikan disajikan pada Tabel 3.5.

Tabel 3.5.

Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK)
di Kabupaten Klaten Menurut Jenjang Pendidikan
Tahun 2014-2018

No	Tahun	SD/MI/SDLB/ Paket A	SMP/MTs/SMP LB/Paket B	SMA/SMK/MA/ SMALB/Paket C
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	2014	92,27	87,26	68,69
2	2015	94,53	87,58	93,06
3	2016	105,23	97,57	81,00
4	2017	97,45	90,93	-
5	2018	102,75	95,21	-

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten, 2019.

Catatan: *) Mulai tahun 2017 urusan Pendidikan Menengah menjadi kewenangan Provinsi.

4) Angka Partisipasi Murni (APM)

APM untuk semua jenjang pendidikan dasar dan menengah selama tahun 2014-2018 mengalami perkembangan yang bersifat fluktuatif. Jenjang pendidikan SD/MI/SDLB/Paket A tahun 2014 sudah mencapai 79,13%, naik menjadi 90,84% pada tahun 2018. Jenjang SMP/MTs/SMPLB/Paket B pada tahun 2014 sudah mencapai 62,48% menjadi 64,07% hal ini dipicu adanya anak usia sekolah pada jenjang tertentu ingin sekolah di luar daerah, yang relatif lebih baik dalam layanan penyelenggaraan pendidikannya. Perkembangan APM di Kabupaten Klaten untuk semua jenjang pendidikan dasar disajikan pada Tabel 3.6.

Tabel 3.6.

Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM)
di Kabupaten Klaten Menurut Jenjang Pendidikan
Tahun 2014-2018

No	Tahun	SD /MI /SDLB/Paket A	SMP/MTs/SMPLB/
(1)	(2)	(3)	(4)
1	2014	79,13	62,48
2	2015	81,60	63,96
3	2016	91,26	72,77
4	2017	86,84	68,22
5	2018	90,84	64,07

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten, 2019.

Berdasarkan Tabel 3.6. sebagaimana tersebut di atas, yang mendesak untuk dilakukan adalah perkembangan APM untuk semua jenjang pendidikan sangat dipengaruhi kondisi masyarakat dan layanan pendidikan pada saat-saat tertentu, mengingat Klaten diapit dua kota besar, Yogyakarta dan Solo.

5) Angka Putus Sekolah

Perkembangan angka putus sekolah (APS) selama tahun 2014-2018 untuk semua jenjang pendidikan bersifat fluktuatif. Perkembangan angka putus sekolah di Kabupaten Klaten tahun 2014-2018 disajikan pada Tabel 3.7.

Tabel 3.7.

Perkembangan Persentase Angka Putus Sekolah Menurut Jenjang
Pendidikan di Kabupaten Klaten Tahun 2014-2018

Uraian	Satuan	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)
Angka Putus Sekolah Tk. Pendidikan SD/MI	Kasus	31	27	33	44	20
Angka Putus Sekolah Tk. Pendidikan SMP/MTS	Kasus	36	56	43	92	34
Angka Putus Sekolah Tk. Pendidikan SMA/MA*)	Kasus	285	295	283	-	-

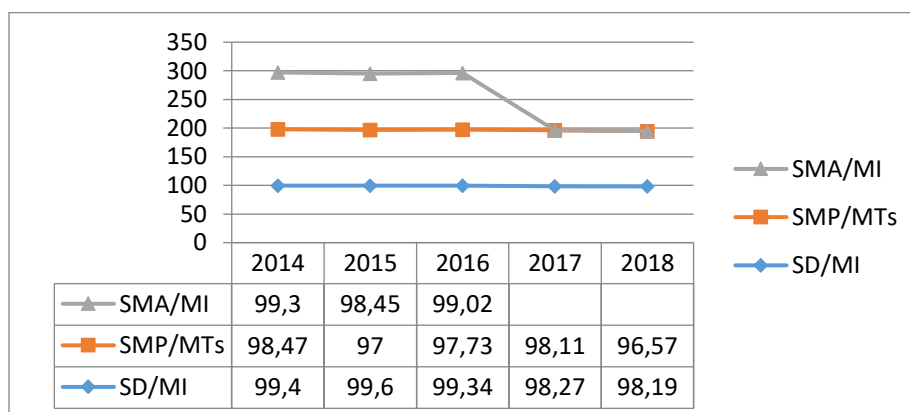
Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten, 2019.

Catatan: *) Mulai tahun 2017 urusan Pendidikan Menengah menjadi kewenangan Provinsi..

Berdasarkan Tabel 3.7. sebagaimana tersebut di atas, dapat dilihat bahwa angka putus sekolah pada dua Tahun terakhir mengalami penurunan baik untuk angka putus sekolah tingkat SD/MI dari Tahun 2017 sebesar 44 % menjadi 20 % di Tahun 2018, sedangkan untuk angka putus sekolah SMP/MTS dari 92 % di Tahun 2017 menjadi 34 % di Tahun 2018, hal ini mengindikasikan bahwa kebutuhan dasar bidang pendidikan sudah terpenuhi dengan adanya program Pemerintah antara lain Bantuan Operasioanl Sekolah (BOS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP).

6) Angka Kelulusan (AL)

Angka kelulusan (AL) menunjukkan bobot prestasi kelulusan untuk setiap jenjang penyelenggaraan pendidikan. Adapun kondisi Angka Kelulusan (AL) untuk setiap jenjang penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Klaten pada Tahun 2014-2018 bersifat fluktuatif. Perkembangan angka kelulusan tahun 2014-2018 disajikan pada Grafik 3.3.



Sumber: Dinas Pendidikan, 2019.

Grafik 3.3 Angka Kelulusan (AL) Tahun 2014-2018

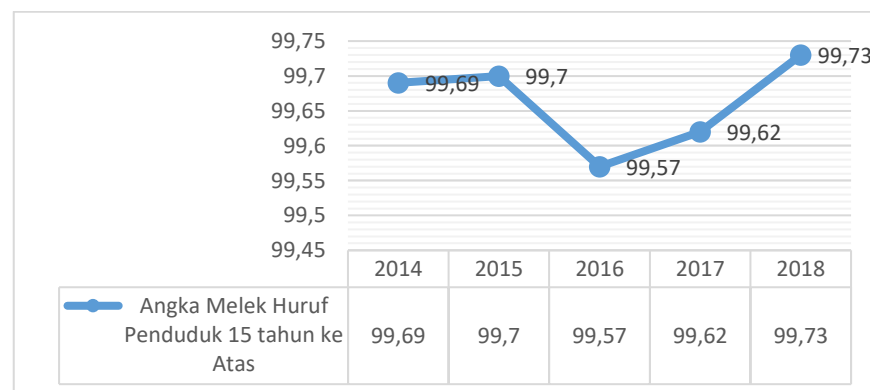
Catatan: *) Mulai tahun 2017 urusan Pendidikan Menengah menjadi kewenangan Provinsi..

Berdasarkan Grafik 3.3. sebagaimana tersebut di atas dapat dilihat bahwa angka kelulusan jenjang SD/MI cenderung mengalami penurunan terakhir dari 99,6% pada tahun 2015 menjadi 98,19 % di tahun 2018. Penurunan ini disebabkan seiring dengan angka putus sekolah, dan rendahnya kemampuan individu siswa (gagal kecerdasannya). Sedangkan untuk jenjang SMP/MTS dari 98,11 % di tahun 2017 menurun menjadi 96,57 % di tahun 2018, hal ini disebabkan karena banyak siswa kelas VI dan IX yang tidak meneruskan sekolahnya karena berbagai alasan.

7) Angka Melek Huruf

Indikator keberhasilan pembangunan urusan pendidikan ditunjukkan dengan kemampuan mengatasi angka buta huruf penduduk usia >15 Tahun ke atas. Beberapa langkah nyata yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten diantaranya dengan melakukan penyelenggaraan pendidikan keaksaraan.

Angka melek huruf pada penduduk usia lebih dari 15 Tahun ke atas dirumuskan dengan pengertian persentase penduduk usia 15 Tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis huruf latin atau huruf lainnya. Adapun perkembangan angka melek huruf penduduk usia >15 Tahun ke atas di Kabupaten Klaten tahun 2014-2018 disajikan pada Grafik 3.4.



Sumber: Dinas Pendidikan, 2019.

Grafik 3.4. . Angka Melek Huruf Penduduk Usia >15 Tahun ke atas di Kabupaten Klaten Tahun 2014-2018

Berdasarkan Grafik 3.4. sebagaimana tersebut di atas, angka melek huruf di Kabupaten Klaten pada dua Tahun terakhir mengalami kenaikan, dari 99,62 % di Tahun 2017 menjadi 99,73 % di Tahun 2018. Hal ini mengindikasikan bahwa hampir seluruh penduduk Kabupaten Klaten sudah terbebas dari buta huruf.

8) Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Kurikulum Pendidikan Tahun 2013 mensyaratkan kualifikasi teknis yang semakin tinggi sehingga perlu dibarengi peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan. Sebagai gambaran perkembangan Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D IV di Kabupaten Klaten tahun 2014-2018 disajikan pada Tabel 3.8.

Tabel 3.8.

Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D IV Menurut Jenjang Pendidikan
di Kabupaten Klaten Tahun 2014-2018

Uraian	Satuan	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jenjang Pendidikan SD/ MI	%	72,32	79,09	81,99	84,16	87,67
Jenjang Pendidikan SMP/ MTs	%	90,70	92,09	91,51	60,33	91,98
Jenjang Pendidikan SMA/ MA/ SMK	%	96,11	96,71	97,06	-	-

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten, 2019

NB : Untuk data jenjang SMA/MA/SMK, tidak tersedia dikarenakan segala jenis administrasi sudah di bawah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.

Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D.IV selama lima tahun terakhir (Tahun 2014-2018) guru yang memenuhi kualifikasi S1/D.IV semakin meningkat, hal ini tidak terlepas dari adanya dana tunjangan profesi guru yang sudah memiliki sertifikat profesi, dan bantuan keuangan dari Pemerintah provinsi untuk meningkatkan kapasitasnya.

Adapun data guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah di SD/MI/, SMP/MTS berkualifikasi S1/D.IV dan bersertifikat Kepala Sekolah tahun 2014-2018 dapat dilihat pada Tabel 3.9.

Tabel 3.9.

Kepala Sekolah yang Memenuhi Kualifikasi SI / D IV dan Bersertifikat
Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2014-2018

Uraian	Satuan	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jenjang Pendidikan SD/ MI	%	95,13	98,08	98,76	98,27	99,00
Jenjang Pendidikan SMP/ MTs	%	98,13	96,58	96,78	93,55	96,92
Jenjang Pendidikan SMA/ MA/ SMK	%	90,36	89,64	97,53	-	-

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten, 2019

NB : Untuk data jenjang SMA/ MA/ SMK, tidak tersedia dikarenakan segala jenis administrasi sudah dibawah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan Tabel 3.9. sebagaimana tersebut di atas, terdapat peningkatan jumlah Kepala Sekolah yang Memenuhi Kualifikasi D4/SI dan bersertifikat di jenjang pendidikan SD/MI dari 98,27 % DI TAHUN 2017 menjadi 99,00 % di Tahun 2018 dan pendidikan SMP/MTS dari 93,55 % di Tahun 2017 menjadi 96,92 % di Tahun 2018. Jabatan Kepala Sekolah di Jenjang Pendidikan SD/MI/SMP/MTS telah memenuhi kualifikasi S1/D4 standar sistem Pendidikan Nasional. Kepala Sekolah masing-masing telah tercapai 100%. Hal ini menandakan bahwa tingkat mutu guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah yang dipersyaratkan telah sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan.

9) Rasio Murid terhadap Guru

Rasio murid terhadap guru per jenjang pendidikan disajikan pada Tabel 3.10, Tabel 3.11, dan Tabel 3.12.

Tabel 3.10.

Jumlah Sekolah, Murid, Guru SD Negeri Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2014-2018

No	Kecamatan	Sekolah	Murid	Guru	Rata-rata Murid per Sekolah	Rata-rata Guru per Sekolah	Rasio Murid Thdp Guru
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Prambanan	30	3.610	242	120	8	15
2	Gantiwarno	23	2.550	183	111	8	14
3	Wedi	28	3.417	245	122	9	14
4	Bayat	34	3.452	284	102	8	12
5	Cawas	40	3.427	341	86	9	10
6	Trucuk	39	4.583	360	118	9	13
7	Kalikotes	21	2.413	177	115	8	14
8	Kebonarum	11	934	82	85	7	11
9	Jogonalan	26	3.967	231	153	9	17
10	Manisrenggo	28	2.955	199	106	7	15
11	Karangnongko	25	2.465	182	99	7	14
12	Ngawen	23	2.565	182	112	8	14
13	Ceper	30	3.611	242	120	8	15
14	Pedan	24	3.048	225	127	9	14
15	Karangdowo	29	2.310	230	80	8	10
16	Juwiring	33	3.435	284	104	9	12
17	Wonosari	38	4.079	318	107	8	13
18	Delanggu	25	3.232	227	129	9	14
19	Polanharjo	28	2.165	216	77	8	10
20	Karanganom	26	2.380	201	92	8	12

No	Kecamatan	Sekolah	Murid	Guru	Rata-rata Murid per Sekolah	Rata-rata Guru per Sekolah	Rasio Murid Thdp Guru
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
21	Tulung	29	2.614	236	90	8	11
22	Jatinom	35	4.515	315	129	9	14
23	Kemalang	25	3.074	198	123	8	16
24	Klaten Selatan	19	2.425	165	128	9	15
25	Klaten Tengah	20	3.987	225	199	11	18
26	Klaten Utara	14	2.846	149	203	11	19
Jumlah 2018		703	80.059	5.939	117	8	14
	2017	705	83.665	6.124	119	9	14
	2016	710	85.849	6.258	124	9	14
	2015	716	87.698	6.322	125	9	14
	2014	727	90.413	6.469	127	9	14

Sumber : Dinas Pendidikan, 2019.

Berdasarkan Tabel 3.10. sebagaimana tersebut di atas dapat dilihat bahwa rata-rata rasio murid terhadap guru untuk jenjang pendidikan SD Negeri adalah sebesar 14%.

Tabel 3.11.

Jumlah Sekolah, Murid, Guru SD Swasta Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2018

No	Kecamatan	Sekolah	Murid	Guru	Rata-rata Murid per Sekolah	Rata-rata Guru per Sekolah	Rasio Murid Terhadap Guru
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Prambanan	2	520	33	260	17	16
2	Gantiwarno	2	497	33	249	17	15
3	Wedi	7	2.142	117	306	17	18
4	Bayat	4	838	49	210	12	17
5	Cawas	3	1.069	78	356	26	14
6	Trucuk	2	275	26	138	13	11
7	Kalikotes	-	-	-	-	-	-
8	Kebonarum	1	286	21	286	21	14
9	Jogonalan	2	315	29	158	15	11
10	Manisrenggo	1	67	6	67	6	11
11	Karangnongko	-	-	-	-	-	-
12	Ngawen	1	477	21	477	21	23
13	Ceper	4	502	33	126	8	15
14	Pedan	2	608	41	304	21	15
15	Karangdowo	2	153	22	-	-	-
16	Juwiring	5	557	58	111	12	10
17	Wonosari	3	459	35	153	12	13

No	Kecamatan	Sekolah	Murid	Guru	Rata-rata Murid per Sekolah	Rata-rata Guru per Sekolah	Rasio Murid Terhadap Guru
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
18	Delanggu	5	1.366	89	273	18	15
19	Polanharjo	1	166	12	166	12	14
20	Karanganom	4	717	48	179	12	15
21	Tulung	1	349	30	349	30	12
22	Jatinom	2	723	56	362	28	13
23	Kemalang	-	-	-	-	-	-
24	Klaten Selatan	3	263	26	88	9	10
25	Klaten Tengah	10	2.793	171	279	17	16
26	Klaten Utara	5	1.415	81	283	16	17
Jml	2018	72	16.557	1.115	199	14	12
	2017	66	14.979	1.031	227	16	15
	2016	65	14.280	973	188	13	12
	2015	57	13.015	883	191	14	11
	2014	53	11.437	789	177	13	11

Sumber : Dinas Pendidikan, 2019.

Berdasarkan Tabel 3.10. sebagaimana tersebut di atas dapat dilihat bahwa rata-rata rasio murid terhadap guru untuk jenjang pendidikan SD Swasta adalah sebesar 12.

Tabel.3.12.

Jumlah Sekolah, Murid, Guru SMP Negeri Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2014–2018

No	Kecamatan	Sekolah	Murid	Guru	Rata-rata Murid per Sekolah	Rata-rata Guru per Sekolah	Rasio Murid Terhadap Guru
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Prambanan	2	1.088	78	544	39	14
2	Gantiwarno	3	1.741	119	580	40	15
3	Wedi	2	1.575	95	788	48	17
4	Bayat	3	1.557	120	519	40	13
5	Cawas	3	1.369	112	456	37	12
6	Trucuk	3	1.638	108	546	36	15
7	Kalikotes	1	847	45	847	45	19
8	Kebonarum	1	641	37	641	37	17
9	Jogonalan	2	1.364	90	682	45	15
10	Manisrenggo	3	1.870	117	623	39	16
11	Karangnongko	1	524	35	524	35	15
12	Ngawen	1	751	40	751	40	19

No	Kecamatan	Sekolah	Murid	Guru	Rata-rata Murid per Sekolah	Rata-rata Guru per Sekolah	Rasio Murid Terhadap Guru
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
13	Ceper	3	1.634	121	545	40	14
14	Pedan	3	1.855	124	618	41	15
15	Karangdowo	4	2.605	155	651	39	17
16	Juwiring	2	1.282	86	641	43	15
17	Wonosari	2	1.473	95	737	48	16
18	Delanggu	4	2.474	147	619	37	17
19	Polanharjo	3	1.171	81	390	27	14
20	Karanganom	4	1.886	128	472	32	15
21	Tulung	3	1.488	102	496	34	15
22	Jatinom	3	1.855	119	618	40	16
23	Kemalang	2	916	61	458	31	15
24	Klaten Selatan	1	655	44	655	44	15
25	Klaten Tengah	3	2.370	136	790	45	17
26	Klaten Utara	3	2.520	171	840	57	15
Jml	2018	65	39.149	2.566	617	40	15
	2017	65	39.927	2.508	614	39	16
	2016	65	40.672	2.721	640	42	15
	2015	65	40.927	2.740	637	42	15
	2014	65	40.441	2.777	633	43	15

Sumber : Dinas Pendidikan, 2019.

Berdasarkan Tabel 3.12. sebagaimana tersebut di atas dapat dilihat bahwa rata-rata rasio murid terhadap guru untuk jenjang pendidikan SMP Negeri adalah sebesar 15.

Tabel 3.13.

Jumlah Sekolah, Murid, Guru SMP Swasta Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2014-2018

No	Kecamatan	Sekolah	Murid	Guru	Rata-rata Murid per Sekolah	Rata-rata Guru per Sekolah	Rasio Murid Terhadap Guru
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Prambanan	1	209	13	209	13	16
2	Gantiwarno	2	127	21	64	11	6
3	Wedi	4	374	44	94	11	9
4	Bayat	2	371	27	186	14	14
5	Cawas	4	347	49	87	12	7
6	Trucuk	4	191	50	48	13	4
7	Kalikotes	-	-	-	-	-	-

No	Kecamatan	Sekolah	Murid	Guru	Rata-rata Murid per Sekolah	Rata-rata Guru per Sekolah	Rasio Murid Terhadap Guru
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
8	Kebonarum	-	-	-	-	-	-
9	Jogonalan	1	148	15	148	15	10
10	Manisrenggo	1	67	15	67	15	4
11	Karangnongko	1	13	9	13	9	1
12	Ngawen	3	541	49	180	16	11
13	Ceper	-	-	-	-	-	-
14	Pedan	1	25	10	25	10	3
15	Karangdowo	1	47	6	47	6	8
16	Juwiring	3	269	42	90	14	6
17	Wonosari	2	83	23	42	12	4
18	Delanggu	4	364	47	91	12	8
19	Polanharjo	-	-	-	-	-	-
20	Karanganom	2	188	28	94	14	7
21	Tulung	1	-	10	-	-	-
22	Jatinom	2	303	22	152	11	14
23	Kemalang	2	82	13	41	7	6
24	Klaten Selatan	2	550	46	275	23	12
25	Klaten Tengah	2	369	28	185	14	13
26	Klaten Utara	4	1.335	81	334	20	16
Jml	2018	49	6.003	648	95	10	7
	2017	47	5.631	428	120	9	13
	2016	46	4.855	611	106	13	9
	2015	45	5.357	607	99	12	7
	2014	42	5.379	627	105	13	7

Sumber : Dinas Pendidikan, 2019.

Berdasarkan Tabel 3.13. sebagaimana tersebut di atas dapat dilihat bahwa rata-rata rasio murid terhadap guru untuk jenjang pendidikan SMP Swasta adalah sebesar 7 – 13.

10) Manajemen Pelayanan Pendidikan

Manajemen Pelayanan Pendidikan diukur dengan indikator Angka melanjutkan sekolah dari Angka Melanjutkan dari SD/ MI ke SMP/ MTs dan dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA di Kabupaten Klaten di tahun 2014-2018 disajikan pada Tabel 3.14.

Tabel 3.14.
Perkembangan Angka Melanjutkan Sekolah dari SMP/MTs Ke SMA/MA/SMK
Kabupaten Klaten Tahun 2014-2018

Uraian	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Angka Melanjutkan dari SD/ MI ke SMP/ MTs	99,40	100,37	98,87	99,26	99,30
Angka Melanjutkan dari SMP/ MTs ke SMA/ MA/ SMK	89,16	96,64	92,43	88,28	95,48

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Klaten, 2019

Berdasarkan Tabel 3.13. sebagaimana tersebut di atas, peserta didik di jenjang pendidikan SD/MI yang melanjutkan ke jenjang pendidikan SMP/MTS pada tahun 2014-2018 perkembangannya bersifat fluktuatif, begitu pula untuk jenjang SMP/MTs. Hal ini mengkondisikan, bahwa angka melanjutkan sangat bersifat situasional.

11) Sarana dan Prasarana Sekolah

Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pendidikan sangat berpengaruh terhadap proses kegiatan belajar mengajar dan tentunya akan juga sangat berpengaruh terhadap capaian kualitas pendidikan di Kabupaten Klaten. Perkembangan kondisi Sarana dan Prasarana Sekolah dalam kondisi baik selama tahun 2014-2018 disajikan pada Tabel 3.15.

Tabel 3.15.
Persentase Ruang Kelas Dalam Kondisi Baik
Tahun 2014-2018

Uraian	Satuan	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Sekolah pendidikan SD/MI dalam kondisi baik	%	71,55	69,67	69,29	81,00	79,00
Sekolah pendidikan SMP/MTS dan SMA/SMK/MA dalam kondisi baik	%	89,20	89,61	88,23	96,30	80,00

Sumber : Dinas Pendidikan, 2019.

Berdasarkan Tabel 3.15. sebagaimana tersebut di atas kondisi ruang kelas gedung sekolah masih terdapat ruang kelas dalam kondisi tidak layak meskipun persentasenya kecil, sehingga rehabilitasi ruang kelas menjadi hal mutlak yang harus dilaksanakan.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait pemenuhan Pendidikan Sepanjang Hayat bagi masyarakat di Kabupaten Klaten. Pada tahun 2018, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis **“Terwujudnya Pemenuhan Kebutuhan Pendidikan Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Non Formal”** terdiri dari 6 (enam) program, diantaranya:

1. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
2. Pendidikan Dasar 9 (Sembilan) Tahun;
3. Pendidikan Menengah;
4. Pendidikan Non Formal;
5. Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan; dan
6. Manajemen Pelayanan Pendidikan.

Permasalahan

Urusan Pendidikan dengan permasalahan yang dihadapi, diantaranya:

- a. Masih tingginya angka anak usia sekolah, tetapi tidak sekolah;
- b. Kualitas kelulusan siswa belum memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan pasar kerja dan dunia usaha;
- c. Belum semua guru memenuhi kualifikasi standar minimal yang dipersyaratkan (D-4/S.1);
- d. Belum meratanya sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas;
- e. Belum meratanya kualitas pendidikan di semua jenjang pendidikan;
- f. Belum optimalnya penanaman nilai-nilai moralitas, budi pekerti dan integritas; dan
- g. Kurang meratanya penyebaran jumlah siswa pada jenjang sekolah dasar, terutama pada SD Negeri yang memungkinkan untuk diregruping.

Solusi

Solusi yang bisa dilakukan untuk memperbaiki layanan pendidikan, diantaranya:

- a. Perlunya peningkatan kualitas *pamong belajar* untuk mendampingi dan atau menekan anak putus sekolah dengan belajar mandiri;
- b. Perlunya kerjasama dengan dunia usaha untuk meningkatkan kualitas kelulusan siswa agar memiliki kualifikasi yang dibutuhkan pasar kerja dan dunia usaha;
- c. Perlunya sertifikasi dan peningkatan kualifikasi guru agar memiliki standar minimal yang dipersyaratkan (D-4/S.1); dan
- d. Perlunya pemerataan sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas untuk semua jenjang pendidikan.

2. Sasaran Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat dan Menurunnya Angka Kematian , Angka Kesakitan dan Kecacatan;

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kesehatan, bahwa azas penyelenggaraan kesehatan berdasarkan perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, perlindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender dan nondiskriminatif, norma-norma keagamaan. Serta memperhatikan ketentuan Pasal 3, dinyatakan bahwa tujuan pembangunan kesehatan untuk meningkatkan kesadaran kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya sebagai investasi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi.

Mengingat kesehatan sebagai hak dasar manusia yang harus diwujudkan dalam bentuk pemberian berbagai pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat melalui pelayanan kesehatan yang menyeluruh secara terarah, terpadu dan berkesinambungan, adil dan merata, serta aman, berkualitas, dan terjangkau oleh masyarakat. Bahwa untuk memenuhi hak, dan kebutuhan kesehatan setiap individu dan masyarakat dalam pelayanan kesehatan, serta memberikan perlindungan serta kepastian hukum kepada masyarakat, Pemerintah wajib menyiapkan dan/atau mengadakan kebutuhan upaya kesehatan masyarakat, fasilitas pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan, dan pembiayaan kesehatan yang harus diwujudkan.

Berdasarkan pasal 12 Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar diantaranya Urusan Kesehatan dengan parameter aksesibilitas pelayanan dasar kesehatan yang diarahkan untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan indikator meningkatnya Indek Pembangunan Manusia (IPM) yang ditandai dengan peningkatan kesehatan, pendidikan, dan pendapatan masyarakat. Juga dasar Undang-Undang 23 Tahun 2014 urusan kewenangan daerah Kabupaten/Kota berkaitan dengan urusan kesehatan mencakup diantaranya :1. Upaya kesehatan, 2. Sumber Daya Manusia Kesehatan, 3. Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman, dan 4. Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan.

Adapun capaian sasaran terwujudnya Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat dan menurunnya angka kematian , angka kesakitan dan kecacatan sebagaimana Tabel 3.16

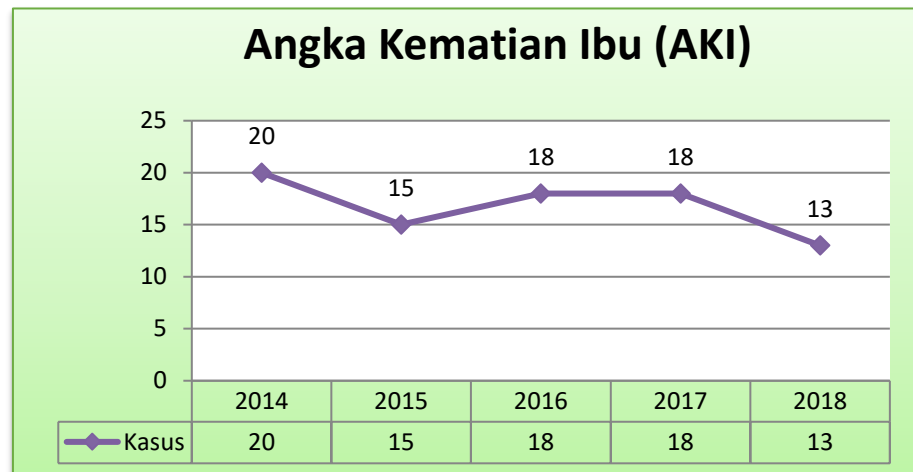
Tabel 3.16

**Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja
Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat dan menurunnya angka
kematian, angka kesakitan dan kecacatan**

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun 2018			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2018 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			Target	Realisasi	%		
1	Kasus kematian Ibu	15	17	13	123,53	14	92,86
2	Angka Kematian Bayi	12,94	10,13	10,7	94,37	10,07	94,11
3	Angka Kematian Balita	2,99	1,67	1,9	86,23	1,61	118,01
4	Prevalensi Gizi Buruk (BB/U)	0,75	0,73	0,56	123,29	0,70	80

1. Kasus Kematian Ibu Melahirkan

Perkembangan kasus kematian ibu melahirkan di Kabupaten Klaten selama Tahun 2014-2018 dapat disajikan pada Grafik 3.5.



Sumber: Dinas Kesehatan, 2019.

Grafik 3.5 Perkembangan Kasus Kematian Ibu Melahirkan di Kabupaten Klaten Tahun 2014-2018

Berdasarkan Grafik 3.5. sebagaimana tersebut di atas, kasus Kematian Ibu di Kabupaten Klaten dalam kurun waktu Tahun 2014-2018 cenderung bersifat fluktuatif. Penyebab kematian ibu, di samping akibat hipertensi dan pendarahan, juga disebabkan oleh faktor-faktor non medis. Kondisi ini menggambarkan derajat kesehatan masyarakat perlu di tingkatkan terutama di wilayah-wilayah kecamatan dengan kasus kematian ibu yang tinggi. Adapun kasus kematian ibu melahirkan selama tahun 2014-2018 menurut kecamatan dan Puskesmas disajikan pada Tabel 3.17.

Tabel 3.17.

Jumlah Kasus Kematian Ibu Melahirkan Menurut Kecamatan dan Puskesmas di Kabupaten Klaten Tahun 2014-2018

No	Kecamatan	Puskesmas	Kematian Ibu Melahirkan				
			2014	2015	2016	2017	2018
1	Prambanan	Prambanan	0	2	0	0	2
		Kebondalem Lor	0	0	0	0	0
2	Gantiwarno	Gantiwarno	1	0	0	1	0
3	Wedi	Wedi	0	1	3	0	1
4	Bayat	Bayat	3	1	0	1	1
		Cawas I	1	0	0	2	1
5	Cawas	Cawas II	1	1	0	1	1
		Trucuk I	1	1	1	1	0
6	Trucuk	Trucuk II	1	0	0	1	0
		Kalikotes	1	0	1	0	0
7	Kalikotes	Kalikotes	1	0	1	0	0
8	Kebonarum	Kebonarum	0	0	0	0	0
9	Jogonalan	Jogonalan I	0	2	1	1	0
		Jogonalan II	0	0	0	0	0
10	Manisrenggo	Manisrenggo	0	0	1	0	1
11	Karangnongko	Karangnongko	0	0	0	1	0
12	Ngawen	Ngawen	1	0	0	0	0
13	Ceper	Ceper	1	0	0	2	0
		Jambukulon	2	0	1	0	0
14	Pedan	Pedan	1	1	0	0	1
15	Karangdowo	Karangdowo	0	0	1	1	1
16	Juwiring	Juwiring	0	0	3	0	0
17	Wonosari	Wonosari I	0	0	0	1	1
		Wonosari II	0	0	1	0	0
18	Delanggu	Delanggu	1	0	1	1	0
19	Polanharjo	Polanharjo	0	1	0	0	1
20	Karanganom	Karanganom	0	1	0	2	1
21	Tulung	Tulung	0	0	0	0	0
		Majegan	0	0	1	0	0
22	Jatinom	Jatinom	1	0	0	0	1
		Kayumas	0	0	1	0	0
23	Kemalang	Kemalang	1	1	0	2	0
24	Klaten Selatan	Klaten Selatan	2	1	0	0	0
25	Klaten Tengah	Klaten Tengah	1	1	1	0	0
26	Klaten Utara	Klaten Utara	0	1	1	0	0
Jumlah			20	15	18	18	13

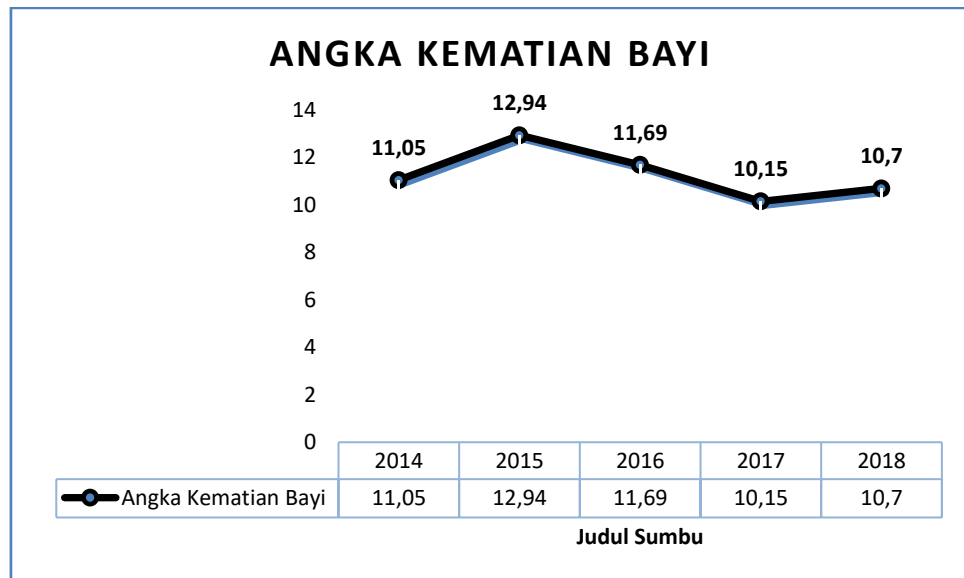
Sumber: Dinas Kesehatan, 2019.

Berdasarkan Tabel 3.17 sebagaimana tersebut di atas bisa dilihat bahwa setiap tahun masih ada ibu mati karena melahirkan, hal ini bisa disebabkan salah satunya karena alur pelayanan di fasilitas kesehatan yang agak panjang, terlebih untuk yang memakai Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang mana rujukan harus dilakukan ketika ibu yang hendak melahirkan memerlukan penanganan di fasilitas kesehatan yang lebih memadai, namun banyak kendala dalam penerapannya. Skema Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) membuat pasien harus mengikuti alur rujukan sesuai aturan dan ini terkadang membuat pasien terlambat

ditangani dan masih banyak faktor medis dan non medis lainnya yang menyebabkan kasus kematian ibu melahirkan cukup tinggi.

2. Angka Kematian Bayi dan Balita

Kondisi Angka Kematian Bayi di Kabupaten Klaten selama Tahun 2014-2018 disajikan pada Grafik 3.5.



Sumber: Dinas Kesehatan, 2019.

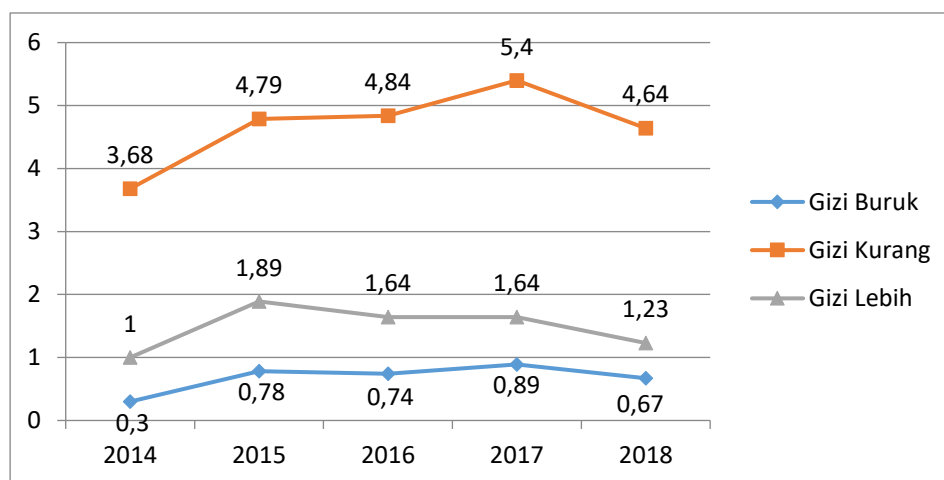
Grafik 3. 6. Perkembangan Angka Kematian Bayi di Kabupaten Klaten Tahun 2014-2018

Berdasarkan Grafik 3.6. sebagaimana tersebut di atas angka kematian bayi dalam kurun waktu Tahun 2014-2018 cenderung bersifat fluktuatif. Meski dalam tiga Tahun terakhir mengalami penurunan, tetapi Tahun 2018 angka kematian bayi cenderung naik. Penyebab Kematian bayi terbanyak adalah BBLR, Asfiksia dan kelainan kongenital. Derajat kesehatan masyarakat perlu ditingkatkan terutama di wilayah kecamatan dengan kasus kematian bayi yang tinggi, seperti Kecamatan: Juwiring, Bayat, Trucuk I dan Delanggu.

3. Prevalensi Gizi Buruk

Balita dengan status gizi buruk masih menjadi masalah karena berbagai penyebab. Penyebab balita mengalami gizi buruk karena: asupan makan yang kurang, pola jajanan makanan yang tidak memenuhi zat gizi, pola asuh orang tua yang tidak telaten memenuhi kebutuhan zat gizi anak asuhannya.

Kasus *underweight* (gizi buruk dan gizi kurang) dengan indikator berat badan menurut umur di Kabupaten Klaten selama Tahun 2014-2018 dari hasil pengukuran serentak dapat disajikan pada Grafik 3.6.



Sumber: Dinas Kesehatan, 2019.

Grafik 3.7. Perkembangan Persentase Gizi Buruk di Kabupaten Klaten Tahun 2014-2018

Berdasarkan Grafik 3.7. sebagaimana tersebut di atas dapat dilihat perkembangan selama tahun 2014-2018 dapat diturunkan. Namun ada beberapa wilayah yang perlu mendapat perhatian terkait kasus gizi buruk murni tanpa penyakit penyerta, diantaranya Kecamatan: Delanggu, Jogonalan, Trucuk, Wonosari, Kalikotes, Prambanan, Jatinom, Gantiwarno.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait peningkatan kualitas derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Klaten. Pada tahun 2018, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis "**peningkatan derajat kesehatan masyarakat**" terdiri dari 13 (tiga belas) program, diantaranya:

1. Upaya Kesehatan Masyarakat;
2. Obat dan Perbekalan Kesehatan;
3. Pengawasan Obat dan Makanan;
4. Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat;
5. Perbaikan Gizi Masyarakat;
6. Pengembangan Lingkungan Sehat;
7. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular;
8. Standarisasi Pelayanan Kesehatan;
9. Pelayanan Kesehatan masyarakat Miskin;
10. Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan prasarana sarana Puskesmas/Pustu dan Jaringannya;

11. Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Prasarana dan Sarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata;
12. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia; dan
13. Pelayanan Kesehatan.

Permasalahan

Urusan Kesehatan dengan permasalahan yang dihadapi, diantaranya:

- a. Masih diketemukannya kasus kematian ibu dan bayi.
- b. Angka kesakitan demam berdarah masih ditemui, penemuan infeksi HIV dan AIDS tiap tahun cenderung meningkat, serta adanya ancaman pandemik flu burung, serta penyakit yang bersumber dari binatang diantaranya :
 - Demam berdarah dengue .
 - Malaria
 - Filariatis
- c. Untuk jenis penyakit menular / infeksi tertentu belum dapat diatasi, di sisi lain angka kesakitan dan kematian beberapa penyakit tidak menular dan degeneratif seperti Diabetes Militus (DM), kardiovaskuler dan keganasan (kanker). Serta beberapa penyakit yang perlu kewaspadaan dini, diantaranya:
 - Penyakit menular Tuberculosis paru
 - Kusta penderita PB
 - Diare
 - Infeksi Saluran Pernapasan atas
 - HIV
 - Kejadian luar biasa KIPI
- d. Keadaan gizi : Berat Badan (BB) naik, BB di bawah garis merah dan Gizi buruk
- e. Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang penyehatan lingkungan.
- f. Penerapan perilaku hidup bersih dan sehat di masyarakat masih rendah, diantaranya: kebiasaan cuci tangan dengan sabun, sebelum makan dan sesudah buang air besar, serta kebiasaan merokok di masyarakat masih tinggi, dan
- g. Pelaksanaan Pembiayaan Jaminan Pelayanan Kesehatan belum optimal.

Solusi

Solusi yang bisa dilakukan untuk memperbaiki layanan kesehatan, diantaranya:

- a. Peningkatan kualitas pendampingan bagi ibu hamil di setiap Puskesmas dan layanan kesehatan masyarakat;

- b. Pemetaan kasus dan faktor resiko serta skrining penyakit ibu sebelum kehamilan. Peningkatan *antenatal care* (ANC) terpadu, didukung kelas ibu hamil untuk menjaga kontinuitas konseling, edukasi dan informasi bagi ibu hamil.

3. Sasaran Meningkatnya Pemanfaatan Pelayanan Kerumahsakitian oleh Masyarakat dan Menurunnya Angka Kematian di Rumah Sakit;

Kesehatan sebagai hak dasar manusia yang harus diwujudkan dalam bentuk pemberian berbagai pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat melalui pelayanan kesehatan yang menyeluruh secara terarah, terpadu dan berkesinambungan, adil dan merata, serta aman, berkualitas, dan terjangkau oleh masyarakat. Bahwa untuk memenuhi hak, dan kebutuhan kesehatan setiap individu dan masyarakat dalam pelayanan kesehatan, serta memberikan perlindungan serta kepastian hukum kepada masyarakat, Pemerintah wajib menyiapkan dan/atau mengadakan kebutuhan upaya kesehatan masyarakat, fasilitas pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan, dan pembiayaan kesehatan yang harus diwujudkan.

Oleh karena itu Pemerintah Daerah dalam meningkatkan pemanfaatan pelayanan Kerumahsakitian oleh masyarakat dan menurunnya angka kematian di Rumah Sakit didorong dengan mengutamakan dan mengoptimalkan pelayanan Rumah Sakit Daerah (RSD) didukung dengan kinerja Puskesmas untuk menekan angka kematian.

Adapun capaian sasaran "Meningkatnya Pemanfaatan Pelayanan Kerumahsakitian oleh Masyarakat dan Menurunnya Angka Kematian di Rumah Sakit" sebagaimana Tabel 3.18.

Tabel 3.18.

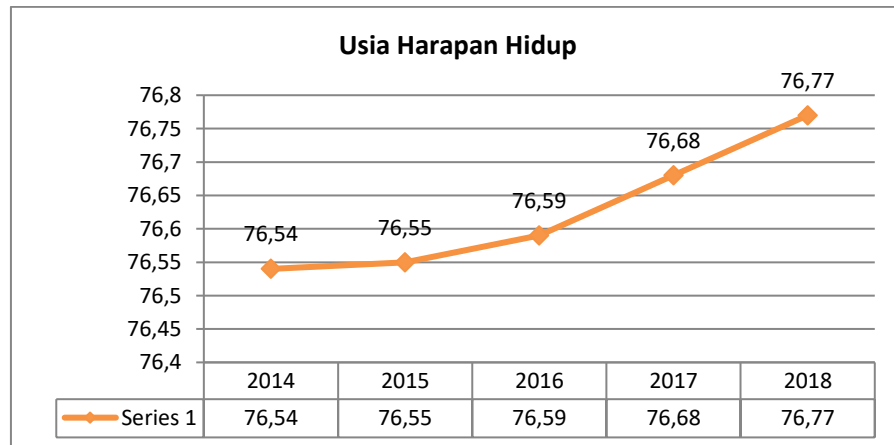
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja
Meningkatnya pemanfaatan pelayanan Kerumahsakitian oleh Masyarakat dan
menurunnya angka kematian di Rumah Sakit

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun 2018			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2018 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			Target	Realisasi	%		
1	Usia Harapan Hidup	76,59	76,62	76,77	100,20	76,62	100,20

Sumber: Dinas Kesehatan, 2019.

Usia harapan hidup (UHH) dalam arti usia hidup panjang dan sehat, di samping sebagai cerminan terhadap ukuran peningkatan

kesejahteraan penduduk, juga menjadi indikator meningkatnya derajat kesehatan masyarakat. Selama kurun waktu 2014-2018 UHH cenderung mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan antara lain oleh semakin tingginya kesadaran masyarakat terhadap budaya hidup bersih dan sehat, termasuk upaya pemberian asupan yang semakin berkualitas terhadap anak usia dini atau anak usia Bawah Lima Tahun (BALITA). Perkembangan UHH di Kabupaten Klaten tahun 2014-2018 disajikan pada Grafik 3.8.

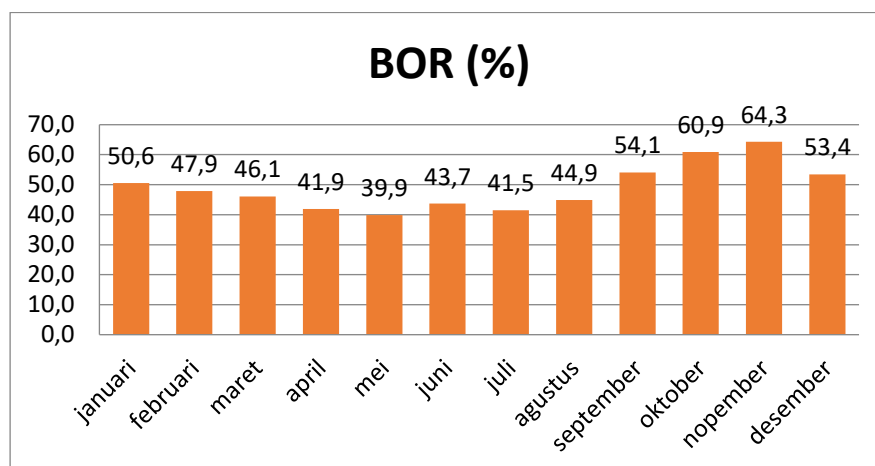


Sumber : Bappeda Provinsi Jawa Tengah 2019, diolah.

Grafik 3.8. Perkembangan Usia Harapan Hidup Masyarakat di Kabupaten Klaten Tahun 2014-2018

1) Cakupan Pelayanan RSD Bagas Waras

Kinerja pelayanan RSD Bagas Waras diukur dari indikator BOR (Persentase pemakaian tempat tidur pada satuan waktu tertentu). BOR Tahun 2018 adalah 49,1% dengan jumlah per bulan disajikan pada Grafik 3.9.

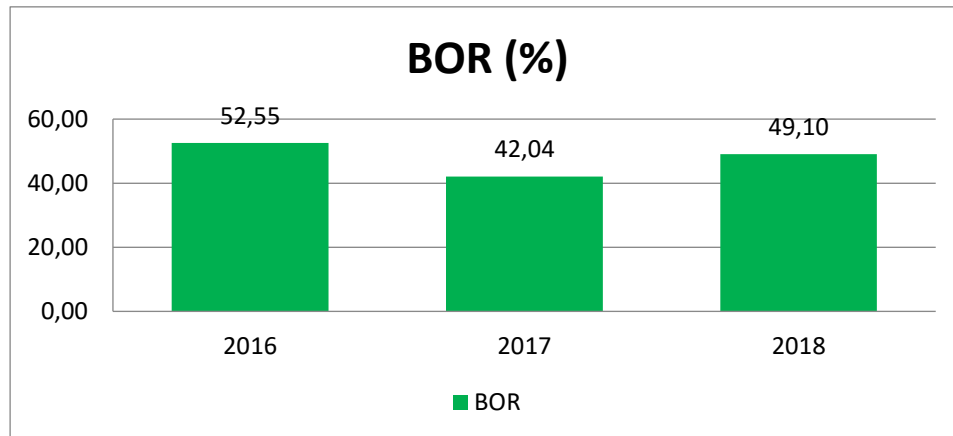


Sumber : RSD Bagas Waras, 2019

Grafik 3.9. Indikator BOR (Persentase pemakaian tempat tidur pada satuan waktu tertentu Menurut Bulan Tahun 2018)

Di samping itu, pada Tahun 2018 , jumlah kunjungan pasien sebanyak 70.161 jiwa dengan perincian: 1). Rata-rata kunjungan rawat inap sebanyak 7.214 orang/Tahun (atau rata-rata 20 orang/hari), 2). Rata-rata kunjungan rawatjalan sebanyak 53.272 orang/Tahun (atau rata-rata 146 orang/hari), dan 3). Rata-rata kunjungan IGD sebanyak 9.675 orang/Tahun (atau rata-rata 26 orang/hari).

Adapun kinerja pelayanan RSD Bagas Waras dapat dilihat pada Grafik 3.10.



Sumber : RSD Bagaswaras, 2019.

Grafik 3.10. Indikator BOR (Persentase pemakaian tempat tidur pada satuan waktu tertentu Tahun 2016-2018)

Berdasar pada Grafik 3.9. dan Grafik 3.10. indikator BOR di atas terlihat bahwa pada Tahun 2018 terjadi kenaikan persentase pemakaian tempat tidur dibanding Tahun 2017 sebesar 7,06.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait peningkatan kualitas derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Klaten. Pada tahun 2018, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis **“meningkatkan pemanfaatan pelayanan kerumahsakitannya oleh masyarakat dan menurunnya angka kematian di Rumah Sakit”** dengan program utama Pelayanan Kesehatan, dengan didukung beberapa program, diantaranya:

1. Upaya Kesehatan Masyarakat;
2. Obat dan Perbekalan Kesehatan;
3. Pengawasan Obat dan Makanan;
4. Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat;
5. Perbaikan Gizi Masyarakat;
6. Pengembangan Lingkungan Sehat;
7. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular;

8. Standarisasi Pelayanan Kesehatan;
9. Pelayanan Kesehatan masyarakat Miskin;
10. Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan prasarana sarana Puskesmas/Pustu dan Jaringannya;
11. Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Prasarana dan Sarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata; dan
12. Peningkatan Pelayanan kesehatan lansia, Ibu dan Anak.

Permasalahan

Urusan Kesehatan dengan permasalahan yang dihadapi, diantaranya:

1. Angka kesakitan demam berdarah masih ditemui, penemuan infeksi HIV dan AIDS tiap tahun cenderung meningkat, serta adanya ancaman pandemik flu burung, serta penyakit yang bersumber dari binatang diantaranya :
 - a. Demam berdarah dengue .
 - b. Malaria
 - Filariatis
2. Untuk jenis penyakit menular / infeksi tertentu belum dapat diatasi, di sisi lain angka kesakitan dan kematian beberapa penyakit tidak menular dan degeneratif seperti Diabetes Militus (DM), kardiovaskuler dan keganasan (kanker). Serta beberapa penyakit yang perlu kewaspadaan dini, diantaranya:
 - a. Penyakit menular Tuberculosis paru
 - b. Kusta penderita PB
 - c. Diare
 - d. Infeksi Saluran Pernapasan atas
 - e. HIV
 - f. Kejadian luar biasa KIPI
3. Pelaksanaan Pembiayaan Jaminan Pelayanan Kesehatan belum optimal.

Solusi

Solusi yang bisa dilakukan untuk memperbaiki layanan kesehatan, diantaranya:

- a. Peningkatan kualitas pendampingan bagi ibu hamil di setiap Puskesmas dan layanan kesehatan masyarakat;
- b. Pemetaan kasus dan faktor resiko serta skrining penyakit ibu sebelum kehamilan. Peningkatan *antenatal care* (ANC) terpadu, didukung kelas ibu hamil untuk menjaga kontinuitas konseling, edukasi dan informasi bagi ibu hamil.

4. Sasaran Meningkatnya Upaya Pencegahan Permasalahan Sosial dan Aksesibilitas PMKS dalam Memperoleh Pelayanan dan Rehabilitasi yang Berperspektif HAM;

Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Efektif dan Efisien bisanya dicerminkan ke dalam 3 (tiga) pilar yaitu akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi. Sehingga kelihatan, sejauh mana faktor kontribusi masyarakat turut andil menyelesaikan masalah agar ruang demokrasi tumbuh dan berkembang. Ukuran Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Efektif dan Efisien diukur pada upaya pencegahan permasalahan sosial dan aksesibilitas PMKS dalam memperoleh pelayanan dan rehabilitasi yang berperspektif HAM, sehingga sasaran strategis yang hendak dicapai dapat diukur.

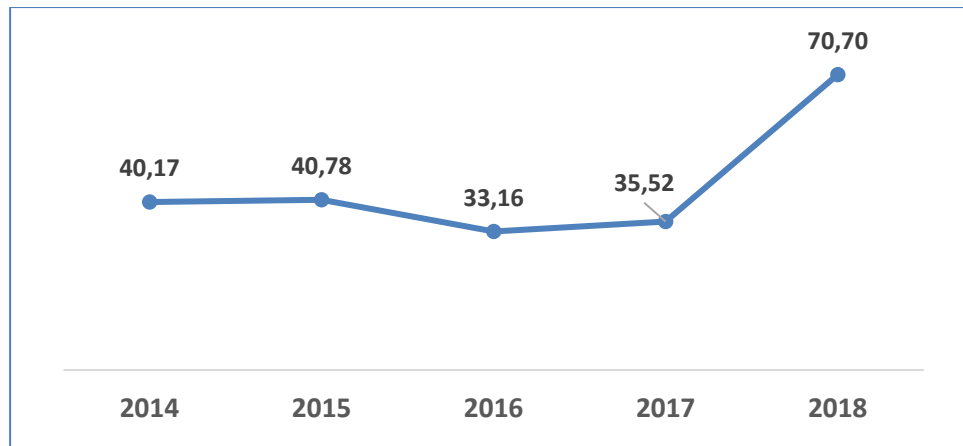
Adapun capaian sasaran Meningkatnya upaya pencegahan permasalahan sosial dan aksesibilitas PMKS dalam memperoleh pelayanan dan rehabilitasi yang berperspektif HAM sebagaimana Tabel 3.19.

Tabel 3.19.

**Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja
Meningkatnya upaya pencegahan permasalahan sosial dan aksesibilitas PMKS
dalam memperoleh pelayanan dan rehabilitasi yang berperspektif HAM**

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun 2018			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2018 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			Target	Realisasi	%		
1	Persentase penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	35,52	83	70,66	85,13	89	79,39
2	Persentase penguatan kapasitas PSKS	90	96	96	100	100	96
3	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	13,9	13,3	14,32	107,67	12,9	111,01
4	Persentase penduduk miskin	14,59	14,12	12,96	89,16	14,00	92,57

Pengentasan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) merupakan salah satu fokus pembangunan daerah di Kabupaten Klaten hingga saat ini. Program-kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka peningkatan perlindungan sosial belum sepenuhnya dapat mengatasi permasalahan PMKS secara keseluruhan, namun telah menunjukkan perkembangan ke arah yang positif. Hal ini ditunjukkan kinerja layanan sosial diukur dengan PMKS yang memperoleh bantuan, dan persentase PMKS skala Kabupaten yang menerima bantuan program pemberdayaan masyarakat melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi Sejenis Lainnya. Perkembangan PMKS yang memperoleh bantuan dapat tahun 2014–2018 disajikan pada Grafik 3.11.



Sumber: Dinas Sosial P3AKB, 2019.

Grafik 3.11. PMKS yang Memperoleh Bantuan Tahun 2014–2018

Berdasarkan Grafik 3.11. sebagaimana tersebut di atas, karena dukungan dan kepedulian dari berbagai pihak untuk mengurangi angka PMKS, khususnya peran Pemerintah daerah, keterlibatan masyarakat baik secara langsung maupun melalui kelompok-kelompok masyarakat akan bisa membuahkan hasil yang maksimal. Terhadap keluarga rawan sosial yang jumlahnya relatif sudah semakin berkurang, namun demikian tetap harus mendapatkan perhatian yang memadai dari semua pihak.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait peningkatan kualitas derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Klaten. Pada tahun 2018, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis “Meningkatnya upaya pencegahan permasalahan sosial dan aksesibilitas PMKS dalam memperoleh pelayanan dan rehabilitasi yang berperspektif HAM,” diantaranya:

1. Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya;
2. Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial; dan
3. Pembinaan Eks. Penyandang Penyakit Sosial.

Permasalahan

Urusan Sosial dengan permasalahan yang dihadapi, diantaranya:

1. Masih banyaknya masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang belum terselesaikan;
2. Minimnya sarana dan prasarana Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial; dan
3. Banyaknya Eks. Penyandang Penyakit Sosial (Gepeng) yang dibuang/dilepas dari daerah lain.

Solusi

Solusi yang bisa dilakukan untuk memperbaiki layanan sosial, diantaranya:

- a. Peningkatan kualitas pendampingan bagi petugas sosial dan layanan sosial masyarakat;
- b. Pemetaan kasus dan faktor resiko serta skrining sosial untuk menjaga kontinuitas konseling, edukasi dan penanganan Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Eks. Penyandang Penyakit Sosial.

5. Sasaran Menurunnya Angka Kelahiran (*Total Fertility Rate*);

Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Klaten dalam menekan angka kelahiran diupayakan dengan pelayanan keluarga berencana. Adapun capaian sasaran “**Menurunnya angka kelahiran (*Total Fertility Rate*)**” sebagaimana Tabel 3.20.

Tabel 3.20.

Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja
Menurunnya angka kelahiran (*Total Fertility Rate*)

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun 2018			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2018 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			Target	Realisasi	%		
1	Angka Kelahiran (<i>Total Fertility Rate</i>) / TFR	2,2	2,16	1,91	111,60	2,1	109,05

Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Klaten dalam menurunkan angka kelahiran dengan melaksanakan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dengan indikator:

1. Jumlah Peserta KB dan KB Aktif

Jumlah peserta KB baru dalam kurun waktu Tahun 2014-2018 mengalami peningkatan secara fluktuatif. Peserta KB baru pada Tahun 2014 sebanyak 28.254 peserta, dan pada Tahun 2015 turun menjadi 23.559 peserta KB baru, namun pada Tahun 2018 turun lagi menjadi 15.565 peserta KB baru. Hal ini disebabkan karena semakin meningkatnya kesadaran pasangan usia subur dalam menyiapkan keluarga sejahtera, dan kondisi sosial masyarakat. Gambaran peserta KB dan KB Aktif di Kabupaten Klaten tahun 2014-2018 disajikan pada Tabel 3.21.

Tabel 3.21.

Peserta KB dan KB Aktif di
Kabupaten Klaten Tahun 2014-2018

Tahun	Pasangan Usia Subur	Peserta KB Baru	Peserta KB Aktif
2014	206.812	28.254	172.333
2015	203.448	23.559	154.422
2016	201.950	26.461	158.943
2017	211.577	23.783	169.626
2018	196.717	15.565	137.109

Sumber : Dinas Sosial, P3AKB Kab. Klaten, 2019.

Berdasarkan Tabel 3.21. sebagaimana tersebut di atas, mengalami peningkatan secara fluktuatif. Peserta KB baru pada tahun 2014 sebanyak 28.254 peserta, dan pada tahun 2015 turun menjadi 23.559 peserta KB baru, namun pada tahun 2018 turun lagi menjadi 15.565 peserta KB baru.

2. Jumlah Keluarga Sejahtera

Perkembangan jumlah keluarga sejahtera tahun 2014-2017 mengalami peningkatan yang signifikan. Tahun 2018 jumlah keluarga Pra Sejahtera, Keluarga Sejahtera I (KS I), dan jumlah Keluarga Sejahtera (KS) sebanyak 372.750 jiwa. Data tersebut mengindikasikan bahwa upaya Pemerintah Kabupaten Klaten dalam melaksanakan program pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat mencapai hasil yang optimal. Jumlah Pra Sejahtera, KS I, dan keluarga sejahtera tahun 2014-2018 disajikan pada Tabel 3.22.

Tabel 3.22.

Jumlah Pentahapan Keluarga Sejahtera Menurut Jenisnya
di Kabupaten Klaten Tahun 2014-2018

Kecamatan	Pra Sejahtera	KS-I	KS	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01 Prambanan	1.425	3.103	9.233	4.528
02 Gantiwarno	2.110	2.275	8.356	4.385
03 Wedi	1.626	3.234	11.195	4.860
04 Bayat	5.644	3.182	8.413	8.826
05 Cawas	2.689	4.003	12.151	6.692
06 Trucuk	4.724	4.302	13.411	9.026
07 Kalikotes	894	2.402	6.806	3.296
08 Kebonarum	370	1.203	3.946	1.573
09 Jogonalan	1.812	3.519	10.835	5.331

Kecamatan	Pra Sejahtera	KS-I	KS	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
10 Manisrenggo	1.754	3.441	7.972	5.195
11 Karangnongko	2.002	2.116	7.311	4.118
12 Ngawen	1.165	4.137	9.269	5.302
13 Ceper	1.222	5.268	14.080	6.490
14 Pedan	1.395	3.433	9.534	4.828
15 Karangdowo	3.135	2.603	9060	5.738
16 Juwiring	1.740	3.777	10.022	5.517
17 Wonosari	2.956	3.682	10.206	6.638
18 Delanggu	481	2.897	8.103	3.378
19 Polanharjo	1.146	2.802	8.551	3.948
20 Karanganom	1.343	3.305	9.444	4.648
21 Tulung	2.588	2.986	9.629	5.574
22 Jatinom	4.129	3.149	8.719	7.278
23 Kemalang	3.239	2.468	6.341	5.707
24 Klaten Selatan	1.016	3.165	8.998	4.181
25 Klaten Tengah	941	2.369	8.318	3.310
26 Klaten Utara	1.142	2.867	8471	4.009
2018	52.688	81.688	238.374	372.750
2017	80.935	114.736	192.994	388.665
2016	67.400	83.239	239.583	390.222
2015	68.814	80.446	236.200	385.460
2014	65.271	75.559	223.226	364.056

Sumber : Dinas Sosial, P3AKB Kab. Klaten, 2019.

Berdasarkan Tabel 3.22. sebagaimana tersebut di atas, pada tahun 2018 jumlah keluarga Pra Sejahtera sebanyak 52.688 jiwa, jumlah Keluarga Sejahtera I (KS I) sebanyak 81.688 jiwa, dan jumlah Keluarga Sejahtera (KS) sebanyak 238.374 jiwa.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait peningkatan kualitas derajat kesehatan masyarakat untuk menurunkan angka kelahiran. Pada tahun 2018, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis “angka kelahiran (Total Fertility Rate)”, diantaranya:

1. Keluarga Berencana;
2. Peningkatan Kesehatan Reproduksi Remaja; dan
3. Pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB Mandiri.

Permasalahan

Urusan keluarga berencana untuk menekan angka melahirkan dengan permasalahan yang dihadapi, diantaranya:

1. Tingginya angka drop out KB; dan
2. Banyak Pasangan usia subur.

Solusi

Solusi yang bisa dilakukan untuk memperbaiki layanan keluarga berencana, diantaranya:

- a. Peningkatan kualitas pendampingan bagi masyarakat, terutama pasangan usia subur;
- b. Pemetaan kasus dan faktor resiko serta skrining sosial untuk menjaga kontinuitas konseling, edukasi dan penanganan keluarga berencana.

6. Sasaran Meningkatnya Hasil Pengembangan dan Pembinaan Pemuda dan Olahraga;

Lembaga atau organisasi kepemudaan yang ada di Kabupaten Klaten meliputi: (a) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI); (b) Organisasi Kemasyarakatan Pemuda; (c) Lembaga Sosial Pemuda, Lembaga kepemudaan yang umumnya berbentuk Yayasan; (d) Organisasi Pemuda Partai Politik; (e) Organisasi Mahasiswa; (f) Praja Muda Karana (Pramuka); (g) Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) tingkat SLTA; (h) Karang Taruna; (i) Organisasi Pemuda Kedaerahan; (j) Lembaga Pemuda Profesi; (k) Perkumpulan Pemuda di bidang Seni; (l) Klub Ilmuwan Muda; dan (m) Lembaga Pemuda Pencinta Alam (n) Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI). Lembaga-lembaga tersebut sebagian besar secara organisasi bisa berjalan namun kualitas dan kapasitasnya masih rendah, sehingga masih perlu adanya pembinaan secara simultan oleh pihak-pihak yang terkait.

Adapun capaian sasaran "Meningkatnya Hasil Pengembangan dan Pembinaan Pemuda dan Olahraga" sebagaimana Tabel 3.23.

Tabel 3.23.

Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Hasil Pengembangan dan Pembinaan Pemuda dan Olahraga

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun 2018			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2018 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			Target	Realisasi	%		
1	Persentase Kenaikan Prestasi Pemuda	5	10	12	120	60	20,00
2	Persentase Kenaikan Prestasi Olahraga	5	5	5	100	30	16,67

Perkembangan jumlah organisasi kepemudaan dan jumlah organisasi olahraga relatif stabil, hanya saja kegiatan keolahragaan yang khusus diperuntukkan bagi penyandang disabilitas masih sangat rendah. Jumlah klub/cabang olahraga mengalami penurunan, hal ini menunjukkan pembinaan terhadap klub/cabang olahraga masih kurang. Sedangkan jumlah gedung olah raga sudah cukup merata disetiap kecamatan, namun yang memenuhi standar sarana dan prasarana gedung olahraga baru ada dua yaitu GOR Gelar Sena dan Stadion Trikoyo.

Perkembangannya kepemudaan dan olahraga dapat dilihat pada tabel 3.24.

Tabel 3.24.

Perkembangan Kepemudaan dan Olahraga
di Kabupaten Klaten Tahun 2014-2018

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2014	2015	2016	2017	2018
1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Jml klub/cabang olahraga	Cabang	31	31	31	31	31
2.	Jml gedung Olahraga Tk. Kecamatan	Gedung	26	26	26	26	26
3.	Jml Organisasi Pemuda	Organisasi	26	26	29	29	29
4.	Jml Organisasi Olahraga	Organisasi	8	8	35	35	35

Sumber : Disparbudpora Kabupaten Klaten, 2019.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait peningkatan kualitas pemuda dan olahraga. Pada tahun 2018, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis "Meningkatnya Hasil Pengembangan dan Pembinaan Pemuda dan Olahraga," diantaranya:

1. Peningkatan Peran Serta Pemuda dalam Pembangunan; dan
2. Pembinaan dan Pemasyaratan Olahraga.

Permasalahan

Peningkatan kualitas pemuda dan prestasi olahraga dengan permasalahan yang dihadapi, diantaranya:

1. Usia produktif memiliki kepekaan psikologis sesuai dengan pilihannya sendiri, kadang program kepemudaan Pemerintah kurang menyentuh kebutuhan pemuda secara umum; dan
2. Rendahnya prestasi olahraga, karena minimnya pembinaan dan penghargaan bagi atlet berprestasi.

Solusi

Solusi yang bisa dilakukan untuk memperbaiki peningkatan kualitas pemuda dan prestasi olahraga, diantaranya:

- a. Peningkatan kualitas pendampingan bagi pemuda, sesuai dengan dinamika yang berkembang; dan
- b. Pemetaan kasus dan faktor resiko serta skrining sosial untuk menjaga kontinuitas konseling, edukasi dan pendampingan pemuda dan atlet berbakat; dan
- c. Pemberian penghargaan yang sepadan bagi atlet dan pemuda yang berprestasi.

7. Sasaran Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan dan Pelestarian Seni Budaya Daerah, Kawasan Cagar Budaya, Situs dan Benda Cagar Budaya

Upaya Pemerintah kabupaten dalam meningkatkan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan dan Pelestarian Seni Budaya Daerah, Kawasan Cagar Budaya, Situs dan benda Cagar Budaya dengan melakukan berbagai event dan baluran budaya daerah. Langkah ini diharapkan akan memperkuat daya saing daerah melalui seni dan budaya.

Adapun capaian sasaran Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan dan Pelestarian Seni Budaya Daerah, Kawasan Cagar Budaya, Situs dan benda Cagar Budaya sebagaimana Tabel 3.25.

Tabel 3.25.

Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan dan Pelestarian Seni Budaya Daerah, Kawasan Cagar Budaya, Situs dan Benda Cagar Budaya

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun 2018			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2018 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			Target	Realisasi	%		
1	Persentase Kenaikan Penyelenggaraan Pagelaran Seni dan Budaya	5	6	3,2	53,33	6	53,33
2	Persentase Peningkatan Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	7	10	14,3	143	10	143

1. Penyelenggaraan Seni dan Budaya

Perkembangan jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya serta sarana penyelenggaraan seni dan budaya selama tahun 2014-2018 dapat disajikan pada Tabel 3.26.

Tabel 3.26.

Jumlah Penyelenggaraan Seni dan Budaya
di Kabupaten Klaten Tahun 2014-2018

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan Budaya	kegiatan	52	52	52	52	28
2	Jumlah sarana Penyelenggaraan seni dan Budaya	Tempat	12	12	12	12	12

Sumber : Disparbudpora Kab. Klaten, 2019.

Promosi, pengembangan dan pembinaan seni budaya daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten dengan pengiriman Tim kesenian Kabupaten ke TMII, ke Provinsi Jawa Tengah dan beberapa kabupaten lain. Begitu juga dengan pemberian bantuan keuangan kepada sanggar-sanggar kesenian yang ada di Kabupaten Klaten semakin intensif.

Upaya untuk perlindungan dan pelestarian seni budaya daerah akan didaftarkan melalui HAKI (Hak Atas Kepemilikan Intelektual), diantaranya: a) Lurik ATBM; b) Tari Lurik Payung; dan c) Tari Lurik Asri. Begitu juga dengan pelestarian dan penggunaan bahasa Jawa dialek Yogyakarta-Surakarta yang diimplementasikan dalam bentuk lomba dongeng Bahasa Jawa, Lomba Dalang Muda, dan mewajibkan penggunaan bahasa Jawa halus setiap hari Kamis di semua OPD Kabupaten Klaten.

2. Jumlah cagar budaya yang dilestarikan.

Selama tahun 2014-2018 perkembangan jumlah cagar budaya yang dilestarikan di Kabupaten Klaten tidak ada perubahan. Jumlah Cagar Budaya yang dilestarikan di Kabupaten Klaten pada Tahun 2014-2018 dapat dilihat pada Tabel 3.27.

Tabel 3.27.

Jumlah Cagar Budaya Yang Dilestarikan
di Kabupaten Klaten Tahun 2014-2018

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Jumlah Candi Purbakala	Jumlah	8	8	8	8	8
2	Jumlah Makam	Jumlah	4	4	4	4	4
3	Pemandangan Alam	buah	2	2	2	2	2
4	Museum	buah	1	1	1	1	1

Sumber : Disparbudpora Kabupaten Klaten, 2019.

Berdasarkan Tabel 3.27 sebagaimana tersebut di atas, jumlah cagar budaya yang dilestarikan selama tahun 2014-2018 tidak mengalami perkembangan, sebab penambahan maupun pengurangan cagar budaya memerlukan verifikasi dari Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Budaya dan Pariwisata serta UNESCO.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait Meningkatkan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan dan Pelestarian Seni Budaya Daerah, Kawasan Cagar Budaya, Situs dan benda Cagar Budaya. Pada tahun 2018, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis Meningkatkan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan dan Pelestarian Seni Budaya Daerah, Kawasan Cagar Budaya, Situs dan benda Cagar Budaya, diantaranya:

1. Pengelolaan Kekayaan Budaya;
2. Pengembangan Nilai Budaya; dan
3. Pengelolaan Keragaman Budaya,

Permasalahan

Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan dan Pelestarian Seni Budaya Daerah, Kawasan Cagar Budaya, Situs dan benda Cagar Budaya dengan permasalahan yang dihadapi, diantaranya:

1. Kekayaan, nilai dan keberagaman budaya yang berkembang apabila tidak dirawat dan dipelihara akan mengakibatkan *culture lag (kemandegan budaya)*, dan menjadi ancaman desintegrasi bangsa; dan
2. Kurangnya pembinaan yang kontinu bagi pengelolaan kekayaan budaya, nilai budaya, dan keberagaman budaya.

Solusi

Solusi yang bisa dilakukan untuk memperbaiki peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan dan Pelestarian Seni Budaya Daerah, Kawasan Cagar Budaya, Situs dan benda Cagar Budaya, diantaranya:

- a. Peningkatan kualitas pendampingan bagi pamong budaya, sesuai dengan dinamika yang berkembang; dan
- b. Pemetaan kasus dan faktor resiko serta skrining sosial untuk menjaga kontinuitas konseling, edukasi untuk pengembangan dan pengelolaan budaya; dan
- c. Pemberian penghargaan yang sepadan bagi pelaku seni dan budaya yang berprestasi.

8. Sasaran Meningkatnya Kunjungan Masyarakat ke Perpustakaan;

Upaya Pemerintah kabupaten dalam meningkatkan kunjungan masyarakat ke perpustakaan dengan melakukan berbagai event daerah. Langkah ini diharapkan akan meningkatkan budaya baca masyarakat. Adapun capaian sasaran Meningkatnya Kunjungan Masyarakat ke Perpustakaan disajikan pada Tabel 3.28.

Tabel 3.28.

Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Kunjungan Masyarakat ke Perpustakaan

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun 2018			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2018 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			Target	Realisasi	%		
1	Persentase Kenaikan kunjungan masyarakat	4	5	65,79	1.315,8	5	1.315,8

Pada Tahun 2018 jumlah perpustakaan desa sebanyak 43 unit dan perpustakaan kelurahan sebanyak 2 unit. Layanan perpustakaan keliling sebanyak 5 unit yang melayani 26 kecamatan di Kabupaten Klaten, secara bergilir sesuai jadwal yang ditetapkan. Terdapat juga layanan perpustakaan keliling dengan 5 unit sepeda motor untuk merolling buku pada daerah yang tidak terjangkau bus keliling. Adapun perkembangan pengelolaan perpustakaan di Kabupaten Klaten tahun 2014-2018 disajikan pada Tabel 3.29.

Tabel 3.29.

Perkembangan Jumlah Pengunjung Perpustakaan
di Kabupaten Klaten Tahun 2014-2018

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah koleksi perpustakaan	Judul	38.481	41.464	43.979	44.687	45.362
2	Jumlah pengunjung perpustakaan	Orang	7.648	7.673	40.003	41.225	68.346

Sumber : Dinas Arsip dan Perpustakaan Kab. Klaten, 2019

Perkembangan jumlah perpustakaan desa selama tahun 2014-2018 disajikan pada Tabel 3.30.

Tabel 3.30.

Perkembangan Jumlah Perpustakaan Desa
di Kabupaten Klaten Tahun 2014 – 2018

NO	Tahun	Jumlah Perpustakaan
(1)	(2)	(3)
1	2018	45
2	2017	45
3	2016	44
4	2015	44
5	2014	42

Sumber : Dinas Arsip dan Perpustakaan Kab. Klaten, 2019.

Berdasarkan Tabel 3.30. sebagaimana tersebut di atas, perkembangan lima tahun terakhir (tahun 2014-2018) bahwa terdapat peningkatan jumlah perpustakaan yang didirikan di desa-desa setiap tahunnya. Namun demikian jumlah perpustakaan desa sampai dengan tahun terakhir hanya sejumlah 45 desa dari 391 desa (atau baru 11,50% dari jumlah desa).

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait upaya peningkatan jumlah pengunjung perpustakaan. Pada tahun 2018, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis "Meningkatnya Kunjungan Masyarakat ke Perpustakaan", dengan program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan.

Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi untuk meningkatkan kunjungan masyarakat ke Perpustakaan, diantaranya:

1. Terbatasnya buku literatur yang diminati/dibutuhkan pengunjung; dan
2. Kurang representatifnya ruang baca, sarana dan prasarana perpustakaan.

Solusi

Solusi yang bisa dilakukan untuk memperbaiki peningkatan pengunjung perpustakaan, diantaranya:

- Peningkatan kualitas pengelola perpustakaan, sesuai dengan dinamika yang berkembang; dan
- Menciptakan lingkungan perpustakaan yang representatif; dan
- Menghimpun buku-buku masyarakat yang memiliki nilai untuk dikelola sebagai museum buku..

9. Sasaran Meningkatnya Profesionalisme Aparatur Pemerintah Daerah;

Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Efektif dan Efisien bisanya dicerminkan ke dalam 3 (tiga) pilar yaitu akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi. Sehingga kelihatan, sejauh mana faktor kontribusi masyarakat turut andil menyelesaikan masalah agar ruang demokrasi tumbuh dan berkembang. Ukuran Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Efektif dan Efisien diukur dari tingkat profesionalisme aparatur Pemerintah daerah, sejauh mana data dan informasi dipakai sebagai *road map* reformasi birokrasi untuk meningkatkan kualitas layanan publik.

Adapun capaian sasaran Meningkatnya profesionalisme aparatur Pemerintah daerah sebagaimana Tabel 3.31.

Tabel 3.31.

Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Profesionalisme Aparatur Pemerintah Daerah

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun 2018			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2018 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			Target	Realisasi	%		
1	Indeks Profesionalitas ASN	-	82,06	74	90,18	87,36	84,71

**) catatan: Kondisi awal belum terisi karena pengisian Indeks Profesionalitas ASN dimulai tahun 2017.*

Tuntutan profesionalitas aparatur sipil negara merupakan perwujudan akuntabilitas kinerja Pemerintah sebagai kewajiban Pemerintah yang harus bisa diwujudkan untuk mempertanggung-jawaban mandat yang telah diberikan dalam mengelola urusan penyelenggaraan Pemerintah. Capaian Indeks Profesionalitas ASN tahun 2018 merupakan cerminan sejauh mana integritas ASN dalam menjalankan mandat.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait Meningkatnya profesionalisme aparatur Pemerintah daerah. Pada tahun 2018, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis Meningkatnya profesionalisme aparatur Pemerintah daerah terdiri dari 2 (dua) program, diantaranya:

1. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur; dan
2. Pembinaan dan Pengembangan Aparatur.

Permasalahan :

- a. Belum meratanya penyebaran ASN yang berkualitas untuk menempati jabatan strategis di perangkat daerah tertentu; dan
- b. Masih terbatasnya kemampuan SDM perencana dan pelaporan di jajaran OPD untuk mempercepat terwujudnya Pemerintahan yang kredibel.

Solusi :

- a. Meningkatkan koordinasi di semua lini untuk meningkatkan kapasitas ASN; dan
- b. Membangun basis data terpadu, untuk mempercepat terwujudnya ASN yang berintegritas dan kompetitif.

10. Sasaran Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah;

Untuk mewujudkan sasaran “*Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah*” sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Klaten diukur Opini BPK terhadap LKPD.

Opini BPK terhadap LKPD merupakan penilaian atas kinerja keuangan daerah yang dilakukan oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) untuk menilai sejauh mana akuntabilitas dan kinerja keuangan Pemerintah daerah telah dilaksanakan dengan baik. Dasar penilaian BPK berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Badan Pemeriksa keuangan, berdasarkan ketentuan ini pemeriksaan dilakukan secara periodik setiap tahun, dan pemeriksaan ini mencakup neraca, laporan realisasi anggaran, laporan kas, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan yang dihasilkan atas pemeriksaan ini secara bertingkat, terdiri atas: Tidak Wajar (TD), Tidak Memberikan Pendapat (TMP), Wajar dengan Pengecualian (WDP), dan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Adapun capaian sasaran “*Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah*” sebagaimana Tabel 3.32.

Tabel 3.32.

Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja
Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun 2018			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2018 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			Target	Realisasi	%		
1	Opini BPK terhadap LKPD	WTP	WDP	WDP	100	WTP	75

Realisasi atas target kinerja keuangan menunjukkan hasil kinerja sangat tinggi, atau menghasilkan opini penilaian *WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)*, satu prestasi yang belum pernah diperoleh selama ini. Kinerja ini merupakan komitmen bersama disemua jajaran Pemerintah Kabupaten Klaten untuk mewujudkan aspek akuntabilitas pelaksanaan program/kegiatan, transparansi penggunaan anggaran, dan tertib administrasi sebagai bagian dari fakta integritas yang telah dibangun dan diciptakan penyelenggara negara. Adapun Opini BPK atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2013–2017 disajikan pada Tabel 3.33

Tabel 3.33.

Opini BPK Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Klaten
Tahun 2013–2017

Tahun	Opini BPK	Keterangan
2013	WDP	Paragraf penjabar berupa: penataan usaha persediaan di 43 SKPD tidak sesuai dengan pengelolaan aset tetap tidak tertib, realisasi intensif dan biaya pemungutan pajak daerah melebihi ketentuan, penganggaran dan pelaksanaan bantuan keuangan tidak sesuai ketentuan, serta sub pekerjaan speaker pembangunan Masjid Agung tahap II tidak sesuai spesifikasi.
2014	WDP	Paragraf penjabar berupa : Belum memadainya pengelolaan aset tetap dan pengelolaan retribusi izin gangguan dan retribusi izin mendirikan bangunan, kurang memadainya pengelolaan penempatan dana cadangan serta kelebihan pembayaran atas selisih harga timpang dan kekurangan volume pekerjaan.
2015	WTP	Paragraf penjabar berupa: berlalutnya pekerjaan pembangunan menara Masjid Agung, belum memadainya data rincian aset peralatan dan aset tetap lainnya pada sekolah-sekolah, kelebihan pembayaran perjalanan dinas, serta program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian pegawai ASN.

2016	WDP	Paragraf penjelas berupa: belum memadainya data rincian aset peralatan dan aset tetap lainnya pada sekolah-sekolah, kelebihan pembayaran perjalanan dinas, serta program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian pegawai ASN.
2017	WDP	Paragraf penjelas berupa: belum memadainya data rincian aset peralatan dan aset tetap lainnya perangkat daerah dan pengelolaan dana BOS.

Sumber : Badan Pengelola Keuangan Daerah, 2019.

*) Catatan: Opini BPK tahun 2018 belum keluar.

Hasil penilaian sebagaimana tersebut pada Tabel 3.33. di atas, berdasarkan atas Proses pemeriksaan ini meliputi eksaminasi atas dasar pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah pengungkapan laporan keuangan, serta penilaian atas prinsip akuntabilitas yang digunakan dan estimasi yang signifikan, serta penyajian laporan keuangan secara menyeluruh yang dikerjakan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah pada tahun 2018, dengan penguatan program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Permasalahan :

- a. Belum meratanya penyebaran ASN yang berkualitas untuk menempati jabatan strategis di perangkat daerah tertentu; dan
- b. Masih terbatasnya kemampuan SDM perencana dan pelaporan di jajaran OPD untuk mempercepat terwujudnya Pemerintahan yang kredibel.

Solusi :

- a. Meningkatkan koordinasi di semua lini untuk meningkatkan kapasitas ASN yang mengelola barang dan jasa daerah; dan
- b. Membangun basis data terpadu, untuk mempercepat terwujudnya ASN yang berintegritas dan kompetitif untuk melaksanakan program dan kegiatan berbasis kinerja.

11. Sasaran Meningkatnya Kualitas Layanan dan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD;

Salah satu tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD adalah mendukung tugas pokok DPRD, dan membuat laporan administrasi dan keuangan. Adapun capaian sasaran "Meningkatnya kualitas layanan dan akuntabilitas kinerja sekretariat DPRD" tahun 2018 sebagaimana Tabel 3.34.

Tabel 3.34.

**Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja
Meningkatnya kualitas layanan dan akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD**

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun 2018			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2018 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			Target	Realisasi	%		
1	Persentase Raperda yang disahkan tepat waktu	70	85	93,10	109,53	85	109,53

Mengacu pada pelaksanaan Perubahan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021, serta Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2018 maka capaian kinerja organisasi yang telah dilaksanakan Sekretariat DPRD sampai dengan Tahun 2018 sebagaimana Tabel 3.35.

Tabel 3.35.

**Capaian Kinerja Organisasi
Berdasarkan Pelaksanaan Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2016-2021
Sampai dengan Tahun 2018**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (n-1)	Tahun 2018			Target Renstra	
				Target	Realisasi	% Capaian	Target Akhir Renstra	% capaian thd target akhir Renstra
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=[(4)+(6)]/(8)*100
1	Menyempurnakan sistem dan prosedur pelayanan kepada DPRD	Jumlah Keputusan DPRD dan Keputusan Pimpinan DPRD yang ditetapkan	123	56	56	100	347	51,59
2	Meningkatnya kualitas layanan legislasi DPRD	Jumlah produk legislasi DPRD	35	28	28	100	140	45
		Jumlah produk pengawasan DPRD	28	14	14	100	84	50
		Jumlah produk penganggaran yang dihasilkan	8	4	4	100	18	66,67

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 4 (empat) indikator kinerja sasaran yang sifatnya progresif, diperoleh hasil:

- a. Jumlah Keputusan DPRD dan Keputusan Pimpinan DPRD yang ditetapkan
Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap Jumlah Keputusan DPRD dan Keputusan Pimpinan DPRD yang ditetapkan pada tahun 2018 capaian kinerjanya sebesar 100% (atau dengan Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja ***Sangat Baik***). Jumlah Keputusan DPRD dan Keputusan Pimpinan DPRD sampai dengan tahun 2018 sebanyak 179 produk Keputusan DPRD dan Keputusan Pimpinan DPRD atau Persentase capaian terhadap target akhir Renstra sudah mencapai 51,59%.
- b. Jumlah Produk Legislasi DPRD.
Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap Jumlah produk legislasi DPRD pada tahun 2018 capaian kinerjanya sebesar 100% (dengan Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja ***Sangat Baik***). Jumlah produk legislasi DPRD sampai dengan tahun 2018 sebanyak 63 produk legislasi DPRD (Perda) atau Persentase capaian terhadap target akhir Renstra sudah mencapai 45%.
- c. Jumlah Produk Pengawasan DPRD.
Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap indikator Jumlah produk pengawasan DPRD pada tahun 2018 capaian kinerjanya sebesar 100% (dengan Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja ***Sangat Baik***). Jumlah produk pengawasan DPRD sampai dengan tahun 2018 sebanyak 42 Obyek pengawasan (Obrik) atau Persentase capaian terhadap target akhir Renstra sudah mencapai 50%.
- d. Jumlah Produk Penganggaran Yang Dihasilkan
Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap indikator Jumlah Produk Penganggaran yang Dihasilkan pada tahun 2018 capaian kinerjanya sebesar 100% (dengan Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja ***Sangat Baik***). Jumlah produk penganggaran yang dihasilkan sampai dengan tahun 2018 sebanyak 12 produk penganggaran atau persentase capaian terhadap target akhir Renstra sudah mencapai 66,67%.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait "*Meningkatnya Kualitas Layanan dan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD*" pada tahun 2018, dengan penguatan program peningkatan kapasitas DPRD.

Permasalahan :

- a. Belum meratanya penyebaran ASN yang berkualitas untuk mendukung tugas dan fungsi DPRD; dan
- b. Tingginya mobilitas DPRD yang tidak diimbangi kecepatan pengadministrasian kegiatan terkadang belum bisa diukur sebagai capaian kinerjanya.

Solusi :

- a. Meningkatkan koordinasi di semua lini untuk meningkatkan kapasitas ASN yang mengelola barang dan jasa daerah; dan
- b. Membangun basis data terpadu, untuk mempercepat terwujudnya ASN yang berintegritas dan kompetitif untuk melaksanakan program dan kegiatan berbasis kinerja.

12. Sasaran Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah;

Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Efektif dan Efisien dicerminkan ke dalam 3 (tiga) pilar yaitu akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi. Sehingga kelihatan, sejauh mana faktor kontribusi masyarakat turut andil menyelesaikan masalah agar ruang demokrasi tumbuh dan berkembang. Ukuran Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Efektif dan Efisien diukur pada saat rencana disusun, sejauh mana data dan informasi dipakai sebagai *road map* untuk menyusun sasaran strategis yang hendak dicapai, juga sejauh mana konsistensi antar dokumen perencanaan dan penganggaran dapat terlaksana dengan tepat waktu dan manfaat.

Adapun capaian sasaran "Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah" sebagaimana Tabel 3.36.

Tabel 3.36.

Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun 2018			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2018 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			Target	Realisasi	%		
1	Tingkat Konsistensi dan ketepatan waktu Perencanaan	71	100	95	95	90	99,54

Perencanaan pembangunan wajib berbasis data dan informasi pelaksanaan pembangunan tahun-tahun sebelumnya. Sehingga sesuai dengan Pasal 17 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dijelaskan bahwa RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) memuat kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun dari sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat harus didukung **data dan informasi pelaksanaan pembangunan**.

Memperhatikan ketentuan di atas, perencanaan pembangunan daerah harus didukung **base line data dan informasi pembangunan** yang akurat, dan tepat manfaat. Dukungan semua pihak untuk mewujudkan perencanaan yang tepat waktu dan manfaat, serta untuk menjaga konsistensi antar dokumen rencana sangat dibutuhkan sekaligus sebagai upaya kita mendukung terwujudnya masyarakat Klaten yang **Maju, Mandiri dan Berdaya Saing**.

13. Sasaran Meningkatnya Tata Kelola Arsip SKPD;

Upaya Pemerintah kabupaten dalam meningkatkan tata kelola Arsip SKPD dengan melakukan berbagai perbaikan sarana dan prasarana kearsipan, dan peningkatan pengelolaan arsip secara terpadu. Langkah ini diharapkan akan meningkatkan tata kelola Arsip. Adapun capaian sasaran Meningkatnya Tata Kelola Arsip SKPD disajikan pada Tabel 3.37.

Tabel 3.37.

Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Kunjungan Masyarakat ke Perpustakaan

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun 2018			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2018 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			Target	Realisasi	%		
1	Persentase kenaikan SKPD mengelola arsip secara baku	5	5	11,72	234,4	25	46,88

Pengelolaan kearsipan sebagai bagian dari aset Pemerintah daerah dilihat dari jumlah arsip yang tercatat dari tahun ke tahun mengalami peningkatan.

Pada Tahun 2014 sebanyak 71.161 arsip, dan pada Tahun 2018 sudah mencapai 87.625 arsip. Gambaran pengelolaan kearsipan di Kabupaten Klaten pada Tahun 2014-2018 dapat dilihat pada Tabel 3.38.

Tabel 3.38.

Pengelolaan Kearsipan di Kabupaten Klaten Tahun 2014-2018

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah Arsip	Jumlah	71.161	68.700	74.700	78.434	87.625

Sumber : Dinas Arsip dan Perpustakaan Kab. Klaten, 2018

Berdasarkan Tabel 3.38. sebagaimana tersebut di atas, Pelayanan arsip untuk OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten diharapkan dapat berkembang kearah arsip digital, sehingga akan lebih memudahkan dalam pencarian arsip. Dengan semakin meningkatnya jumlah koleksi arsip dan semakin mutakhirnya pengelolaan kearsipan akan menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung perpustakaan, sehingga bisa meningkatkan jumlah kunjungan masyarakat ke perpustakaan Daerah.

14. Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Profesional, Transparan dan Akuntabel;

Pemerintahan Desa sebagai penyelenggara Pemerintahan terdepan memerlukan peningkatan standar pelayanan dalam hal: pemberdayaan masyarakat, menjaga adat-istiadat, serta melayani kebutuhan administrasi penduduk. Upaya Pemerintah kabupaten dalam **Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Profesional, Transparan dan Akuntabel** dengan melakukan berbagai peningkatan partisipasi, dan penyempurnaan regulasi tentang desa. Langkah ini diharapkan akan meningkatkan tata kelola Pemerintahan Desa yang Profesional, Transparan dan Akuntabel. Adapun capaian sasaran "Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Profesional, Transparan dan Akuntabel" disajikan pada Tabel 3.39.

Tabel 3.39.

Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Profesional, Transparan
dan Akuntabel

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun 2018			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2018 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			Target	Realisasi	%		
1	Persentase penyelenggaraan Pemerintah desa yang profesional, transparan dan akuntabel	15	46	48	104	100	48

Program pemberdayaan masyarakat untuk mendorong kemandirian desa dan menanggulangi kemiskinan dilaksanakan melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Pasar Desa.

Jumlah BUMDes dalam kurun waktu Tahun 2013-2014 masih relatif rendah karena belum adanya dukungan dana desa dan komitmen Pemerintah Desa, peningkatan mulai terlihat pada Tahun 2015 ketika dana desa mulai diberikan kepada Pemerintah Desa serta ditunjang dengan adanya komitmen dari Pemerintah Desa yang tinggi. Dari 215 BUMDes yang ada di Kabupaten Klaten saat ini, diklasifikasikan ke dalam 4 (empat) kategori berdasarkan Peraturan Gubernur No. 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan BUMDesa Provinsi Jawa Tengah yaitu: 1. BUMDes Dasar sejumlah 85; 2. BUMDes Tumbuh sejumlah 112; 3. BUMDes Berkembang sejumlah 24; dan 4. BUMDes Maju sejumlah 5.

Guna pengembangan dan optimalisasi pengelolaan BUMDes maka, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa telah melakukan pendampingan kepada pengelola BUMDes dalam rangka meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia. Perkembangan lembaga ekonomi Pedesaan tahun 2014–2018 disajikan pada Tabel 3.40.

Tabel 3.40.

Lembaga Ekonomi Perdesaan

Tahun	Jumlah BUMDes	Jumlah Pasar Desa	Pasar Desa Dikelola oleh Desa
(1)	(2)	(3)	(4)
2014	34	40	5
2015	63	40	5
2016	141	40	5
2017	217	40	5
2018	224	40	5
Jumlah	224	40	5

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2019.

Berdasarkan Tabel 3.40. sebagaimana tersebut di atas, Lembaga ekonomi perdesaan lainnya (Pasar Desa) juga dituntut dapat memberikan kontribusi positif di dalam meningkatkan pendapatan masyarakat desa. Peran pasar desa belum maksimal karena otoritas manajemen pengelolaan pasar desa belum diberikan sepenuhnya kepada Desa dan masih dikelola oleh Pemerintah Daerah. Hal ini perlu adanya komunikasi dari pihak terkait dalam rangka menyelesaikan permasalahan tersebut, lebih lanjut diharapkan adanya keberpihakan terhadap APBDes dalam rangka pengembangan Pasar Desa.

Pelatihan teknologi tepat guna di perdesaan dari kurun waktu tahun 2014-2018 disajikan pada Tabel 3.41.

Tabel. 3.41.

Pelatihan Teknologi Tepat Guna Tahun 2014-2018

No	Uraian	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jenis Pelatihan TTG yang telah diberikan	1. Pelatihan Pembuatan Aneka Kripik bahan Singkong Pemanfaatan TTG di Desa Kalikotes dengan peserta dari semua desa se Kec. Kalikotes masing desa sebanyak 5 (lima) orang	1. Pelatihan Ternak Lele dengan metode Bioflock Pemanfaatan TTG di Desa Drono peserta dari Desa Drono, Tempursari, Desa Ngawen Kec. Ngawen Desa Wiro Kec. Bayat Desa Ngawonggo Kec. Ceper	1. Pelatihan Pembuatan Aneka Kripik bahan Singkong Pemanfaatan TTG di Desa Bono peserta dari Desa Bono, Pucangmiliran dan Wunut Kec. Tulung	1. Pelatihan Hidroponik Pemanfaatan TTG di Desa Bawukan peserta dari Desa Bawukan dan Desa Panggang Kecamatan Kemalang 2. Pelatihan Ternak Lele dengan metode Bioflock Pemanfaatan TTG di Desa Gunung Gajah peserta dari Desa Kebon dan Desa	1. Pelatihan pembuatan Briket orang dengan bahan sampah organik di desa Solodiran, Kec Manisrenggo 2. Pelatihan pembuatan Briket orang dengan bahan sampah organik di desa Kranggan, Kec Manisrenggo 3. Pelatihan pembuatan Briket orang dengan bahan sampah organik di

No	Uraian	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
					Gununggajah, Bayat 3 Pelatihan Hidroponik Pemanfaatan TTG di Desa Sidowayah peserta dari Desa Sidowayah dan Desa Kebonharjo Kecamatan Polanharjo	desa Taskombang, Kec Manisrenggo 4. Pelatihan pembuatan Briket orang dengan bahan sampah organik di desa Nangsri, Kec Manisrenggo
2.	Data Perkembangan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) dipedesaan	1. Posyantek Kec. Kalikotes	1. Posyantek Kec. Ngawen	1. Posyantek Kec. Kemalang 2. Posyantek Kec. Tulung	1. Posyantek Kec. Karanganom (Keputusan Bupati Klaten No. 414.4/213 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Pengelola POSYANTEK Kec. Karanganom Kab. Klaten) 2. Posyantek Kec. Polanharjo (Keputusan Bupati Klaten No. 414.4/214 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Pengelola POSYANTEK Kec. Polanharjo Kab. Klaten)	1. Posyantek antar desa TA 2018 di Kec. Cawas, Kec. Wedi

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2019.

Berdasarkan Tabel 3.41. sebagaimana tersebut di atas, mekanisme penerapan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) di Kabupaten Klaten, diawali dengan sosialisasi kepada seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Klaten (26 Kecamatan), kemudian proses pembentukan Teknologi Tepat Guna (TTG) dipilih pada kecamatan yang memiliki potensi untuk dikembangkan.

Data yang tersaji dalam pengembangan kawasan perdesaan hanya ada pada Tahun 2016 dan 2017, dikarenakan kegiatan pengembangan kawasan perdesaan ini baru dimulai pada Tahun 2016. Pada Tahun 2016 hanya ada 1 data pengembangan kawasan pedesaan yaitu pengembangan Kawasan Perdesaan Berbasis Mandiri Pangan di Desa Kaligayam, Desa Kadilanggon, dan Desa Melikan di Kecamatan Wedi. Pengembangan kawasan perdesaan tersebut sudah sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh desa, Penempatan

lokasi tersebut di dasarkan pada hasil penelitian Universitas Tidar Kabupaten Magelang. Sedangkan pada Tahun 2017 pengembangan kawasan desa ada 5 data pengembangan kawasan pedesaan dan masih dalam proses penyusunan RPKP, yaitu:

- 1). Pengembangan kawasan desa sentra batik di Desa Jarum, Banyuripan, Beluk dan Kebon di Kecamatan Bayat. Pengembangan kawasan desa batik tersebut telah sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh desa-desa tersebut sebagai sentra penghasil batik di Kabupaten Klaten.
- 2). Pengembangan kawasan desa industri lurik dan pertanian organik di Desa Tlingsing, Mlese, Balak dan Baran di Kecamatan Cawas. Pengembangan kawasan desa industri lurik dan pertanian organik tersebut sudah sesuai dengan potensi yang dimiliki desa.
- 3). Pengembangan kawasan desa wisata budaya berbasis ekonomi di Desa Taskombang, Solodiran, Kranggan, dan Nagsri di Kecamatan Manisrenggo. Pengembangan kawasan desa wisata budaya berbasis ekonomi tersebut sudah sesuai dengan potensi yang dimiliki desa.
- 4). Pengembangan kawasan desa wisata alam lereng merapi di Desa Balerante, Sidorejo, dan Bumiharjo di Kecamatan Kemalang. Pengembangan kawasan desa wisata alam lereng merapi tersebut sudah sesuai dengan potensi desa yang terletak di lereng gunung merapi. Rician pengembangan lokasi desa wisata disajikan pada Tabel 3.42.

Tabel 3.42.

Lokasi Pengembangan Wisata

Tahun	Nama / Tema Kawasan	Lokasi	Tahap Kegiatan	Keterangan
2016	Kawasan Perdesaan Berbasis Mandiri Pangan	Kecamatan Wedi : Ds. Kaligayam, Ds. Kadilanggon, Ds. Melikan	Sudah menyusun RPKP	SK Bupati No. 050/221 Tahun 2016 tentang Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Mandiri Pangan di Kabupaten Klaten
2017	Kawasan Sentra Batik	Kecamatan Bayat : Ds. Jarum, Ds. Banyuripan, Ds. Beluk, Ds. Kebon	Proses penyusunan RPKP	SK Bupati No. 050/467 Tahun 2017 tentang Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan di Kabupaten Klaten
	Kawasan Sentra Industri Lurik dan Pertanian Organik	Kecamatan Cawas : Ds. Tlingsing, Ds. Mlese, Ds. Balak, Baran	Proses penyusunan RPKP	SK Bupati No. 050/467 Tahun 2017 tentang Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan di Kabupaten Klaten

Tahun	Nama / Tema Kawasan	Lokasi	Tahap Kegiatan	Keterangan
	Kawasan Wisata Budaya Berbasis Ekonomi	Kecamatan Manisrenggo : Ds. Taskombang, Ds. Solodiran, Ds. Kranggan, Ds. Nangsri	Proses penyusunan RPKP	SK Bupati No. 050/467 Tahun 2017 tentang Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan di Kabupaten Klaten
	Kawasan Wisata Alam Lereng Merapi	Kecamatan Kemalang : Ds. Balerante, Ds. Sidorejo, Ds. Bumiharjo	Proses penyusunan RPKP	SK Bupati No. 050/467 Tahun 2017 tentang Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan di Kabupaten Klaten
Jumlah	5 kawasan			

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2019.

Berdasarkan Tabel 3.42 sebagaimana tersebut di atas, ada 5 (lima) kawasan dengan desa sebanyak 17 (tujuh belas) desa pengembangan pengembangan desa wisata masing-masing ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati.

15. Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Efektif dan Efisien biasanya dicerminkan ke dalam 3 (tiga) pilar yaitu akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi. Sehingga kelihatan, sejauh mana faktor kontribusi masyarakat turut andil menyelesaikan masalah agar ruang demokrasi tumbuh dan berkembang. Ukuran Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Efektif dan Efisien diukur pada saat rencana disusun, sejauh mana data dan informasi dipakai sebagai *road map* untuk menyusun sasaran strategis yang hendak dicapai, juga sejauh mana konsistensi antar dokumen perencanaan saling menguatkan, sehingga *output*, *outcome* dan *benefit* akan kelihatan progres capaiannya.

Adapun capaian sasaran "Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah" sebagaimana Tabel 3.43.

Tabel 3.43.

Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja
Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun 2018			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2018 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			Target	Realisasi	%		
1	Level Maturitas SPIP	1	2	2	100	3	66,67
2	Level Kapabilitas APIP	2	3	2	66,67	3	66,67
3	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	47,89(C)	64 (B)	60,33 (B)	94,27	70 (B)	60,33 (B)

1. Level Maturitas Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP)

Kapabilitas APIP ditingkatkan untuk memastikan dan mengurangi terjadinya penyimpangan/penyelewengan atas tujuan yang akan dicapai melalui Sistem Pengawasan Intern Pemerintah (SPIP). Level Maturitas SPIP Kabupaten Klaten berada di level 2 berdasarkan hasil Penjaminan Kualitas atas pelaksanaan penilaian maturitas level SPIP di Kabupaten Klaten tanggal 12 Maret 2018 oleh Tim Penjamin Kualitas dari Badan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan DIY. Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Peningkatan Kapabilitas APIP pada Inspektorat Kabupaten Klaten Tahun 2018 Nomor LQAPIP-142/PW12/6/2018 Tanggal 21 Juni 2018, Inspektorat Kabupaten Klaten disimpulkan bahwa Kapabilitas Inspektorat Kabupaten Klaten berada pada level 2 (*insfrastructure*).

2. Level Maturitas SPIP

Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah sistem pengendalian intern (SPI) yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan Pemerintah pusat dan Pemerintah daerah. Maturitas SPIP terdiri dari 5 tingkatan yaitu:

1. Level 0 (belum ada), Belum memiliki kebijakan dan prosedur;
2. Level 1 (Rintisan), Ada praktik pengendalian intern – ada kebijakan dan prosedur tertulis, namun masih bersifat *ad-hoc* dan tidak terorganisasi dengan baik. Tanpa komunikasi dan pemantauan;

3. Level 2 (Berkembang), Ada praktik pengendalian intern tapi tidak terdokumentasi dengan baik. Pelaksanaan tergantung pada individu dan belum melibatkan semua unit organisasi. Efektivitas pengendalian belum dievaluasi.
4. Level 3 (Terdefinisi), Ada praktik pengendalian intern yg terdokumentasi dengan baik. Evaluasi atas pengendalian intern dilakukan tanpa dokumentasi yang memadai.
5. Level 4 (Terkelola & Terukur), Ada praktik pengendalian internal yang efektif. Evaluasi formal dan terdokumentasi.
6. Level 5 (Optimum), Menerapkan pengendalian intern yang berkelanjutan, terintegrasi dalam pelaksanaan kegiatan. Pemantauan otomatis menggunakan aplikasi komputer

Kabupaten Klaten menetapkan target pada tahun 2018 mencapai tingkat maturitas SPIP level 2 (dua). Target tersebut telah tercapai dengan baik pada tahun 2018 karena berdasarkan penilaian telah terdapat pengendalian intern walaupun belum terdokumentasi dengan baik. Penilaian Maturitas SPIP dilakukan dua tahap yaitu penilaian mandiri oleh Inspektorat dan kemudian dilakukan *Quality Assurance* (kendali mutu) oleh tim dari Badan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan DIY. Penilaian mandiri telah dilakukan pada akhir tahun 2017 dan kemudian dilakukan kendali mutu oleh BPKP DIY pada awal tahun 2018 dengan nilai akhir 2,29. Penilaian mandiri dilakukan kembali pada akhir tahun 2018 dengan nilai 3,35 kemudian direviu oleh BPKP DIY dengan nilai 3,15, Namun demikian nilai akhir masih menunggu hasil *Quality Assurance* dari BPKP Pusat.

Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Inspektorat pada tahun 2018 dalam mencapai target maturitas SPIP Level 2 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan *awareness* di jajaran kepala OPD, Inspektorat telah menyelenggarakan rapat dengan mengundang Kepala BPKP Perwakilan DIY dengan tujuan menekankan urgensi SPIP sebagai instrumen pencegah *fraud* dan pengawal tujuan organisasi.
2. Pendampingan/Asistensi terhadap seluruh OPD dalam penyelenggaraan SPIP terutama dalam penyusunan register risiko dan rencana tindak pengendaliannya.
3. Menyelenggarakan pelatihan peningkatan maturitas SPIP bekerjasama dengan BPKP Perwakilan DIY.
4. Diskusi strategi peningkatan Maturitas SPIP dalam rangka peningkatan integritas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.

5. Mendorong pembentukan tim satgas implementasi SPIP di OPD.
6. Meningkatkan Peran APIP yang Efektif antara lain dengan upaya:
 - a. Program pengawasan berbasis risiko. Sebelum melakukan audit ke objek pengawasan dilakukan terlebih dahulu evaluasi manajemen risiko terhadap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh objek pengawasan.
 - b. Inspektorat Kabupaten Klaten telah menyusun audit program untuk audit operasional yang bertujuan untuk ekonomis, efisiensi dan efektifitas kegiatan, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, pengelolaan keuangan dan barang milik daerah, tugas dan fungsi kepegawaian, pendapatan dan investigasi, reviu LKPD, Reviu LKjIP.
 - c. Inspektorat Kabupaten Klaten telah melakukan telaah sejawat dengan Inspektorat Kabupaten Sukoharjo sebagaimana Laporan Nomor: 700/61.a/2018 Tanggal 10 Juli 2018. Atas saran perbaikan dalam Laporan telaah sejawat ini telah dilakukan tindak lanjut sesuai Surat Inspektur Kabupaten Klaten Nomor 045/514/11 Tanggal 12 November 2018 hal Tindak Lanjut atas Hasil Telaah Sejawat pada Inspektorat Kabupaten Klaten

3. **Level Kapabilitas APIP**

Kapabilitas APIP ditargetkan pada tahun 2018 mencapai level 3 (tiga), namun demikian realisasinya baru mencapai level 2. Sama dengan Penilaian Maturitas SPIP, Penilaian tingkat kapabilitas APIP dilakukan dua tahap yaitu penilaian mandiri oleh Inspektorat dan kemudian dilakukan *Quality Assurance* (kendali mutu) oleh tim dari Badan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan DIY. Penilaian Mandiri atas kapabilitas APIP di Kabupaten Klaten telah dilakukan sebanyak dua kali. Penilaian mandiri pertama dilakukan pada bulan April 2018 dan penilaian mandiri kedua dilakukan pada Bulan November 2018. Atas penilaian mandiri pertama telah dievaluasi oleh BPKP DIY dengan hasil penilaian Inspektorat Kabupaten Klaten mencapai level 2 (dua). Penilaian Mandiri tingkat Kapabilitas APIP yang diselesaikan tanggal 13 November 2018 telah menunjukkan bahwa Kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten Klaten telah mencapai level 3 (tiga), namun demikian hasil evaluasi (*quality Assurance*) sampai akhir tahun 2018 belum tersusun laporan.

Peningkatan Level Kapabilitas APIP ini dilakukan dengan menggunakan model yang dikembangkan oleh Insititute of Internal Auditor (IIA) Research Foundation yaitu Internal Audit Capability Model (IA-CM). Model Kapabilitas Pengawasan Intern atau Internal Audit Capability Model (IA-CM) adalah suatu kerangka kerja yang mengidentifikasi aspek-aspek fundamental yang dibutuhkan untuk pengawasan intern yang efektif di sektor publik. IA-CM dimaksudkan sebagai

model universal dengan perbandingan sekitar prinsip, praktik, dan proses yang dapat diterapkan secara global untuk meningkatkan efektivitas pengawasan intern. Terdapat 6 (enam) elemen yang dinilai dari model tersebut yaitu Peran dan Layanan ; Pengelolaan Sumber Daya Manusia ; Praktik Profesional ; Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja ; Budaya dan Hubungan Organisasi ; serta Struktur Tata Kelola.

4. Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

Tuntutan akuntabilitas kinerja Pemerintah merupakan kewajiban Pemerintah yang harus bisa diwujudkan untuk mempertanggung-jawaban mandat yang telah diberikan dalam mengelola urusan penyelenggaraan Pemerintah. Sebagaimana dalam RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 mengupayakan pentingnya Mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik dan bersih yang dijabarkan ke dalam arah kebijakan pembangunan daerah dengan Meningkatkan efektivitas organisasi Pemerintah Daerah yang peka terhadap permasalahan dan perubahan lingkungan internal maupun eksternal, dan Mewujudkan tata Pemerintahan yang efektif dan efisien.

Capaian kinerja telah menunjukkan hasil yang meningkat. Target yang ditetapkan pada tahun 2018 dengan nilai 64, namun terealisasi 60,33 (dengan Kategori B). Perolehan skor 60,33 dengan kriteria sedang.

Berdasarkan penilaian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terdapat beberapa ikhtisar penting terkait penilaian kinerja instansi Pemerintah di Kabupaten Klaten, diantaranya:

1. Pemerintah Kabupaten Klaten memperoleh nilai 60,33 atau dengan predikat B. Secara rinci hasil penilaian tersebut, sebagai berikut:
 - Perencanaan kinerja nilai 19,94
 - Pengukuran kinerja nilai 14,83
 - Pelaporan kinerja nilai 9,43
 - Evaluasi kinerja nilai 5,74
 - Capaian kinerja nilai 10,39
2. Nilai ini merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di lingkungan Instansi Pemerintah Kabupaten Klaten.
3. Pemerintah Kabupaten Klaten telah membangun akuntabilitas kinerja di semua jenjang Pemerintahan dengan menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah yang mencakup: perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan capaian kinerja.

4. Secara umum atas kinerja Pemerintah Kabupaten Klaten adalah baik, namun masih terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian untuk perbaikan ke depan, agar kinerja pada instansi Pemerintah terus mengalami peningkatan.

Langkah-langkah strategis yang akan dilaksanakan guna meningkatkan sistem akuntabilitas kinerja, adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas perencanaan, dengan langkah-langkah;
 - a). Mereviu dokumen perencanaan untuk melihat ketepatan dan sinkronisasi antara tujuan, sasaran, indikator kinerja untuk mencapai target pembangunan jangka menengah dan panjang daerah.
 - b). Memperbaiki dokumen perencanaan dan perjanjian kinerja sesuai dengan hasil reviu sebagai acuan penyusunan anggaran dengan menyusun agenda aksi daerah.
- b. Memperbaiki kualitas pengukuran kinerja melalui langkah-langkah;
 - a). Menerapkan sistem pengukuran kinerja secara konsisten, dan sebagai bahan penilaian kinerja lembaga/pejabat, sekaligus sebagai pengendalian rencana.
 - b). Memastikan penerapan dan penetapan Perjanjian Kinerja secara berjenjang mulai eselon II, III sampai pada tingkatan eselon IV.
- c. Meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja terhadap OPD, serta kualitas evaluasi program; dan
- d. Melakukan pengendalian dan evaluasi secara berjenjang terhadap capaian kinerja baik di tingkat kabupaten maupun OPD sebagai dasar penerapan pemberian *reward and punishment* dalam rangka semakin mendorong terciptanya manajemen berbasis kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Efektif dan Efisien di Kabupaten Klaten. Pada tahun 2018, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah terdiri dari 3 (tiga) program, diantaranya:

1. Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH;
2. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Tata Laksana Perangkat Daerah; dan
3. Peningkatan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan

Permasalahan :

1. Tindak lanjut hasil pengawasan internal dan eksternal dari Audit yang belum sepenuhnya sesuai dengan rekomendasi atas LHP yang telah diterbitkan dalam menindaklanjuti hasil temuan.
2. Terbatasnya jumlah sumber daya aparatur pengawas/auditor.
3. Masih adanya ketidaktertiban pengelolaan barang daerah oleh OPD pengelola.

Solusi :

1. Penguatan tindak lanjut hasil pengawasan internal dan eksternal dengan pembuatan regulasi, sosialisasi, koordinasi intensif, serta penguatan komitmen auditor dalam melaksanakan penyelesaian tindak lanjut pengawasan.
2. Mengajukan formasi auditor dan mengirimkan diklat fungsional/substantif ke lembaga diklat yang berkompeten.
3. Penguatan komitmen seluruh kepala OPD dalam penerapan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan aturan yang berlaku.

Kedepan akan terus diupayakan langkah-langkah guna mempertahankan opini WTP, dengan penguatan komitmen semua sepihak, baik pimpinan maupun pejabat fungsional umum Kabupaten Klaten untuk mempertahankan opini BPK Atas Laporan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Klaten.

16. Sasaran Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah;

Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Efektif dan Efisien bisanya dicerminkan ke dalam 3 (tiga) pilar yaitu akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi. Sehingga kelihatan, sejauh mana faktor kontribusi masyarakat turut andil menyelesaikan masalah agar ruang demokrasi tumbuh dan berkembang. Ukuran Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Efektif dan Efisien diukur pada saat rencana disusun, sejauh mana data dan informasi dipakai sebagai *road map* untuk menyusun sasaran strategis yang hendak dicapai, juga sejauh mana konsistensi antar dokumen perencanaan saling menguatkan, sehingga *output*, *outcome* dan *benefit* akan kelihatan progres capaiannya.

Adapun capaian sasaran "Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah" sebagaimana Tabel 3.44.

Tabel 3.44.

Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja
Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun 2018			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2018 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			Target	Realisasi	%		
1	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	2,6	2,9	3,09	106,55	3,1	3,09

Catatan: kondisi akhir capaian RPJMD disamakan dengan kondisi tahun 2018 mengingat angka riel yang mengeluarkan Mendagri.

Dalam RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016–2021 telah ditetapkan adanya kebijakan daerah untuk : Mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik dan bersih yang dijabarkan ke dalam arah kebijakan pembangunan daerah dengan Meningkatkan efektivitas organisasi Pemerintah Daerah yang peka terhadap permasalahan dan perubahan lingkungan internal maupun eksternal, dan mewujudkan tata Pemerintahan yang efektif dan efisien.

Capaian EKPPD (Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah) Kabupaten Klaten tahun 2018 dengan skor 3,09 tergolong sangat tinggi, dan perolehan skor ini apabila dirangking untuk tingkat Provinsi Jawa Tengah menduduki posisi 23 (dua puluh tiga) dari 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah. Ke depan untuk memperbaiki peringkat EKPPD diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Peningkatan koordinasi secara lebih intensif dengan sesama OPD (Organisasi Perangkat Daerah).
- b. Melakukan pendampingan/desk dengan OPD dalam mengisi format EKPPD.
- c. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Tim Daerah (BPKP dan Inspektorat).

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Efektif dan Efisien di Kabupaten Klaten. Pada tahun 2018, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan otonomi daerah terdiri dari 6 (enam) program, diantaranya:

1. Peningkatan Kinerja Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
2. Peningkatan Kerjasama Daerah;
3. Pengembangan Wilayah Perbatasan;

4. Peningkatan Tata Kelola Kecamatan;
5. Pengembangan Komunikasi Informatika Mass Media; dan
6. Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah..

Permasalahan :

- a. Masih adanya kendala pengumpulan data dan pengukuran data kinerja secara akurat dan cepat;
- b. Masih terbatasnya kemampuan SDM perencana dan pelaporan di jajaran OPD untuk mempercepat terwujudnya Pemerintahan yang kredibel,

Solusi :

- a. Meningkatkan koordinasi di semua lini untuk meningkatkan kapasitas OPD;
- b. Membangun basis data terpadu, untuk mempercepat pengukuran kinerja dan mengambil tindakan/intervensi tepat waktu apabila diperlukan.

17. Sasaran Meningkatnya Koordinasi Penataan Peraturan Perundang Undangan serta Bantuan Hukum dan HAM;

Untuk mewujudkan sasaran Meningkatnya koordinasi penataan peraturan perundang undangan serta bantuan hukum dan HAM sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Klaten diukur dengan indikator persentase tercapainya penyusunan produk hukum dan penanganan perkara, dan Indeks Kabupaten Peduli HAM.

Adapun capaian sasaran Meningkatnya Koordinasi Penataan Peraturan Perundang-Undangan serta Bantuan Hukum dan HAM sebagaimana Tabel 3.45.

Tabel 3.45.

Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja
Meningkatnya Koordinasi Penataan Peraturan Perundang-Undangan serta
Bantuan Hukum dan HAM

No	Indikator Kinerja	Capaian Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun 2018			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2018 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			Target	Realisasi	%		
1	Persentase tercapainya penyusunan produk hukum dan penanganan perkara	80	85	90	105	90	100
2	Indeks Kabupaten Peduli HAM	0	75	234	175,5	80	292,50

1. Persentase tercapainya penyusunan produk hukum dan penanganan perkara

Pada tahun 2018 direncanakan sebanyak 94 Produk Hukum Daerah, dengan perincian: sebanyak 30 Peraturan Daerah, dan 64 Peraturan Bupati. dibahas tepat waktu, namun hanya terealisasi sebanyak 36 Produk hukum Daerah yang dibahas tepat waktu (atau 90%). Jumlah perkara yang ditangani sebanyak 4 perkara.

2. Indeks Kabupaten Peduli HAM

Penghargaan atas martabat manusia adalah hak setiap warga negara yang wajib diberikan negara. Dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten Klaten dalam menjamin hak setiap warga negara diukur dari Indeks Kabupaten Peduli HAM.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait sasaran “Meningkatnya Koordinasi Penataan Peraturan Perundang-Undangan serta Bantuan Hukum dan HAM” di Kabupaten Klaten. Pada tahun 2018, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis sasaran dengan program Penataan Peraturan Perundang-Undangan.

Permasalahan:

1. Banyaknya produk hukum nasional yang belum ditindaklanjuti dengan peraturan daerah, begitu pula sebaliknya banyak peraturan daerah yang perlu ditinjau ulang.
2. Supremasi hukum belum sepenuhnya dapat diimplementasikan sebagai penyelesaian persoalan sosial kemasyarakatan yang muncul.
3. Pembangunan berbasis isu, sepenuhnya belum dianalisis secara tata naskah akademis baik menyangkut aspek: yuridis, sosial dan filosofinya.

Solusi:

1. Pemerintah wajib hadir memberi perlindungan HAM terhadap warga negara yang mengalami ancaman.
2. Pemerintah wajib memenuhi hak-hak politik, memberi peluang berkembangnya aspek kebebasan sipil, memeperkuat aspek kelembagaan demokrasi agar Kabupaten Peduli HAM dapat diwujudkan.
3. Memperkuat Sekretariat Komisi HAM Kabupaten.

18. Sasaran Meningkatnya Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan;

Untuk mewujudkan sasaran Meningkatnya koordinasi pelaksanaan pembangunan sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Klaten diukur dengan indikator persentase kesesuaian capaian pelaksanaan pembangunan (fisik dan keuangan) dengan target (rencana). Adapun capaian sasaran Meningkatnya Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan sebagaimana Tabel 3.46.

Tabel 3.46.

Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun 2018			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2018 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			Target	Realisasi	%		
1	Persentase kesesuaian capaian pelaksanaan pembangunan (fisik dan keuangan) dengan target (rencana)	80	90	87,78	97,53	90	97,53

Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Klaten dalam meningkatkan kinerja pembangunan dilakukan dengan melakukan Rapat Koordinasi “Senenan” secara rutin, hal ini sebagai bentuk agenda aksi untuk pengendalian kegiatan yang diharapkan menjaga konsistensi capaian pelaksanaan pembangunan dengan target rencana. Pada tahun 2018 tercatat sebanyak 173 program dengan 987 kegiatan. Realisasi fisik tercapai 87,78% dari target rencana. Dukungan dana untuk melaksanakan pembangunan dianggarkan sebanyak Rp.1.018.676.084.121,98 dan terserap sebesar Rp.859.618.219.315,88 (atau 84,39%).

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait sasaran Meningkatnya Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan. Pada tahun 2018, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis Meningkatnya Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan, dengan program Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan.

Permasalahan:

1. Ada beberapa kegiatan fisik yang tidak bisa diselesaikan tepat waktu, karena terbatasnya masa kontrak pekerjaan tidak mencukupi waktunya untuk menyelesaikan pekerjaan. Misalnya Pembangunan Gedung Pemda II, dan gedung kompleks DPRD.

Solusi:

1. Mengefektifkan Pengendalian kegiatan agar semua pekerjaan fisik dapat diselesaikan tepat waktu.

18. Sasaran Terwujudnya Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa yang Kredibel;

Untuk mewujudkan sasaran Terwujudnya pelayanan pengadaan barang dan jasa yang kredibel sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Klaten diukur dengan indikator Persentase pengadaan barang dan jasa secara elektronik yang sesuai regulasi. Adapun capaian sasaran *Terwujudnya pelayanan pengadaan barang dan jasa yang kredibel* sebagaimana Tabel 3.47

Tabel 3.47.

Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja
Terwujudnya Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Yang Kredibel

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun 2018			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2018 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			Target	Realisasi	%		
1	Persentase pengadaan barang dan jasa secara elektronik yang sesuai regulasi)	0	100	100	100	100	100

Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Klaten dalam meningkatkan kinerja pembangunan *Terwujudnya Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa yang Kredibel* dilakukan secara transparan, dan terbuka untuk publik. Pada tahun 2018 tercatat sebanyak 273 usulan pengadaan barang dan jasa secara elektronik, dari sebanyak 273 usulan yang lolos seleksi secara elektronik sebanyak 252, gagal lelang sebanyak 9, 1 jasa pengadaan barang dan jasa dikembalikan ke OPD, dan 11 penunjukan langsung oleh OPD terkait.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait sasaran *Terwujudnya Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Yang Kredibel* dilakukan secara transparan, dengan dukungan program Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (Pelayanan Pemilihan penyedia barang dan jasa).

Permasalahan:

Karena semua sistem sudah dijalankan secara *online*, tertutup kemungkinan adanya praktek penyimpangan.

Solusi:

Mengefektifkan Pengendalian kegiatan agar semua pekerjaan fisik dapat diselesaikan tepat waktu.

20. Sasaran Meningkatnya fasilitasi koordinasi bidang kehumasan dan keprotokolan;

Untuk mewujudkan sasaran Meningkatnya fasilitasi koordinasi bidang kehumasan dan keprotokolan sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Klaten diukur dengan indikator kinerja, diantaranya: Persentase publikasi kebijakan dan kegiatan kepala daerah, Persentase dokumentasi kegiatan kepala Daerah, dan Persentase pelayanan keprotokolan kegiatan kepala daerah. Adapun capaian sasaran "**Meningkatnya fasilitasi koordinasi bidang kehumasan dan keprotokolan**" sebagaimana Tabel 3.48.

Tabel 3.48.

Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja
Meningkatnya Fasilitasi Koordinasi Bidang Kehumasan dan Keprotokolan

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun 2018			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2018 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			Target	Realisasi	%		
1	Persentase publikasi kebijakan dan kegiatan Kepala Daerah	90	90	88,14	97,93	90	97,93
2	Persentase dokumentasi kegiatan kepala Daerah	90	90	98,08	108,98	90	108,98
3	Persentase pelayanan keprotokolan kegiatan Kepala Daerah	100	100	95	95,00	100	95,00

Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Klaten dalam *Meningkatkan Fasilitasi Koordinasi Bidang Kehumasan dan Keprotokolan*, pada tahun 2018 jumlah publikasi kebijakan dan kegiatan Kepala Daerah yang direncanakan sebanyak 1720, dan terealisasi sebanyak 1516 (atau 88,14%). Jumlah dokumentasi kegiatan Kepala Daerah yang direncanakan sebanyak 2400 dan terealisasi sebanyak 2354 (98,08%). Sedangkan jumlah pelayanan keprotokolan kegiatan Kepala Daerah yang direncanakan sebanyak 240 dan terealisasi sebanyak 228 (atau 95%).

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait sasaran *Meningkatnya Fasilitasi Koordinasi Bidang Kehumasan dan Keprotokolan*

untuk mendukung kegiatan Kepala Daerah dilakukan dengan program Kerjasama dengan Mass Media.

Permasalahan:

Liputan kegiatan Kepala Daerah, belum menjadi dokumen cerita historis kePemerintahan baru sebatas berita/informasi.

Solusi:

Menyusun sekapur sirih setiap event Kepala Daerah yang memiliki nilai historis menjadi cerita sukses perjalanan Pemerintah.

21. Sasaran Meningkatnya Fasilitasi dan Pengawasan Kebijakan Daerah Bidang Perekonomian;

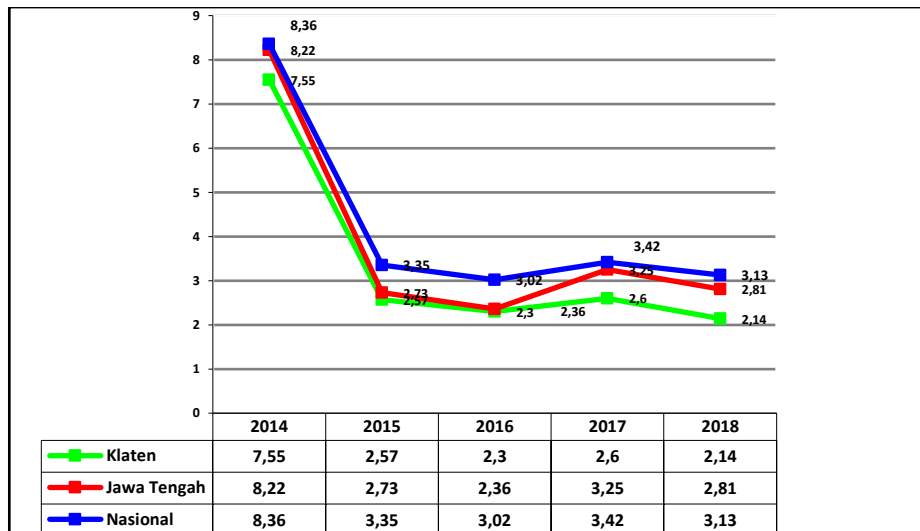
Untuk mewujudkan sasaran Meningkatnya Fasilitasi dan Pengawasan Kebijakan Daerah Bidang Perekonomian sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Klaten diukur dengan indikator kinerja Tingkat Inflasi YoY. Adapun capaian sasaran “Meningkatnya Fasilitasi dan Pengawasan Kebijakan Daerah Bidang Perekonomian” sebagaimana Tabel 3.49

Tabel 3.49.

Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja
Meningkatnya Fasilitasi dan Pengawasan Kebijakan Daerah Bidang Perekonomian

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun 2018			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2018 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			Target	Realisasi	%		
1	Tingkat Inflasi YoY	4(± 1)	3,5 (± 1)	2,39	68,29	3,5 (± 1)	2,39

Perkembangan inflasi di Kabupaten Klaten selama tahun 2014-2018 sangat fluktuatif. Inflasi di Kabupaten Klaten pada Tahun 2014 sebesar 7,55%, atau lebih tinggi dibanding Tahun 2018 sebesar 2,14%. Penurunan nilai inflasi disebabkan adanya pelaksanaan program pembangunan yang sinergis dan harga komoditas yang stabil. Perkembangan laju inflasi di Kabupaten Klaten selama Tahun 2014-2018 dapat dilihat pada Grafik 3.12.



Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Klaten, 2019
 Grafik 3.12. Laju Inflasi di Kabupaten Klaten Tahun 2014-2018

Berdasarkan Grafik 3.12 di atas, laju inflasi selama tahun 2014-2018 mengalami perkembangan yang bersifat fluktuatif, namun berdasarkan penggolongannya, inflasi di Kabupaten Klaten apabila dilihat termasuk ringan, karena masih di bawah 10% per tahunnya, dan juga di bawah inflasi nasional maupun provinsi. Sedangkan untuk Tahun 2018 inflasi di Kabupaten Klaten sebesar 2,39% disebabkan oleh terkendalinya harga beberapa komoditas pangan utama dan berfungsinya Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Klaten.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait sasaran “Meningkatnya Fasilitas dan Pengawasan Kebijakan Daerah Bidang Perekonomian” dalam menjaga stabilitas harga dengan menjaga inflasi daerah, agenda aksi ini dilakukan melalui program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan.

Permasalahan:

Fluktuatifnya harga kebutuhan pokok, seringkali bergerak lebih cepat dari upaya Pemerintah untuk melakukan perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan. Karena kegiatannya Pemerintahan bersifat “linier” tidak “given” atau menunggu waktu.

Solusi:

1. Perlunya stok kebutuhan bahan pokok yang aman dan tersedia; dan
2. Menggerakkan kinerja Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Klaten untuk bergerak cepat mengatasi gejolak harga yang dimungkinkan terjadi.

22. Sasaran Meningkatnya Koordinasi Kesejahteraan Rakyat;

Untuk mewujudkan sasaran Meningkatnya Koordinasi Kesejahteraan Rakyat sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Klaten diukur dengan indikator kinerja Persentase keterlibatan *stakeholder* dalam pelaksanaan pembangunan bidang kesra. Adapun capaian sasaran "Meningkatnya Koordinasi Kesejahteraan Rakyat" sebagaimana Tabel 3.50.

Tabel 3.50.

Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Koordinasi Kesejahteraan Rakyat

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun 2018			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2018 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			Target	Realisasi	%		
1	Persentase keterlibatan <i>stakeholder</i> dalam pelaksanaan pembangunan bidang kesra	90	90	90	100	95	94,74

Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Klaten dalam Meningkatkan Koordinasi Kesejahteraan Rakyat, pada tahun 2018 jumlah *stakeholder* yang terlibat dalam pelaksanaan pembangunan bidang kesra sebanyak 270 dari total 300 stakholder / terealisasi sebanyak 90%. Kegiatan yang dilakukan diantaranya: penyaluran bantuan bagi PMKS, penguatan Pokja Lansia, dan fasilitasi bantuan sosial lainnya.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait sasaran Meningkatnya Koordinasi Kesejahteraan Rakyat untuk mendukung kegiatan Perangkat Daerah dilakukan dengan program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial.

Permasalahan:

Kompleksitas permasalahan sosial belum disusun rencana Aksi Daerah untuk mengatasi isu daerah yang berkembang terkait dengan bidang Kesra.

Solusi:

Perlu disusun Renaksi Daerah Peningkatan Kesejahteraan Rakyat dengan Perangkat Daerah terkait.

23. Sasaran Meningkatnya Ketersediaan Pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah;

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang pemenuhannya menjadi hak azasi setiap warga negara, hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996. Ketentuan peraturan perundangan ini telah ditindak-lanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan, ditegaskan bahwa ketahanan pangan merupakan hal yang sangat penting dalam rangka pembangunan nasional dan membentuk manusia Indonesia yang berkualitas, mandiri dan sejahtera melalui perwujudan persediaan pangan yang cukup, aman, bermutu, bergizi dan beragam dan terjangkau oleh daya beli masyarakat.

Pada kenyataannya peta penduduk rawan pangan yang dilansir BPS masih menunjukkan situasi yang sangat memprihatinkan. Rendahnya aksesibilitas pangan, dengan indikator kemampuan rumah tangga untuk selalu memenuhi kebutuhan pangan anggotanya akan mendorong penurunan konsumsi makanan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman di tingkat rumah tangga. Pada akhirnya akan mengancam dan berdampak pada kekurangan gizi masyarakat, terutama pada kelompok rentan yaitu ibu, bayi dan anak.

Adapun capaian sasaran "Meningkatnya ketersediaan Pangan Beragam, bergizi seimbang dan meningkatnya kontribusi sektor pertanian terhadap pertumbuhan ekonomi daerah" sebagaimana Tabel 3.51.

Tabel 3.51.

Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja
Meningkatnya Ketersediaan Pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Meningkatnya
Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun 2018			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2018 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			Target	Realisasi	%		
1	Kontribusi sektor Pertanian terhadap PDRB	12,5	12,25	10,98	89,68	12,6	87,14

Luas wilayah Kabupaten Klaten sebesar 655,56 Km². Pada Tahun 2018 berdasarkan pemakaian di lahan pertanian untuk penggunaan lahan sawah 32.959,2 Ha dan untuk lahan bukan sawah sebesar 6.579,5 Ha. Sedangkan untuk lahan bukan pertanian seluas 26.017 Ha. Menurut sistem penggunaan air di Kabupaten Klaten, menunjukkan bahwa sawah dengan

sistem pengairan teknis seluas 19.012 Ha, sistem pengairan setengah teknis seluas 10.314 Ha; sistem pengairan sederhana seluas 2.202 Ha, serta sistem tadah hujan seluas 1.631 Ha.

Penggunaan lahan di Kabupaten Klaten setiap tahunnya selalu berubah dan cenderung mengikuti pertumbuhan jumlah penduduk, dan perluasan kegiatan perekonomian. Perubahan tata guna lahan berhubungan dengan lahan sawah dan lahan kering. Adapun Luas Lahan Pertanian dan Bukan Lahan Pertanian di Kabupaten Klaten tahun 2014–2018 disajikan pada Tabel 3.52.

Tabel 3.52.

Luas Lahan Pertanian dan Bukan Lahan Pertanian
di Kabupaten Klaten Tahun 2014–2018

No.	Kecamatan	Lahan Pertanian Sawah	Lahan Pertanian Bukan Sawah	Lahan Bukan Pertanian	Jumlah	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Prambanan	1,234.7	13.0	1,195	2,443	
2	Gantiwarno	1,624.6	155.0	784	2,564	
3	Wedi	1,552.8	18.0	867	2,438	
4	Bayat	813.4	785.0	2,345	3,943	
5	Cawas	2,313.2	46.0	1,088	3,447	
6	Trucuk	1,905.5	2.0	1,473	3,381	
7	Kalikotes	747.7	8.0	542	1,298	
8	Kebonarum	714.1	2.0	251	967	
9	Jogonalan	1,570.0	1.0	1,099	2,670	
10	Manisrenggo	1,507.4	139.0	1,050	2,696	
11	Karangnongko	764.0	851.0	1,059	2,674	
12	Ngawen	1,032.6	8.0	656	1,697	
13	Ceper	1,517.7	7.0	920	2,445	
14	Pedan	864.7	444.3	608	1,917	
15	Karangdowo	2,045.5	69.0	809	2,923	
16	Juwiring	1,992.0	12.0	975	2,979	
17	Wonosari	2,209.8	14.0	890	3,114	
18	Delanggu	1,288.2	1.0	589	1,878	
19	Polanharjo	1,818.7	92.0	473	2,384	
20	Karanganom	1,676.7	11.0	718	2,406	
21	Tulung	1,734.1	466.5	999	3,200	
22	Jatinom	601.1	1,542.8	1,409	3,553	
23	Kemalang	53.9	1,847.8	3,264	5,166	
24	Klaten Selatan	791.9	3.0	648	1,443	
25	Klaten Tengah	288.4	1.0	603	892	
26	Klaten Utara	296.1	40.0	702	1,038	

No.	Kecamatan	Lahan Pertanian Sawah	Lahan Pertanian Bukan Sawah	Lahan Bukan Pertanian	Jumlah	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Jumlah 2018	32,958,8	6,579.5	26,017	65,556	
	2017	33,021.0	6,581.0	25,954.0	65,556.0	
	2016	33,066.0	6,581.0	25,909.0	65,556.0	
	2015	33,111.0	6,581.0	25,684.0	65,556.0	
	2014	33,166.0	6,581.0	25,809.0	65,556.0	

Sumber: DPKPP Kab. Klaten, 2019

Sedangkan LP2PB (Lahan Perlindungan Pertanian Pangan Berkelanjutan) seluas 32.451 Ha sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perda Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), khususnya peruntukan sawah lestari Daerah. Dengan adanya LP2PB tersebut, alih fungsi lahan pertanian dapat dikendalikan dengan rata-rata perubahan lahan pertanian 56 Ha di luar LP2PB. Namun, setiap tahunnya Luas Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian Ke Non Pertanian Menurut Kecamatan dan Penggunaannya disajikan pada Tabel 3.53.

Tabel 3.53.

Luas Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian Ke Non Pertanian Menurut Kecamatan dan Penggunaannya di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017

Tahun	Dari Sawah & Tegalan (Ha)	Peruntukkan Bangunan Tanah (Ha)				Jumlah (Ha)
		Perumahan	Industri	Perusahaan	Jasa	
2017	45,7611	40,2981	4,515	-	0,948	45,7611
2016	45,392	33,058	8,910	0,113	3,311	45,392
2015	55,230	40,899	13,663	-	0,668	55,230
2014	54,140	40,480	13,660	-	-	54,140
2013	79,7688	44,893	31,160	-	3,7158	79,7688

Sumber: DPKPP Kab. Klaten, 2019

Untuk mengatasi perubahan lahan, dan mengganti produksi pertanian yang hilang akibat perubahan lahan pertanian dikembangkan pola pertanian terpadu, yang merupakan integrasi antara bidang tanaman pangan, bidang peternakan, dan bidang perikanan yang diharapkan kedepan bisa menjadi Kawasan Agropolitan. Perkembangan luas tanam dan luas panen tanaman pangan tahun 2014-2018 disajikan pada Tabel 3.54.

Tabel 3.54.
Perkembangan Luas Tanam dan Luas Panen Tanaman Pangan
Kabupaten Klaten Tahun 2014-2018

No	Jenis Komoditas	2014		2015		2016		2017		2018	
		Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)
1	Padi	65.678	65.671	69.158	68.661	76.029	73.627	74.964	73.962	70.421	73.810
2	Jagung	15.256	11.427	11.784	11.484	9.682	9.549	11.713	11.085	10510.6	10292.2
3	Kedelai	2.245	2.244	2.820	2.816	1.935	1.523	2.562	2.234	3744.8	3554.7
4	Kacang Tanah	2.102	1.919	2.074	2.073	1.224	1.067	955	909	1346.3	1296.3
5	Kacang Hijau	180	175	116	115	350	299	240	228	18.4	4
6	Ubi Kayu	801	704	707	707	822	685	435	395	304.9	357.9
7	Ubi Jalar	124	108	32	28	24	20	26	21	31	29

Sumber: DPKPP Kab. Klaten, 2019

Tabel 3.55.
Perkembangan Produksi dan Produktivitas
Tanaman Pangan Tahun 2014-2018

No	Jenis Komoditas	2014		2015		2016		2017		2018	
		Produksi (Ton)	Provititas (Kwt/ha)	Produksi (Ton)	Provititas (Kwt/ha)	Produksi (Ton)	Provititas (Kwt/ha)	Produksi (Ton)	Provititas (Kwt/ha)	Produksi (Ton)	Provititas (Kwt/ha)
1	Padi	359.474	56,12	437.623	63,29	426.028	57,87	380.268	51,41	458.992	61.80
2	Jagung	87.422	76,50	94.416	82,22	72.583	74,97	90.343	81,50	81.981	79.65
3	Kedelai	3.485	15,52	5.656	20,06	2.759	18,12	4.440	19,87	7.026	19.77
4	Kacang Tanah	713,24	3,72	3.151	15,20	1.784	14,58	1.527	16,79	1.816	14.01
5	Kacang Hijau	284.608	15,81	134.634	11,61	260	8,72	285	12,50	81	11.31
6	Ubi Kayu	11.992	170,35	20.370	288,12	32.224	392,11	9.778	224,99	9.370	261.80
7	Ubi Jalar	1.215	112,54	369,15	131,84	356	143,55	251	119,28	297	103.67

Sumber: DPKPP Kab. Klaten, 2019

Berdasarkan Tabel 3.54 dan Tabel 3.55 sebagaimana di atas, terlihat bahwa rata-rata luas panen dibawah luas tanam. Hal ini disebabkan karena adanya puso dan serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT), terutama Wereng Batang Coklat (WBC), Tikus, Penggerek Batang dan Sundep. Sehingga hal ini juga berpengaruh terhadap produksi dan produktivitas tanaman pangan terutama padi.

Produksi dan produktivitas padi pada Tahun 2018 meningkat dibandingkan dengan Tahun 2017. Hal ini disebabkan oleh implementasi intensifikasi pertanian yang cukup baik dan penerapan teknologi di bidang pertanian. Sedangkan Produksi Perkebunan tahun 2014-2018 disajikan pada Tabel 3.56.

Tabel 3.56.

Produksi Perkebunan Tahun 2014-2018

No.	Jenis Komoditas	Produksi (Ton)				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Tembakau Rajangan	1,201.755	2,191.360	2,193.575	1,233.527	1,744.364
2	Tembakau Asepan	1,167.656	1,164.270	1,038.530	1,070.724	1,514.140
3	Tembakau Vorstenland	164.552	453.740	303.930	239.455	129.115
4	Kelapa Dalam	5,203.615	5,384.477	4,097.630	4,697.582	4,588.666
5	Kelapa Hibrida	45.023	43.556	45.510	45.600	44.133
6	Kelapa Deres	115.917	82.861	99.470	98.740	92.464
7	Kopi Arabica	101.361	101.940	105.250	81.320	81.523
8	Kopi Robusta	4.856	4.856	9.830	9.990	10.150
9	Cengkeh	42.339	46.378	44.220	45.630	47.040
10	Lada	14.256	9.717	13.150	12.110	13.150
11	Tebu	4,352.390	4,184.222	6,289.000	3,258.940	824.760

Sumber: DPKPP Kab. Klaten, 2019

Berdasarkan Tabel 3.56. sebagaimana tersebut di atas, komoditas andalan dan unggulan adalah Tembakau Rajangan produksi tertinggi dicapai pada Tahun 2016 sebesar 2.193,575 Ton dan Tembakau Asepan produksi tertinggi dicapai pada Tahun 2018 sebesar 1,514.140 Ton. Sedangkan populasi ternak pada tahun 2014-2018 disajikan pada Tabel 3.57.

Tabel 3.57.

Populasi Ternak Tahun 2014-2018

No	Jenis Ternak	Populasi Ternak (ekor)				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Sapi Potong	98,753	99,438	88,343	88,850	100,259
2	Sapi Perah	5,340	5,486	5,795	6,098	6,284
3	Kambing	86,367	92,014	88,343	88,957	9,596
4	Domba	42,894	43,982	38,489	38,570	45,204
5	Ayam Bukan Ras	1,359,177	1,446,963	2,801,581	3,256,177	2,245,443
6	Ayam Pedaging	1,866,432	1,936,862	2,898,344	3,385,400	2,475,187
6	Ayam Petelur	1,044,474	1,045,869	867,822	930,234	746,422
7	Itik	323,839	292,929	395,436	575,100	425,473
8	Burung Puyuh	448,226	454,596	451,193	452,332	519,566

Sumber: DPKPP Kab. Klaten, 2019.

Berdasarkan Tabel 3.57. sebagaimana tersebut di atas, terlihat pada tahun 2018 populasi sapi potong mengalami kenaikan sebesar 100,259 ekor jika dibandingkan dengan tahun 2017 yaitu sebesar 88.850 ekor. Hal ini dipengaruhi oleh intensifnya penyuluhan tentang kesehatan hewan dan penggunaan bibit ternak yang baik. Sedangkan produksi peternakan tahun 2014–2018 disajikan pada Tabel 3.58.

Tabel 3.58.

Produksi Susu, Daging dan Telur Tahun 2014-2018

No	Jenis	Produksi (Lt/Kg/Butir)				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Susu (Liter)	4,200,567	4,030,895	4,878,662	5,903,181	4,266,718
2	Daging (Kg)	2,750,101	2,549,885	2,749,351	2,963,800	584,220
3	Telur (Butir)	278,730,823	246,585,003	375,376,131	570,571,719	130.992.000

Sumber: DPKPP Kab. Klaten, 2019.

Berdasarkan Tabel 3.58. sebagaimana tersebut di atas perkembangan produksi susu, daging dan telur pada Tahun 2018 mengalami penurunan dibandingkan dari Tahun 2014-2017 yang selalu meningkat setiap tahunnya, hal ini dipengaruhi oleh tingginya harga pakan ternak dan menurunnya populasi hewan ternak.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait sasaran Meningkatkan Ketersediaan Pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Meningkatkan Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah pada tahun 2018 dilaksanakan dengan program, diantaranya:

1. Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan);
2. Program Pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak;
3. Program Peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan;
4. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan;
5. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani;
6. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian / Perkebunan Lapangan;
7. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat;
8. Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan; dan
9. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan.

Permasalahan:

- a. Belum optimalnya penerapan penelitian dan pengembangan di bidang pertanian yang berakibat belum terwujudnya upaya penanganan terpadu di bidang pertanian sebagai pilar penyangga ketahanan pangan.

- b. Belum optimalnya penerapan teknologi, rekayasa genetik, varietas – varietas baru yang memiliki keunggulan absolut dan komparatif, dan belum optimalnya intensifikasi dan diversifikasi hasil – hasil pangan.
- c. Tingginya tingkat penggunaan bahan kimia yang berakibat menurunnya tingkat kesuburan tanah dan kekebalan hama penyakit tanaman sehingga perlu gerakan bersama untuk kembali ke alam (*back to nature*).
- d. Belum optimalnya kepastian hukum dalam rangka memberikan proteksi dan advokasi terhadap petani, demikian pula legalisasi kepemilikan hak kekayaan intelektual (*intellectual property right*) terhadap produk – produk pangan unggulan Kabupaten Klaten.
- e. Belum berkembangnya diversifikasi pangan.
- f. Belum optimalnya pemanfaatan lahan dan pekarangan rumah menuju kawasan rumah pangan lestari.
- g. Belum tercapainya kemandirian dan kedaulatan pangan.
- h. Belum optimalnya sinergitas antara program – program Pemerintah dengan kebutuhan riil dalam mempertahankan dan meningkatkan ketahanan pangan, dan belum optimalnya kemampuan dan keterampilan para penyuluh dalam mengoptimalkan kesadaran dan keterampilan petani, dan
- i. Belum terciptanya sinergitas antar Satker dalam melakukan koordinasi terpadu dalam upaya mengoptimalkan urusan ketahanan pangan.

Solusi :

- a. Peningkatan penerapan penelitian dan pengembangan di bidang pertanian untuk mewujudkan penanganan terpadu di bidang pertanian sebagai pilar penyangga ketahanan pangan;
- b. Peningkatan penerapan teknologi, rekayasa genetik, varietas – varietas baru yang memiliki keunggulan absolut dan komparatif, dan peningkatan intensifikasi dan diversifikasi hasil – hasil pangan;
- c. Menekan penggunaan bahan kimia yang berakibat menurunnya tingkat kesuburan tanah dan kekebalan hama penyakit tanaman sehingga perlu gerakan bersama untuk kembali ke alam (*back to nature*);
- d. Penguatan kepastian hukum dalam rangka memberikan proteksi dan advokasi terhadap petani, demikian pula legalisasi kepemilikan hak kekayaan intelektual (*intellectual property right*) terhadap produk – produk pangan unggulan Kabupaten Klaten; dan
- e. Penciptaan sinergitas antara program – program Pemerintah dengan kebutuhan riil dalam mempertahankan dan meningkatkan ketahanan pangan, dan belum optimalnya kemampuan dan keterampilan para penyuluh dalam mengoptimalkan kesadaran dan keterampilan petani.

24 Sasaran Meningkatnya Peran LEM, LED dan Pengembangan Potensi TTG di Desa Dalam Penanggulangan Kemiskinan;

Pemerintahan Desa sebagai penyelenggara Pemerintahan terdepan memerlukan peningkatan standar pelayanan dalam hal: pemberdayaan masyarakat, menjaga adat-istiadat, serta melayani kebutuhan administrasi penduduk. Upaya Pemerintah kabupaten dalam Meningkatnya Peran LEM, LED dan Pengembangan Potensi TTG di Desa Dalam Penanggulangan Kemiskinan dengan melakukan berbagai peningkatan partisipasi, dan penyempurnaan regulasi tentang desa. Langkah ini diharapkan akan meningkatkan tata kelola Pemerintahan Desa yang Profesional, Transparan dan Akuntabel. Adapun capaian sasaran "Meningkatnya Peran LEM, LED dan Pengembangan Potensi TTG di Desa Dalam Penanggulangan Kemiskinan" disajikan pada Tabel 3.59.

Tabel 3.59.

Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja
Meningkatnya Peran LEM, LED dan Pengembangan Potensi TTG di Desa
dalam Penanggulangan Kemiskinan

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun 2018			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2018 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			Target	Realisasi	%		
1	Persentase desa yang memiliki LEM, LED dan Posyantek	12	35	35	100	58	60,34

Program pemberdayaan masyarakat untuk mendorong kemandirian desa dan menanggulangi kemiskinan dilaksanakan melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Pasar Desa.

Jumlah BUMDes dalam kurun waktu tahun 2013-2014 relatif masih rendah karena belum adanya dukungan dana desa dan komitmen Pemerintah Desa, peningkatan mulai terlihat pada tahun 2015 ketika dana desa mulai diberikan kepada Pemerintah Desa serta ditunjang dengan adanya komitmen dari Pemerintah Desa yang tinggi. Dari 215 BUMDes yang ada di Kabupaten Klaten saat ini, diklasifikasikan ke dalam 4 (empat) kategori berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan BUMDesa Provinsi Jawa Tengah yaitu: 1. BUMDes Dasar sejumlah 85; 2. BUMDes Tumbuh sejumlah 112; 3. BUMDes Berkembang sejumlah 24; dan 4. BUMDes Maju sejumlah 5.

Guna pengembangan dan optimalisasi pengelolaan BUMDes maka, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa telah melakukan pendampingan kepada

pengelola BUMDes dalam rangka meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia. Perkembangan lembaga ekonomi Pedesaan tahun 2014–2018 disajikan pada Tabel 3.60.

Tabel 3.60.
Lembaga Ekonomi Perdesaan

Tahun	Jumlah BUMDes	Jumlah Pasar Desa	Pasar Desa Dikelola Desa
(1)	(2)	(3)	(4)
2014	34	40	5
2015	63	40	5
2016	141	40	5
2017	217	40	5
2018	224	40	5
Jumlah	224	40	5

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2019.

Berdasarkan Tabel 3.60. sebagaimana tersebut di atas, Lembaga ekonomi perdesaan lainnya (Pasar Desa) juga dituntut dapat memberikan kontribusi positif di dalam meningkatkan pendapatan masyarakat desa. Peran pasar desa belum maksimal karena otoritas manajemen pengelolaan pasar desa belum diberikan sepenuhnya kepada Desa dan masih dikelola oleh Pemerintah Daerah. Hal ini perlu adanya komunikasi dari pihak terkait dalam rangka menyelesaikan permasalahan tersebut, lebih lanjut diharapkan adanya keberpihakan terhadap APBDes dalam rangka pengembangan Pasar Desa.

Pelatihan teknologi tepat guna di perdesaan dari kurun waktu tahun 2014-2018 disajikan pada Tabel 3.61.

Tabel. 3.61.

Pelatihan Teknologi Tepat Guna Tahun 2014-2018

No	Uraian	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jenis Pelatihan TTG yang telah diberikan	1. Pelatihan Pembuatan Aneka Kripik bahan Singkong Pemanfaatan TTG di Desa Kalikotes dengan peserta dari semua desa se Kec. Kalikotes masing desa sebanyak 5 (lima) orang	1. Pelatihan Ternak Lele dengan metode Bioflock Pemanfaatan TTG di Desa Drono peserta dari Desa Drono, Tempursari, Desa Ngawen Kec. Ngawen Desa Wiro Kec. Bayat Desa	1. Pelatihan Pembuatan Aneka Kripik bahan Singkong Pemanfaatan TTG di Desa Bono peserta dari Desa Bono, Pucangmiliran dan Wunut Kec. Tulung	1. Pelatihan Hidroponik Pemanfaatan TTG di Desa Bawukan peserta dari Desa Bawukan dan Desa Panggang Kecamatan Kemalang 2. Pelatihan Ternak Lele dengan metode Bioflock Pemanfaatan TTG di Desa Gunung Gajah	1. Pelatihan pembuatan Briket orang dengan bahan sampah organik di desa Solodiran, Kec Manisrenggo 2. Pelatihan pembuatan Briket orang dengan bahan sampah organik di desa Kranggan, Kec Manisrenggo 3. Pelatihan pembuatan

No	Uraian	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
			Ngawonggo Kec. Ceper		peserta dari Desa Kebon dan Desa Gununggajah, Bayat 3 Pelatihan Hidroponik Pemanfaatan TTG di Desa Sidowayah peserta dari Desa Sidowayah dan Desa Kebonharjo Kecamatan Polanharjo	Briket orang dengan bahan sampah organik di desa Taskombang, Kec Manisrenggo 4. Pelatihan pembuatan Briket orang dengan bahan sampah organik di desa Nangsri, Kec Manisrenggo
2.	Data Perkem- bangan Pemanf- aatan Teknolo- gi Tepat Guna (TTG) dipedes- aan	1. Posyantek Kec. Kalikotes	1. Posyantek Kec. Ngawen	1. Posyantek Kec. Kemalang 2. Posyantek Kec. Tulung	1. Posyantek Kec. Karanganom (Keputusan Bupati Klaten No. 414.4/213 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Pengelola POSYANTEK Kec. Karanganom Kab. Klaten) 2. Posyantek Kec. Polanharjo (Keputusan Bupati Klaten No. 414.4/214 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Pengelola POSYANTEK Kec. Polanharjo Kab. Klaten)	1. Posyantek antar desa TA 2018 di Kec. Cawas, Kec. Wedi

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2019.

Berdasarkan Tabel 3.61. sebagaimana tersebut di atas, mekanisme penerapan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) di Kabupaten Klaten, diawali dengan sosialisasi kepada seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Klaten (26 Kecamatan), kemudian proses pembentukan Teknologi Tepat Guna (TTG) dipilih pada kecamatan yang memiliki potensi untuk dikembangkan.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait Meningkatkan Peran LEM, LED dan Pengembangan Potensi TTG di Desa Dalam Penanggulangan Kemiskinan dilaksanakan dengan program, diantaranya:

1. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan'; dan
2. Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan.

Permasalahan :

1. Masih rendah desa yang memanfaatkan peran LEM, LED dan pengembangan potensi TTG; dan
2. Terbatasnya kualitas sumber daya aparatur desa, untuk memanfaatkan peluang pengembangan teknologi informasi.

Solusi :

1. Percepatan penggunaan Dana Desa yang berorientasi untuk pengembangan LEM, LED dan pengembangan potensi TTG; dan
2. Peningkatan kapasitas SD aparatur desa untuk memanfaatkan era digital bagi pengembangan desa.

**25. Sasaran Meningkatnya Produktifitas, Nilai Tambah dan Daya Saing
Sektor Kepariwisata;**

Sektor pariwisata merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang mempunyai keterkaitan dengan sektor-sektor lainnya sebagai penggerak utama perekonomian di daerah, untuk mendorong peningkatan pendapatan masyarakat, mengurangi pengangguran dan menurunkan angka kemiskinan. Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Klaten dengan mendorong sektor pariwisata untuk mengembangkan produktifitas, dan nilai tambah untuk meningkatkan daya saing daerah.

Adapun capaian Sasaran "Meningkatnya Produktifitas, Nilai Tambah dan Daya Saing Sektor Kepariwisata" sebagaimana Tabel 3.62.

Tabel 3.62.

Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja
Meningkatnya Produktifitas, Nilai Tambah dan Daya Saing Sektor
Kepariwisata

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun 2018			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2018 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			Target	Realisasi	%		
1	Persentase Peningkatan PAD dari sektor Pariwisata	5	25	47,50	190	100	36,54

Pengembangan pariwisata Kabupaten Klaten dapat dilihat antara lain dari produk wisata. Produk pariwisata di Kabupaten Klaten mencakup:

A. Jenis Kekayaan Wisata Alam

Kabupaten Klaten mempunyai banyak wisata alam maupun wisata buatan. Nama dan jenis obyek wisata serta lokasinya di Kabupaten Klaten disajikan pada Tabel 3.63.

Tabel 3.63.

Nama dan Jenis Obyek Wisata serta Lokasinya
di Kabupaten Klaten Tahun 2018

No.	Nama Obyek Wisata	Jenis Obyek Wisata	Lokasi
(1)	(2)	(3)	(4)
01.	Perayaan Padusan	Event Tradisional	Kec. Tulung Kab.Klaten
02.	Perayaan Maleman	Event Tradisional	Kec. Klaten Utara
03.	Perayaan Syawalan	Event Tradisional	Kec. Bayat dan Kec. Kalikotes
04.	Perayaan Yaqowiyu	Event Tradisional	Kec. Jatinom
05.	Deles Indah	Wisata Alam	Kec. Kemalang
06.	Sumber Air Ingas (OMAC)	Wisata Alam	Kec. Tulung Kab.Klaten
07.	Makam Sunan Pandanaran	Wisata Sejarah dan Religi	Kec. Bayat
08.	Jombor Permai	Wisata Alam	Kec. Bayat
09.	Makam R.Ng Ronggowarsito	Wisata Sejarah dan Religi	Kec. Trucuk
10.	Makam Ki Ageng Perwito	Wisata Sejarah dan Religi	Kec. Wonosari
11.	Pemandian Jolotundo	Wisata Alam	Kec. Karanganom
12.	Candi Plaosan, Sojiwan, Sewu dan Candi Bubrah	Wisata Sejarah dan Religi	Kec. Prambanan
13.	Makam Ki Agen Gribig	Wisata Sejarah dan Religi	Kec. Jatinom
14.	Sendang Sinongko	Wisata Alam	Kec. Ceper
15.	Umbul Pongkok, Nganten, Siblarak dan Umbul Nilo	Wisata Air dan Snarkling	Kec. Polanharjo
16.	Umbul Pelem	Wisata Air	Kec. Tulung
17.	Umbul Susuhan	Wisata Air	Kec. Ngawen
18.	Umbul Brintik, Brondong, Geneng dan Umbul Pluneng	Wisata Air	Kec. Kebonarum
19.	Desa Wisata Bugisan	Wisata Budaya dan Sejarah	Kec. Prambanan
20.	Desa Wisata Nganjat	Wisata Air dan Perikanan Nila	Kec. Polanharjo
21.	Desa Wisata Janti	Pemancingan	Kec. Polanharjo
22.	Desa Wisata Sidowayah	Wisata Air, Outbond, Kampung Dolanan dan Oase	Kec. Polanharjo
23.	Desa Wisata Soropaten	Wisata Budaya	Kec. Karanganom
24.	Desa Wisata Beku	Wisata Air dan Outbond	Kec. Karanganom

No.	Nama Obyek Wisata	Jenis Obyek Wisata	Lokasi
(1)	(2)	(3)	(4)
25.	Desa Wisata Kebondalem Kidul	Wisata Budaya, Sejarah dan Industri	Kec. Prambanan
26.	Desa Wisata Soran-Duwet	Wisata Budaya dan Outbond	Kec. Ngawen
27.	Desa Wisata Jarum	Wisata Budaya dan Kerajinan Batik	Kec. Bayat
28.	Desa Wisata Krakitan	Wisata Religi dan Alam	Kec. Bayat
30.	Desa Wisata Paseban	Wisata Religi, Budaya dan Industri	Kec. Bayat
31.	Desa Wisata Gunung Gajah	Wisata Alam	Kec. Bayat
32.	Desa Wisata Jotangan	Wisata Alam	Kec. Bayat
33.	Desa Wisata Demak Ijo	Wisata Budaya dan Kerajinan	Kec. Karangnongko
34.	Desa Wisata Karangnongko	Wisata Budaya dan Sejarah	Kec. Karangnongko
35.	Desa Wisata Balerante	Wisata Alam dan Air	Kec. Kemalang
36.	Desa Wisata Sidorejo	Wisata Alam dan Agro	Kec. Kemalang
37.	Desa Wisata Tegalmulyo	Wisata Alam, Outbond dan Embung	Kec. Kemalang
38.	Desa Wisata Nglinggi	Wisata Pemancingan dan Kuliner	Kec. Klaten Selatan
39.	Desa Wisata Mlese dan Tlising	Industri Lurik	Kec. Cawas
40.	Desa Wisata Melikan	Wisata Budaya dan Kerajinan Keramik	Kec. Wedi
41.	UmbulTirtomulyani&TirtoMulyono	Alam	Kec. Kebonarum
42.	WatuPrahu Bukit Cinta	Alam	Kec. Bayat
43.	WatuSepur	Alam	Kec. Bayat
44.	Bukit Petrum	Alam	Kec. Bayat
45.	Puncak Arjuna	Alam	Kec. Bayat
46.	Kedungan Waterpark	Buatan	Kec. Pedan
47.	Tirtonirmolo	Buatan	Kec. Prambanan
48.	Museum Gula Jawa Tengah	Buatan	Kec. Jogonalan
49.	Candi Merak	Budaya	Kec. Karangnongko
50.	Candi Sojiwan	Budaya	Kec. Prambanan
51.	Kolam Renang Tirta Pelangi	Buatan	Kec. Bayat
52.	Kolam Renang Tirta Indah	Buatan	Kec. Klaten Selatan
53.	Kolam Renang Tirta Harapan	Buatan	Kec. Klaten Utara
54.	Desa Wisata Glagah	Edukasi	Kec. Jatinom
55.	Wisata Hidroponik	Edukasi	Kec. Kemalang
56.	Kalitalang	Alam	Kec. Kalitalang
57.	Banyu Beku	Alam	Kec. Polanharjo
58.	Water Gong	Alam	Kec. Polanharjo
59.	Ponggok Ciblon	Buatan	Kec. Polanharjo
60.	Susur Kali Pusur	Alam	Kec. Tulung
61.	Tugu Waseso Soropaten	Budaya	Kec. Polanharjo
62.	Taman Celosia Tlogo Nursery	Buatan	Kec. Prambanan
63.	Umbul Gedaren	Alam	Kec. Jatinom
64.	Umbul Manten	Alam	Kec. Tulung
65.	Umbul Brondong	Alam	Kec. Kebonarum
66.	Omah Wayang	Budaya	Kec. Klaten Selatan

Sumber: Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Klaten , 2019

B. Jenis Kekayaan Wisata Budaya

Jenis kekayaan wisata budaya di Kabupaten Klaten antara lain: Candi Plaosan, Candi Lumbung, Candi Bubrah, Candi Asu (Sona), Candi Sojiwan, Candi Merak, Candi Karangnongko, Candi Sewu, Masjid Jimbung, Masjid Golo, Masjid Jawi, Makam Syech Domba, Makam Syeh Kewel, Makam Ki Ageng Gribig, Makam R Ng. Ronggowarsito, Situs Kaliworo, dan Situs Wonobojo, Makam Sunan Pandanaran, dan Makam Kyai Mlati.

C. Tempat Bersejarah

Tempat bersejarah yang ada di Kabupaten Klaten diantaranya: Monumen Juang 45 Klaten, Monumen PARATA MBKD Pos X-I, Museum Gula Jawa Tengah di Jogonalan, Monumen Patung Kemerdekaan Soekarno, Goa Jepang dan Pesanggrahan Pakubuwu di Deles.

Jumlah Obyek Wisata Dan Pengunjung

Perkembangan jumlah obyek wisata dan pengunjung di Kabupaten Klaten dalam kurun waktu Tahun 2014-2018 menunjukkan peningkatan, selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 3.64.

Tabel 3.64.

Jumlah Obyek Wisata, Pengunjung, Lama Tinggal dan Rata-rata Pengeluaran Wisatawan Nusantara (Wisnus) dan Wisatawan Mancanegara (Wisman) Tahun 2014-2018

Tahun	Jumlah Obyek Wisata (obyek)	Pengunjung (orang)		Lama Tinggal (hari)		Rata-rata Pengeluaran (Rp.000)	
		Wisnus	Wisman	Wisnus	Wisman	Wisnus	Wisman
2014	82	320.687	185	1	0,5	475	750
2015	82	329.021	220	1	0,5	550	1.000
2016	82	377.409	372	1	1	750	1.500
2017	82	2.224.294	190.686	1	1	1.000	2.000
2018	82	2.483.945	222.373	1	1	1.000	2.000

Sumber: Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Klaten, 2019

Berdasarkan Tabel 3.64 sebagaimana tersebut di atas, dapat dilihat bahwa jumlah pengunjung obyek wisata pada tahun 2014 -2018 mengalami kenaikan dan didominasi oleh wisatawan nusantara, sedangkan wisatawan mancanegara relatif lebih sedikit karena wisatawan mancanegara lebih banyak berkunjung ke Candi Prambanan. Hal ini disebabkan adanya penataan di beberapa obyek wisata dan naiknya jumlah pengunjung pada beberapa perayaan seperti Maleman, Syawalan dan Yaqowiyu.

Sedangkan di sisi lain lama tinggal wisatawan Nusantara rata-rata hanya satu hari dan untuk wisatawan mancanegara rata-rata hanya 0,75 hari. Hal ini disebabkan kebanyakan para wisatawan, baik nusantara maupun mancanegara hanya sekedar berkunjung di tempat obyek wisata saja dan lebih menyukai menginap di Yogyakarta ataupun Surakarta. Demikian juga dengan rata-rata pengeluaran relative belum begitu besar, untuk wisatawan nusantara hanya berkisar antara Rp. 350.000,- sampai Rp.1.000.000,- dan wisatawan mancanegara berkisar Rp.500.000,- sampai Rp.2.000.000,- Sumbangan Sektor Pariwisata Terhadap PAD tahun 2014-2018 disajikan pada Tabel 3.65.

Tabel 3.65.

Sumbangan Sektor Pariwisata Terhadap PAD
Kabupaten Klaten Tahun 2014-2018

No	Jenis Obyek Wisata Perayaan	Target (Rp. 000)					Realisasi (Rp)				
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
1	Perayaan Padusan	57.500	57.500	52.500	52.500	57.500	57.500	57.500	52.500	57.500	58.000
2	Perayaan Maleman	26.000	26.000	28.000	28.000	28.000	26.100	26.000	28.000	28.000	28.000
3	Perayaan Syawalan	47.000	47.000	51.700	51.700	53.000	47.000	47.000	51.700	52.500	53.000
4	Perayaan Yagowiyu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Deles Indah	12.500	12.500	14.000	14.000	25.000	12.500	12.500	14.000	15.600	9.600
6	OMAC	555.045	555.045	600.000	600.000	1.680.500	481.149	559.175	609.976	739.919	943.170
7	Jombor Permai	62.500	62.500	65.000	65.000	68.000	72.915	68.205	65.495	68.050	71.450
8	Makam Pandanaran	100.000	100.000	134.000	114.000	180.000	162.900	152.300	143.300	144.500	141.200
9	Makam Ronggowarsito	1.605	1.605	1.800	1.800	2.000	1.740	1.880	1.890	2.000	2.050
10	Pemandian Jolotundo	22.000	22.000	24.200	24.200	77.000	22.000	22.017,5	24.200	50.170	81.680
11	Candi Plaosan	2.500	2.500	5.000	50.000	100.000	7.101	7.758	53.883	80.454	218.718
12	Makam Ki Ageng Gribig	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000	2.000	2.000	3.000	3.030	3.041
13	Lain-lain	21.350	21.350	21.350	21.350	21.350	20.717	21.350	23.850	13.450	12.460
	Jumlah	910.000	910.000	1.000.550	1.025.550	2.295.350	913.622	977.685,5	1.071.794	1.255.173	1.622.369

Sumber: Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Klaten , 2019

Berdasarkan Tabel 3.65. sebagaimana tersebut di atas, terlihat bahwa kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD belum optimal. Pada Tahun 2014-2017 realisasi pendapatan mencapai di atas target, tetapi belum signifikan sedangkan pada Tahun 2018 realisasi pendapatan tidak memenuhi target, sehingga pendapatan dari sektor pariwisata tersebut masih perlu dioptimalkan.

Permasalahan :

Permasalahan yang dijumpai dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Klaten adalah masih perlunya peningkatan pengembangan pemasaran pariwisata, pengembangan destinasi pariwisata serta peningkatan sumber daya manusia yang terkait dengan kepariwisataan serta penataan kawasan pariwisata yang dapat memiliki daya tarik.

Solusi :

Peningkatan pengembangan pemasaran pariwisata, pengembangan destinasi pariwisata serta peningkatan sumber daya manusia yang terkait dengan kepariwisataan serta penataan kawasan pariwisata yang dapat memiliki daya tarik.

26. Sasaran Meningkatnya Nilai Tambah, Produktifitas dan Daya Saing pada Urusan Perdagangan, Koperasi dan UKM;

Sektor perdagangan, koperasi dan UKM merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang mempunyai keterkaitan dengan sektor-sektor lainnya sebagai penggerak utama perekonomian di daerah, untuk mendorong peningkatan pendapatan masyarakat, mengurangi pengangguran dan menurunkan angka kemiskinan. Upaya yang dilakukan untuk Meningkatnya Nilai Tambah, Produktifitas dan Daya Saing pada Urusan Perdagangan, Koperasi dan UKM diupayakan dengan berbagai kebijakan Daerah yang mendukung urusan perdagangan, koperasi dan UKM.

Adapun capaian Sasaran Meningkatnya Nilai Tambah, Produktifitas dan Daya Saing pada Urusan Perdagangan, Koperasi dan UKM sebagaimana Tabel 3.66.

Tabel 3.66.

Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja
Meningkatnya Nilai Tambah, Produktifitas dan Daya Saing pada Urusan
Perdagangan, Koperasi dan UKM

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun 2018			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2018 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			Target	Realisasi	%		
1	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	18,74	18,94	17,88	94,40	19,38	92,26
2	Persentase UMKM yang memiliki daya saing	5	9	8,99	99,88	15	59,93

1. Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB

Pada tahun 2018 tercatat kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB tumbuh sebesar 17,88%. Tumbuhnya sektor perdagangan ini ditunjang adanya pengembangan dan pemberdayaan UKM melalui pola klaster dan penetapan Produk Unggulan Daerah diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal serta dapat menjadi daya ungkit bagi pertumbuhan sektor dan sub sektor lainnya.

2. Persentase UMKM yang Memiliki Daya Saing

Pada tahun 2017 jumlah UMKM sebanyak 54.966 dan jumlah UMKM yang berdaya saing sebanyak 3.727 atau sebesar 6,9%. Pada tahun 2018 tercatat sebanyak 55.016 UMKM dan yang berdaya saing sebanyak 4.946 atau sebanyak 8,99%. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2017, capaian tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 2,09%.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait sasaran Meningkatkan Produktifitas, Nilai Tambah dan Daya Saing Sektor Pertanian dan Ketahanan Pangan di Kabupaten Klaten. Pada tahun 2018, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis sasaran Meningkatkan Nilai Tambah, Produktifitas dan Daya Saing pada Urusan Perdagangan, Koperasi dan UKM diantaranya dengan program:

1. Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan;
2. Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri;
3. Pembinaan Pedagang Kakilima dan Asongan;
4. Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah;
5. Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM; dan
6. Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi;

Permasalahan :

- a. Terbatasnya akses dan perluasan pasar produk ekspor serta kurang berkembangnya kerjasama perdagangan internasional;
- b. Lemahnya daya saing dan belum optimalnya pengembangan mutu, desain dan merk dagang beberapa produk ekspor;
- c. Terbatasnya kemampuan SDM pelaku usaha di sektor perdagangan khususnya Usaha Dagang Kecil Menengah;
- d. Masih lemahnya legalisasi hak kekayaan intelektual terhadap produk – produk perdagangan unggulan Kabupaten Klaten;
- e. Belum optimalnya penataan dan pemberdayaan PKL;

- f. Masih kurangnya ketersediaan sarana prasarana pasar yang representatif;
- g. Kurangnya kesadaran pelaku usaha untuk memberikan informasi, data dan laporan perkembangan usahanya;
- h. Kurangnya inovasi dan diversifikasi produk; dan
- i. Terbatasnya produk berorientasi ekspor.

Solusi :

- a. Peningkatan akses dan perluasan pasar produk ekspor dengan membuka kerjasama perdagangan internasional;
- b. Penguatan daya saing dengan pengembangan mutu, desain dan merk dagang beberapa produk ekspor;
- c. Optimalisasi pelaksanaan perlindungan konsumen dan pengawasan barang beredar;
- d. Peningkatan kemampuan kualitas SDM pelaku usaha di sektor perdagangan khususnya Usaha Dagang Kecil Menengah.
- e. Mengupayakan legalisasi hak kekayaan intelektual terhadap produk – produk perdagangan unggulan Kabupaten Klaten; dan
- f. Penataan dan pemberdayaan PKL.

27. Sasaran Meningkatnya Penerapan Inovasi Dalam Pembangunan Daerah;

Penerapan inovasi dalam pembangunan merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang mempunyai keterkaitan dengan sektor-sektor lainnya sebagai penggerak utama perekonomian di daerah, untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan pelayanan masyarakat.

Adapun capaian Sasaran “Meningkatnya Penerapan Inovasi Dalam Pembangunan Daerah” sebagaimana Tabel 3.67.

Tabel 3.67.


Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja
Meningkatnya Penerapan Inovasi Dalam Pembangunan Daerah

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun 2018			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2018 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			Target	Realisasi	%		
1	Persentase inovasi yang diterapkan	31,82	72,73	60	82,56	100	60

Inovasi Pembangunan Daerah merupakan upaya untuk mengakselerasi pencapaian-pencapaian pembangunan daerah dan pengembangan Daerah. Inovasi ini didorong munculnya pola pikir yang inovatif menjadi pijakan bagi kerangka penyusunan kebijakan pembangunan daerah. Gambaran inovasi-inovasi yang telah dilakukan dan terus dikembangkan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten disajikan pada Tabel. 3.68.

Tabel 3.68.

Inovasi Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten

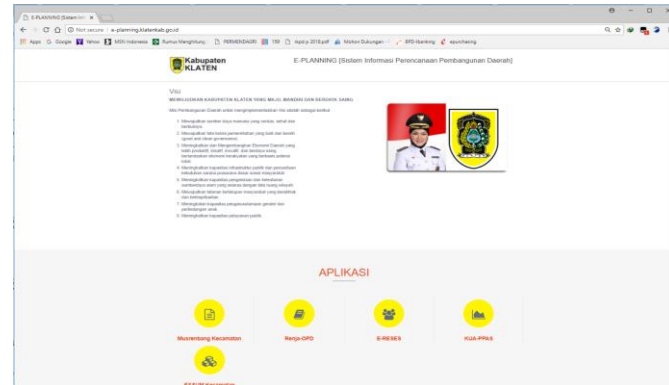
No	Inovasi	Gambaran Ringkas	Urusan Bidang Terkait
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Matur Dokter	<p>Matur Dokter merupakan aplikasi yang berfungsi untuk mempermudah masyarakat di Kabupaten Klaten dalam mendapat informasi atau melakukan pengaduan dan konsultasi tentang masalah kesehatan kepada petugas. Dalam Aplikasi Matur Dokter memiliki beberapa fitur seperti logo, Panel Kontrol, <i>Whatsapp Chat</i> Darurat, Telepon Darurat, Informasi Tempat Tidur Rumah Sakit, Matur Dokter, Forum Kesehatan, Berita Kesehatan, Tips Kesehatan, <i>Slide Show</i> Berita Kesehatan</p> 	Kesehatan

2

e-Planning
e-Budgeting

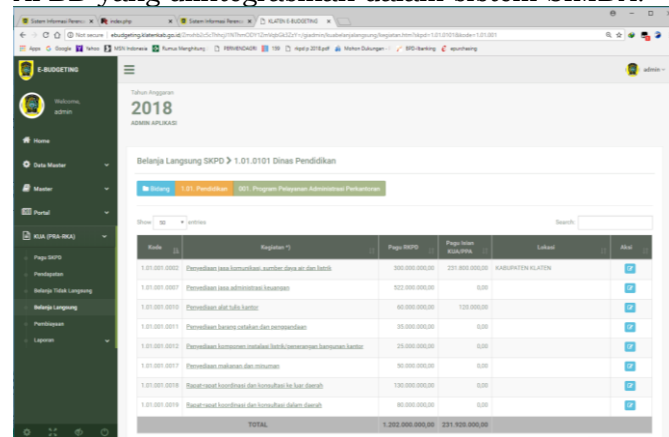
Perencanaan APBD dimulai dari perencanaan RKPD/Renja Perangkat Daerah yang sudah dilakukan melalui aplikasi yang berbasis web yang dapat diakses melalui alamat **http://e-planning.klatenkab.go.id.**

Fokus aplikasi ini dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan tahunan/Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, yang dalam tahapan penyusunannya mengakomodir dan mendokumentasikan antara lain Musrenbang Kecamatan, **E-Reses** yang menghasilkan Pokok-Pokok Pikiran DPRD, serta penyusunan rancangan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang selanjutnya dibahas dalam Forum Perangkat Daerah



Sistem aplikasi integrasi perencanaan dan penganggaran sudah dibangun di tahun 2018, dengan berbasis web yang dapat diakses di alamat **http://ebudgeting.klatenkab.go.id/**

Sistem ini digunakan dalam penyusunan dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang mempedomani dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sampai dengan rincian belanja yang disusun menjadi PRA-RKA yang kemudian dijadikan dasar penyusunan Raperda APBD yang diintegrasikan dalam sistem SIMDA.



Perencanaan

No	Inovasi	Gambaran Ringkas	Urusan Bidang Terkait
(1)	(2)	(3)	(4)
3	Pengembangan Varietas Padi Rojo Lele	Latar belakang pengembangan varietas padi Rojolele adalah keinginan untuk pelestarian varietas tersebut, dikarenakan petani mulai enggan menanam disebabkan oleh kondisi fisik varietas padi yang tinggi sekitar 180 cm, sehingga mudah rebah pada saat akan panen dan umur tanaman yang lama sekitar lima setengah bulan. Bekerjasama dengan instansi BATAN (Badan Tenaga Nuklir Nasional) kelemahan tersebut diperbaiki dengan tujuan memendekkan umur tanaman dan memendekkan tinggi tanaman. Penelitian dimulai bulan Desember 2013 dan saat ini tujuan tersebut telah tercapai, umur tanaman lebih pendek menjadi sekitar seratus hari dan tinggi tanaman menjadi sekitar 110 cm. disamping itu tambahan hasil positifnya antara lain produktivitas menjadi lebih besar diindikasikan dari jumlah anakan yang lebih banyak, serta sifat padi rojolele yang pulen dan wangi masih terjaga. Direncanakan pada awal pebruari dijadwalkan akan dilakukan uji proposal pelepasan varietas padi hasil penelitian sebagai varietas padi Rojolele yang baru sebagai varietas lokal khas Klaten.	Penelitian dan Pengembangan
4	Layanan e-KTP Mobile	Layanan e-KTP mobile dilakukan dalam rangka pendekatan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil. e-KTP mobile diutamakan menyasar pada siswa-siswa sekolah yang telah wajib KTP, penduduk usia wajib KTP yang mempunyai keterbatasan fisik dan masyarakat umum.	

28. Sasaran Meningkatnya Nilai Tambah, Produktifitas dan Daya Saing Sektor Penanaman Modal;

Sektor penanaman modal merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang mempunyai keterkaitan dengan sektor-sektor lainnya sebagai penggerak utama perekonomian di daerah untuk mendorong peningkatan daya saing daerah. Upaya yang dilakukan untuk Meningkatnya Nilai Tambah, Produktifitas dan Daya Saing Sektor Penanaman Modal diupayakan dengan berbagai kebijakan Daerah yang mendukung urusan penanaman modal.

Adapun capaian Sasaran *Meningkatnya Nilai Tambah, Produktifitas dan Daya Saing Sektor Penanaman Modal* sebagaimana Tabel 3.69.

Tabel 3.69.

Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja
Meningkatnya Nilai Tambah, Produktifitas dan Daya Saing Sektor Penanaman
Modal

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun 2018			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2018 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			Target	Realisasi	%		
1	Rasio daya serap tenaga kerja (PMDN/PMA):						
	PMDN	189	417	131	31,41	483	27,12
	PMA	46	294	264	89,79	294	89,80
2	Persentase pertumbuhan realisasi investasi (PMDN/PMA):						
	PMDN	1,75	1,98	1078	54.444,44	2,50	43.120
	PMA	2,25	2,45	52	2122,45	2,55	2.039,22

Kondisi perekonomian Kabupaten Klaten diukur dari berbagai variabel makro seperti PDRB dan laju pertumbuhan ekonomi, tingginya kedua variable tersebut sangat mendukung masuknya investasi baik dalam bentuk Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA). Gambaran jumlah Investasi PMA dan PMDN di Kabupaten Klaten Tahun 2014-2018, disajikan pada Tabel 3.70.

Tabel 3.70.

Jumlah Investasi PMA dan PMDN
Tahun 2014-2018

Tahun	Penanaman Modal Asing				Penanaman Modal Dalam Negeri		
	Nilai Investasi (US\$)	Nilai Investasi (Rp.000)	Jumlah Proyek	Kenaikan / Penurunan (%)	Nilai Investasi (Rp 000.)	Jumlah Proyek	Kenaikan/ Penurunan (%)
2014	12.246.600	149.922.877,2	6	-77	25.000.000	1	-85
2015	7.080.000	88.500.000	5	83	401.071.500	21	1.504
2016	11.278.800	154.102.700	5	-42	89.208.500	12	-78
2017	17.179.600	231.535.000	4	59	334.295.500	7	275
2018	90.087.482	1.261.224.753,17	20	52	3.939.171.301,52	133	1.078

Sumber Data : DPMPSTSP Kabupaten Klaten, 2019

Berdasarkan Tabel 3.70. sebagaimana tersebut di atas, dapat dilihat bahwa jumlah investasi PMDN maupun PMA pada Tahun 2018 mengalami peningkatan yaitu PMDN sebesar Rp.3.939.171.301.520,- dan PMA sebesar 1.261.224.753.170 US\$ dibandingkan dengan Tahun 2017 yaitu PMDN sebesar Rp.334.295.500.000,- dan PMA sebesar Rp. 231.535.000.000. Hal ini disebabkan

oleh iklim usaha yang kondusif, fasilitas dan infrastruktur investasi yang memadai, ketersediaan tenaga kerja.

1. Penanaman Modal dalam Negeri (PMDN)

Faktor penting lain yang juga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah adalah penanaman modal/investasi. Penanaman modal/investasi tidak bisa dilepaskan dari sektor usaha industri, semakin besar dan berkembang industri di suatu daerah semakin besar investasi yang ditanamkan dalam daerah tersebut. Perkembangan PMDN di Kabupaten Klaten Tahun 2014-2018 dapat dilihat pada Tabel 3.71.

Tabel 3.71.

Perkembangan Realisasi PMDN Tahun 2014-2018

No	Uraian	Satuan	PMDN				
			2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Jumlah Usaha	Unit	1	21	12	7	133
2	Jumlah Tenaga Kerja	Orang	100	3.959	2.861	2.781	17.413
3	Nilai Investasi (Rp. 000)	Rp.	25.000.000	401.071.500	89.208.500	334.295.500	3.939.171.301,52

Sumber Data : DPMPSTSP Kabupaten Klaten, 2019

2. Penanaman Modal Asing (PMA)

Jumlah investasi PMA di Kabupaten Klaten dalam kurun waktu Tahun 2014-2018 mengalami peningkatan. Perkembangan PMA di Kabupaten Klaten Tahun 2014-2018 dapat dilihat pada Tabel 3.72.

Tabel 3.72.

Perkembangan Realisasi PMA Tahun 2014-2018

No	Uraian	Satuan	PMA				
			2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah Usaha	Unit	6	5	5	4	20
2	Jumlah Tenaga Kerja	Orang	521	230	1.468	79	5.270
3	Nilai Investasi	(US \$)	12.246.600	7.080.000	11.278.800	17.179.600	90.087.482

Sumber Data : DPMPSTSP Kabupaten Klaten, 2019

Berdasarkan Tabel 3.71 dan Tabel 3.72 sebagaimana tersebut di atas, realisasi perkembangan PMDN dan PMA di Kabupaten Klaten tahun 2018 terlihat bahwa sebagian perusahaan atau proyek belum dapat merealisasikan investasi atau penanaman modal, baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA).

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait sasaran Meningkatnya Produktifitas, Nilai Tambah dan Daya Saing Sektor Penanaman Modal didukung dengan program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi.

Permasalahan :

1. Kurangnya informasi terkait potensi investasi; dan
2. Harga tanah peruntukan industri yang tinggi.

Solusi :

- a. Peningkatan akses dan perluasan pasar produk ekspor dengan membuka kerjasama perdagangan internasional;
- b. mengupayakan pemanfaatan lahan kritis sebagai lokasi investasi, dan Pemerintah daerah wajib menyediakan infrastruktur penunjang.

29. Sasaran Meningkatnya dan Pengembangan Produktifitas, Nilai Tambah dan Data Saing Sektor Ketenagakerjaan;

Masalah angkatan kerja adalah masalah yang perlu mendapat perhatian serius dalam melakukan perencanaan pembangunan daerah. Karakteristik angkatan kerja ini sangat besar pengaruhnya bagi kesejahteraan penduduk, terutama jika dilihat secara ekonomi makro. Proporsi atau jumlah pengangguran terbuka dari angkatan kerja berguna sebagai acuan Pemerintah bagi pembukaan lapangan kerja baru. Di samping itu, trend indikator ini akan menunjukkan keberhasilan program ketenagakerjaan dari tahun ke tahun.

Adapun capaian sasaran “ Meningkatnya dan Pengembangan Produktifitas, Nilai Tambah dan Data Saing Sektor Ketenagakerjaan” disajikan pada Tabel 3.73.

Tabel 3.73.

**Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja
Meningkatnya dan Pengembangan Produktifitas, Nilai Tambah dan Daya Saing Sektor Ketenagakerjaan**

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun 2018			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2018 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			Target	Realisasi	%		
1	Rasio penduduk yang bekerja	0,97	1,03	0,87	84,47	1,08	80,55
2	Angka partisipasi angkatan kerja	67,79	69	73,58	106,64	69	106,64

1. Rasio Penduduk yang bekerja

Pada Tahun 2018 jumlah penduduk yang bekerja sebanyak 586.684 jiwa, sedangkan jumlah angkatan kerja sebanyak 674.273. Sehingga rasio penduduk yang bekerja sebesar 0,87%.

2. Tingkat partisipasi angkatan kerja

Pada tahun 2018 jumlah angkatan kerja usia 15 tahun ke atas sebanyak 674.273 jiwa, sedangkan jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas sebanyak 916.377 jiwa. Sehingga tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar 73,58%.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari sasaran Meningkatkan dan Pengembangan Produktifitas, Nilai Tambah dan Daya Saing Sektor Ketenagakerjaan di Kabupaten Klaten dengan dukungan program:1) Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja, dan 2) Peningkatan Kesempatan kerja.

Permasalahan:

- a. Terbatasnya kesempatan kerja yang disebabkan oleh: (i) ketidakseimbangan antara kesempatan kerja yang ada dengan kebutuhan masyarakat akan pekerjaan; dan (ii) Penyerapan angkatan kerja yang ada tidak sebanding dengan pertumbuhan angkatan kerja, sehingga jumlah pengangguran bertambah;
- b. Peluang kerja relatif belum bisa menampung tenaga kerja bagi pencari pekerjaan;
- c. Hambatan budaya (feodalisme), masyarakat cenderung kepada pekerjaan kantoran (pegawai negeri, dll) sebagai pekerjaan prestisius, sehingga mematikan kreatifitas untuk bekerja di luar sektor jasa Pemerintahan;
- d. Rendahnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja yang disebabkan oleh: (i) Rendahnya tingkat pendidikan tenaga kerja; (ii) Rendahnya ketrampilan tenaga kerja; (iii) Ketidaksesuaian antara persyaratan kualifikasi yang dibutuhkan oleh pasar kerja dengan kompetensi pendidikan yang dimiliki; (iv) Ketersediaan lembaga pelatihan untuk meningkatkan kualitas pekerja juga belum memadai;
- e. Meningkatnya jumlah pencari kerja yang diakibatkan angkatan kerja baru, tidak sebanding dengan lapangan kerja yang tersedia;

- f. Belum optimalnya pembinaan dan pemihakan anggaran terhadap kelompok – kelompok pengangguran untuk membuka kesempatan kerja mandiri melalui pemberdayaan usaha ekonomi produktif ;
- g. Belum optimalnya pelatihan kerja bagi para angkatan kerja guna meningkatkan keterampilan untuk mampu bersaing di pasar kerja;
- h. Belum optimalnya organisasi serikat pekerja sebagai wadah perjuangan hak – hak pekerja;
- i. Belum optimalnya proteksi dan advokasi terhadap tenaga kerja yang berakibat kurangnya nilai tawar tenaga kerja;
- j. Inkonsistensi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI); dan
- k. Belum tersedianya *database* ketenagakerjaan.

Solusi :

- a. Membuka peluang kerja seluas-luasnya untuk menampung tenaga kerja bagi pencari pekerjaan;
- b. Menghilangkan hambatan budaya (feodalisme), bahwa semua lapangan kerja adalah pekerjaan prestisius, sehingga akan membuka ruang kreatifitas untuk bekerja di luar sektor jasa Pemerintahan;
- c. Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja yang disebabkan oleh: (i) Rendahnya tingkat pendidikan tenaga kerja; (ii) Rendahnya ketrampilan tenaga kerja; (iii) Ketidaksesuaian antara persyaratan kualifikasi yang dibutuhkan oleh pasar kerja dengan kompetensi pendidikan yang dimiliki; (iv) Ketersediaan lembaga pelatihan untuk meningkatkan kualitas pekerja juga belum memadai;
- d. Mengoptimalkan pembinaan dan pemihakan anggaran terhadap kelompok – kelompok pengangguran untuk membuka kesempatan kerja mandiri melalui pemberdayaan usaha ekonomi produktif ;
- e. Mengoptimalkan pelatihan kerja bagi para angkatan kerja guna meningkatkan keterampilan untuk mampu bersaing di pasar kerja.
- f. Mengoptimalkan organisasi serikat pekerja sebagai wadah perjuangan hak – hak pekerja;
- g. Mengoptimalkan proteksi dan advokasi terhadap tenaga kerja yang berakibat kurangnya nilai tawar tenaga kerja; dan
- h. Merintis *database* ketenagakerjaan secara *online*.

30. Sasaran Meningkatnya Perlindungan Sektor Ketenagakerjaan;

Perlindungan tenaga kerja sangat besar pengaruhnya bagi kesejahteraan penduduk, terutama jika dilihat secara ekonomi makro. Tidak saja memberi rasa nyaman bagi pekerja, tetapi juga menjaga ketahanan daerah. Sehingga perlunya perlindungan tenaga kerja akan menunjukkan keberhasilan program ketenagakerjaan dari tahun ke tahun.

Adapun capaian sasaran "Meningkatnya Perlindungan Sektor Ketenagakerjaan" disajikan pada Tabel 3.74.

Tabel 3.74

Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Perlindungan Sektor Ketenagakerjaan

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun 2018			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2018 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			Target	Realisasi	%		
1	Besaran pekerja/ buruh yang menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan	86,81	87,60	82,59	94,28	25,5	323,88

1. Besaran pekerja/ buruh yang menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan

Jumlah tenaga kerja di sektor PMA pada tahun 2017 sebanyak 79 jiwa dan yang bekerja di sektor PMDN sebanyak 2.781 jiwa. Pada tahun 2018 jumlah tenaga kerja di sektor PMA sebanyak 5.270 jiwa, dan di sektor PMDN sebanyak 9.413 jiwa. Jumlah pekerja/buruh pada tahun 2018 sebanyak 14.683 jiwa (di sektor PMA/PMDN) yang menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan mencapai 12.127 jiwa (atau 82,59%). Sehingga masalah perlindungan tenaga kerja adalah masalah yang perlu mendapat perhatian besar dalam melakukan perencanaan pembangunan.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari sasaran Meningkatnya Perlindungan Ketenagakerjaan di Kabupaten Klaten dengan dukungan program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan.

Permasalahan:

1. Belum optimalnya organisasi serikat pekerja sebagai wadah perjuangan hak – hak pekerja;
2. Belum optimalnya proteksi dan advokasi terhadap tenaga kerja yang berakibat kurangnya nilai tawar tenaga kerja;

3. Belum optimalnya pembinaan dan pemihakan anggaran terhadap kelompok – kelompok pekerja/buruh melalui pemberdayaan usaha ekonomi produktif ;
4. Belum optimalnya pelatihan kerja bagi para angkatan kerja guna meningkatkan keterampilan untuk mampu bersaing di pasar kerja;

Solusi :

- a. Menghilangkan hambatan budaya (feodalisme), bahwa semua lapangan kerja adalah pekerjaan prestisius, sehingga akan membuka ruang kreatifitas untuk bekerja di luar sektor jasa Pemerintahan dan wajib difasilitasi menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan;
- b. Mengoptimalkan pembinaan dan pemihakan anggaran terhadap kelompok – kelompok pekerja/buruh melalui pemberdayaan usaha ekonomi produktif;
- c. Mengoptimalkan organisasi serikat pekerja sebagai wadah perjuangan hak – hak pekerja; dan
- d. Mengoptimalkan proteksi dan advokasi terhadap tenaga kerja yang berakibat kurangnya nilai tawar tenaga kerja.

31. Sasaran Meningkatnya Nilai Tambah, Produktifitas dan Daya Saing Sektor Perindustrian;

Sektor perindustrian merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang mempunyai keterkaitan dengan sektor-sektor lainnya sebagai penggerak utama perekonomian di daerah, untuk mendorong peningkatan pendapatan masyarakat, mengurangi pengangguran dan menurunkan angka kemiskinan, serta menumbuhkan daya saing daerah. Upaya yang dilakukan untuk Meningkatnya Nilai Tambah, Produktifitas dan Daya Saing Sektor Industri diupayakan dengan berbagai kebijakan Daerah yang mendukung urusan perindustrian.

Adapun capaian Sasaran Meningkatnya Nilai Tambah, Produktifitas dan Daya Saing pada Sektor Perindustrian sebagaimana Tabel 3.75.

Tabel 3.75.

Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja
Meningkatnya Nilai Tambah, Produktifitas dan Daya Saing Sektor
Perindustrian

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun 2018			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2018 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			Target	Realisasi	%		
1	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	27,55	34,86	35,94	103,10	35,2	102,10
2	Persentase IKM yang memiliki daya saing	2,5	5,50	1,80	32,73	7,5	24

1. Kontribusi Sektor Perindustrian terhadap PDRB

Komponen pembentuk PDRB, sektor industri manufaktur dibentuk oleh sub sektor industri besar, menengah, kecil dan rumah tangga. Sektor industri sebagai sektor andalan memberikan andil yang besar bagi perekonomian di Kabupaten Klaten, yaitu memberikan sumbangan terhadap PDRB sebesar 34,54 % (atau Rp.12.412.507,52 juta) pada tahun 2017 dan pada tahun 2018 menjadi sebesar 35,94 % (Rp.14.080.982,00 juta).

2. Persentase IKM yang Memiliki Daya Saing

Pada tahun 2017 sebanyak 34.672 IKM yang memiliki daya saing baru mencapai 4,5%, dan pada tahun 2018 menurun menjadi 1,80%, sehingga diperlukan upaya untuk terus dapat meningkatkan daya saing bagi IKM di Kabupaten Klaten. Penurunan ini disebabkan karena, banyaknya pekerja di sektor IKM yang beralih profesi dan lesunya pasar.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait sasaran Meningkatkan Produktifitas, Nilai Tambah dan Daya Saing Sektor Pertanian dan Ketahanan Pangan di Kabupaten Klaten. Pada tahun 2018, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis sasaran Meningkatkan Nilai Tambah, Produktifitas dan Daya Saing Sektor industri diantaranya dengan program:

1. Pengembangan industri kecil dan Menengah; dan
2. Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri.

Permasalahan :

- a. Terbatasnya akses dan perluasan pasar produk ekspor serta kurang berkembangnya kerjasama perdagangan internasional;
- b. Lemahnya daya saing dan belum optimalnya pengembangan mutu, desain dan merk dagang beberapa produk ekspor;
- c. Terbatasnya kemampuan SDM pelaku usaha di sektor IKM; dan
- d. Masih lemahnya legalisasi hak kekayaan intelektual terhadap produk – produk perindustrian unggulan Kabupaten Klaten;

Solusi :

- a. Peningkatan akses dan perluasan pasar produk ekspor dengan membuka kerjasama perdagangan internasional;
- b. Penguatan daya saing dengan pengembangan mutu, desain dan merk dagang beberapa produk ekspor;
- c. Optimalisasi pelaksanaan perlindungan konsumen dan pengawasan barang beredar; dan
- d. Peningkatan kemampuan kualitas SDM pelaku usaha IKM.

32. Sasaran Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Publik dan Sarana Prasarana Dasar Masyarakat;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah, Pemerintah kabupaten diwajibkan melaksanakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang. Sementara ini kewajiban yang harus diperhatikan terkait prasarana jalan adalah : Total panjang jalan di Kabupaten Klaten yang termasuk ke dalam kategori jalan negara 45,272 km, jalan provinsi sepanjang 34,238 km dan jalan kabupaten sepanjang 769,63 km. Faktor-faktor penting yang perlu diperhatikan adalah aksesibilitas, mobilitas, dan keselamatan.

Luas area layanan irigasi di Kabupaten Klaten sebesar 1.608 ha yang tercakup dalam Daerah Irigasi (DI). Secara kewenangan, ada 2 (dua) DI yang menjadi kewenangan Pemerintah pusat, 5 (lima) DI yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan 478 DI yang menjadi kewenangan Kabupaten Klaten. Dengan pembagian kewenangan itu, maka pengelolaan irigasi dilakukan dari APBN, APBD Provinsi Jawa Tengah dan APBD Kabupaten Klaten maupun yang bersumber dari dana desa. Pengelolaan sistem irigasi meliputi prasarana irigasi, air irigasi, manajemen irigasi, kelembagaan pengelolaan irigasi, dan sumber daya manusia. Disamping itu Pemerintah kabupaten diwajibkan pula serius untuk memenuhi kebutuhan pelayanan air bersih dan sanitasi masyarakat.

Adapun capaian sasaran “ Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur publik dan sarana prasarana dasar masyarakat “ disajikan pada Tabel 3.76.

Tabel 3.76.

Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja
Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Publik dan Sarana
Prasarana Dasar Masyarakat

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun 2018			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2018 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			Target	Realisasi	%		
1	Indeks layanan infrastruktur	26,97	29,42	58,61	199,22	38,16	153,59

Untuk sasaran Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Publik dan Sarana Prasarana Dasar Masyarakat, di tahun 2018 target untuk indikator Indkes Layanan Insfrastruktur sebesar 29,42, terealisasi sebesar 58,61%. Ini berarti capaian kinerja di tahun 2018 sebesar 199,22%.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait sasaran Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Publik dan Sarana Prasarana Dasar Masyarakat di Kabupaten Klaten yang ditunjang oleh indikator persentase jalan dalam kondisi baik sepanjang 471,86 Km (total panjang jalan 769,63 Km), drainase dalam kondisi baik baru mencapai 61,31% (471,86 Km), hal ini disebabkan karena pembangunan jalan tidak disertai pembangunan drainase, sehingga merupakan salah satu penyebab rusaknya kondisi jalan. Program pendukung pencapaian sasaran Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Publik dan Sarana Prasarana Dasar Masyarakat, diantaranya:

1. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan;
2. Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya; dan
3. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan.

Permasalahan :

- a. Infrastruktur jalan dan jembatan banyak dalam kondisi rusak, sebagai akibat minimnya pemeliharaan dan peningkatan prasarana jalan dan jembatan.
- b. Belum terpenuhinya semua kebutuhan pengelolaan jaringan irigasi dan jaringan pengairan lainnya dalam mendukung pembangunan pertanian dan penyediaan air baku.
- c. Belum optimalnya fungsi sarana, prasarana dan utilitas umum (drainase).

- d. Belum optimalnya kinerja sarana dan prasarana air bersih, sanitasi terutama, di lingkungan masyarakat berpenghasilan rendah.
- e. Rendahnya kualitas pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung Pemerintah diakibatkan tidak dipatuhinya NSPM (Norma Standar Pedoman Manual) dan rendahnya sosialisasi serta pengawasan pelaksanaan NSPM.
- f. Belum optimalnya kinerja tim pembina jasa konstruksi di tingkat kabupaten dalam pembinaan sampai dengan pengawasan pelaksanaan jasa konstruksi.

Solusi :

- a. Peningkatan pemeliharaan dan peningkatan kualitas prasarana jalan dan jembatan;
- b. Pemenuhan secara bertahap kebutuhan pengelolaan jaringan irigasi dan jaringan pengairan lainnya dalam mendukung pembangunan pertanian dan penyediaan air baku;
- c. Optimalisasi fungsi sarana, prasarana dan utilitas umum (drainase);
- d. Optimalisasi kinerja sarana dan prasarana air bersih, sanitasi terutama, di lingkungan masyarakat berpenghasilan rendah;
- e. Sosialisasi serta pengawasan pelaksanaan NSPM (Norma Standar Pedoman Manual) untuk mengawasi pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung Pemerintah secara ketat; dan
- f. Peningkatan kinerja tim pembina jasa konstruksi di tingkat kabupaten dalam pembinaan sampai dengan pengawasan pelaksanaan jasa konstruksi.

33. Sasaran Meningkatnya kualitas manajemen rekayasa lalu lintas dan penyelenggaraan angkutan;

Peningkatan jumlah sarana angkutan publik, menuntut ketersediaan prasarana perhubungan jalan yang memadai untuk pengangkutan barang dan jasa. Adapun kondisi sarana perhubungan pada saat ini dapat dicerminkan dari keberadaan sarana transportasi darat yang terdiri mobil barang, kendaraan khusus dan angkutan publik.

Adapun capaian sasaran "Meningkatnya kualitas manajemen rekayasa lalu lintas dan penyelenggaraan angkutan" disajikan pada Tabel 3.77.

Tabel 3.77.

Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja
Sasaran Meningkatkan kualitas manajemen rekayasa lalu lintas dan
penyelenggaraan angkutan

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun 2018			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2018 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			Target	Realisasi	%		
1	Tingkat Pelayanan Infrastruktur Perhubungan	36,04	45,87	43,58	95,01	57,52	75,76

Pencapaian indikator tingkat pelayanan infrastruktur perhubungan meningkat dari tahun lalu 31,52% menjadi 43,58%, angka tersebut masih dibawah target yang ditetapkan pada tahun 2018 yaitu sebesar 45,87%. Prosentase tingkat realisasinya sebesar 95,01%, hal tersebut disebabkan karena target yang disampaikan merupakan target renstra pada tahun ke-3 (Tahun 2018) yang belum disesuaikan kedalam target Renja Tahun 2018 dengan melewati berapa kebijakan terkait pengurangan anggaran.

Pencapaian indikator tingkat pelayanan infrastruktur perhubungan sebagaimana tersebut di atas, didukung jumlah sarana angkutan (Umum dan Pribadi) disajikan pada Tabel 3.78.

Tabel 3.78.

Jumlah Sarana Angkutan (Umum dan Pribadi)
di Kabupaten Klaten Tahun 2014-2018

Jenis Kendaraan	Tahun (unit)				
	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
01 Mobil Barang	10.819	11.049	10.657	9.622	9.001
02 Mobil Bus					
* Umum	344	386	464	397	395
<i>Bus Besar</i>	119	80	44	65	79
<i>Bus Sedang</i>	125	196	131	261	211
<i>Bus Kecil</i>	100	110	289	71	105
* Bukan Umum	199	155	137	105	114
03 Kendaraan Khusus / Alat Berat	3	9	9	6	6
Jumlah	11.709	11.985	11.731	10.527	9.911

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten, 2018

Berdasarkan Tabel 3.78 sebagaimana tersebut di atas, jumlah terminal angkutan penumpang umum/sub terminal sebanyak 8 (delapan) lokasi untuk mendukung transportasi darat. Data terminal angkutan penumpang umum pada tahun 2018 disajikan pada Tabel 3.79.

Tabel 3.79.

Data Terminal Angkutan Penumpang Umum
Di Kabupaten Klaten Tahun 2018

No	Terminal	Alamat	Type	Luas
1	2	3	4	5
1	Penggung	Penggung, Ceper, Klaten	C	4500 m ²
2	Cawas	Cawas, Klaten	C	3000 m ²
3	Teloyo	Teloyo, Wonosari, Klaten	C	3310 m ²
4	Pasar Klaten	Klaten Tengah	C	600 m ²
5	Bendogantungan	Bendogantungan, Klaten Selatan	C	3168 m ²
6	Tulung	Tulung, Klaten	C	400 m ²
7	Manisrenggo	Manisrenggo, Klaten	C	1785 m ²
8	Delanggu	Karang, Klaten	C	7000 m ²

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten, 2019.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait sasaran Meningkatnya kualitas manajemen rekayasa lalu lintas dan penyelenggaraan angkutan, dilaksanakan dengan program Peningkatan Pelayanan Angkutan.

Permasalahan:

1. Perlengkapan Jalan Terpasang belum Optimal
2. Tingginya tingkat pelanggaran lalu lintas di bidang angkutan (ijin trayek, laik jalan dan angkutan galian golongan C)
3. Rendahnya kesadaran pemilik KBWU untuk mengujikan kendaraannya
4. Masih minimnya jumlah Traffic light ATCS yang telah terkoneksi dengan CCRoom
5. Pemasangan Rambu-rambu lalu lintas daerah perbatasan yang masih belum optimal
6. Ketertiban Administrasi dan Teknis di Pengujian kendaraan bermotor yang justru dikeluhkan masyarakat dan berbanding negatif terhadap retribusi pengujian kendaraan bermotor.

Solusi:

Dari permasalahan yang dihadapi diatas, secara garis besar solusi terhadap permasalahan utama, diantaranya:

1. Meningkatkan tingkat pelayanan infrastruktur perhubungan; dan
2. Mengoptimalkan kualitas pelayanan perhubungan.

34. Sasaran Meningkatnya Pemenuhan Prasarana, Sarana dan Utilitas Kawasan Perumahan dan Pemukiman;

. Menghadapi tantangan dalam rangka peningkatan prasarana dasar permukiman khususnya kawasan permukiman padat, maka harus ditempuh dengan berbagai upaya pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kualitas lingkungan permukimannya. Masyarakat perlu ditingkatkan kesadarannya untuk mampu memelihara prasarana dasar permukiman yang ada di lingkungannya, dengan demikian sumber daya manusia di tingkat Pemerintahan desa dan kelurahan secara bertahap ditingkatkan kemampuannya, selain berkonsentrasi mengurus masalah administrasi Pemerintahan juga mampu memberdayakan masyarakat.

Keseluruhan lahan yang ada, tidak mungkin untuk dibangun sebagai kawasan permukiman, oleh karenanya Pemerintah Kabupaten Klaten harus melakukan pembatasan kawasan untuk pembangunan perumahan, dan melakukan optimalisasi pemanfaatan lahan. Sementara ini tercatat sebanyak 379.404 unit rumah, dengan perincian: untuk tempat tinggal sebanyak 307.713 unit, campuran sebanyak 48.532 unit, dan bukan tempat tinggal sebanyak 23.159 unit.

Adapun capaian sasaran Meningkatnya Pemenuhan Prasarana, Sarana dan Utilitas Kawasan Perumahan dan Pemukiman sebagaimana Tabel 3.80

Tabel 3.80

**Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja
Meningkatnya Pemenuhan Prasarana, Sarana dan Utilitas Kawasan
Perumahan dan Pemukiman**

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun 2016			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2016 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			Target	Realisasi	%		
1	Indeks kualitas perumahan dan kawasan permukiman	57,71	41,06	34,08	83	74,4	45,81

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait sasaran Meningkatnya Pemenuhan Prasarana, Sarana dan Utilitas

Kawasan Perumahan dan Pemukiman di Kabupaten Klaten yang pergerakannya relatif lambat. Hal ini disebabkan karena, 1). Penanganan air minum layak, penduduk yang terlayani sistem air limbah yang layak sangat tergantung pada sumber pendanaan dari APBN. Sementara itu jumlah rumah tangga 182.324 unit, 2) penanganan kawasan kumuh perkotaan, sementara ini hanya bergerak di 2 (2 desa) titik sasaran dengan cakupan luasan 34,47 Ha. 3). Penanganan RTLH hanya bergerak pada kisaran 1087 unit pertahun, padahal jumlah RTLH masih sebanyak 24.775 unit.

Pada tahun 2016, program yang dilaksanakan untuk sasaran Meningkatkan Pemenuhan Prasarana, Sarana dan Utilitas Kawasan Perumahan dan Pemukiman terdiri dari 3 (tiga) program, diantaranya:

1. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah;
2. Program Pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan; dan
3. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Permasalahan :

- a. Banyaknya rumah tidak layak huni, dan merata di setiap kecamatan.
- b. Belum optimalnya pemanfaatan lahan dengan pola pembangunan vertikal terutama pada kawasan-kawasan permukiman yang padat.
- c. Belum optimalnya upaya pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kualitas lingkungan permukiman.
- d. Belum memadainya sarana dan prasarana pendukung permukiman (air bersih, sanitasi dan utilitas umum).
- e. Masih adanya kawasan kumuh perkotaan.

Solusi :

- a. Percepatan penanganan pembangunan rumah tidak layak huni;
- b. Mengoptimalkan upaya pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kualitas lingkungan permukiman.
- c. Pemenuhan sarana dan prasarana pendukung permukiman (air bersih, sanitasi dan utilitas umum) layak melalui pelaksanaan Program Kotaku; dan
- d. Percepatan penanganan kawasan kumuh perkotaan dengan mengerakkan partisipasi masyarakat lewat CSR.

35. Sasaran Terkendalinya Pemanfaatan Kawasan Sesuai dengan Konsep Tata Ruang;

Peningkatan efektivitas Rencana Tata Ruang Wilayah sebagai instrumen pembangunan secara konsisten digunakan untuk mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Penggunaan sumber daya alam harus selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup. Sebagai konsekuensinya, kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan harus mengintegrasikan aspek lingkungan hidup dan mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan. Kebijakan yang dimaksud adalah rangkaian konsep dan azas yang menjadi dasar rencana. Kebijakan, rencana dan atau program (KRP) yang disusun harus memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, juga selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup.

Sehingga sebagai konsekwensi logis dari persoalan tersebut, KRP harus memperhatikan aspek lingkungan hidup dalam mewujudkan tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Sehingga pemanfaatan dan pengendalian ruang merupakan upaya yang terstruktur, dan sebagai terobosan dan memastikan bahwa pada setiap tahap awal penyusunan KRP sudah memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Dalam pengertian, makna strategisnya sejak awal proses perencanaan dalam pengambil keputusan sudah mempertimbangkan hal-hal yang mendesak terkait pembangunan berkelanjutan.

Adapun capaian sasaran Terkendalinya pemanfaatan kawasan sesuai dengan konsep tata ruang sebagaimana Tabel 3.81

Tabel 3.81
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja
Terkendalinya Pemanfaatan Kawasan Sesuai Dengan Konsep Tata Ruang

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun 2016			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2016 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			Target	Realisasi	%		
1	Ketaatan terhadap RTRW	78,86	78,98	78,98	100	80,00	98,73

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait sasaran Terwujudnya Tertib Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang dilaksanakan melalui Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

Permasalahan :

- a. Kinerja Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) belum optimal dalam memfasilitasi pemecahan permasalahan dan pengendalian pemanfaatan ruang.
- b. Peningkatan efektivitas RTRW sebagai instrumen pembangunan secara konsisten digunakan untuk mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan.
- c. Pengendalian pemanfaatan ruang belum dilaksanakan secara konsisten, hal ini disebabkan karena belum lengkapnya piranti peraturan penunjang.
- d. Belum kuatnya pengendalian pemanfaatan ruang melalui penyusunan rencana detail, penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian *insentif-desinsentif* serta pemberian sanksi yang tegas terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang.
- e. Kurangnya pengembangan sarana informasi kepada masyarakat di bidang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dan
- f. Rendahnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukannya.

Solusi :

- a. Optimalisasi Kinerja Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) belum optimal dalam memfasilitasi pemecahan permasalahan dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- b. Peningkatan efektivitas RTRW sebagai instrumen pembangunan secara konsisten digunakan untuk mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan;
- c. Pengendalian pemanfaatan ruang dilaksanakan secara konsisten, dan tidak tebang pilih; dan
- d. Penguatan pengendalian pemanfaatan ruang melalui penyusunan rencana detail, penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian *insentif-desinsentif* serta pemberian sanksi yang tegas terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang.

36. Sasaran Terjaganya kualitas lingkungan hidup;

Sebagai upaya untuk menjaga kualitas lingkungan hidup, target indikator sasaran digunakan sebagai alat ukur pencapaian keberhasilan diantaranya: indeks kualitas air, indeks kualitas udara, dan cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL dan penegakan hukum lingkungan. Masih rendahnya indeks kualitas air salah satu penyebabnya adalah tingginya pencemaran air oleh limbah domestik.

Adapun capaian sasaran "Terjaganya kualitas lingkungan" disajikan pada Tabel 3.82

Tabel 3.82

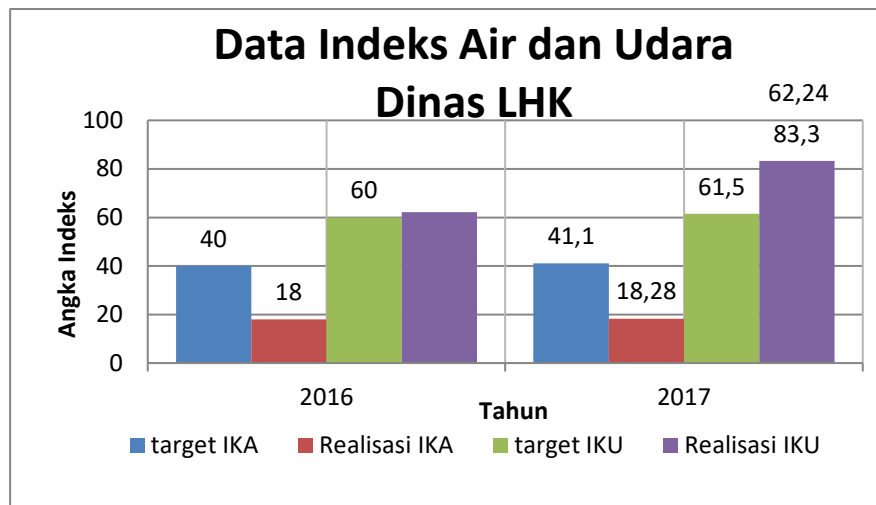
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Terjaganya Kualitas Lingkungan

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun 2018			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2018 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			Target	Realisasi	%		
1	Indeks kualitas air	16,00	30,68	18,28	59,58	40,46	45,18
2	Indeks kualitas udara	60,00	74,68	83,3	111,54	84,46	98,63
3	Indeks tutupan vegetasi (lahan)	34,14	48,82	42,54	87,14	58,60	72,59

Target Indeks Kualitas Air (IKA) tahun 2018 sebesar 41,1 dengan capaian realisasi IKA sebesar 18,28 (44%) sedangkan target Indeks Kualitas Udara (IKU) pada tahun 2018 sebesar 74,68 telah melampaui target yang ditentukan dengan capaian sebesar 83,3 (135%). Uji sampling udara menggunakan metode pasive sampler dimana keakuratan lebih baik dan lebih mewakili uji kualitas udara di Kab. Klaten, pengambilan uji dilakukan selama 24 jam dengan pelaksanaan 2 kali dalam setahun pada 4 titik (kawasan padat penduduk, transportasi, industri dan perkantoran).

Pengambilan uji sampling kualitas air sungai dilakukan hanya beberapa titik menyesuaikan anggaran dan karena SDM yang terbatas serta antrian pada laboratorium lingkungan yang terakreditasi sangat panjang maka tahun 2018 ini hanya dapat dilakukan sekali dengan pengambilan sampling pada 26 titik dari 7 sungai yang ada di Kab. Klaten dari target 10 sungai. Adapun sungai yang dapat dipantau mutu airnya dengan pengambilan sample adalah sebagai berikut : Sungai Rowo Jombor, Sungai Modin, Sungai Soran, Sungai Pusur, Sungai Merbung, Sungai Kacang Ijo, dan Sungai Kroman. Ditambah hasil uji dari BKSDA sebanyak 3 sungai

yaitu Sungai Dengkeng, Sungai Jebol dan Sungai Pusur. (DAS Bengawan Solo). Indeks Kualitas air dan Kualitas udara disajikan pada Grafik 3.13



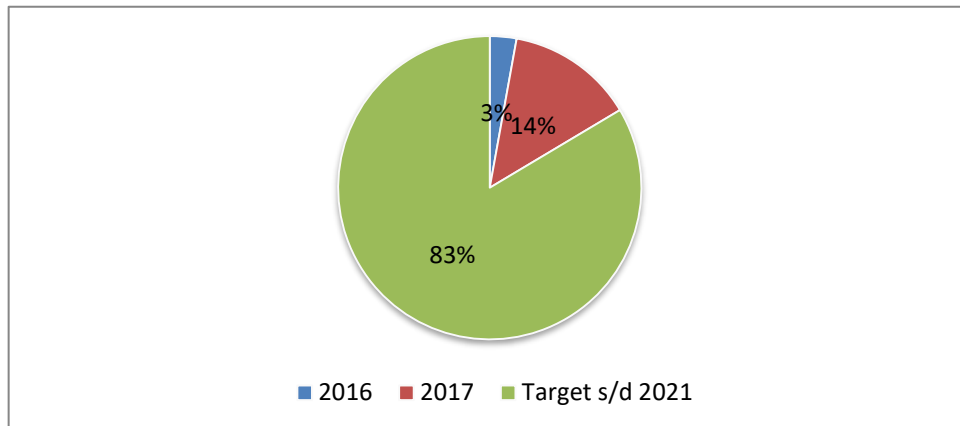
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2019.
Grafik: 3.13 Indeks Kualitas Air dan Indeks Kualitas Udara.

Berdasarkan Grafik 3.13 sebagaimana di atas terlihat bahwa indeks air dibanding tahun lalu mengalami peningkatan sejumlah 0,28 poin dan indeks udara mengalami kenaikan yang cukup signifikan sebanyak 20,9 poin. Kedua indeks tersebut diatas yaitu indeks kualitas air dan udara apabila digabung dengan indeks tutupan vegetasi/tutupan lahan dimana indeks tutupan lahan/vegetasi Kab. Klaten tahun 2018 sebesar 42,54 menjadi Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) dengan hasil perhitungan 47,49. Meningkat dibandingkan tahun lalu dimana IKLH Kab. Klaten 39,74, meskipun masih jauh dari target yang diharapkan akan tetapi telah terlihat jelas mengalami progres kenaikan. Dengan adanya komitmen semua pihak instansi terkait diharapkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten pada akhirnya sesuai dengan apa yang ditargetkan/diharapkan.

Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL dari target 100% terealisasi 100%. Data perusahaan yang wajib AMDAL sejumlah 9 dan telah dilaksanakan monitoring/pengawasannya.

Perhitungan penegakan hukum lingkungan berdasarkan data jumlah aduan yang masuk kepada Pemda dan diteruskan ke DLHK kemudian ditindaklanjuti sehingga aduan/masalah lingkungan yang ada di masyarakat Kabupaten Klaten dapat terfasilitasi atau terselesaikan. Adapun data selama tahun 2018 sebanyak 5 aduan masyarakat dimana 5 kasus sudah terselesaikan (100%). Hasil tahun 2018 lebih baik dari

pada tahun 2016 dimana persentase capaian indikator sasaran ditahun 2016 sebesar 83% menjadi 100% di tahun 2018.



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2019.

Grafik: 3. 14 Capaian Konservasi Penghijauan Daerah Sumber Mata Air Kabupaten Klaten Tahun 2016-2017 dan Target sampai tahun 2021.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait sasaran “Menjaga kualitas lingkungan hidup” dilaksanakan dengan program:

1. Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup; dan
2. Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam.

Permasalahan:

1. Belum sinerginya antar pelaku pemangku kepentingan dalam mengelola lingkungan hidup; dan
2. Tingginya tingkat pencemaran limbah domestik.

Solusi:

Kewenangan dalam pengendalian IPAL domestik bukan menjadi kewenangan Dinas LHK melainkan Perwaskim sehingga diharapkan kedepan adanya program dan koordinasi dengan instansi terkait untuk mengatasi permasalahan pencemaran limbah air domestik di sungai.

37. Sasaran Terwujudnya Pengurangan Kerentanan Resiko Bencana;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengamanatkan perlunya pengaturan yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program (Pasal 1 butir 10 UU PPLH).

Sehingga potensi dampak dan/atau resiko lingkungan yang mungkin ditimbulkan oleh suatu kebijakan, rencana, dan/atau program, sebelum pengambilan keputusan dilakukan, dapat diantisipasi. Dampak dan/atau resiko lingkungan yang mungkin timbul oleh suatu kebijakan, rencana, dan/atau program, oleh Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 dikategorisasikan, antara lain sebagai potensi: meningkatkan resiko perubahan iklim, meningkatkan kerusakan, kemerosotan atau kepunahan, keanekaragaman hayati, banjir, longsor, kekeringan dan/atau kebakaran hutan dan lahan, menurunkan mutu dan kelimpahan sumber daya alam, mendorong perubahan penggunaan dan/atau alih fungsi kawasan hutan terutama pada daerah yang kondisinya tergolong kritis, meningkatkan jumlah penduduk miskin atau terancamnya keberlanjutan penghidupan sekelompok masyarakat, dan/atau meningkatkan resiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia.

Berbagai hal tersebut di atas, perlu ada upaya pengurangan kerentanan resiko bencana dengan cara menggerakkan partisipasi masyarakat. Salah satu bentuk upaya tersebut perlunya penguatan masyarakat dengan menciptakan desa tangguh bencana dengan berbagai instrumen yang diperlukan.

Adapun capaian sasaran Terwujudnya Pengurangan Kerentanan Resiko Bencana sebagaimana Tabel 3.83.

Tabel 3.83

Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Terwujudnya Pengurangan Kerentanan Resiko Bencana

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun 2018			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2018 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			Target	Realisasi	%		
1	Kelas Indeks kapasitas bencana)	0	Sedang (119)	Sedang (123,20)	103,53	Sedang	Sedang

Pada tahun 2018 target untuk sasaran Terwujudnya Pengurangan Kerentanan Resiko Bencana adalah kelas sedang (119) dan realisasinya juga

kelas sedang tetapi dengan angka capaian yang lebih tinggi yaitu 123,20. Sehingga capaian untuk tahun 2018 sebesar 103,53.

Pada tahun 2018 upaya untuk mewujudkan desa tangguh bencana belum optimal, sementara ini baru diupayakan dengan rintisan “**desa paseduluran**” dan Kabupaten Tangguh Bencana, serta untuk mendukung pencapaian sasaran “*Terwujudnya Pengurangan Kerentanan Resiko Bencana*” di Kabupaten Klaten. Pada tahun 2018, program yang dilaksanakan untuk sasaran Terwujudnya Pengurangan Kerentanan Resiko Bencana dengan program, diantaranya:

1. Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
2. Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana; dan
3. Program Peningkatan Pengelolaan logistik;

Permasalahan :

1. Masih rendahnya perencanaan berbasis mitigasi bencana; dan
2. Sulitnya persyaratan dan dukungan pembiayaan desa tangguh bencana.

Solusi :

1. Mendorong dan penguatan kelembagaan perencanaan berbasis mitigasi bencana secara terpadu;
2. Peningkatan dan pemihakan kebijakan desa tangguh bencana secara massif.

38. Sasaran Meningkatnya Kesadaran dan Pemahaman Masyarakat Terhadap Politik dan Demokrasi;

Memperhatikan luas wilayah 65.556 ha (655,56 km²) yang mencakup 26 Kecamatan, 391 Desa serta 10 Kelurahan, sementara ini diukur dari jumlah Linmas per jumlah 10.000 penduduk baru pada kisaran 89,83 dengan rasio Pos Siskamling per jumlah penduduk sudah mencapai kisaran angka 2,49, dan cakupan penegakan Perda baru mencapai 90,91 hal ini disebabkan karena luasan wilayah, jumlah penduduk serta kompleksitas permasalahan kemasyarakatan tidak sebanding dengan jumlah Linmas. Sehingga perlunya pemberdayaan masyarakat dalam ikut menjaga ketentraman dan ketertiban untuk menekan angka kriminalitas menjadi alternatif dalam menjaga kondusivitas daerah.

Adapun capaian sasaran “*Meningkatnya Kesadaran dan Pemahaman Masyarakat Terhadap Politik dan Demokrasi*” sebagaimana Tabel 3.84

Tabel 3.84

Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Kesadaran Dan Pemahaman Masyarakat Terhadap Politik Dan Demokrasi

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun 2016			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2016 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			Target	Realisasi	%		
1	Indeks Demokrasi	69,75	75	70,85	94,47	75,7	93,59

Angka kriminalitas dari tahun ke tahun dapat ditekan, karena dukungan masyarakat. Namun masalah PMKS yang seringkali menjadi pemicu tersumbatnya demokrasi belum juga bisa diatasi. Dimana PMKS yang memperoleh bantuan sosial belum bisa memenuhi target karena keterbatasan pembiayaan. Dari sebanyak 119.489 penyandang PMKS baru bisa ditangani sebanyak 48.729 PMKS, sehingga perlunya antisipasi cipta kondisi sosial budaya menjadi mendesak untuk dilakukan. Pada tahun 2018, program yang dilaksanakan untuk sasaran Meningkatkan Meningkatnya Kesadaran dan Pemahaman Masyarakat Terhadap Politik dan Demokrasi diantaranya:

1. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan; dan
2. Program Peningkatan dan Pembinaan Kehidupan Sosial Politik;

Permasalahan:

- a. Masih munculnya berbagai penyakit masyarakat;
- b. Adanya ancaman pergerakan terorisme yang berkembang di Klaten;
- c. Masih rendahnya kualitas politik masyarakat.

Solusi :

- a. Pengendalian dan pencegahan dini munculnya berbagai penyakit masyarakat;
- b. Pembinaan kualitas politik masyarakat yang bermartabat dan kepribadian Indonesia.

39. Sasaran Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Kelompok Pelestarian Adat dalam Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya;

Ukuran keberhasilan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Kelompok Pelestarian Adat dalam Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya diantaranya diukur dengan indikator Rata - rata kader lembaga kemasyarakatan dan kelompok pelestarian adat dalam pengembangan sosial budaya yang aktif (mendapat pembinaan dan pelatihan). Pada tahun 2018 tercatat sebanyak 391 desa, dan 10 kelurahan, dengan jumlah kecamatan 10 merupakan target sasaran pembinaan dan fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Kelompok Pelestarian Adat dalam Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya melalui lembaga desa untuk menuju ketahanan desa dan kemandirian desa.

Adapun capaian sasaran “*Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Kelompok Pelestarian Adat dalam Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya*” disajikan pada Tabel 3.85.

Tabel 3.85

Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Kelompok Pelestarian Adat
dalam Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun 2018			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2018 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			Target	Realisasi	%		
1	Rata - rata kader lembaga kemasyarakatan dan kelompok pelestarian adat dalam pengembangan sosial budaya yang aktif (mendapat pembinaan dan pelatihan)	16	49	49	100	100	49

Pada tahun 2018 target untuk sasaran Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Kelompok Pelestarian Adat dalam Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya sebanyak 49 dan realisasinya juga sebanyak 49. Sehingga capaian untuk tahun 2018 sebesar 100%.

Berdasarkan capaian Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Kelompok Pelestarian Adat dalam Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya sebagaimana Tabel 3.85 di atas, per kelompok rata-rata sebanyak 49 orang apabila diakumulasi dengan jumlah desa/kelurahan sudah merupakan modal sosial untuk melestarikan adat dalam pengembangan kehidupan sosial yang

memadai. Tinggal bagaimana pembinaan dan fasilitasi kegiatan dapat dilakukan dengan baik.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait sasaran Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Kelompok Pelestarian Adat dalam Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya yang didukung dengan program, diantaranya:

1. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa;
2. Pemberdayaan dan kesejahteraan Keluarga; dan
3. Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan.

Permasalahan :

- a. Masih kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya Pelestarian Adat dalam Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya untuk menjaga keutuhan suatu bangsa;.
- b. Kurangnya sinkronisasi dan koordinasi antar instansi terkait, dalam pelaksanaan Pelestarian Adat dalam Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya;
- c. Belum adanya sarana informasi Pelestarian Adat dalam Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya yang secara langsung bisa diakses oleh masyarakat luas.

Solusi :

- a. Peningkatan sinkronisasi dan koordinasi antar instansi terkait Pelestarian Adat dalam Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya ; dan
- b. Peningkatan sarana informasi Pelestarian Adat dalam Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya yang secara langsung bisa diakses oleh masyarakat luas.

40. Sasaran Terwujudnya Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;

Ukuran keberhasilan Terwujudnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat diantaranya diukur dengan indikator Indeks ketertiban masyarakat. Di Kabupaten Klaten dengan luas wilayah 65.556 ha (655,56km²) yang mencakup 26 Kecamatan, 391 Desa serta 10 Kelurahan, diperlukan sejumlah Linmas per jumlah 10.000 jiwa, rasio pos kamling per jumlah penduduk dan cakupan penegakan perda.

Adapun capaian sasaran "Terwujudnya Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat" disajikan pada Tabel 3.86

Tabel 3.86

Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja
Terwujudnya Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun 2018			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2018 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			Target	Realisasi	%		
1	Indeks ketertiban masyarakat	90	95	92,20	97,05	100	92,20

Sumber: Satpol PP, 2019.

Pada Tahun 2018 jumlah Linmas per 10.000 penduduk baru bekisar 89,83, rasio pos kamling per jumlah penduduk mancapai angka 2,49, sedangkan untuk penegakkan perda mencapai 90,91.

Untuk tahun 2018 target sasaran Terwujudnya Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat sebanyak 95 dan realisasinya sebanyak 92,90. Sehingga capaian untuk tahun 2018 sebesar 97,05.

Jenis kegiatan untuk mendukung pencapaian urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan yang dilaksanakan diantaranya: koordinasi pengamanan wilayah, optimalisasi peran Peningkatan Kinerja Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Toma/ga dan lembaga lainnya, Penegakan Perda, Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan, dan Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan. Hal tersebut juga diharapkan mampu untuk mencegah, menekan, dan/atau menyelesaikan terjadinya konflik sosial maupun konflik yang dilatarbelakangi masalah SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar golongan). Berbagai permasalahan yang dihadapi bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan, diantaranya:

1. Penyakit Masyarakat

Data yang tersaji tentang berbagai penyakit masyarakat didapatkan berdasarkan Hasil operasi penertiban pemberantasan penyakit masyarakat (PEKAT), data tersebut adalah mengenai data pelacuran dan peredaran minuman keras/beralkohol. Salah satu jenis penyakit masyarakat yang menonjol yaitu kasus pelacuran dalam kurun waktu Tahun 2014-2018 kasusnya bersifat fluktuatif, data kondisinya disajikan pada Tabel 3.87.

Tabel 3.87.

Rekapitulasi Data Hasil Operasi Penertiban Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT) Tahun 2014-2018

No	Tahun	Jumlah kegiatan	Hasil operasi penertiban					
			PGOT		PSK/ WTS	Pasangan Tidak Resmi	Anjal/punk	
			Pria	Wanita			Pria	Wanita
1	2014	10	4	8	8	38	8	7
2	2015	10	11	5	10	50	8	2
3	2016	12	14	7	8	46	12	4
4	2017	15	15	8	6	58	12	14
5	2018	15	8	6	10	78	18	7

SANKSI

- Bagi WTS/PSK dan Anjal wanita langsung dikirim ke Barehsos WANODYATAMA Surakarta selama 6 bulan ;
- Bagi Anjal pria dikirim ke PPSA Mandiri Semarang ;
- Bagi PGOT yang terjaring diserahkan ke Rumah Singgah Klaten guna assesment dan tindak lanjut;
- Bagi Pasangan tidak resmi diwajibkan wajib lapor pembinaan sebanyak 20 kali di SATPOL PP.

Sumber: Satpol PP Kab. Klaten, 2019

Berdasarkan Tabel 3.87 sebagaimana tersebut di atas, trend pelanggaran Peraturan Daerah khususnya masalah penyakit masyarakat semakin besar jumlahnya dibandingkan jumlah pelanggaran Peraturan Daerah secara umum, hal ini disebabkan:

- a. Tingkat kesadaran warga masyarakat yang rendah;
- b. Kurangnya sosialisasi peraturan daerah dimaksud sampai kepedesaan/pelosok;
- c. Persaingan ekonomi dan gaya hidup kekinian mendorong masyarakat dan remaja melakukan perbuatan yang cenderung kriminal dan mengganggu ketertiban umum; dan
- d. Penerapan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan daerah belum mampu membuat efek jera para pelanggar.

Berikut Rekapitulasi Hasil Operasi Penertiban Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT) Jenis Minuman Keras/ Beralkohol selama tahun 2014-2018 disajikan pada Tabel 3.88.

Tabel 3.88.

Rekapitulasi Hasil Operasi Penertiban Pemberantasan
Penyakit Masyarakat (PEKAT) Jenis Minuman Keras/ Beralkohol
Tahun 2014-2018

No	Tahun	Jumlah kegiatan	Hasil Operasi Penertiban			
			Ciu	Vodka	Anggur putih	Anggur merah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	2014	6	120 liter	60 botol	10 dus	20 dus
2	2015	6	200 liter	40 botol	5 dus	4 dus
3	2016	4	60 liter	-	2 dus	2 dus
4	2017	3	50 liter	48 botol	4 dus	6 dus
5	2018	0	0	0	0	0
SANKSI						
- Barang bukti miras diserahkan ke Polres guna pemusnahan terpadu;						
- Para pelaku pelanggaran dilakukan tipiring oleh Penyidik Polres Klaten.						

Sumber: Satpol PP Kab. Klaten, 2019.

Berdasarkan Tabel 3.88 sebagaimana tersebut di atas, minuman keras/beralkohol yang ditemukan berdasarkan hasil operasi penertiban pemberantasan penyakit masyarakat (PEKAT) jumlahnya juga bersifat fluktuatif. Hal ini tergantung pada situasi sosial budaya masyarakat yang sering kali menjadi baluran tindak kriminal yang mengiringinya.

2. Ancaman Terorisme

Adanya Ancaman Terorisme, Konflik SARA (baik Vertikal maupun Horizontal) dan gerakan yang bersifat radikalisme yang kadang bersifat laten serta kenakalan remaja masih sering terjadi. Kondisi permasalahan ketentraman umum selama tahun 2014-2018 disajikan pada Tabel 3.89.

Tabel 3.89

Kondisi Jenis Permasalahan Ketentraman Umum
Tahun 2014-2018

No.	Jenis Permasalahan	Tahun (Jumlah Kejadian)				
		2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Ancaman Terorisme	7	-	17	-	-
2.	Konflik Sara	5	-	17	3	1
3.	Gerakan Radikalisme	3	4	21	9	2
4.	Kenakalan Remaja	4	3	4	3	4

Sumber: Kantor Kesbangpol, 2018

Berdasarkan Tabel 3.89 sebagaimana tersebut di atas jenis permasalahan ketentraman umum di Kabupaten Klaten secara umum mengalami penurunan. Ancaman terorisme hanya terjadi pada tahun 2014 dan tahun 2016 yaitu sebanyak 7 dan 17 kasus. Sedangkan konflik terjadi terbanyak pada Tahun 2016 yaitu sebanyak 17 kasus. Rata-rata jumlah dari jenis permasalahan di Tahun terakhir mengalami penurunan hal ini disebabkan karena intensifnya kegiatan forum kerukunan umat beragama untuk meminimalisir konflik SARA.

3. Angka Kriminalitas

Angka kriminalitas dirumuskan: Jumlah kriminalitas tertangani/jumlah penduduk X 10.000 (lampiran permendagri 86 Tahun 2017) maka diperoleh data angka kriminalitas sebagai berikut :

a. Tahun 2015 : 3,94.

Jumlah kriminalitas tertangani 509 kasus dibagi jumlah penduduk 1.292.013 dikali 10.000.

b. Tahun 2016 : 4,19

Jumlah kriminalitas tertangani 546 kasus dibagi jumlah penduduk 1.300.706 dikali 10.000.

c. Tahun 2017 : 3,25

Jumlah kriminalitas tertangani 424 kasus dibagi jumlah penduduk 1.304.519 dikali 10.000.

(Sumber Polres Klaten dan Dinas Dukcapil Kab. Klaten)

Angka Kriminalitas belum bisa ditekan, hal ini disebabkan beberapa permasalahan, diantaranya: 1). Bentuk dan modus kejahatan (tindak pidana) pun terus berkembang, sehingga penanganannya pun harus beda. 2). Selain itu meningkatnya tindak kriminal disebabkan persoalan seperti, ekonomi, sosial, konflik dan rendahnya kesadaran hukum, kemajuan teknologi informasi yang mendorong terjadinya bentuk-bentuk tindak yang didasari atau pun tidak. 3). Selain itu rendahnya ketaatan pelaksanaan terhadap perda/perbup karena kurangnya sosialisasi, dan terbatasnya sumber daya manusia aparat penegak Perda/Perbup.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait sasaran “Terwujudnya Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat” yang didukung dengan program Pemeliharaan ketentraman masyarakat, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

Permasalahan :

- a. Masih kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat untuk menjaga keutuhan suatu bangsa;
- b. Kurangnya sinkronisasi dan koordinasi antar instansi terkait, dalam pelaksanaan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
- c. Belum adanya sarana informasi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, dan masyarakat lebih senang mengkonsumsi berita hoax sebagai komoditas politik.

Solusi :

- a. Peningkatan sinkronisasi dan koordinasi antar instansi terkait Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat ; dan
- b. Peningkatan sarana informasi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang secara langsung bisa diakses oleh masyarakat luas untuk melawan berita *hoax*.

41. Sasaran Meningkatnya Kapasitas Perempuan, Perlindungan Perempuan dan Anak;

Peningkatan kapasitas perempuan, dan Perlindungan perempuan dan anak merupakan salah satu agenda penting dalam RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021, mengingat jumlah anak di Kabupaten Klaten pada tahun 2018 telah mencapai 411.599 jiwa (atau 31,40% dari total jumlah penduduk). Penyebaran jumlah penduduk yang tidak merata, serta besarnya jumlah jiwa sudah barang tentu akan terkait dengan masalah pangan, gizi, kesehatan, pendidikan dan kebutuhan khusus anak menjadi hal krusial yang harus diwujudkan untuk melindungi anak dengan cara penguatan kelembagaan anak, perlunya hak sipil dan kebebasan, serta perlindungan khusus terhadap tumbuh kembang anak. Data menunjukkan 14,47 persen penduduk Indonesia termasuk dalam kelompok sangat rawan pangan (asupan kalori <1.400 Kkal/orang/hari), 5,38 persen prevalensi gizi kurang hal ini menunjukkan bahwa *foodborne disease* merupakan masalah kesehatan masyarakat yang perlu diantisipasi.

Secara khusus, peningkatan kapasitas perempuan diukur dengan indikator Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), dan Indeks Pembangunan Gender (IPG). Sedangkan kondisi umum pencapaian dan permasalahan yang dihadapi perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Klaten, diantaranya terkait : (1). Penguatan kelembagaan, (2). Hak sipil dan kebebasan, (3). Lingkungan keluarga dan

pengasuhan alternatif, (4). Kesehatan dasar dan kesejahteraan, (5). Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan kreatif, serta (6). Perlindungan khusus.

Adapun capaian sasaran Meningkatnya Kapasitas Perempuan, Perlindungan Perempuan dan Anak “ disajikan pada Tabel 3.90

Tabel 3.90

Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja
Meningkatnya Kapasitas Perempuan, Perlindungan Perempuan dan Anak

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun 2018			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2018 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			Target	Realisasi	%		
1	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	59,95	60,16	59,60	99,07	60,37	98,72
2	Capaian Kabupaten Layak Anak (KLA)	Madya	Nindya (750)	Madya (650)	86,67	Nindya (750)	86,67

Sumber: Dinas Sosial, P3AKB, 2019.

Indikator kinerja keberhasilan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diukur dari Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Secara ringkas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Indeks Pembangunan Gender (IPG);

Indeks Pembangunan Gender (IPG) tahun 2014-2018 menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan meskipun pada tahun 2016 sempat mengalami penurunan. Peningkatan ini disebabkan adanya komitmen pemerintah Daerah untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan, hanya saja peningkatan ini perlu ditunjang dengan pelaksanaan perencanaan dan penganggaran responsif gender yang optimal. Perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Klaten Tahun 2014-2018 disajikan pada Tabel 3.91.

Tabel 3.91.

Indeks Pembangunan Gender (IPG)
Kabupaten Klaten Tahun 2014-2018

Indikator	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
IPG	95,90	95,90	73,97	96,54	96,62

Sumber : Dinsos P3AKB, 2019.

Berdasarkan Tabel 3.91 sebagaimana tersebut di atas, selama dua tahun terakhir IPG mengalami peningkatan sebesar 0,08 % dari tahun 2017 sebesar 96,54 % menjadi 96,62 pada tahun 2018. Peningkatan ini disebabkan adanya kerjasama yang baik antara pemangku kepentingan melalui penguatan lembaga P2TP2A, dan dukungan penganggaran responsif gender.

2. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) selama tahun 2014-2018 menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan meskipun pada tahun 2017 sempat mengalami penurunan. Peningkatan ini disebabkan adanya komitmen pemerintah Daerah untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan. Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Klaten Tahun 2014-2018 disajikan pada Tabel 3.92.

Tabel 3.92.

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Klaten Periode 2014-2018

No.	Indikator	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Keterlibatan Perempuan di Parlemen (%)	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
2	Perempuan Sebagai Tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi (%)	49,44	52,74	49,7	47,65	51,16
3	Sumbangan Perempuan Dalam Pendapatan Kerja (%)	37,53	37,69	37,72	37,76	37,52
4	IDG	59,72	59,95	59,72	59,50	59,60

Sumber : Dinsos Sumber: Dinas Sosial dan P3AKB, 2019.

Berdasarkan Tabel 3.92 sebagaimana tersebut di atas bisa dilihat perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) selama tahun 2014-2018 bersifat relatif fluktuatif, hal ini dikarenakan budaya *patriarki* yang masih kuat. Hal ini termanifestasi dalam bentuk stereotype, marginalisasi, subordinasi, tindak kekerasan dan beban ganda sehingga hal ini menyebabkan adanya deskriminasi pada upah pekerja perempuan di sektor non formal.

3. Peran Perempuan dalam Pemerintahan

Partisipasi perempuan dalam pembangunan dapat dilihat dari posisi perempuan dalam jabatan eksekutif dan legislatif selama tahun 2014-2018 relatif stagnan, hal ini disebabkan karena masih rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap perempuan untuk menduduki posisi jabatan eksekutif dan legislatif. Perkembangan keterwakilan peran perempuan dalam jabatan pemerintahan, dan Lembaga Perwakilan Rakyat selama tahun 2014-2018 disajikan pada Tabel 3.92.

Tabel 3.93.

Keikutsertaan Perempuan di dalam Jabatan Eksekutif dan Legislatif di Kabupaten Klaten tahun 2014-2018

No.	Jenis Jabatan	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Eksekutif (%)	(7.159/24.195) = 29,6	(7.417/26.518) = 27,97	(7.072/27.344) = 25,86	56,6	57
2	Legislatif (%)	(3/50) = 6,00	(3/50) = 6,00	(3/50) = 6,00	(3/50) = 6,00	(3/50) = 6,00

Sumber: Kabupaten Klaten Dalam Angka (2018), diolah.

Berdasarkan Tabel 3.93. sebagaimana tersebut di atas, Keterlibatan perempuan di lembaga legislatif Kabupaten Klaten stagnan karena masih dalam satu periode DPRD, hanya dalam jabatan eksekutif mulai tahun 2017 persentasenya meningkat, hal ini seiring dengan peningkatan kualitas dan kemampuan perempuan dalam mengisi formasi jabatan publik.

4. Perlindungan Anak

Upaya perlindungan anak dan perempuan ditunjukkan dengan meningkatnya penyelesaian terhadap kasus kekerasan yang berbasis gender dan anak disebabkan karena secara intensif telah dilakukan sosialisasi tentang hukum dan peraturan lainnya berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak kepada masyarakat. Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat dilihat pada Tabel 3.94.

Tabel 3.94.

Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Berhadapan Dengan Hukum di Kabupaten Klaten 2014-2018

Tahun	Fisik		Psikis		Seksual		Penelantaran		Trafficking		Jumlah
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2014	6	41	0	4	0	62	0	8	0	0	121
2015	7	10	2	0	2	18	0	3	0	0	42
2016	11	16	2	8	0	29	0	6	0	1	73
2017	9	6	3	5	0	12	0	7	1	0	43
2018	7	8	2	5	0	22	1	6	0	0	51

Sumber : P2TP2A Kabupaten Klaten, 2019

Berdasarkan Tabel 3.94. sebagaimana tersebut di atas, selama dua tahun terakhir jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak berhadapan dengan hukum (ABH) mengalami peningkatan sebesar 8 kasus dari tahun 2017 sebesar 43 kasus menjadi 51 kasus di tahun 2018, hal ini disebabkan belum optimalnya perlindungan perempuan dan anak dalam menghadapi kekerasan.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait sasaran Peningkatan Kapasitas Perempuan, dan Perlindungan Perempuan dan Anak di Kabupaten Klaten didukung dengan program:

1. Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak; dan
2. Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak.

Permasalahan :

- a. Masih kurangnya kebijakan pembangunan yang berpihak pada perempuan dan anak;
- b. Lemahnya kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak;
- c. Masih adanya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak; dan
- d. Sistem kesejahteraan dan perlindungan anak belum memadai.

Solusi :

- a. Peningkatan kebijakan pembangunan yang berspektif perempuan dan anak;
- b. Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak;
- c. Peningkatan pendampingan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban tindak kekerasan; dan
- d. Peningkatan sistem kesejahteraan dan perlindungan anak.

42. Sasaran Meningkatnya Kualitas Layanan Perhubungan;

Ukuran keberhasilan meningkatnya kualitas layanan perhubungan diantaranya diukur dengan indikator Indeks kepuasan layanan perhubungan. ketersediaan prasarana perhubungan jalan yang memadai untuk pengangkutan barang dan jasa. Adapun kondisi sarana perhubungan pada saat ini dapat dicerminkan dari keberadaan sarana transportasi darat yang terdiri mobil barang, kendaraan khusus dan angkutan publik.

Adapun capaian sasaran “*Meningkatnya kualitas layanan perhubungan* “ disajikan pada Tabel 3.95.

Tabel 3.95
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja
Meningkatnya Kualitas Layanan Perhubungan

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun 2018			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2018 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			Target	Realisasi	%		
1	Indeks kepuasan layanan perhubungan	75,99	79,02	78,95	99,91	81,08	97,37

Dari tabel 3.95 dapat dilihat bahwa target sasaran Meningkatnya Kualitas Layanan Perhubungan tahun 2018 sebesar 79,02 dalam realisasinya tercapai sebesar 78,95. Sehingga capaian kinerja tahun 2018 untuk sasaran tersebut sebesar 99,91%.

Jumlah sarana angkutan (Umum dan Pribadi) disajikan pada Tabel 3.96.

Tabel 3.96.
Jumlah Sarana Angkutan (Umum dan Pribadi)
di Kabupaten Klaten Tahun 2014-2018

Jenis Kendaraan	Tahun (unit)				
	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
01 Mobil Barang	10.819	11.049	10.657	9.622	9.001
02 Mobil Bus					
* Umum	344	386	464	397	395
<i>Bus Besar</i>	119	80	44	65	79
<i>Bus Sedang</i>	125	196	131	261	211
<i>Bus Kecil</i>	100	110	289	71	105
* Bukan Umum	199	155	137	105	114
03 Kendaraan Khusus / Alat Berat	3	9	9	6	6
Jumlah	11.709	11.985	11.731	10.527	9.911

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten, 2018

Berdasarkan Tabel 3.96. sebagaimana tersebut di atas, jumlah terminal angkutan penumpang umum/sub terminal sebanyak 8 (delapan) lokasi untuk mendukung transportasi darat. Data terminal angkutan penumpang umum pada tahun 2018 disajikan pada Tabel 3.97.

Tabel 3.97.

Data Terminal Angkutan Penumpang Umum
di Kabupaten Klaten Tahun 2018

No	Terminal	Alamat	Type	Luas
1	2	3	4	5
1	Penggung	Penggung, Ceper, Klaten	C	4500 m ²
2	Cawas	Cawas, Klaten	C	3000 m ²
3	Teloyo	Teloyo, Wonosari, Klaten	C	3310 m ²
4	Pasar Klaten	Klaten Tengah	C	600 m ²
5	Bendogantungan	Bendogantungan, Klaten Selatan	C	3168 m ²
6	Tulung	Tulung, Klaten	C	400 m ²
7	Manisrenggo	Manisrenggo, Klaten	C	1785 m ²
8	Delanggu	Karang, Klaten	C	7000 m ²

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten, 2019.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait sasaran Meningkatnya Kualitas Layanan Perhubungan yang didukung dengan program Peningkatan Pelayanan Angkutan.

Permasalahan :

- a. Tingginya mobilitas penduduk, diperlukan sarana perhubungan massal yang terjangkau dan mudah. Namun banyak kondisi angkutan umum yang sudah tidak laik jalan;
- b. Kurangnya sinkronisasi dan koordinasi antar instansi terkait, dalam pelaksanaan pemenuhan layanan perhubungan;
- c. Belum optimalnya sarana informasi layanan perhubungan yang secara langsung bisa diakses oleh masyarakat luas.

Solusi :

- a. Peningkatan sinkronisasi dan koordinasi antar instansi terkait layanan perhubungan ; dan
- b. Peningkatan sarana informasi layanan perhubungan yang secara langsung bisa diakses oleh masyarakat luas.

43. Sasaran Meningkatnya Pelayanan Perijinan Satu Pintu yang Tepat Waktu, Tepat Mutu, Tepat Sasaran dan Tepat Manfaat;

Ukuran keberhasilan Meningkatnya pelayanan perijinan satu pintu yang tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran dan tepat manfaat diukur dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat yang diperoleh melalui survei.

Adapun capaian sasaran "Meningkatnya pelayanan perijinan satu pintu yang tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran dan tepat manfaat" disajikan pada Tabel 3.98.

Tabel 3.98

Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja
Meningkatnya Pelayanan Perizinan Satu Pintu Yang Tepat Waktu, Tepat Mutu,
Tepat Sasaran dan Tepat Manfaat

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun 2018			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2018 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			Target	Realisasi	%		
1	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perizinan	84,50	79,52	80,52	101,26	80,00	100,65

Berdasarkan capaian pelayanan perijinan satu pintu yang tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran dan tepat manfaat sebagaimana Tabel 3.98 di atas, pada tahun 2018 tercatat kinerja layanan satu pintu diukur dari jumlah penerbitan Surat Izin Usaha berdasarkan jenis usaha: 1. Perusahaan kecil sebanyak 61 izin usaha, 2. Perusahaan menengah sebanyak 367 izin usaha, dan 3. Perusahaan besar sebanyak 73 izin usaha. Sedang izin ganggu (HO) menurut bentuk badan usaha, diantaranya: 1. Perusahaanan terbatas(PT) sebanyak 46 PT, 2. CV sebanyak 73, dan 3. Lainnya sebanyak 193 HO. Berdasarkan tanggapan penggunaan layanan ketika disurvei secara mandiri oleh Dinas Penanaman Modal, dan Perizinan Terpadu Satu Pintu, nilai survei kepuasan masyarakat terhadap layanan perizinan sudah mencapai 80,52 (artinya memuaskan).

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait sasaran pelayanan perijinan satu pintu yang tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran dan tepat manfaat yang didukung dengan program Penyiapan potensi sumber daya, sarana dan prasarana daerah.

Permasalahan :

- a. Kurangnya sinkronisasi dan koordinasi antar instansi terkait, dalam pelaksanaan pemenuhan perijinan satu pintu yang tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran dan tepat manfaat; dan
- b. Belum optimalnya sarana informasi layanan perijinan satu pintu yang tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran dan tepat manfaat yang secara langsung bisa diakses oleh masyarakat luas.

Solusi :

- a. Peningkatan sinkronisasi dan koordinasi antar instansi terkait layanan perijinan satu pintu yang tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran dan tepat manfaat ; dan
- b. Peningkatan sarana informasi layanan perijinan satu pintu yang tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran dan tepat manfaat yang secara langsung bisa diakses oleh masyarakat luas.

44. Sasaran Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kependudukan yang Berkualitas;

Ukuran keberhasilan peningkatan kualitas pelayanan publik tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran dan tepat manfaat diantaranya diukur pada layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Pada tahun 2018 tercatat sebanyak 992.889 orang penduduk yang wajib KTP, dari sebanyak 1.300.706 orang.

Adapun capaian sasaran "Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kependudukan yang Berkualitas" sebagaimana Tabel 3.99

Tabel 3.99

**Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kependudukan yang Berkualitas**

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun 2018			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2018 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			Target	Realisasi	%		
1	Indeks kepuasan layanan masyarakat	75	80	82,74	103,43	82,5	100,30

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, 2019.

Dari tabel 3.99 dapat dilihat bahwa target sasaran Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kependudukan yang Berkualitas tahun 2018 sebesar 80 dalam realisasinya tercapai sebesar 82,74. Sehingga capaian kinerja tahun 2018 untuk sasaran tersebut sebesar 103,43. Target bisa tercapai dikarenakan :

1. Adanya pelayanan keliling Adminduk yang dilaksanakan di kecamatan, kelurahan/desa dan sekolah;
2. Adanya layanan jemput bola bagi penduduk penyandang disabilitas, orang sakit dan penduduk yang tidak mampu datang sendiri ke Dinas Dukcapil;
3. Tersedianya gedung Dinas Dukcapil yang baru dimana masyarakat bisa dilayani secara nyaman dan berkualitas;
4. Tersedianya sarana dan prasarana untuk pelayanan Adminduk;
5. Adanya kualitas sumber daya manusia yang kapabel dalam memberikan pelayanan Adminduk kepada masyarakat;
6. Adanya dukungan dana dari Dirjen Dukcapil untuk meningkatkan kualitas pelayanan Adminduk; dan
7. Adanya pembaruan aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang berdampak pada cepatnya pelayanan Adminduk.

Pengelolaan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil meliputi 3 (tiga) bidang, yaitu : (i) Pendaftaran Penduduk, (ii) Pencatatan Sipil, dan (iii) Pengelolaan Informasi Kependudukan. Pendaftaran Penduduk dengan produk Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Surat Keterangan Kependudukan (SKK). Pencatatan Sipil dengan produk Akte Kelahiran, Akte Kematian, Akte Perkawinan, Akte Pengangkatan Anak dan Akte Pengakuan/ Pengesahan Anak. Pengelolaan Informasi Kependudukan dengan produk data/informasi kependudukan yang berupa olahan proses dari pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Perkembang jumlah pelayanan akte di Kabupaten Klaten Tahun 2014–2018 disajikan pada Tabel 3.100

Tabel 3.100

Jumlah Pelayanan Akte di Kabupaten Klaten Tahun 2014-2018

No	Jenis Akte	2014	2015	2016	2017	2018
1	Kelahiran	27.550	23.503	22.356	23.256	27.755
2	Kematian	285	1.336	615	1.400	2.116
3	Perkawinan	435	595	441	450	473
4	Perceraian	56	58	58	58	71

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, 2019.

Berdasarkan Tabel 3.100. sebagaimana tersebut di atas, untuk mewujudkan penerapan *single identity number* program e-KTP sampai dengan tahun 2018 baru tercatat penduduk yang ber-KTP sebanyak 945.832 orang.

Kondisi masyarakat Kabupaten Klaten yang belum memiliki kartu identitas (baik kartu identitas dalam bentuk akta lahir dan Kartu Tanda Penduduk) dalam kurun waktu tahun 2014-2018 cenderung menurun, hal ini dapat dilihat dari Tabel 3.101 Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen resmi kependudukan ini sudah terjadi peningkatan dari tahun ke tahun meskipun belum signifikan. Sedangkan jumlah penduduk Kabupaten Klaten yang belum memiliki Akte Lahir dan KTP Elektronik tahun 2014-2018 disajikan pada Tabel 3.101

Tabel 3.101

Penduduk Kabupaten Klaten yang Belum ber-Akte Lahir dan KTP Elektronik Tahun 2014-2018

No.	Tahun	Belum Memiliki Akte Lahir	Belum Memiliki KTP Elektronik
1	2014	1.104.326	188.574
2	2015	967.452	106.872
3	2016	927.310	93.846
4	2017	894.986	91.538
5	2018	877.190	71.223

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, 2019.

Berdasarkan Tabel 3.101. sebagaimana tersebut di atas jumlah jumlah penduduk Kabupaten Klaten yang belum memiliki Akte Lahir dan KTP Elektronik tahun 2014-2018 cenderung turun, hal ini disebabkan karena validasi data kependudukan mewujudkan penerapan *single identity number* program e-KTP.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait sasaran Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kependudukan yang Berkualitas, yaitu Program Penataan Administrasi Kependudukan.

Permasalahan :

- a. Masih kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya dokumen resmi kependudukan.
- b. Kurangnya sinkronisasi dan koordinasi antar instansi terkait, dan
- c. Belum adanya sarana informasi kependudukan dan catatan sipil yang secara langsung bisa diakses oleh masyarakat luas.

Solusi :

- a. Peningkatan sinkronisasi dan koordinasi antar instansi terkait dalam penanganan administrasi kependudukan; dan
- b. Peningkatan sarana informasi kependudukan dan catatan sipil yang secara langsung bisa diakses oleh masyarakat luas.

45. Sasaran Pengembangan Ketrasmigrasian;

Ukuran keberhasilan pengembangan ketrasmigrasian diukur dengan indikator Persentase besaran peningkatan minat transmigrasi. Selama tahun 2014-2018 sasaran transmigrasi di daerah: Kalimantan, Sulawesi dan Sumatra, namun mulai tahun 2017-2018 tinggal Sumatra saja yang menjadi tujuan transmigrasi.

Adapun capaian sasaran “ *Pengembangan Ketrasmigrasian* “ disajikan pada Tabel 3.102

Tabel 3.102

Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Pengembangan Ketrasmigrasian

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun 2018			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2018 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			Target	Realisasi	%		
1	Persentase besaran peningkatan minat transmigrasi	-64,62	40,50	-80	-197,53	42	-190,48

Peta penyebaran penempatan transmigrasi menurut daerah penempatan tahun 2014-2018 disajikan pada Tabel 3.103.

Tabel 3.103.

Realisasi Penempatan Transmigrasi Umum Menurut Daerah Penempatan Tahun 2014-2018

TAHUN	Sumatra		Kalimantan		Sulawesi	
	KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2014	-	-	4	15	-	-
2015	5	23	2	7	-	-
2016	5	20	10	46	4	17
2017	4	13	-	-	-	-
2018	7	28	-	-	-	-

Sumber : Disperinaker Kabupaten Klaten, 2019.

Berdasarkan Tabel 3.103. sebagaimana tersebut di atas, pengiriman transmigrasi dari tahun ke tahun mengalami penurunan, hal ini dikarenakan berkurangnya quota penempatan transmigran asal Kabupaten Klaten yang ditetapkan oleh Provinsi Jawa Tengah. Selama ini penempatan transmigrasi Kabupaten Klaten masih tergantung dengan quota dan anggaran dari Provinsi Jawa Tengah

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait sasaran pengembangan ketransmigrasian yang didukung dengan program Pengembangan Wilayah Transmigrasi, dan program Transmigrasi Lokal.

Permasalahan :

- a. Minimnya minat calon transmigrasi, sekalipun fasilitasi dan pembekalan dari pemerintah cukup;
- b. Penempatan calon transmigrasi itupun harus Provinsi yang menentukan quotanya.
- c. Kurangnya sinkronisasi dan koordinasi antar instansi terkait, dalam pelaksanaan penjangkauan sampai penempatan transmigrasi; dan
- d. Belum optimalnya sarana informasi layanan ketransmigrasian yang secara langsung bisa diakses oleh masyarakat luas.

Solusi :

- a. Peningkatan sinkronisasi dan koordinasi antar instansi terkait layanan ketransmigrasian; dan
- b. Peningkatan sarana informasi layanan ketransmigrasian yang secara langsung bisa diakses oleh masyarakat luas.

3.3 Akuntabilitas Anggaran*)

Potensi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah pada tahun 2018 direncanakan sebesar Rp.2.545.432.179.217,- (*dua trilyun lima ratus empat puluh lima milyar empat ratus tiga puluh dua juta seratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus tujuh belas rupiah*), dan terealisasi sebesar Rp.2.577.944.813.955,42,- (*dua trilyun lima ratus tujuh puluh tujuh milyar sembilan ratus empat puluh empat juta delapan ratus tiga belas ribu sembilan ratus lima puluh lima koma empat puluh dua rupiah*), atau melebihi target sebesar Rp.32.512.634.738,42 (*tiga puluh dua milyar lima ratus dua belas juta enam ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh delapan koma empat puluh dua rupiah*) dengan rincian sebagai berikut:

1.1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2018 direncanakan sebesar Rp.373.770.433.500, - (*tiga ratus tujuh puluh tiga milyar tujuh ratus tujuh puluh juta empat ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah*), dan teralisasi sebesar Rp.395.867.927.955,42 (*tiga ratus sembilan puluh lima milyar delapan ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh lima koma empat puluh dua rupiah*), atau melampaui target sebanyak Rp.22.097.494.455,42 (*dua puluh dua milyar sembilan puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus lima puluh lima koma empat puluh dua rupiah*).

1.2. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan pada tahun 2018 direncanakan sebesar Rp.1.662.130.955.717,- (*satu trilyun enam ratus enam puluh dua milyar seratus tiga puluh juta sembilan ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus tujuh belas rupiah*), dan terealisasi sebesar Rp.1.652.127.767.661,- (*satu trilyun enam ratus lima puluh dua milyar seratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh satu rupiah*) atau 99,40%.

1.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada tahun 2018 direncanakan sebesar Rp.500.530.790.000,- (*lima ratus milyar lima ratus tiga puluh juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah*), dan terealisasi sebesar Rp.520.049.118.339,- (*lima ratus dua puluh milyar empat puluh sembilan juta seratus delapan belas ribu tiga ratus tiga puluh sembilan rupiah*) atau melebihi target sebanyak Rp.20.418.330.339,- (*dua puluh milyar empat ratus delapan belas juta tiga ratus tiga puluh ribu tiga ratus tiga puluh sembilan rupiah*).

Sedangkan potensi belanja daerah sebagai berikut:

2. Belanja Daerah

Mengingat potensi pendapatan dan meningkatnya kebutuhan pembangunan, namun Belanja Daerah pada tahun 2018 sebesar Rp.2.973.118.885.977,- (*dua trilyun sembilan ratus tujuh puluh tiga milyar seratus delapan belas juta delapan ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah*) dengan perincian sebagai berikut:

2.1. Belanja Tidak Langsung

Belanja Tidak Langsung pada tahun 2018 sebesar Rp.1.954.442.601.856,- (*satu trilyun sembilan ratus lima puluh empat milyar empat ratus empat*

puluh dua juta enam ratus satu ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah), dan terealisasi sebanyak Rp. 1.750.134.706.110,- (satu trilyun tujuh ratus lima puluh milyar seratus tiga puluh empat juta tujuh ratus enam ribu seratus sepuluh rupiah).

2.2. Belanja Langsung

Belanja Langsung (mendanai program dan kegiatan) pada tahun 2018 direncanakan sebanyak Rp.1.018.676.084.121,98 (*satu trilyun delapan belas milyar enam ratus tujuh puluh enam juta delapan puluh empat ribu seratus dua puluh satu koma sembilan puluh delapan rupiah*), dan terealisasi sebanyak Rp.859.618.219.315,88 (*delapan ratus lima puluh sembilan milyar enam ratus delapan belas juta dua ratus sembilan belas ribu tiga ratus belas koma delapan puluh delapan rupiah*).

Untuk menjaga keseimbangan sistem penganggaran daerah langkah yang diperlukan adalah menyusun kebijakan pembiayaan daerah dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Penerimaan Pembiayaan Daerah pada tahun 2018 direncanakan sebesar Rp.455.895.506.760,88,- (*empat ratus lima puluh lima milyar delapan ratus sembilan puluh lima juta lima ratus enam tujuh ratus enam puluh koma delapan puluh delapan rupiah*).
2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah pada tahun 2018 direncanakan sebesar Rp.27.999.000.000,- (*dua puluh tujuh milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah*), dan terealisasi sebanyak Rp.27.249.000.000,- (*dua puluh tujuh milyar dua ratus empat puluh sembilan juta rupiah*) atau kurang sebanyak Rp.750.000.000,- (*tujuh ratus lima puluh juta Rupiah*).

**) catatan: data per Jumat, 15 Maret 2019.*

Tabel 3.104

Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2018

No	Sasaran Strategis	Pencapaian Indikator Kinerja Utama					Program	Anggaran		
		Indikator	Satuan	Rencana	Realisasi	%		Rencana	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Terwujudnya pemenuhan kebutuhan pendidikan usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan non formal	Persentase sekolah dasar yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan	%	48,00	61,05	127,19	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1.092.800.000	469.548.304	42,97
		Persentase sekolah menengah pertama yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan	%	80,00	82,00	102,44	Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	23.009.821.900	16.412.756.639	71,05
							Pendidikan Non Formal	215.000.000	187.183.675	87,06
							Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	5.305.000.000	4.880.270.500	91,99
							Pengembangan Budaya Baca dan Minat Baca	220.000.000	213.515.000	97,05
							Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	582.651.000	484.273.839	83,12
							Manajemen Pelayanan Pendidikan	1.405.000.000	1.008.866.000	71,81
2	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat dan menurunnya angka kematian , angka kesakitan dan kecacatan	Kasus kematian Ibu	Kasus	17	13	123,53	Upaya Kesehatan Masyarakat	9.022.525.720	7.112.695.005	78,83

No	Sasaran Strategis	Pencapaian Indikator Kinerja Utama					Program	Anggaran		
		Indikator	Satuan	Rencana	Realisasi	%		Rencana	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		Angka Kematian Bayi	per 1000 KH	10,13	10,7	94,37	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	669.150.000	476.147.120	71,16
		Angka kematian Balita	per 1000 KH	15,7	12,67	86,23	Obat dan Perbekalan Kesehatan	4.913.243.000	4.662.376.012	94,89
		Prevalensi gizi buruk (BB/U)	%	0,73	0,56	123,29	Pengawasan Obat dan Makanan	55.000.000	54.995.000	99,26
							Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	492.914.500	478.458.000	97,07
							Perbaikan Gizi Masyarakat	608.821.625	491.359.750	80,71
							Pengembangan Lingkungan Sehat	7.700.123.000	7.448.048.290	96,73
							Standarisasi Pelayanan Kesehatan	50.000.000	49.998.000	100
							Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	10.161.222.000	9.686.505.850	95,33
							Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan prasarana sarana Puskesmas/Pustu dan Jaringannya	15.971.264.1555	15.102.056.732	94,56
							Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/Rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/Rumah sakit mata	900.000.000	539.480.865	59,94

No	Sasaran Strategis	Pencapaian Indikator Kinerja Utama					Program	Anggaran		
		Indikator	Satuan	Rencana	Realisasi	%		Rencana	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
3	Meningkatnya pemanfaatan pelayanan Kerumahsakitkan oleh masyarakat dan menurunnya angka kematian di Rumah Sakit.	Usia Harapan Hidup	Tahun	76,62	76,77	100,20	Pelayanan Kesehatan	36.591.248.581	32.270.720.940	88,19
4	Meningkatnya upaya pencegahan permasalahan sosial dan aksesibilitas PMKS dalam memperoleh pelayanan dan rehabilitasi yang berperspektif HAM	Persentase penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	%	83	70,66	85,13	Pemberdayaan Fakir Miskin, Komonitas Adat terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	100.000.000	35.901.000	35,90
		Persentase penguatan kapasitas PSKS	%	96	96	100	Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	1.715.100.000	1.150.479.974	67,68
		Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	%	13,3	14,32	107,67	Pembinaan Eks. Penyandang Penyakit Sosial	75.000.000	54.950.500	73,27
							Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	893.600.000	859.035.300	96,13
5	Menurunnya angka kelahiran (<i>Total Fertility Rate</i>)	Angka Kelahiran (<i>Total Fertility Rate</i>) / TFR	Angka	2,16	1,91	111,60	Keluarga Berencana	8.029.746.000	6.311.884.070	78,61
							Peningkatan Kesehatan Reproduksi Remaja	21.950.000	19.740.000	89,93
							Pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB Mandiri	298.130.000	289.936.168	97,16

No	Sasaran Strategis	Pencapaian Indikator Kinerja Utama					Program	Anggaran		
		Indikator	Satuan	Rencana	Realisasi	%		Rencana	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
6	Meningkatnya Hasil Pengembangan dan Pembinaan Pemuda dan Olahraga.	Persentase Kenaikan Prestasi Pemuda	%	10	12	120	Peningkatan Peran Serta Pemuda dalam Pembangunan	450.000.000	365.697.790	81,27
		Persentase Kenaikan Prestasi Olahraga	%	5	5	100	Pembinaan dan Pemasyaratan Olahraga	1.350.000.000	1.291.967.775	95,70
7	Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan dan Pelestarian Seni Budaya Daerah, Kawasan Cagar Budaya, Situs dan benda Cagar Budaya	Persentase Kenaikan Penyelenggaraan Pagelaran Seni dan Budaya	%	6	3,2	54	Pengelolaan Kekayaan Budaya	2.636.000.000	2.288.108.613	86,80
							Pengembangan Nilai Budaya	130.000.000	112.921.300	86,86
		Persentase Peningkatan Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	%	10	14,3	143	Pengelolaan Keragaman Budaya	155.000.000	94.312.750	61,00
8	Meningkatnya kunjungan masyarakat ke perpustakaan	Persentase kenaikan kunjungan masyarakat	%	5	65,79	1.315,8	Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	582.651.000	484.273.839	83,12
9	Meningkatnya profesionalisme aparatur pemerintah daerah	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	82,06	74	90,18	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	4.965.000.000	4.781.195.547	96,30
							Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	5.429.367.500	3.513.384.491	64,71

No	Sasaran Strategis	Pencapaian Indikator Kinerja Utama					Program	Anggaran		
		Indikator	Satuan	Rencana	Realisasi	%		Rencana	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
10	Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah	Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	Opini	WDP	WDP	100	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	12.791.337.000	9.990.994.192	78
11	Meningkatnya kualitas layanan dan akuntabilitas kinerja sekretariat DPRD	Persentase Raperda yang disahkan tepat waktu	%	85	93,10	109,53	Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	34.238.929.000	26.884.311.166	78,52
12	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Tingkat Konsistensi dan ketepatan waktu Perencanaan	%	100	95	95	Perencanaan Pembangunan Daerah	1.585.000.000	1.294.718.355	81,69
							Perencanaan Pembangunan Ekonomi	475.000.000	410.879.587	86,50
							Perencanaan Sosial dan Budaya	505.000.000	479.635.087	94,98
							Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	463.000.000	439.391.875	94,90
13	Meningkatnya tata kelola arsip SKPD	Persentase kenaikan SKPD mengelola arsip secara baku	%	5	11,72	234,4	Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	187.500.000	172.313.350	91,90
							Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	237.509.000	189.628.700	79,84
14	Meningkatkan tata kelola pemerintahan desa yang profesional, transparan dan akuntabel	Persentase penyelenggaraan pemerintah desa yang profesional, transparan dan akuntabel	%	46	48	104	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa / Kelurahan	569.622.750	503.705.866	88
							Tata Kelola Pemerintah Desa	800.751.450	467.290.901	58

No	Sasaran Strategis	Pencapaian Indikator Kinerja Utama					Program	Anggaran		
		Indikator	Satuan	Rencana	Realisasi	%		Rencana	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
15	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah	Level Maturitas SPIP	Tingkat	2	2	100	Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	5.064.389.000	3.995.265.857	78,89
		Level Kapabilitas APIP	Tingkat	3	2	66,67	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Tata Laksana Perangkat Daerah	1.035.000.000	773.864.215	74,77
		Nilai Akuntabilitas Kinerja pemerintah	Angka	64 (B)	60,33 (B)	94,27	Peningkatan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan	977.842.000	686.481.379	70,20
16	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan otonomi daerah	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	Angka	2,8	3,09	110,36	Peningkatan Kinerja Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	1.825.000.000	1.366.820.114	74,89
							Peningkatan Kerjasama Daerah	150.000.000	122.467.264	82
							Pengembangan Wilayah Perbatasan	360.000.000	345.509.882	96
							Peningkatan Tata Kelola Kecamatan	90.000.000	74.154.980	82,39
							Pengembangan Komunikasi Informatika Mass Media	1.606.767.000	1.489.376.387	92,69
							Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	155.000.000	125.881.060	81

No	Sasaran Strategis	Pencapaian Indikator Kinerja Utama					Program	Anggaran		
		Indikator	Satuan	Rencana	Realisasi	%		Rencana	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
17	Meningkatnya koordinasi penataan peraturan perundang undangan serta bantuan hukum dan HAM	Persentase tercapainya penyusunan produk hukum dan penanganan perkara	%	85	90	105	Penataan Peraturan Perundang-Undangan	2.297.000.000	1.876.871.278	81,71
		Indeks kabupaten peduli HAM	%	75	234	175,5	Peningkatan Pelayanan Bantuan Hukum	658.000.000	559.562.500	85,04
18	Meningkatnya koordinasi pelaksanaan pembangunan	Persentase kesesuaian capaian pelaksanaan pembangunan (fisik dan keuangan) dengan target (rencana)	%	90	87,78	97,53	Peningkatan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan	977.842.000	686.481.379	70,2
19	Terwujudnya pelayanan pengadaan barang dan jasa yang kredibel	Persentase pengadaan barang dan jasa secara elektronik yang sesuai regulasi	%	100	100	100	Peningkatan Koordinasi Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (Pelayanan Pemilihan penyedia barang dan jasa)	285.259.000	209.322.538	73,38
20	Meningkatnya fasilitasi koordinasi bidang kehumasan dan keprotokolan	Persentase publikasi kebijakan dan kegiatan kepala daerah	%	94	94	100	Kerjasama dengan Mass Media	1.862.470.000	1.615.447.178	86,74
		Persentase dokumentasi kegiatan kepala daerah	%	94	98	102,1				
		Persentase pelayanan keprotokolan kegiatan kepala daerah	%	94	95	101,06				

No	Sasaran Strategis	Pencapaian Indikator Kinerja Utama					Program	Anggaran		
		Indikator	Satuan	Rencana	Realisasi	%		Rencana	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
21	Meningkatnya fasilitasi dan pengawalan kebijakan daerah bidang perekonomian	Tingkat Inflasi YoY	%	3,5 (± 1)	2,39	68,29	Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	110.500.000	106.126.500	96,04
22	Meningkatnya koordinasi kesejahteraan rakyat	Persentase keterlibatan <i>stakeholder</i> dalam pelaksanaan pembangunan bidang kesra	%	90	90	100	Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	21.419.000	19.453.000	90,82
23	Meningkatnya ketersediaan Pangan Beragam, bergizi seimbang dan meningkatnya kontribusi sektor pertanian terhadap pertumbuhan ekonomi daerah	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	%	12,25	10,98	89,68	Peningkatan Ketahanan Pangan	5.199.000.000	4.397.136.717	84,58
							Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Masyarakat	775.000.000	689.420.000	88,96
							Peningkatan Produksi Perkebunan	2.850.000.000	2.272.656.119	80
							Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	1.350.000.000	938.055.020	69,49
							Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	150.000.000	147.942.675	98,62
24	Meningkatnya peran LEM, LED dan pengembangan potensi TTG di desa dalam penanggulangan kemiskinan	Persentase desa yang memiliki LEM, LED dan Posyantek	%	35	35	100	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan	892.710.000	683.867.706	76,61
							Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	382.000.000	300.772.110	79,16

No	Sasaran Strategis	Pencapaian Indikator Kinerja Utama					Program	Anggaran		
		Indikator	Satuan	Rencana	Realisasi	%		Rencana	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
25	Meningkatnya Produktifitas, Nilai Tambah dan Daya Saing Sektor Kepariwisataan	Persentase Peningkatan PAD dari sektor Pariwisata	%	25	47,50	190	Pengembangan Kemitraan	555.000.000	538.539.908	97,03
							Pengembangan Pemasaran Pariwisata	1.005.000.000	986.168.787	98,13
							Pengembangan Destinasi Pariwisata	4.171.207.000	659.557.420	15,81
26	Meningkatnya nilai tambah, produktifitas dan daya saing pada Urusan Perdagangan, Koperasi dan UKM	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	18,94	17,88	94,40	Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	300.000.000	210.777.100	70,26
		Persentase UMKM yang memiliki daya saing	%	9	8,99	99,88	Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM	676.000.000	628.562.346	92,98
							Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	325.000.000	290.027.600	89,24
							Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	560.000.000	154.585.800	27,60
							Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	13.005.000.000	12.112.360.936	93,14
							Pembinaan Pedagang Kakilima dan Asongan	400.000.000	388.759.600	97,19
27	Meningkatnya penerapan inovasi dalam pembangunan daerah	Persentase inovasi yang diterapkan	%	72,73	60	82,56	Program penelitian dan pengembangan	600.000.000	513.206.634	85,53

No	Sasaran Strategis	Pencapaian Indikator Kinerja Utama					Program	Anggaran		
		Indikator	Satuan	Rencana	Realisasi	%		Rencana	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
28	Meningkatnya nilai tambah, produktifitas dan daya saing sektor penanaman modal	Rasio daya serap tenaga kerja (PMDN/PMA):					Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	295.000.000	258.201.671	87,53
		PMDN	%	417	131	31,41				
		PMA	%	294	264	89,79				
		Persentase pertumbuhan realisasi investasi (PMDN/PMA):								
		PMDN	%	1,98	1078	54.444,44				
		PMA	%	2,45	52	2122,45				
29	Meningkatnya nilai tambah, produktifitas dan daya saing sektor Ketenagakerjaan	Rasio penduduk yang bekerja	%	1,03	0,87	84,47	Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	830.000.000	743.037.850	89,52
		Angka partisipasi angkatan kerja	%	69	73,58	106,64	Peningkatan Kesempatan Kerja	275.000.000	193.822.351	70,48
30	Meningkatnya perlindungan sektor ketenagakerjaan	Besaran pekerja/ buruh yang menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan	%	87,60	82,59	94,28	Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	169.000.000	154.093.926	91,18
31	Meningkatnya nilai tambah, produktifitas, dan daya saing sektor Perindustrian	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	%	34,86	35,94	103,10	Pengembangan industri kecil dan Menengah	759.560.000	627.897.500	82,67
		Persentase IKM yang memiliki daya saing	%	5,50	1,80	32,73	Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	200.000.000	182.814.000	91,41
32	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur publik dan sarana prasarana dasar masyarakat	Indeks layanan infrastruktur	Indeks	29,42	58,61	199,22	Pembangunan Jalan dan Jembatan	196.851.000.000	175.449.453.340	89,13

No	Sasaran Strategis	Pencapaian Indikator Kinerja Utama					Program	Anggaran		
		Indikator	Satuan	Rencana	Realisasi	%		Rencana	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
							Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	20.833.000.000	16.600.610.051	79,68
							Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Perkotaan	33.863.068.000	21.598.307.650	63,78
33	Meningkatnya kualitas manajemen rekayasa lalu lintas dan penyelenggaraan angkutan	Tingkat Pelayanan Infrastruktur Perhubungan	Tingkat	45,87	43,58	95,01	Peningkatan Pelayanan Angkutan	447.400.000	393.007.200	87,84
34	Meningkatnya kualitas perumahan dan kawasan permukiman	Indeks kualitas perumahan dan kawasan pemukiman	Indeks	41,06	34,08	83	Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	45.545.000.000	39.340.147.915	86,38
							Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	8.925.000.000	7.885.311.614	88,35
							Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	11.246.000.000	9.656.027.200	85,86
							Pembangunan dan Pengelolaan Bangunan Gedung	69.400.000.000	61.681.193.858	88,88
35	Terkendalinya pemanfaatan kawasan sesuai dengan konsep tata ruang	Ketaatan terhadap RTRW	%	78,98	78,98	100	Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang	50.000.000	27.513.958	55,03
36	Terjaganya kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas air	Indeks	30,68	18,28	59,58	Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	1.591.291.000	1.325.254.625	83,28
		Indeks kualitas udara	Indeks	74,68	83,3	111,54	Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	1.160.000.000	1.016.051.650	87,59
		Indeks tutupan vegetasi (lahan)	Indeks	48,82	42,54	87,14				

No	Sasaran Strategis	Pencapaian Indikator Kinerja Utama					Program	Anggaran		
		Indikator	Satuan	Rencana	Realisasi	%		Rencana	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
37	Terwujudnya pengurangan kerentanan resiko bencana	Kelas Indeks kapasitas bencana	Kelas Indeks	Sedang (119)	Sedang (123,20)	103,53	Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	944.000.000	742.937.450	78,70
							Penanganan Darurat Bencana	1.511.000.000	913.386.391	60,45
							Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	150.000.000	129.724.710	86,46
38	Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap politik dan demokrasi	Indeks demokrasi	Indeks	75	70,85	94,47	Pengembangan Wawasan Kebangsaan	370.000.000	312.450.000	84,45
							Peningkatan dan Pembinaan Kehidupan Sosial Politik	585.000.000	503.064.100	85,99
39	Meningkatnya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan kelompok pelestarian adat dalam pengembangan kehidupan sosial budaya	Rata - rata kader lembaga kemasyarakatan dan kelompok pelestarian adat dalam pengembangan kehidupan sosial budaya yang aktif (mendapat pembinaan dan pelatihan)	Klpk	49	49	100	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	731.100.000	624.351.336	85,40
							Pemberdayaan dan kesejahteraan Keluarga	1.003.143.250	971.070.426	96,80
							Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	892.710.000	683.867.706	76,61
40	Terwujudnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.	Indeks ketertiban masyarakat	Indeks	95	92,20	97,05	Pemeliharaan ketentraman masyarakat, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	10.000.000	8.291.000	82,91

No	Sasaran Strategis	Pencapaian Indikator Kinerja Utama					Program	Anggaran		
		Indikator	Satuan	Rencana	Realisasi	%		Rencana	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
41	Meningkatnya kapasitas perempuan, perlindungan perempuan dan anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	60,16	59,60	99,07	Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	90.000.000	82.773.812	91,97
		Capaian Kabupaten Layak Anak (KLA)	Kelas	Nidya (750)	Madya (650)	86,67	Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak	44.000.000	43.128.000	98,02
42	Meningkatnya kualitas layanan perhubungan	Indeks kepuasan layanan perhubungan	Indeks	79,02	78,95	99,92	Peningkatan Pelayanan Angkutan	447.400.000	393.007.200	87,84
43	Meningkatnya pelayanan perijinan satu pintu yang tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran dan tepat manfaat	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	Indeks	79,52	80,52	101,26	Penyiapan potensi sumber daya, sarana dan prasarana daerah	21.000.000	4.306.900	20,51
44	Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan yang berkualitas	Indeks kepuasan layanan masyarakat	Indeks	80	82,74	103,45	Penataan Administrasi Kependudukan	4.878.816.000	4.208.238.527	90,69
45	Pengembangan ketransmigrasian	Persentase besaran peningkatan minat transmigrasi	%	40,50	-80	-197,05	Pengembangan Wilayah Transmigrasi	218.000.000	187.069.385	85,81
							Transmigrasi Lokal	32.000.000	24.775.000	74,42
Jumlah Anggaran Prioritas I (program untuk membiayai visi dan misi Bupati)								796.401.249.831	551.421.809.008	69,24
Jumlah Belanja Langsung								1.018.676.084.121,98	859.618.219.315,88	84,39
Jumlah Belanja Tidak langsung								1.954.442.601.856	1.750.134.706.110	89,55
Jumlah Total Belanja Daerah								2.973.118.685.977,98	2.609.752.925.425,88	87,78

3.4 Efektifitas Sumber Daya

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 ditetapkan 45 (empat puluh lima) sasaran strategis dengan 67 (enam puluh tujuh) Indikator Kinerja Sasaran yang terdiri dari: 58 (lima puluh delapan) indikator yang sifatnya progresif, dan 9 (sembilan) indikator yang sifatnya represif.

Selanjutnya untuk mengimplementasikan RPJMD, telah ditetapkan pula Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten tahun 2018, dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Nomor Tahun 2018 tentang APBD Kabupaten Klaten Tahun 2018 tercatat sebanyak 173 program dengan 987 kegiatan. Realisasi fisik tercapai 87,78% dari target rencana. Dukungan dana untuk melaksanakan pembangunan dianggarkan sebanyak Rp.1.018.676.084.121,98 dan terserap sebesar Rp.859.618.219.315,88 (atau 84,39%).



BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Klaten Tahun 2018 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Review Atas Laporan Kinerja.

Sehingga LKjIP Kabupaten Klaten Tahun 2018 secara umum merupakan gambaran penyelenggaraan pemerintah berazaskan: tanggung jawab negara, kesinambungan dan keberlanjutan, keserasian dan keseimbangan, keterpaduan, manfaat, kehati-hatian, keadilan, ekoregion, partisipatif, kearifan lokal, tata kelola pemerintahan yang baik dan otonomi daerah.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 45 (empat puluh lima) sasaran strategis dengan 67 (enam puluh tujuh) Indikator Kinerja Sasaran yang terdiri dari: 58 (lima puluh delapan) indikator yang sifatnya progresif, dan 9 (sembilan) indikator yang sifatnya represif. Dari masing-masing indikator diperoleh hasil:

A. Indikator Progresif, dengan hasil:

- a. Sebanyak 46 (enam puluh enam) Indikator Kinerja sasaran atau sebanyak 79,31% dengan Kriteria ***Sangat Tinggi***;
- b. Sebanyak 7 (tujuh) atau sebanyak 12,07% dengan Kriteria ***Tinggi***;
- c. Sebanyak 1 (satu) Indikator Kinerja Sasaran atau sebanyak 1,72% dengan Kriteria ***Sedang***;
- d. Sebanyak 1 (satu) Indikator Kinerja Sasaran atau sebanyak 1,72% dengan Kriteria ***Rendah***; dan
- e. Sebanyak 3 (tiga) Indikator Kinerja Sasaran atau sebanyak 5,17% dengan Kriteria ***Sangat Rendah***.

B. *Indikator Regresif*, dengan hasil:

Indikator Regresif sebanyak 9 (sembilan) indikator kinerja sasaran atau sebanyak 100% dengan Kriteria **Baik (Berhasil Menekan)**.

4.2 Rencana Tindak Lanjut

Memedomani ketentuan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 wajib kiranya hasil LKjIP tahun berkenaan dipakai sebagai *bahan penyusunan atau evaluasi kebijakan, rencana, dan/atau program* terkait dengan : (a) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-Perangkat Daerah), dan (b) Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu, maupun yang berpartisipasi aktif dalam mewujudkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2018 diucapkan terima kasih, dengan harapan semoga mampu mewujudkan **Visi Daerah : Maju, Mandiri dan Berdaya Saing**.

Klaten, 28 Maret 2019

BUPATI KLATEN



SRI MULYANI

LAMPIRAN I

Penghargaan dan Piagam Penghargaan Kabupaten Klaten Tahun 2018

1. Piagam Penghargaan “ABIWARA PARIWISATA” Gubernur Jawa Tengah kepada UMBUL PONGGOK Kabupaten Klaten sebagai Peringkat IV Kategori Daya Tarik Wisata Tingkat Provinsi Jawa Tengah;
2. Piagam Penghargaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Atas Keberhasilan Dalam Mengurangi Risiko Bencana Banjir Melalui Aksi “Inisiasi dan Pembinaan Komunitas Peduli Sungai di Kabupaten Klaten Jawa Tengah”.
3. Penghargaan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kepada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten sebagai Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi yang telah Terintegrasi dengan Sistem JDIHN; dan
4. Penghargaan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia kepada Pemerintah Kabupaten Klaten Sebagai Kabupaten Peduli Hak Asasi Manusia.



GUBERNUR JAWA TENGAH

PIAGAM PENGHARGAAN
NOMOR: 0025 / 0017146

ABIWARA PARIWISATA

Diberikan Kepada :

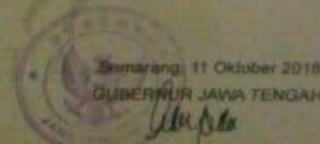
UMBUL PONGGOK

KABUPATEN KLATEN

Sebagai

PERINGKAT IV DAYA TARIK WISATA
(DI KELOLA SWASTA)

Pada Acara Citra Pariwisata Award Tingkat Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2018



Semarang, 11 Oktober 2018
GUBERNUR JAWA TENGAH

H. GANJAR PRANOWO, S.H., M.P.



BNPB

Piagam Penghargaan

Badan Nasional Penanggulangan Bencana
Memberikan Penghargaan Kepada:

BUPATI KLATEN

Atas Keberhasilannya yang Luar Biasa
dalam Mengurangi Risiko Bencana Banjir
Melalui Aksi:

*Inisiasi dan Pembinaan Komunitas Peduli Sungai
di Kabupaten Klaten - Jawa Tengah*

Yogyakarta, 26 November 2018

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana

W. B. B.
Willem Bampangilei



Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia

memberikan

PENGHARGAAN

kepada

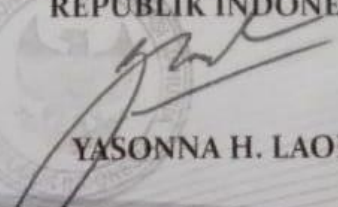
Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Klaten

sebagai


**Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi
yang telah terintegrasi dengan Sistem JDIHN**

dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden RI No. 33 Tahun 2012
tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN)

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA


YASONNA H. LAOLY

ALWAYS THE BEST



MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

MENGANUGERAHKAN

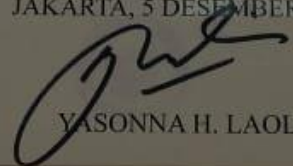
PENGHARGAAN

KEPADA

PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN

SEBAGAI KABUPATEN PEDULI HAK ASASI MANUSIA PADA TAHUN 2017

JAKARTA, 5 DESEMBER 2018



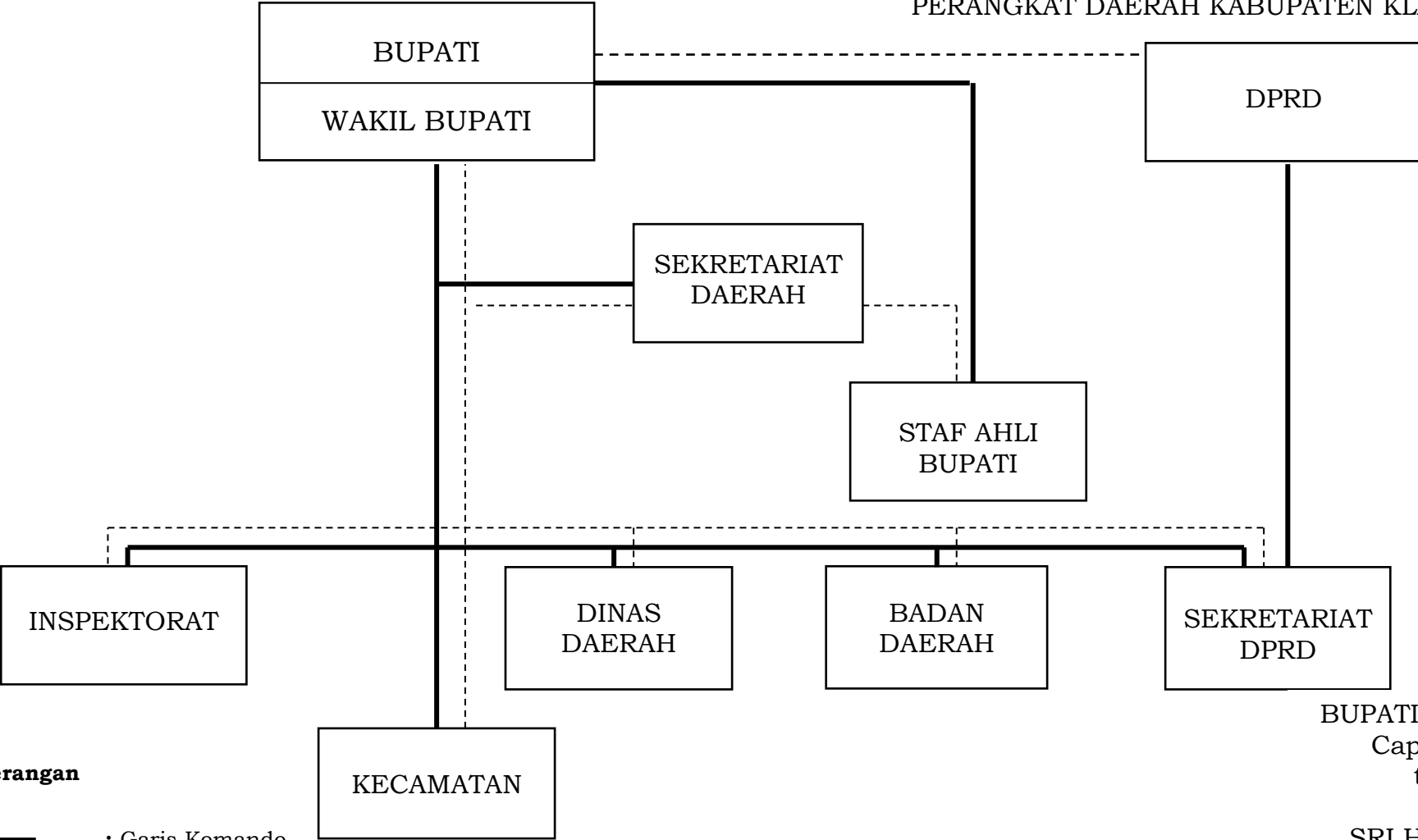
YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN I

Struktur Pemerintah Kabupaten Klaten

BAGAN ORGANISASI PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN KLATEN

PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 36 TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KLATEN



Keterangan
 — : Garis Komando
 - - - : Garis Koordinasi

BUPATI KLATEN,
Cap
ttd
SRI HARTINI